

MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Suryanto, dkk.

MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan

**Buku ini diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan IRSA ke-14
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
dan didanai oleh Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

UNS PRESS

**Menumbuhkan Ekonomi Lokal
(Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan)**

Hak Cipta©Suryanto, dkk. 2018

Penulis

Suryanto	Sutomo
Tulus Tambunan	Agung Slamet Sukardi
M. Yusuf Indra Purnama	Dowes Ardi Nugroho
Rochmat Aldy Purnomo	Fitria Nur Rahmawati
Nurul Istiqomah	Dwi Prasetyani
Izza Mafruhah	Khusnul Ashar
Adenantha L. Dewa	Susilo
Lukman Hakim	Mutifiah
Bhimo Rizky Samudro	Tri Mulyaningsih
Dinarjati Eka Puspitasari	Fatimah
Yogi Pasca Pratama	Wahyu Prasetyo Widodo
Akhmad Daerobi	Malik Cahyadin
Hermada Dekiawan	Ida Busnety
Mulyanto	Johadi
Yunastiti Purwaningsih	

Editor

Suryanto
Tulus Tambunan

Ilustrasi Sampul

UNS Press

Penerbit dan Percetakan

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)
Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
57126
Telepon (0271) 646994 Psw. 341 Fax. (0271) 7890628
Website : www.unspress.uns.ac.id
Email : unspress@uns.ac.id

Cetakan 1, Edisi I, Juni 2018
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

ISBN 978-602-397-178-7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga buku bunga rampai ini terselesaikan dapat diterbitkan. Buku bunga rampai ini adalah kumpulan dari tulisan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Brawijaya, dan praktisi.

Ekonomi lokal adalah ekonomi yang tumbuh berdasarkan kekuatan dan keunikan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi lokal menurut Bank Dunia adalah upaya untuk mengembangkan usaha bisnis melalui pengoptimalan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas (*clustering*), tata ruang, dan regionalisasi ekonomi.

Menumbuhkan ekonomi lokal tidak dapat berharap seperti tumbuhnya cendawan di musim hujan, karena tumbuhnya ekonomi lokal tidak mengenal musim tertentu. Ekonomi lokal tumbuh karena proses yang lebih lama dan kekuatan ekonomi lokal adalah kekhasan yang dimiliki. Ide membuat bunga rampai ini adalah karena tumbuhnya ekonomi lokal memiliki variasi yang unik (khas) seperti meneguhkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, dan keunikan setiap daerah.

Harapannya buku bunga rampai ini dapat menjadi sarana saling tukar pandangan dan semoga menjadi secuil inspirasi untuk para akademisi dan praktisi. Inspirasi untuk dapat membantu pengembangan dan penguatan ekonomi lokal di daerah-daerah lain di Indonesia.

Akhirnya, buku bunga rampai ini tidak dapat terselesaikan apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Prodi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS atas segala fasilitas yang diberikan. Kedua, para kontributor tulisan yang menjadikan buku bunga rampai ini menjadi lebih berwarna. Ketiga, kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga bantuannya tercatat sebagai amal baik. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam buku bunga rampai ini saya selaku editor mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Juni 2018

Suryanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAGIAN I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN	
Suryanto, Tulus Tambunan	1

BAGIAN II EKONOMI KREATIF

BAB II	Ekonomi Kreatif Sumber Perkembangan Ekonomi Desa Tulus Tambunan	9
BAB III	<i>Smart Economy</i> untuk Penguatan Ekonomi Lokal Kota Surakarta M. Yusuf Indra Purnama, Suryanto	45
BAB IV	Seni Reyog Ponorogo dalam Perspektif Strategi Pelestarian dan Pengembangan Industri Kreatif Rochmat Aldy Purnomo, Suryanto	61
BAB V	Konsep <i>Blue Economy</i> dalam Mewujudkan Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Biogas Nurul Istiqomah, Izza Mafruhah.....	75
BAB VI	Peran Transportasi Laut pada Poros Maritim dalam Pengurangan Disparitas Antarwilayah di Indonesia Adenathera L. Dewa, Izza Mafruhah, Indah Susilowati	93

BAGIAN III KELEMBAGAAN

BAB VII	Praktik-praktik Terbiak Pengelolaan Ekonomi Lokal di Subosuka Wonosraten Lukman Hakim	105
BAB VIII	Kearifan Lokal dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekonomi Politik dan Redulasi: Studi Kasus Tradisi Sasi di Maluku Bhimo Rizky S., Dinarhati Eka P., Yogi Pasca P.	113
BAB IX	Strategi Penguatan Kelembagaan Usahatani Akhmad Daerobi.....	123
BAB X	Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Surakarta Suryanto, Hermada Dekiawan, Johadi.....	133

BAB XI	Kinerja Keuangan dan Tren Pendapatan Daerah dari Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Mulyanto, Lukman Hakim.....	155
BAB XII	Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Relokasi Industri dan kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Yunastiti Purwaningsih, Sutomo	183

BAGIAN III KEWIRAUSAHAAN

BAB XIII	Potensi Wisata Kuliner terhadap Penguatan Ekonomi Lokal Agung Slamet S., Doves Ardi N., Fitria Nur R.....	209
BAB XIV	Peran dan Perilaku Muslimah Pengusaha dalam Dinamika Kewirausahaan Dwi Prasetyani, Khusnul Ashar, Susilo, Multifiah.....	227
BAB XV	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Akses Kredit dan Pendampingan Usaha Tri Mulyaningsih, Fatimah	251
BAB XVI	Analisis Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Pengangguran pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016 Wahyu Prasetyo Widodo, Malik Cahyadin.....	269
BAB XVII	Pemetaan Produk-produk Unggulan di Provinsi Sumatera Barat: Hasil Sebuah Tinjauan Ulang dari Berbagai Sumber Tulus Tambunan, Ida Busteny	289

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sumbangan Ekonomi Kreatif terhadap PDB, 2002-2016 (%).....	14
Gambar 2.2	Penyebaran UMK Ekonomi Kreatif Menurut Provinsi di Indonesia, 2016	18
Gambar 2.3	Nilai Ekspor Industri Kreatif, 2010-2014 (Rp miliar)*	19
Gambar 2.4	Keberadaan SDA di Indonesia Menurut Pulau	32
Gambar 2.5	IPM dan Status Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2018	36
Gambar 2.6	Persentase Desa menurut Kelompok IKG, 2014	38
Gambar 2.7	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014.....	39
Gambar 2.8	Persentase Kecamatan yang Ada Pasar/dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014.....	39
Gambar 2.9	Peta Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Bali, 2014.....	41
Gambar 2.10	Nilai Indeks Pembangunan Desa Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2014	43
Gambar 3.1	Ringkasan Indikator <i>Smart Economy</i> Terpilih	49
Gambar 3.2	Konsep <i>Smart City</i> Kota Surakarta.....	50
Gambar 3.3	Hierarki Kategori dan Alternatif <i>Smart Economy</i> Kota Surakarta.....	51
Gambar 3.4	Matriks dan Strategi Eksternal-Internal (SWOT Analysis).....	53
Gambar 4.1	Proses Pembelajaran Reyog Pelajar di SMAN 2 Ponorogo.....	66
Gambar 4.2	Pengrawit dan Wiraswara Seni Reyog Santri.....	67
Gambar 4.3	Busana Warok pada Rekyasa Komunitas Reyog Santri Menggunakan Kaos Lengan Panjang dan Penadon.....	67
Gambar 4.4	Busana Penari Jatil pada Rekyasa Komunitas Reyog Santri Menggunakan Celanan Panjang, Baju Lengan Panjang, dan berjilbab	68
Gambar 4.5	Penari Pujangganong pada Rekyasa Komunitas Reyog Santri Menggunakan Kaos Panjang.....	68

Gambar 4.6	Pelantun Tilawah Al-Qur'an pada Rekyasa Komunitas Seni Reyog Santri.....	69
Gambar 4.7	Busana Klanasewandana pada Rekyasa Komunitas Seni Reyog Santri.....	69
Gambar 5.1	<i>Blue Print</i> Kebijakan Energi Nasional	77
Gambar 5.2	Kemitraan Swasta, Masyarakat, Pemda, dan Akademisi ...	87
Gambar 7.2	Kemitraan Swasta, Masyarakat, Pemda, dan Akademisi ...	88
Gambar 6.1	Industri Maritim dan Konektivitas Laut.....	94
Gambar 6.2	Peringkat <i>Logistic Performance Index</i> (LPI) Tahun 2014...	99
Gambar 8.1	<i>Circular and Cumulative Causation</i> dalam Tradisi Sasi....	118
Gambar 8.2	<i>Social Wisdom Regulation Model</i> (SWRM) – Lingkungan Hidup dan Sistem Sosio-Ekonomi (studi kasus: Tradisi Sasi).....	119
Gambar 11.1	Grafis Rasio Pengumpulan (CR: <i>Collection Rasio</i>) dari Pos-pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam persen).....	164
Gambar 11.2	Grafis Perkembangan Nilai Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam persen).....	166
Gambar 11.3	Grafis Laju Pertumbuhan Berbagai Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 (dalam persen)	168
Gambar 11.4	Grafik Data Realisasi Pos Pajak Daerah Tahun 2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (dalam Rp juta)	173
Gambar 12.1	Peta Provinsi Jawa Tengah.....	191
Gambar 14.1.	Kurva Kendala Anggaran (<i>Budget Constraint</i>).....	235
Gambar 14.2.	Kurva <i>Indifference</i>	236
Gambar 14.3.	Model Penerapan Nilai Islam dalam Aktivitas Bisnis Berdasarkan Teori Tindakan Beralasan dan Teori Perilaku Terencana.....	245
Gambar 15.1	Permasalahan UMK	254
Gambar 15.2	Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaannya (Juta Rupiah)	257

Gambar 15.3 Perkembangan Kredit UMKM (Juta Rupiah).....	258
Gambar 15.4 Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank Tahun 2017.....	258
Gambar 15.5 Persebaran Askrindo.....	260
Gambar 15.6 Persebaran PLUT di Indonesia (persen).....	263
Gambar 15.7 Usulan PLUT_KUMKM Tahun 2018.....	264
Gambar 15.8 Kinerja PLUT (Jumlah UMKM yang didampingi)	264
Gambar 17.1 Produk Unggulan: Proses dari Potensi Hingga Realisasi, dan Faktor-faktor Penentu	308

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Indonesia, 2010-2014 (Rp miliar)*	15
Table 2.2	Nilai Tambah dari Sejumlah Subsektor Ekonomi Kreatif, 2011-2013 (Rp triliun)*	16
Table 2.3	Ekonomi Kreatif Menurut Skala Usaha dan Subsektor, 2016 (%)	17
Table 2.4	Jumlah Desa/Kecamatan Menurut Provinsi dan Spesialisasi Industri UMK, 2014	33
Tabel 2.5	IPM Menurut Provinsi, 2015-2016	35
Table 2.6	IKG Desa Menurut Provinsi, 2014	37
Table 2.7	Jumlah Desa di Provinsi Bali menurut Tingkat Pembangunan, 2014	40
Table 2.8	Persentase Desa Menurut Tingkat Pembangunan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014	41
Table 2.9	Nilai IPD Menurut Dimensi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014	42
Tabel 3.1	Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kota Surakarta Tahun 2009-2016 (%)	47
Table 3.2	Struktur Ekonomi Kota Surakarta dan Kota Surakarta Tahun 2009-2016 (%)	48
Table 3.2	Matrik Berpasangan Level 1	51
Tabel 5.1	Produksi dan Impor BBM Indonesia 2010-2015	75
Tabel 5.2	Jumlah Populasi Ternak Besar di Indonesia	83
Table 7.2	Jumlah Populasi Ternak Besar di Indonesia (000 ekor)	83
Tabel 6.1	Peringkat <i>Global Competitiveness Index</i> (GCI) Indonesia dibanding ASEAN	96
Tabel 6.2	Pilar Infrastruktur Berdasarkan Rangkain GCI Tahun 2017	97
Tabel 6.3	Perbandingan Antar-Infrastruktur	97
Tabel 6.4	Indeks Gini di Indonesia	100
Tabel 8.1	<i>Stylized Fact</i> – Nilai Manfaat Tradisi Sasi terhadap Lingkungan Hidup	116

Tabel 10.1	Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%).....	137
Tabel 10.2	Rata-rata Pertumbuhan 10 Sub kategori Periode 2010-2016.....	138
Tabel 10.3	Nilai LQ Statis dan LQ Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	140
Tabel 10.4	<i>Shift-Share</i> Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	143
Tabel 10.5	Ringkasan Hasil.....	146
Tabel 10.6	Penentuan Kelas Potensi	146
Tabel 10.7	Potensi Subkategori Ekonomi Kota Surakarta	147
Tabel 10.8	Target Pendapatan Per Kapita dalam RPJMD Kota Surakarta 2016-2021.....	148
Tabel 10.9	Kebutuhan Investasi 2017-2021 (Juta Rupiah), dengan ICOR=6,8.....	150
Tabel 11.1	Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2014 (dalam Rp dan persen).....	158
Tabel 11.2	Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2014 (dalam Rp dan persen).....	159
Tabel 11.3	Perkembangan Target dan realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam Rp ribu)	162
Tabel 11.4	Besaran Rasio pengumpulan (CR: <i>Collection Ratio</i>) Pos-pos Pajak daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam persen).....	163
Tabel 11.5	Perkembangan Nilai Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015 (dalam persen)	165
Tabel 11.6	Pertumbuhan berbagai jenis Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2105 (dalam persen)	167
Tabel 11.7	Matriks Potensi dari Berbagai jenis Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dan 2015	169
Tabel 11.8	Parameter Model <i>Trend</i> dengan Pendekatan Regresi Tunggal/Sederhana.....	170

Tabel 11.9	Data Realisasi Pos Pajak Daerah (Tahun 2013-2015) dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (dalam Rp juta)	172
Tabel 12.1	Besaran Upah Minimum DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota Terpilih di Banten dan Jawa Barat Tahun 2012-2013	185
Tabel 12.3	Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016	192
Tabel 12.4	Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016	192
Tabel 12.5	Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017	193
Tabel 12.6	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016	195
Tabel 12.7	Realisasi Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016.....	196
Tabel 12.8.	Jumlah Izin Usaha/Realisasi Proyek Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2013-2014	197
Tabel 12.9	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri.....	199
Tabel 12.10	Rata-rata Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri.....	200
Tabel 12.11	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Tengah, Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri (Juta Rupiah).....	201
Tabel 12.12	Jumlah Orang yang Bekerja di Sektor Industr dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Tengah, Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri (orang).....	202
Tabel 12.13	Jumlah Orang yang Bekerja dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Tengah, Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri (orang).....	203

Tabel 12.14	Kondisi Kesempatan Kerja Dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Tengah, Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri	204
Tabel 13.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Dirinci Menurut Kategori Tahun 2012-2016.....	210
Tabel 13.2	Sebaran Elemen <i>Intangible Heritage</i> di Kecamatan Kota Surakarta.....	212
Tabel 13.3	Struktur Ekonomi Menurut Harga Berlaku Kota Surakarta Tahun 2012 - 2016 (persen)	213
Tabel 13.4	Matriks Analisis SWOT	221
Tabel 13.5	Hasil Pengukuran Capaian Indikator.....	222
Tabel 13.6	Matriks Analisis Swot Potensi Wisata Kuliner Kota Surakarta.....	222
Tabel 15.1	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2013	252
Tabel 16.1	Pengelompokkan Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya.....	271
Tabel 16.2	Pengelompokkan Pengangguran Berdasarkan Cirinya.....	272
Tabel 16.3.	Studi Empiris Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran	273
Tabel 16.4.	Hasil Estimasi FEM.....	280
Tabel 17.1	Potensi Komoditas Unggulan dan Lokasi Pengembangannya di Provinsi Sumatera Barat.....	292
Tabel 17.2	Nama-nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Menurut Produk/Sektor Unggulan.....	292

TENTANG PENULIS

- Dr. Suryanto Adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta. Minat utama studinya pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan aktif dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan.
- Prof. Dr. Tulus Tambunan Adalah pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Minat studi terhadap pengembangan UMKM dan pendampingan pada UMKM. Saat ini beliau menjadi Ketua
- M. Yusuf Indra Purnama S.E., M.Rech. Adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Minat studi pada bidang ekonomi perbankan dan aktif juga dalam pendampingan pada pemerintah daerah khusus perencanaan pembangunan.
- Rochmat Aldy Purnomo, S.E., M.Si Adalah mahasiswa program doktor pada Program Ilmu Ekonomi (PDIE) FEB UNS, sehari-hari menjadi staf pengajar pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Aktif dalam penelitian hibah dikti dan minat studinya pada pengembangan ekonomi kreatif.
- Nurul Istiqomah, S.E., M.Si Adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS dan peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM UNS). Minat studi pada bidang ekonomi mikro dan aktif juga dalam pendampingan pada pemerintah daerah.
- Izza Mafruhah, S.E., M.Si. Saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa program doktor di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Sebagai staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS dan aktif menjadi peneliti pada LPPM UNS.

- Ir. Adenathera L Dewa,
M.M. Adalah mahasiswa program doktor ilmu ekonomi di Universitas Diponegoro (UNDIP). Beliau sehari-hari menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Maritim dan Transpor AMNI Semarang. Fokus penelitian terhadap kemaritiman yang selama ini masih jarang digeluti.
- Lukman Hakim, Ph.D. Selain sebagai dosen saat ini masih menjabat sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan di FEB UNS. Minat penelitian beliau pada bidang ekonomi perbankan dan ekonomi makro.
- Bhimo Rizky Samudro,
Ph.D. Aktivitas utama selain staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS adalah pengelola jurnal ilmiah Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan UNS. Beberapa artikel yang telah diterbitkan di beberapa jurnal terkait dengan ekonomi politik.
- Dr. Dinarjati Eka Puspitasari Adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum UGM, minat utama penelitiannya adalah hokum lingkungan. Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan antara lain terkait dengan pencemaran air, penataan PKL, dan pajak lingkungan.
- Yogi Pasca Pratama, S.E.,
M.Si Adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Peminatan studi dan penelitiannya adalah pada pengembangan metode-metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Aktivitas selain memberi kuliah dan penelitian adalah pengelola jurnal JIEP UNS.
- Dr. Akhmad Daerobi Adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Minat utama studi dan penelitiannya adalah ekonomi kelembagaan. Konsentrasi terhadap kelembagaan menyebabkan penguasaan yang baik terhadap teori dan metode.

- Hermada Dekiawan, S.E.,
M.Si Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM angkatan 1988 saat ini tercatat sebagai dosen di AA YKPN Yogyakarta. Aktif dalam penelitian-penelitian dan pendampingan khususnya dalam bidang ekonomi publik.
- Dr. Mulyanto Adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Aktif dalam penelitian dan pendampingan untuk daerah-daerah khususnya dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah.
- Prof. Dr. Yunastiti
Purwaningsih Adalah salah satu guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Banyak membimbing mahasiswa program doktor khususnya dalam bidang ekonomi pertanian.
- Drs. Sutomo, M.S. Salah satu dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Beliau dikenal sebagai ahli dalam bidang ekonomi ketenagakerjaan yang dimiliki oleh UNS.
- Agung Slamet Sukardi, S.E.
Dowes Ardi Nugroho, S.E.
Fitria Nur Rahmawati, S.E. Mahasiswa program studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (MESP) UNS. Mereka mengambil konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Keuangan Daerah.
- Dr. Dwi Prasetyani Adalah staf pengajar di FEB UNS sangat aktif menulis terutama dalam bidang kewirausahaan dan ekonomi islam.
- Prof. Dr. Khusnul Ashar Adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Dr. Susilo Adalah staf peneliti dan pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Minat penelitiannya pada bidang Sumber Daya Manusia.
- Dr. Multifiah Adalah staf peneliti dan pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Minat penelitiannya pada bidang ekonomi Islam.

- Tri Mulyaningsih, Ph.D. Staf pengajar dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Aktivitas lain juga menjadi pendamping pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Minat utama penelitiannya adalah bidang ekonomi ketenagakerjaan.
- Wahyu Prasetyo Widodo, S.E. Adalah mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS
- Malik Cahyadin, S.E., M.Si Adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Selain mengajar sering menjadi partner Bank Indonesia untuk melakukan survei-survei.
- Ida Busnety, S.E., M.M. Adalah staf pengajar di Universitas Trisakti dan peneliti di *Center for Industry, SME and Business Competition Studies* Universitas Trisakti Jakarta.
- Johadi, S.E., M.Sc Adalah staf pengajar dan peneliti pada FEB UNS. Minat studi dan penelitiannya pada bidang moneter dan kebanksentralan. Selain itu juga aktif dalam pengabdian masyarakat khususnya pendampingan kepada pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

Suryanto
Tulus Tambunan

Ekonomi lokal adalah ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh daerah. Keunggulan tersebut dapat didukung oleh keunggulan dalam penguasaan sumber daya atau pengelolaan yang kreatif. Keunggulan karena penguasaan sumber daya dalam konsep ekonomi perdagangan dikenal sebagai keunggulan absolut dan keunggulan karena pengelolaan yang kreatif lebih dikenal sebagai keunggulan kompetitif.

A. Peran Pembangunan Ekonomi Lokal

Peran pembangunan ekonomi lokal dalam pembangunan nasional adalah penyediaan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peluang kerja dan peluang berusaha meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi lokal. Dengan demikian upaya pemerintah untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan lebih cepat bagi masyarakat. Pada akhirnya pembangunan ekonomi lokal turut mempercepat masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Upaya pemerintah sebagai fasilitator untuk pengembangan ekonomi lokal secara teori terlihat lebih mudah. Namun kendala di lapangan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam APBN 2017 misalnya, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2 persen tercapai 5,07 persen. Sementara tahun 2018, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4 namun melihat perkembangan ekonomi

global hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China yang sedang memanas juga turut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan indikator ekonomi makro tersebut di mana peran ekonomi lokal masih rendah dalam kontribusi ekspornya menjadikan pengembangan ekonomi lokal belum menjadi prioritas.

Ekonomi lokal membutuhkan tiga partisipan aktif yaitu pelaku usaha baik individu maupun komunitas, lingkungan usaha, dan peran pemerintah (kelembagaan). Ketiga partisipan harus berperan secara sinergis agar ekonomi lokal dapat berkembang dan berkelanjutan. Pelaku usaha dalam hal ini para usahawan dituntut untuk memiliki daya kreativitas yang tinggi agar sumber daya yang dimiliki dapat memiliki nilai tambah dan dapat bersaing di pasar. Lingkungan usaha yang dapat mendukung pengurangan biaya produksi, contohnya adanya sentra produksi atau pusat bisnis, ketersediaan infrastruktur seperti listrik, air, sarana transportasi, dan jaringan internet. Peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi kemudahan perizinan, pendampingan usaha, dan pemberian fasilitas kredit untuk usaha-usaha baru. Selain peran ketiga partisipan tersebut masih dibutuhkan sinergitas antara ketiga partisipan harus berjalan dengan baik.

Menumbuhkan ekonomi lokal bukan seperti cendawan di musim hujan adalah judul yang dipilih dalam buku bunga rampai ini, yang merupakan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan *Center for Industry, SME and Business Competition Studies* Universitas Trisakti Jakarta. Dinamika-dinamika dalam pengembangan ekonomi lokal terangkum dalam buku ini. Buku ini menggabungkan beberapa pemikiran terkait dinamika pengembangan ekonomi lokal yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian kesatu adalah pendahuluan, bagian kedua adalah materi tentang ekonomi kreatif, bagian ketiga tentang kelembagaan, dan bagian keempat tentang kewirausahaan.

Bagian pendahuluan hanya terdiri satu bab yang bermaterikan gambaran tentang garis besar pemikiran para kontributor.

Bagian kedua terdiri lima bab dimulai dari tulisan Profesor Tulus Tambunan yang menekankan pada peran ekonomi kreatif di desa. Penulis dengan cermat mengaitkan antara pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan desa. Dua isu yang saat ini sedang dibahas di Indonesia dijadikan dalam satu bahasan oleh penulis. Desa memiliki dua keunggulan komparatif dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pertama, sesuai prinsip ‘satu desa satu produk’, atau yang dikenal dengan singkatan OVOP (*one village one product*), ekonomi kreatif dapat dikembangkan di setiap desa sesuai bahan baku utama yang dimiliki oleh setiap desa. Penekanan ekonomi lokal terlihat dari pernyataan bahwa keunggulan daerah harus dimaksimalkan, misalnya di daerah-daerah yang kaya akan pohon bambu

atau rotan, ekonomi kreatif yang paling tepat untuk dikembangkan di daerah-daerah tersebut tentunya adalah semua jenis barang termasuk meubel dengan berbagai macam disain yang kreatif dan inovatif berbahan baku utama bambu atau rotan. Kedua, sebagian besar jenis ekonomi kreatif tidak memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan formal tinggi seperti sarjana atau insinyur (apalagi bergelar S2 atau S3), melainkan cukup anak-anak muda dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau diploma namun memiliki kreativitas yang tinggi, sangat inovatif, dan menguasai teknik-teknik dasar pembuatan suatu produk kreatif yang tidak harus didapatkan dari pendidikan formal melainkan dari pengalaman bertahun-tahun.

Penulis bab ketiga adalah M. Indra Yusuf Purnama dan Suryanto, penulis menekankan pada pengembangan *smart economy* sebagai pengembangan *smart city*. Pengembangan *smart city* mutlak dilakukan karena untuk menjawab tantangan zaman yang serba lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik. Penulis mencoba mengaitkan beberapa variabel antara lain perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini pembahasan prioritas dalam RPJMD, konsep *smart economy* dan pengembangan ekonomi lokal.

Penulis bab keempat adalah Rochmat Aldy Purnomo dan Suryanto, topik yang diangkat adalah pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan kesenian lokal khususnya kesenian Reyog Ponorogo. Apabila selama ini kesenian reyog hanya berhenti pada kesenian tradisi maka melalui peran dan perhatian dari beberapa pemangku kepentingan kesenian reyog menjadi kesenian yang dapat menembus pasar internasional. Penulis berargumen bahwa pelestarian warisan budaya dengan mengkombinasikan kreasi dan semangat jiwa muda juga dapat menjadi daya dongkrak untuk lebih dapat dinikmati masyarakat, baik skala nasional maupun internasional. Saat ini, kesenian reyog juga dapat dipasarkan melalui permainan dengan basis android dan juga *game online* berbasis Reyog Ponorogo.

Penulis bab kelima adalah Nurul Istikomah dan Izza Marfuhah, menurut penulis energi merupakan salah satu input dalam kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga. Energi terbagi menjadi dua yaitu energi tidak terbarukan dan terbarukan. Semakin bertambahnya waktu energi tidak terbarukan semakin menipis dengan pesatnya jumlah kebutuhan. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan sangat dibutuhkan. Pengembangan energi terbarukan berbasis kearifan lokal dengan pemanfaatan biogas merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar *nonrenewable*. Kerjasama ABCG (*Academic, Bussines, Community, Government*) merupakan hal yang mutlak dalam kegiatan pembangunan di daerah. Sistem ternak Industri

terpadu merupakan salah satu implementasi dalam pengembangan *Blue Economy* yang mampu mengembangkan kegiatan tanpa sisa.

Penulis bab keenam adalah Adenantha L Dewa, Izzah Marfuhah, dan Indah Susilowati. Perhatian mereka terhadap pengembangan ekonomi lokal adalah pentingnya pengembangan poros maritim. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau besar dan kecil yang terpisahkan oleh 12 lautan dan 47 selat dengan luas 5,8 juta km² yang terdiri atas 2,8km² perairan pedalaman, 0,3juta km² laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif dengan garis pantai sepanjang 95,181 km. Wilayah Indonesia yang demikian menyebabkan disparitas antar wilayah semakin lebar, oleh karena itu membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan holistik, bukan hanya pembangunan infrastruktur namun juga kualitas jaringan antar wilayah yang terbangun melalui transportasi laut. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka disparitas antar wilayah adalah tol laut dengan cara membuka, mengembangkan, mengelola dan memperkuat pelabuhan di pulau-pulau kecil. Sehingga diharapkan Kebijakan tol laut dapat menjadi satu andalan dalam Poros Maritim untuk menekan disparitas antar wilayah.

Penulis bab ketujuh Lukman Hakim, dalam tulisannya beliau mengangkat perhatian terhadap praktik-praktik terbaik dalam pengembangan ekonomi lokal di daerah. Menurut penulis banyak contoh yang layak diangkat untuk menunjukkan bahwa ekonomi lokal dapat disemai oleh peran kelembagaan. Dampak praktik-praktik terbaik pada tingkat lokal ini pada gilirannya akan menjadi menjadi sumber inspirasi bagi kabupaten kota untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam tulisannya ada beberapa praktik-praktik terbaik ekonomi local dari beberapa Kab/kota di Wilayah eks Karesidenan Surakarta yang terdiri atas Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten atau disingkat menjadi Subosuka Wonosraten. Ada tiga praktik terbaik yang akan diangkat dalam tulisan ini yakni sistem pelayanan terpadu, penataan kaki lima, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Penulis bab kedelapan adalah Bhimo Rizky Samudro, Dinarjati Eka Puspitasari, dan Yogi Pasca Pratama. Fokus perhatian penulis adalah pada tentang peran masyarakat secara budaya dan tradisi menjaga lingkungan. Perspektif kearifan lokal mengarahkan pemahaman publik terhadap bagaimana peran masyarakat secara budaya dan tradisi menjaga keberlanjutan lingkungan sosial dan alam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai melupakan kearifan lokal yang ada sehingga akan berdampak pada melemahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal adalah Tradisi Sasi di Maluku. Tradisi Sasi dapat berperan memberikan manfaat positif pada 3 aspek

secara sinergi yang meliputi aspek lingkungan hidup, sistem relasi sosial dan sistem ekonomi. Hal ini dapat mengarahkan potensi social capital dalam masyarakat untuk menumbuhkan kearifan lokal melalui proses sirkulasi dan kumulatif (CCC). Dengan demikian kearifan lokal dapat terbentuk untuk menjaga lingkungan hidup sekaligus sistem sosio-ekonomi. Secara jangka panjang dapat berperan menjaga keseimbangan karakteristik dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan juga dalam memanfaatkan sistem sosio-ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan hidup.

Penulis bab kesembilan adalah Akhmad Daerobi yang menitikberatkan pada strategi pengembangan ekonomi lokalnya. Rekomendasi yang diberikan penulis adalah aksi tindak dan prioritas penguatan kelembagaan usahatani dapat dirumuskan model penguatan kelembagaan. Tujuan pengembangan model penguatan kelembagaan haruslah berparadigma holistik, yaitu penguatan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek spasial, yaitu menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani lahan kering, baik pada sisi internal maupun eksternal.

Penulis bab kesepuluh adalah Suryanto, Hermada Dekiawan, dan Johadi. Konsentrasi penulis adalah pada peran pemerintah untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui investasi. Kebutuhan investasi yang ideal dan kebutuhan tenaga kerja lokal agar dapat mendongkrak perekonomian daerah menjadi fokus dalam tulisan ini.

Penulis bab kesebelas adalah Mulyanto dan Lukman Hakim, tulisan bab ini terkait dengan keuangan daerah untuk pengembangan ekonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya komponen pajak daerah selama kurun waktu 2013-2015 menunjukkan bahwa nilai realisasi capaian Pajak Daerah dan pos-pos pembentuknya selalu di atas targetnya. Pengukuran prestasi kerja dalam penerimaan Pajak Daerah masih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), dan bukan dari rasio cakupan (*coverage ratio*), yang merupakan rasio dari realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi yang benar-benar ada dan dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar.

Penulis bab keduabelas adalah Yunastiti dan Sutomo, Penentuan lokasi pabrik menjadi sebuah pertimbangan pelaku industri, apakah lokasi pabrik dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar. Selain itu, lebih didasarkan pada biaya operasional seperti upah minimum dan biaya transportasi yang rendah, sehingga menguntungkan. Besaran upah minimum yang tinggi berdampak pada meningkatnya ongkos produksi perusahaan, sehingga kemudian mendorong terjadinya relokasi industri. Salah satu daerah yang menjadi tujuan relokasi industri adalah

provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kondisi Jawa Tengah masih tersedia lahan untuk kawasan industri. Selain itu, besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih rendah dibanding daerah Jabodetabek.

Penulis bab ketigabelas adalah Agung Slamet Sukardi, Doves Ardi Nugroho, Fitria Nur Rahmawati Tulisan terkait wisata kuliner dan pengembangan ekonomi lokal. Wisata kuliner menjadi jawaban atas kebutuhan dan animo masyarakat yang sangat tinggi tentang informasi makanan khas daerah masing-masing yang sesuai dengan cita rasa yang ingin didapatkan. Selain menambah pengetahuan wisatawan tentang keanekaragaman makanan yang ada, wisatawan juga dapat melihat proses pembuatan makanan.

Penulis bab keempatbelas adalah Dwi Prasetyani, Khusnul Ashar, Susilo, dan Multifia. Perhatian penulis adalah peran kewirausahaan khususnya perempuan. Dalam tulisannya diurai beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan usahanya. Tulisan ini menjadi menarik karena perhatian terhadap kewirausahaan dikaitkan dengan budaya dan ajaran islam yang mengatur tentang peran perempuan.

Penulis bab kelimabelas adalah Tri Mulyaningsih dan Fatimah, menurutnya UMKM merupakan sektor yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dalam menjalankan usahanya UMK memiliki banyak hambatan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi UMK meliputi aspek pengelolaan bisnis primer dan sekunder serta keterbatasan akses kredit. Untuk mendorong perkembangan UMK terutama kaitannya dengan mempermudah akses kredit, pemerintah mengucurkan berbagai fasilitas kredit bersubsidi. Selain itu, UMK juga membutuhkan pendampingan dari pihak eksternal untuk mengurangi *knowledge gap* pengelolaan bisnis yang baik. Keberadaan lembaga pendamping Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pada level provinsi maupun kabupaten/ kota diharapkan mampu meningkatkan kapasitas UMK dalam mengelola bisnisnya. Jumlah PLUT yang terus meningkat di daerah-daerah di Indonesia menunjukkan kebutuhan lembaga pendamping yang sangat besar bagi perkembangan UMK di Indonesia.

Penulis bab keenambelas adalah Malik Cahyadin dan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang jumlah penganggurannya cenderung menurun (BPS,2015). Pengangguran merupakan salah satu indikator makroekonomi yang dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti PDB/PDRB/pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, jumlah penduduk, angkatan kerja, nilai tukar, investasi, kemiskinan, IPM, urbanisasi, dan industrialisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadin dan Wahyu,2018 PDRB berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa PDRB sebagai indikator makroekonomi daerah berperan penting dalam pengurangan pengangguran.

Bab ketujuhbelas atau bab terakhir memberikan deskripsi terkait dengan pemetaan produk-produk unggulan di Sumatera Barat. Bab ini menyarikan hasil sementara dari tinjauan terhadap semua sumber-sumber resmi mengenai produk-produk unggulan dari provinsi Sumatera Barat. Tinjauan ini merupakan tahap awal dari sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Usaha, Universitas Trisakti, dengan tujuan untuk menetapkan produk-produk (bisa berupa jasa maupun komoditas) unggulan utama yang secara riil atau potensial dimiliki oleh provinsi Sumatera Barat.

BAB II

EKONOMI KREATIF SUMBER PERKEMBANGAN EKONOMI DESA

Tulus Tambunan

A. Pendahuluan

Ekonomi kreatif tidak hanya penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara karena berpotensi menyokong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional, tetapi juga sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah, terutama desa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebaran ekonomi kreatif di Indonesia belum merata ke semua daerah. Hanya di lima (5) provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Bali di mana ekonomi kreatif berkembang cukup pesat. Untuk periode 2014-2016, misalnya, sumbangan dari ekonomi kreatif dari lima provinsi tersebut terhadap pembentukan PDB tercatat mencapai 48 persen lebih, dan sisanya, sekitar 51,96 persen dari 29 provinsi lainnya. Pada tahun 2016, jumlah usaha ekonomi kreatif tercatat sebanyak 8,2 unit (sekitar 20 persennya adalah usaha mikro atau berstatus perusahaan rintisan dengan jumlah pekerja satu hingga dua orang), yang sekitar 65,37 persennya terdapat di Jawa; 17,94 persen di Sumatera; 4,95 persen di Kalimantan; 6,53 persen di Sulawesi, Maluku dan Papua serta sisanya, 5,21 persen, di Bali dan Nusa Tenggara (berita Kompas, Rabu, 28 Februari 2018, halaman 19).

Tidak heran jika pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak era Jokowi, sangat serius mendukung pengembangan ekonomi kreatif dalam berbagai bentuk. Di antaranya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengupayakan sejumlah fasilitasi yang dibutuhkan oleh kewirausahaan ekonomi kreatif, termasuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dan fasilitasi akses permodalan ke investor (berita Kompas, Kamis, 29 Maret 2018, halaman 19). Keseriusan pemerintah Indonesia mempromosikan ekonomi kreatif selama ini sangat

relevan dengan pengembangan ekonomi desa yang juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yakni pembangunan 40 kawasan ekonomi perdesaan yang berbasis partisipasi penuh warga (berita Kompas, Kamis, 11 Januari 2018, halaman 23).

Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif di desa-desa bisa sangat membantu dalam penyerapan dana desa yang jumlahnya sangat besar yang diterima dari pemerintah pusat setiap tahun oleh semua desa di tanah air. Terutama karena ekonomi kreatif sifatnya sangat padat karya, dan sesuai permintaan Presiden Jokowi pemanfaatan dana desa harus untuk mendanai pembangunan-pembangunan yang menciptakan kesempatan kerja/berusaha.

Desa memiliki dua keunggulan komparatif dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pertama, sesuai prinsip ‘satu desa satu produk’, atau yang dikenal dengan singkatan OVOP (*One Village One Product*), ekonomi kreatif dapat dikembangkan di setiap desa sesuai bahan baku utama yang dimiliki oleh setiap desa. Misalnya, di daerah-daerah yang kaya akan pohon bambu atau rotan, ekonomi kreatif yang paling tepat untuk dikembangkan di daerah-daerah tersebut tentunya adalah semua jenis barang termasuk meubel dengan berbagai macam disain yang kreatif dan inovatif berbahan baku utama bambu atau rotan. Kedua, sebagian besar jenis ekonomi kreatif tidak memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan formal tinggi seperti sarjana atau insinyur (apalagi bergelar S2 atau S3), melainkan cukup anak-anak muda dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau diploma namun memiliki kreativitas yang tinggi, sangat inovatif, dan menguasai teknik-teknik dasar pembuatan suatu produk kreatif yang tidak harus didapatkan dari pendidikan formal melainkan dari pengalaman bertahun-tahun.

Sesuai temanya, bab ini dibagi dalam dua bagian utama, yakni bagian pertama membahas perkembangan ekonomi kreatif selama ini di Indonesia, dan bagian kedua membahas potensi desa untuk pengembangan ekonomi kreatif. Di bagian terakhir ini juga diperlihatkan beberapa kasus sukses dari kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di sejumlah daerah di tanah air.

B. Ekonomi Kreatif

1. Konsep dan Definisi

Ekonomi atau sering juga disebut industri kreatif merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu yang menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan berbagai macam produk dan jasa. Atau, seperti pernyataan berikut ini yang dikutip dari harian Kompas dengan

tema berita “Industri Kreatif, Nafsu Besar Saja Tak Cukup” (catatan akhir tahun), *industri kreatif adalah industri yang muncul karena penggunaan kreativitas, keterampilan, dan talenta individu untuk menciptakan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Kreatif bukan saja berbasis seni budaya, melainkan juga berbasis sains, teknologi informasi, inovasi, dan keteknikan* (berita Kompas, Selasa, 31 Desember 2013, halaman 14).

Adapun menurut Irandoust (2014), kreativitas dapat dilihat sebagai kemampuan seseorang mengimajinasikan atau menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dengan lainnya yang sudah ada. Atau seperti yang dikatakan oleh Setiawan (2015), kreativitas adalah membuat sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih istimewa. Irandoust (2014) lebih lanjut menegaskan bahwa kreativitas tidak terbatas pada kemampuan menciptakan dari ketiadaan, tetapi juga menghasilkan ide-ide baru dengan menggabungkan, mengubah, atau mengulang ide-ide yang sudah ada. Kreatif juga merupakan sikap untuk menerima perubahan, kemauan untuk bermain dengan ide dan kemungkinan, serta mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Lainnya, seperti Samosir (2015) mengatakan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya mengukur luaran ekonomi, tetapi mencakup empat (4) bentuk modal, yakni sosial budaya, manusia, struktural atau institusional, dan kreativitas.

Sementara itu, Rajab (2015) berpendapat bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat perkotaan yang prular, berbasis pada gagasan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi informasi baru yang dituangkan dalam produk-produk yang baru juga, berupa barang-barang serta jasa atau metode kerja, yang diintegrasikan pada ekonomi pasar. Menurutnya, produk-produk kreatif cukup beragam, yang bisa dikelompokkan kedalam empat (4) kategori. Pertama, warisan, seperti ekspresi budaya tradisional yang meliputi kerajinan-kerajinan artistik, festival dan perayaan-perayaan, serta situs-situs budaya yang menyangkut situs-situs arkeologis, museum, perpustakaan, dan pameran. Kedua, karya-karya seni, aksesoris, ornamen, seperti seni visual yang menyangkut lukisan, patung, ukiran, fotografi, barang-barang antik; seni pertunjukkan yang menyangkut pertunjukan musik, teater, tarian, opera, dan sirkus. Ketiga, media, seperti penerbitan dan percetakan, *audiovisual*, yang menyangkut film, televisi, dan radio. Keempat, kreasi fungsional, seperti desain, interior, grafis, perhiasan, mainan, dan jasa kreatif yang menyangkut arsitektural, periklanan, turisme, kuliner, serta penelitian dan pengembangan kreatif.

Secara resmi definisi atau maksud dari ekonomi kreatif dapat merujuk pada definisi pemerintah, yakni ada enam (6) kelompok atau 15 subsektor ekonomi atau industri kreatif (berita Kompas, Senin, 24 September 2010; Tambunan, 2017):

- a) kelompok industri publikasi dan presentasi melalui media, yang terdiri dari penerbitan dan percetakan serta periklanan;
- b) kelompok industri dengan kandungan budaya yang disampaikan melalui media elektronik, yang terdiri dari televisi, radio, film, video, dan fotografi;
- c) kelompok industri dengan kandungan budaya yang ditampilkan ke publik secara langsung maupun tidak langsung lewat media elektronik, lewat musik dan seni pertunjukkan;
- d) kelompok industri yang padat kandungan seni dan budaya, yang terdiri dari kerajinan, kuliner dan pasar barang seni;
- e) kelompok industri desain, yang terdiri dari desain, mode, dan arsitektur;
- f) kelompok industri kreatif dengan muatan teknologi, yang terdiri dari riset dan pengembangan, permainan interaktif, teknologi informasi, layanan komputer, dan peranti lunak.

2. Peran di dalam Perekonomian Perdesaan

Industri kreatif memiliki tiga peran utama bagi pembangunan ekonomi perdesaan, yaitu (Tambunan, 2017):

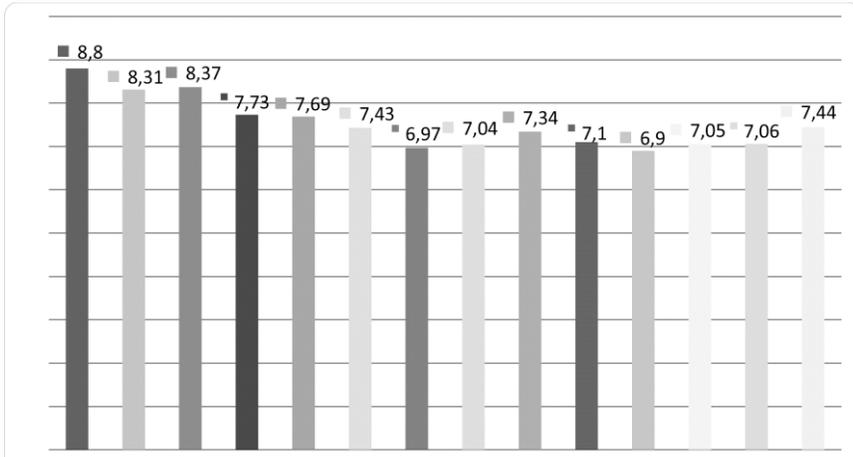
- a) menciptakan kesempatan kerja. Sebagian besar bisnis kreatif adalah dari kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih padat karya dibandingkan dengan usaha besar (UB) yang lebih padat modal. Karena UMKM, terutama usaha mikro dan kecil (UMK) adalah kelompok usaha yang mendominasi kegiatan-kegiatan ekonomi perdesaan, maka dengan sendirinya ekonomi menjadi sangat penting untuk mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan di perdesaan, yang sekaligus juga mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota dan memperkecil kesenjangan pendapatan antara perdesaan dan perkotaan;
- b) pengembangan wirausaha. Salah satu ciri khas penting dari ekonomi kreatif adalah kreativitas dan inovasi dari individu-individu, dan menurut Irandoust (2014) pola pikir seorang yang berjiwa kewirausahaan adalah kemampuannya untuk bekerja secara efektif dengan ide-ide kreatif dan inovatif dengan cepat mengubah konsep menjadi realitas dalam bentuk sebuah barang atau jasa. Hal ini bisa terjadi jika orang itu mampu mengenali peluang pasar (komersial), memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, dan keterampilan untuk bertindak. Dalam perkataan lain, seorang pelaku kreativitas dengan membuka usaha sendiri untuk menjual hasil kreativitas-atau inovasinya dengan sendirinya sedang melakukan suatu proses kewirausahaan; dan

- c) pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya unit usaha ekonomi kreatif yang masing-masing menghasilkan output atau nilai tambah, maka dengan sendirinya ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang penting terhadap pembentukan atau pertumbuhan *output* atau pendapatan di perdesaan. Bahkan karena Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan barang-barang atau jasa-jasa kreatif yang dapat diekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya lewat penjualan ke wisatawan-wisatawan asing), maka pengembangan atau keberadaan ekonomi kreatif di desa dapat meningkatkan lebih banyak lagi pendapatan masyarakat perdesaan.

C. Kinerja Ekonomi Kreatif Indonesia

Di Indonesia ekonomi kreatif sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Akan tetapi, perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap sektor ini baru muncul dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut sebuah berita di Harian Kompas (Ekonomi, Senin, 24 September 2012), ada sejumlah sentra industri kreatif di Indonesia, yang masih terpusat di wilayah Indonesia bagian barat, atau khususnya di pulau Jawa, seperti Bandung (Provinsi Jawa Barat), Denpasar (Provinsi Bali), Jakarta (DKI), Solo (Provinsi Jawa Tengah), Yogyakarta (DIY), Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat), dan Medan (Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan nilai rata-rata, selama periode 2002-2016 ekonomi kreatif di Indonesia telah menyumbang lebih dari 7 persen terhadap total kegiatan ekonomi nasional atau PDB, walaupun ada variasi antar tahun. Pada tahun 2002 sumbangan sektor ini terhadap pembentukan PDB tercatat sekitar 8,8 persen dan pada tahun 2016 dengan nilai outputnya sebesar Rp 922,59 triliun (meningkat dari misalnya tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 525,96 triliun), ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7.4 persen. Memang jika dilihat dari tren perkembangan selama periode yang diteliti itu pangsa PDB dari ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan penurunan; walaupun data 2016 menunjukkan kecenderungan naik kembali (Gambar 2.1).



Sumber: Kompas (Ekonomi, Kamis, 4 Oktober 2012, halaman 20; Ekonomi, Selasa, 1 September 2015, halaman 17; Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu, 12 September 2015, halaman 12; dan Kompas, Rabu, 28 Februari 2018, halaman 19). Data diolah oleh Libang Kompas dari Kementerian Perdagangan.

Gambar 2.1
Sumbangan Ekonomi Kreatif terhadap PDB, 2002-2016 (%)

Penurunan pangsa PDB dari ekonomi kreatif selama periode yang diteliti tersebut (terkecuali tahun 2016) bukan disebabkan oleh penurunan output atau nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Karena, seperti yang dapat dilihat di Tabel 2.1, setiap tahun nilai tambah yang diciptakan oleh ekonomi kreatif cenderung terus bertambah. Pada tahun 2012 pertumbuhannya tercatat sebanyak 4,47 persen (dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama sebesar 6,23 persen) Pada tahun 2013 nilai tambah ekonomi kreatif tercatat hampir mencapai Rp 642 triliun (berdasarkan harga pasar yang berlaku), atau pertumbuhan sebesar 5,76 persen dibandingkan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2012 (atau lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun itu, yang tercatat sekitar 5,74 persen). Pada tahun 2014, nilai tambah ekonomi kreatif mengalami sedikit peningkatan, yakni hanya sekitar 0,03 persen dibandingkan tahun 2013. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa penurunan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pembentukan PDB disebabkan oleh laju pertumbuhan nilai tambah dari sejumlah sektor ekonomi lainnya yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif.

Tabel 2.1
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Indonesia, 2010-2014 (Rp miliar)*

	Periode				
	2010	2011	2012	2013	2014
Nilai tambah	472.999	526.999	578,761	641.815	716.695
Pertumbuhan nilai tambah (%)	-	5,02	4,47	5,76	11,7

Keterangan: * berdasarkan harga pasar yang berlaku.

Sumber: Kompas (Ekonomi, Kamis, 19 Juni 2014, halaman 19), Kompas (Ekonomi, Selasa, 1 September 2015, halaman 17), dan Kompas (Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu, 12 September 2015, halaman 12). Data diolah oleh Litbang Kompas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berikut, Tabel 2.1 memberikan data nilai tambah dari sejumlah kelompok industri/subsektor ekonomi kreatif. Dapat dilihat tiga subsektor paling penting karena nilai tambahnya paling besar, yakni kuliner, mode, dan kerajinan. Indonesia memang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ketiga subsektor kreatif ini karena jelas memiliki banyak keunggulan komparatif dibandingkan negara-negara lain. Misalnya, kuliner, setiap wilayah atau suku atau etnik di tanah air memiliki makanan dan minuman tradisional yang tidak mudah (jika tidak bisa dikatakan tidak mungkin) ditiru di daerah lain atau oleh kelompok masyarakat lainnya. Namun, sumbangan terbesar adalah dari subsektor mode dan subsektor kerajinan yang secara total mencapai sekitar 45 persen terhadap total nilai tambah ekonomi kreatif pada tahun 2010. Pada tahun 2012, subsektor mode sendiri menyumbang 40,9 persen dengan nilai mencapai Rp 191 triliun, dan subsektor kerajinan sekitar 27,6 persen. Adapun subsektor-subsektor kreatif yang sumbangannya terhadap total NT ekonomi kreatif (dan juga PDB) masih relatif kecil adalah di antaranya kelompok industri berbasis konten seperti film, musik, animasi, dan radio (berita Kompas, Ekonomi, Kamis, 4 Oktober 2012, halaman 20).

Tabel 2.2
Nilai Tambah dari Sejumlah Subsektor Ekonomi Kreatif, 2011-2013 (Rp triliun)*

Kelompok	Periode		
	2011	2012	2013
Kuliner	169,7	186,8	208,6
Mode	147,5	164,5	181,6
Kerajinan	79,5	84,2	92,7
Penerbitan & percetakan	43,8	47,9	52,0
Desain	21,0	22,2	25,0
Radio & televisi	15,7	17,5	20,3
Arsitektur	10,4	11,5	12,9
Riset & pengembangan	10,0	11,0	11,8
Layanan komputer & peranti lunak	8,1	9,4	10,1
Lainnya	21,4	23,7	26,8
Total	527,0	578,8	641,8

Keterangan: * berdasarkan harga pasar yang berlaku.

Sumber: Kompas (Ekonomi, Rabu, 5 Agustus 2015, halaman 19). Data diolah oleh Litbang Kompas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan skala usaha, menurut data BPS (2017a), jumlah usaha di sektor ekonomi kreatif lebih didominasi oleh UMK dari pada usaha menengah dan besar (UMB), persentasenya mencapai sekitar 99,11 persen (Tabel 2.3). Selain itu, hampir di semua subsektor usaha ekonomi kreatif didominasi oleh UMK, terkecuali di subsektor periklanan serta televisi dan radio. Di subsektor pertama tersebut jumlah UMK sekitar 49,17 persen dan UMB sebesar 50,83 persen. Adapun jumlah UMK di subsektor kedua itu sedikit di bawah 38 persen dibandingkan UMB yang porsinya sedikit di atas 62 persen.

Tabel 2.3
Ekonomi Kreatif Menurut Skala Usaha dan Subsektor, 2016 (%)

Subsektor	UMK	UMB
Arsitektur	73,50	26,50
Desain interior	89,97	10,03
Desain komunikasi visual	94,16	5,84
Desain produk	93,41	6,59
Film, animasi, video	79,86	20,14
Fotografi	99,43	0,57
Kriya	98,65	1,35
Kuliner	99,55	0,45
Musik	98,40	1,60
Mode	98,42	1,58
Aplikasi dan pengembangan permainan	89,70	10,30
Penerbitan	95,87	4,13
Periklanan	49,17	50,83
Televisi dan radio	37,98	62,02
Seni pertunjukkan	96,41	3,59
Seni rupa	99,07	0,93
Total	99,11	0,89

Sumber: BPS (2017a).

Sejalan dengan distribusi UMKM atau UMK menurut wilayah yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah UMK terdapat di pulau Jawa (sejalan dengan posisi pulau ini sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia), demikian juga persebaran jumlah UMK ekonomi kreatif terbesar terdapat di pulau Jawa dengan persentase mencapai 65,27 persen. Kemudian disusul berturut-turut oleh pulau Sumatera dengan persentase 18 persen, pulau Sulawesi 5,45 persen, pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,21 persen, pulau Kalimantan 4,97 persen, dan yang paling kecil adalah pulau Maluku dan Papua yang hanya sekitar 1,1 persen (BPS, 2017a).

Selanjutnya, Gambar 2.2 menunjukkan penyebaran UMK di sektor ekonomi kreatif menurut provinsi. Dapat dilihat bahwa provinsi-provinsi dengan persentase UMK ekonomi kreatif yang tinggi juga berada di provinsi-provinsi di pulau Jawa. Provinsi dengan UMK ekonomi kreatif tertinggi adalah Jawa Barat dengan 18,33 persen dari seluruh UMK ekonomi kreatif di Indonesia. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, masing-masing, 18,26 persen dan 17,26 persen.

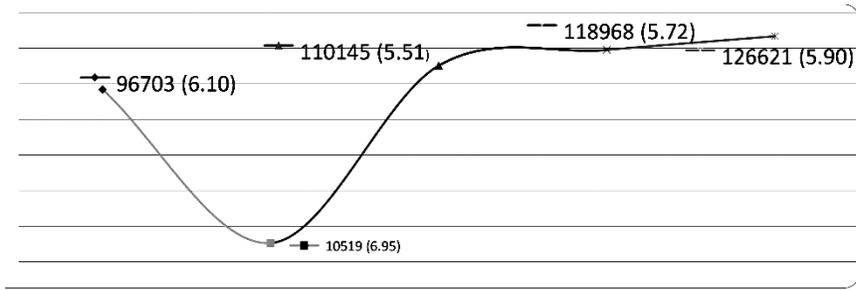
Sementara itu, di luar pulau Jawa, provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat yang hanya 0,16 persen. Yang lainnya yakni Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Maluku Utara, masing-masing 0,17 persen dan 0,23 persen.



Sumber: dikutip dari Gambar 5.1 di BPS (2017a; halaman 64).

Gambar 2.2 Penyebaran UMK Ekonomi Kreatif
Menurut Provinsi di Indonesia, 2016

Selain sumbangannya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB dan penciptaan kesempatan kerja, industri kreatif juga punya peran besar terhadap pendapatan devisa lewat pertumbuhan ekspor neto (ekspor minus impor). Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang diolah oleh Litbang Kompas (berita Kompas, Ekonomi, Senin, 24 September 2012), nilai ekspor industri kreatif dalam beberapa tahun belakangan ini secara akumulatif sudah di atas Rp 131 miliar. Tetapi Indonesia juga banyak impor produk-produk kreatif, yang nilainya dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp 16,2 miliar. Pada tahun 2010, nilai ekspor industri kreatif mencapai Rp 96,7 triliun, atau 6,10 persen dari nilai total ekspor Indonesia, dan pada tahun 2013, nilainya bertambah menjadi Rp 118,97 triliun, atau sekitar 5,72 persen, dan pada tahun 2014 Rp 126,6 triliun, atau 5,90 persen (Gambar 3) (berita Kompas, Ekonomi, Selasa, 26 Agustus 2014, halaman 17; berita Kompas, Pendidikan & Kebudayaan, Sabtu, 12 September 2015, halaman 12).



Keterangan : * di dalam kurung adalah persentase kontribusi terhadap nilai ekspor Indonesia)

Sumber : Kompas (Pendidikan & Kebudayaan, Sabtu, 12 September 2015, halaman12). Data diolah oleh Litbang Kompas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gambar 2.3
Nilai Ekspor Industri Kreatif, 2010-2014 (Rp miliar)*

Menurut catatan dari harian Kompas, dari jumlah ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia tahun 2016, subsektor dengan sumbangan terbesar adalah mode (*fashion*) dengan pangsa ekspornya mencapai 56 persen; disusul kemudian, berturut-turut, oleh kriya 37 persen, kuliner 6 persen, dan lainnya 1 persen. Lima (5) besar daerah asal ekspor ekonomi kreatif adalah Provinsi Jawa Barat dengan porsi terbesar mencapai 33,56 persen, Provinsi Jawa Timur 20,85 persen, Provinsi Banten 15,66 persen, Provinsi Jawa Tengah 14,02 persen, dan Provinsi DKI Jakarta 10,50 persen (berita Kompas, Kreatorial, Sabtu, 21 April 2017, halaman 11).

D. Beberapa Kasus Keberhasilan Pelaku Kreatif di Indonesia

Berikut ini beberapa kasus mengenai sejumlah orang yang berhasil dalam berkreaitivitas yang bersumber dari beberapa terbitan dari harian Kompas dan hasil wawancara penulis.

1. Ide Kreatif Petenun Lombok

Keindahan tenun asal Lombok memikat perhatian Linda Hamidy Grander (37). Setelah lulus pendidikan di sekolah *Fashion Institute of Design and Merchandising*, San Francisco, Amerika Serikat (AS), Linda pada awalnya tidak pernah berpikir untuk mengolah tenun. Akan tetapi, pengalamannya membantu sebuah agen perjalanan milik ayahnya dengan mendampingi rombongan turis ke desa-desa tenun di Lombok, ditambah pengalaman mengikuti kelas bisnis di AS, menyadarkannya.

Pulang ke tanah air beberapa tahun lalu, Linda pun menetapkan tekadnya untuk membuka butik dengan produk utama dari kain tenun. Dia waktu itu termasuk nekat karena pasar mode di Lombok sebenarnya belum terbentuk. Masyarakat setempat umumnya masih memanfaatkan tenun sebagai salah satu kebutuhan adat belaka. Sementara pasar lokal kelas "premium" yang menjadi target utama Linda pun masih sangat terbatas jumlahnya.

Dengan bantuan sejumlah penjahit, Linda membagi kreasinya tersebut dalam lima (5) lini. Dia juga turun langsung untuk memotong kain dan membuat pola sendiri. Hal ini dia lakukan karena mengolah kain tenun membutuhkan keterampilan dan kepekaan khusus. Dari tangannya lahirlah produk mode kreatif berbasis kain tenun. Tenun pun menjadi gaun pesta. Selain itu, sebagai produk-produk turunan mode atau sampingan, limbah tenun dia 'sulap' menjadi dompet, tas, dasi, tempat tisu, dan tempat telepon seluler.

Talenta dan kerja kerasnya itu pernah mengantarkan Linda mengikuti Minggu Mode Indonesia pada tahun 2013. Sebelumnya, dia juga pernah meraih penghargaan juara II Busana Etnik Modern pada tahun 2011 dan juara III Busana Kreasi Daerah pada tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional. Selain itu, Linda juga pernah mengikuti Lombok-Sumbawa *Ethnic Fashion* 2012.

2. Tas Berbahan Kain Denim dari Solo

Lahir dari keluarga penjahit, Heru Nugroho (33) tidak ingin hanya mewarisi bisnis konfeksi orangtuanya di Desa Mento, Solo, Provinsi Jawa Tengah. Sadar akan potensi kain tekstil di Solo dan sekitarnya yang melimpah, muncul ide segar, yang dia realisasikan dengan membuka usaha sendiri sekitar empat (4) tahun yang lalu, dan tas-tas yang dia buat diberi label "Kreatifi Tas".

Awalnya sulit karena di Solo dan daerah-daerah sekitarnya belum ada perajin yang membuat tas seperti yang dia kehendaki. Selain itu, teknik menjahit pakaian yang dia miliki selama itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan untuk membuat tas. Maka dia belajar teknik membuat tas dari orang lain, dan teknik yang dia pelajari lalu dikembangkan untuk membuat beraneka tas dengan bahan kain denim dengan kombinasi ragam kain lainnya.

Karena dia sadar bahwa usahanya tidak akan bertahan lama jika tidak berkreasi, maka Heru terus meran-cang model dan inovasi baru. Dia mengeluarkan model baru setiap pekan sekali. Hingga sekarang sudah ada 800-an model tas yang dia buat. Sebagian dari tas-tas buatannya sudah dipasarkan hingga Kalimantan, Bali, dan bahkan Papua.

Dengan hasil karyanya ini, Heru ikut pameran *Indonesia Creative City Expo* yang merupakan bagian dari perhelatan Konferensi Kota Kreatif Indonesia di Benteng *Vastenburg*, Solo. Dalam pameran tersebut, puluhan produk kreatif dari beberapa daerah dipamerkan dengan tujuan agar para pengrajin bisa saling berinteraksi untuk membentuk jaringan kerja sama dan pemasaran

3. Gitar dari Solo

Guruh Nugroho (36) juga jeli melihat potensi usaha dari lingkungannya. Tumbuh besar di Laweyan yang merupakan salah satu sentra industri batik di Solo, Guruh yang memang seorang pengrajin gitar, pada tahun 2009 mulai berpikir untuk menggabungkan batik dan gitar. Dia lalu menekuni bisnis gitar batik dengan nama "Batik Guitar".

Dengan sentuhan kreativitas, gitar-gitar yang semula dipandang sekadar alat musik petik, kini menjadi barang yang tergolong mewah. Berkat tambahan aksesoris batik, dia mampu memasarkan gitar batiknya hingga ke luar negeri seperti Belanda, Jerman, dan Inggris. Sebelum digambaran batik, penjualan gitarnya setiap bulan rata-rata hanya laku 5 buah. Sekarang, dengan gitar batik, paling tidak satu bulan ada pesanan antara 20 hingga 25 buah.

Kreativitasnya pula yang mampu mendongkrak nilai ekonomi sebuah gitar. Sebelum berhias lukisan batik, satu unit gitar standar harganya hanya berkisar Rp 500.000 hingga yang paling mahal Rp 1,5 juta. Namun setelah gitar dihiasi dengan aneka motif batik, harganya bisa mencapai hingga 975 dollar AS, atau sekitar Rp 13 juta. Dengan hasil karyanya ini, Heru ikut pameran *Indonesia Creative City Expo* yang merupakan bagian dari perhelatan Konferensi Kota Kreatif Indonesia di Benteng *Vastenburg*, Solo.

Motif batik yang dilukiskan di gitar-gitar buatannya juga terus dikembangkan dengan mempelajari perkembangan terkini. Bagi Guruh, kreativitas adalah "raja" dari keberlangsungan bisnis gitar batiknya.

4. Lampu Hias dari Jakarta

Safrida Purnamasari (37), dengan panggilan Frida, memiliki sebuah toko lampu hias dengan nama "CahayaLampu" di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, yang menjual ragam bentuk unik, motif, dan warna-warni lampu dekorasi produk perusahaan yang dia dirikan. Lampu yang ia buat mulai dari lampu meja, lampu tinggi, lampu gantung, lampu dinding, masih banyak lagi.

Frida membangun bisnis lampunya mulai dari nol. Ia tidak pernah bermimpi suatu saat akan menjadi wirausaha. Namun sejak dulu sudah

tergambar dalam pikirannya untuk memiliki toko lampu. Sebelumnya ia bekerja di sebuah perusahaan di bidang periklanan. Setelah berpikir secara matang dan dengan dukungan sepenuhnya dari suaminya, setelah empat tahun bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya ia keluar.

Toko Cahya Lampu-nya awalnya hanya sebuah gerai kecil yang jika tiga pelanggan datang pada waktu bersamaan sudah penuh sesak, disamping sebuah swalayan yang ia juga miliki di Kemang pada awal tahun 2000. Begitu usahanya semakin maju dan menguntungkan, maka ia membangun sebuah toko yang lebih besar di samping rumahnya di Kemang.

Klien Frida sebagian besar adalah ekspatriat, jaringan restoran besar, para kontraktor, atau individu yang menginginkan lampu dalam mode atau desain tertentu. Semua masukan atau saran dari para pelanggannya ia gunakan untuk terus mempertinggi kualitas produknya.

Frida tidak pernah berpuas diri; ia terus melakukan kreativitas dan inovasi baru. Ia sudah mulai mencoba dengan bahan-bahan yang mudah didapatkannya, seperti kain batik sebagai tudung lampu.

5. Radio Kayu dari Temanggung

Setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1992, Singgih Susilo Kartono (46) memulai usaha sendiri. Ia membuka babak baru kehidupannya, hanya berbekal satu keinginan yakni pulang kampung, di Dusun Krajan 1, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Ia memproduksi radio Magno yang adalah radio berbahan kayu di unit usaha kerajinan kayu miliknya, CV Piranti Works, di dusun kecil di sisi utara gunung Sumbing. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004. Sebenarnya, sebelum ia mendirikan perusahaan ini, Singgih bersama rekannya pernah mendirikan sebuah usaha yang membuat berbagai ragam mainan anak-anak juga dari bahan kayu.

Sejak diproduksi tahun 2006, radio Magno mendapat empat (4) penghargaan desain internasional, yaitu *Grand Award Design for Asia* dari Hongkong *Design Center* pada tahun 2008, *Good Design Award* dari Jepang juga pada tahun 2008, *Product of the Year* dari Design Museum London pada tahun 2009, dan yang terakhir *Kids Design Award* dari Jepang pada tahun 2013.

Radio Magno sebenarnya hanyalah satu dari beragam produk kerajinan berbahan kayu yang dibuat Singgih dan 29 pekerjanya yang sebagian berasal dari luar desanya. Ia pilih kayu sebagai bahan radionya sebab material itu dekat dengan kehidupannya. Sejak kecil Singgih sering membuat berbagai mainan dengan berbahan kayu, dan di Temanggung

banyak terdapat industri pengolahan kayu. Magno berasal dari kata *magnifying*, yang artinya memperbesar, yang adalah nama produk pertamanya yang dibuat oleh perusahaannya, yakni kaca pembesar.

Setiap bulan perusahaannya membuat sekitar 200 buah kerajinan, dan lebih separuhnya berupa radio. Sisanya, sekitar 18 jenis produk, antara lain jam, kompas, dan kaca pembesar. Sekitar 80 persen dari produk-produk itu dipasarkan ke luar negeri melalui distributor di beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, dan Australia.

Awalnya, ia sulit mendapatkan komponen elektronik karena pabrik elektronik menetapkan jumlah minimum pembelian. Singgih berupaya dengan membeli radio di pasar, mempreteli komponennya, lalu dipasang di radio Magno. Trik ini terus ia lakukan hingga tahun 2005, saat ia bertemu dengan pimpinan industri elektronik nasional, yang akhirnya ia mendapatkan pasokan komponen elektronik secara rutin.

6. Batik Mangrove dari Semarang

Setelah mengetahui banyaknya tumbuhan bakau atau *mangrove* yang rusak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Zazilah (44) dan suaminya, Marheno Jayanto (44), tergerak untuk membuat batik berbahan baku tumbuhan bakau. Batik ini, yang diwarnai dengan tumbuhan bakau dan bermotif tumbuhan bakau, mereka terus kembangkan di Kota Semarang hingga saat ini.

Suami istri ini sudah bergelut dengan batik sejak tahun 2004. Zie, panggilan Zazilah, mulai belajar membatik di Museum Tekstil di Jakarta. Sebelumnya, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan tekstil. Melihat banyak orang, terutama warga asing, mau bersungguh-sungguh belajar membatik, Zie semakin terdorong untuk mempelajari batik dan mendirikan ushaa batik sendiri.

Awalnya, Zie dan Heno, panggilan Marheno, membuat batik dengan pewarna alam seperti jelawe atau joho untuk warna kuning, kayu secang untuk warna merah, dan indigo untuk warna biru. Namun, setelah mengikuti sebuah pameran batik di Jakarta-Convention Center pada tahun 2010, di mana mereka melihat ada stan yang memajang batik *mangrove*, muncullah ide untuk juga membuat batik dari tumbuhan bakau.

Sepulang dari Jakarta, mereka bertanya kepada seorang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, yang merupakan salah satu pelanggan batik mereka, mengenai tumbuhan bakau di pantai Kota Semarang. Mereka juga mendatangi kawasan pesisir di Tambakrejo, Mangkang, untuk melihat tumbuhan bakau secara langsung.

Di rumah, mereka bereksperimen, apakah tumbuhan bakau dapat dijadikan bahan pewarna untuk batik. Eksperimen ini terus mereka

lakukan, namun tidak juga membuahkan hasil. Suatu hari, pada saat mereka berkunjung ke Teluk Awur, mereka melihat banyak buah tumbuhan bakau yang telah berkecambah, yang tidak berhasil tumbuh, kering, dan mati. Buah tumbuhan bakau yang mati itu kemudian mereka bawa pulang. Di rumah, mereka kemudian mencoba memakai buah tersebut untuk dijadikan bahan pewarna batik. Upaya mereka ini membuahkan hasil. Dari buah tumbuhan bakau itu, tercipta warna coklat dalam sejumlah gradasi.

Sekarang ini, suami istri itu menghasilkan sekitar 200 helai batik tumbuhan bakau per bulan, dengan harga Rp 100.000 hingga termahal Rp 5 juta per helai. Batik berbahan baku tumbuhan bakau buatan mereka juga diminati oleh para kolektor batik ataupun kain nusantara dari berbagai wilayah di tanah air. Mereka bercita-cita membuat batik tumbuhan bakau menjadi ciri khas batik Semarang. Selain membuat batik, mereka berdua juga mengajar membatik.

7. Meubel dan Rumah Bambu dari Rangkasbitung

CV Shaniqua Marigold Bamboo, yang berlokasi di Rangkasbitung (Provinsi Banten), adalah sebuah perusahaan keluarga yang membuat berbagai macam perabotan rumah tangga berbasis bambu dengan desain-desain yang kreatif. Selain itu, perusahaan itu juga membuat rumah bambu yang dapat dibongkar pasang. Pendiri atau pemilik perusahaan ini adalah sepasang suami istri, Bapak Khairul E. Pulungan dan Ibu Siti Sundari.

Sebelum perusahaan ini resmi berdiri, pasangan suami-istri ini sebenarnya sudah memulai bisnis ini sejak tahun 1998, saat terjadinya krisis keuangan Asia, pada saat mana ekonomi nasional mengalami keterburukan dan banyak perusahaan, terutama dari kategori usaha besar, di dalam negeri yang mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan phk di mana-mana. Ibu Siti Sundari menanggapi kondisi saat itu sebagai suatu peluang besar bagi usaha produk bambu, terutama juga karena di sekitar rumahnya banyak sekali pohon bambu yang tidak terurus. Selanjutnya, dia mendiskusikan peluang pasar ini dengan suaminya untuk membuat kerajinan dari bambu, pertama untuk pasar lokal saja dan kemudian untuk ekspor. Dia juga termotivasi oleh dua faktor lainnya: bahwa pada masa itu banyak anak muda di wilayahnya tidak memiliki pekerjaan, yang dapat dilatih sebagai perajin yang baik, dan tidak perlu banyak modal untuk memulai sebuah bisnis bambu. Suaminya setuju dan setelah dipikirkan dengan hati-hati selama enam bulan, kemudian mereka mulai hanya memproduksi satu produk.

Pada awalnya, akhir tahun 1997, mereka menyewa lahan milik orang tuanya Ibu Siti Sundari untuk membuat sebuah bengkel meubel bambu yang tidak terlalu besar yang berfungsi sebagai tempat menampung

para pengrajin yang sebelumnya adalah anak-anak muda yang menganggur di Rangkasbitung dan sekitarnya (Pandeglang-Serang); sebuah pekerjaan yang membuat Ibu Siti Sundari sangat bangga karena dia dapat berkontribusi nyata untuk mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan di kotanya dan daerah sekitarnya, terutama pada saat krisis tersebut.

Setelah mencari tempat untuk dijadikan galeri (kontrak bangun) ke berbagai lokasi, akhirnya pada tahun 1998 mereka mendirikan Shaniqua Galeri di Kemang Utara, Jakarta Selatan, dan mencari sumber-sumber kerajinan dari berbagai tempat di Provinsi Banten dan sekitarnya untuk di jual di galeri tersebut. Mereka juga membina hubungan baik dengan berbagai pengusaha UMKM kerajinan meubel dari berbagai kota di Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, dan Kalimantan. Selain di galerinya sendiri, Nyonya Siti Sundari juga menitipkan produk produk kerajinannya di galeri-galeri besar di Kemang.

Selama periode November 1998–September 1999 Ibu Siti Sundari aktif mengikuti berbagai pameran musiman yang dilaksanakan di mall dan hotel yang dijematani oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) DKI, sebuah dewan yang khusus dibentuk pemerintah untuk membantu peningkatan kemampuan pengrajin (anggota) di bidang produksi melalui pembinaan kewirausahaan, teknik produksi, peningkatan mutu dan desain produk, dan membantu pengrajin melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak dalam usaha untuk meningkatkan mutu produk. Selain itu, Ibu Siti Sundari juga rutin mengikuti pameran Pengendalian Pembangunan Ekoregion Indonesia (PPEI) yang diselenggarakan setiap tahun bulan Oktober di Kemajoran (Jakarta Pusat) oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Awalnya pada pameran Oktober 1998 ia menumpang di stand Jawa Barat milik kawannya, seorang wanita pengusaha yang berhasil dan sudah mengekspor ke banyak negara, dan produk yang dipamerkan oleh Ibu Siti Sundari waktu itu adalah sofa Linda. Sejak itu, Ibu Siti Sundari secara rutin berpartisipasi dalam pameran tahunan tersebut dan juga dalam beberapa pameran serupa lainnya. Berpartisipasi aktif dalam banyak pameran internasional memang merupakan salah satu strategi utamanya sejak awal untuk mendapatkan pesanan untuk pasar internasional. Dengan berpartisipasi dalam banyak pameran, ia melakukan banyak kontak dengan pembeli dari dalam negeri maupun luar negeri. Hasil dari pameran, dia mendapatkan sejumlah pembeli lokal dan juga seorang produsen tekstil Indonesia. Produsen ini yang ingin mencoba menjadi pengusaha meubel menghubungi Shaniqua karena dia mendapat pesanan dari Spanyol untuk mengisi sebuah vila di pesisir Spanyol. Pesanan itu berupa berbagai produk meubel, termasuk tempat tidur, cermin, lemari pakaian, kursi rias, dan

lemari TV. Jadi, bagi Shaniqua pesanan ini merupakan ekspor pertama, walaupun secara tidak langsung melalui seorang produsen tekstil.

Pesanan dari Spanyol ini bagi Ibu Siti Sundari menjadi sebuah tantangan besar karena pada saat itu dia tidak pernah berpikir bahwa akan segera terlibat dalam perdagangan internasional. Dia tidak memiliki sedikitpun pengetahuan bagaimana mempersiapkan pesanan seperti itu terutama untuk pasar luar negeri. Akan tetapi, setelah belajar dari banyak sumber termasuk berbicara dengan banyak orang yang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan terutama pada kualitas, dan juga berpartisipasi dalam banyak program pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan, Shaniqua berhasil untuk pertama kalinya memenuhi standar internasional yang diperlukan, dan setelah tiga bulan, perusahaan ini berhasil membuat beberapa contoh produk meubel dengan kualitas tinggi. Pembeli dari Spanyol itu puas, dan Shaniqua mendapat pesanan untuk 13 kontainer hanya dalam 4 bulan. Untuk memenuhi permintaan ini, Ibu Siti Sundari mempekerjakan 150 pemuda setempat.

Dengan meningkatnya penjualan, khususnya ke luar negeri, pada tahun 2004, Ibu Siti Sundari membeli lahan sendiri yang luas dan membangun gedung pabrik, karena hal ini untuk menunjang produktivitas dan kualitas barang. Pada tahun 2016, perusahaan ini sudah memiliki lahan seluas 10.000 meter² dan sebuah pabrik seluas 2000 meter². Pada awalnya tahun 2000 perusahaan ini hanya mengerjakan tiga orang yang diberi upah bulanan, dan per Juni 2016 sudah memiliki 30 karyawan. Beberapa dari mereka tidak menyelesaikan sekolah dasar, dan yang lain hanya memiliki ijazah SMA. Perusahaan ini mempekerjakan tidak hanya pria muda tetapi juga wanita yang menikah yang terutama berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah di kotanya. Perusahaan ini menyediakan pelatihan bagi para pekerjanya untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam membuat barang-barang kerajinan.

Pada 2014, setelah berpartisipasi dalam *Trade Expo Indonesia* di J-EXPO Kemayoran (Jakarta), perusahaan ini mendapat pesanan untuk memasok berbagai produk meubel ke resor di Ubud di Bali; Sawarna di Banten, dan Sungai Siput di Perak, Malaysia. Setelah penjualan ke Malaysia tersebut, pada akhir tahun 2015, Shaniqua menandatangani kerjasama dengan mitra lokalnya di negara Jiran tersebut untuk membangun pabrik pertamanya di negara tersebut yang diberi nama "Shaniqua Malaysia". Ini adalah investasi patungan asing pertama yang dilakukan oleh CV Shaniqua Marigold Bamboo dan perusahaan lokal sebagai mitranya di Malaysia. Sejak Malaysia, Shaniqua memperluas eksponnya juga ke beberapa negara ASEAN lainnya, terutama Thailand, Singapura dan Vietnam. Nyonya Siti Sundari menganggap ASEAN sebagai pasar yang sangat penting karena pertumbuhan ekonominya yang

stabil dan banyak orang di negara-negara ASEAN tersebut menyukai perabotan berbasis bambu. Saat ini, produk-produk yang di ekspor termasuk tempat tidur, laci, cermin, lemari pakaian, kursi, meja dan rumah bambu.

Saat ini, CV. Shaniqua Marigold Bamboo menjadi pabrik bambu terbesar di Indonesia, dan proses pembuatan meubel hampir 100 persen dikerjakan dengan tangan. Sejak tahun 2015, Shaniqua menguasai sekitar 50 persen pasar domestik untuk perabotan bambu. Produk meubel yang diproduksi oleh Shaniqua memiliki banyak desain yang berbeda, dan sebagian besar eksklusif untuk beberapa pembeli. Perusahaan ini memproduksi antara lain tempat tidur, tempat tidur, laci, cermin, lemari, lemari TV, aksesoris, gazebo, sofa, lemari pakaian, kursi, dan meja. Selain itu, perusahaan ini juga menghasilkan rumah bamboo. Di Indonesia, perusahaan yang memproduksi barang tersebut dikategorikan sebagai industri kreatif. Bambu Shaniqua memiliki visi dan misi untuk secara aktif berpartisipasi menuju pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Banten untuk menjaga cara pembuatan produk buatan tangan dengan desain inovatif yang kreatif.

Sejak 2010, Ibu Siti Sundari menerima sejumlah penghargaan karena keberhasilannya mengelola perusahaan dan terutama dalam melakukan ekspor, di antaranya adalah: (i) dalam rapat DPRD Banten tahun 2010, Gubernur Banten menghadihkan Bambu Shaniqua sebagai perusahaan “Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”; (ii) PRABASWARA *Award* 2013 untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan (iii) PRIMANYARTA AWARD 2103 dari pemerintah Indonesia yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Budiono untuk kategori "Eksportir Potensi Usaha Kecil Menengah".

8. Kain lukis dari Solo

Di antara UMKM di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), adalah sebuah perusahaan bernama Nasrafa yang didirikan oleh Bapak Yani Mardiyanto pada awal tahun 2012. Perusahaan ini memproduksi tekstil dengan lukisan kain sebagai produk intinya. Sebelum tahun 2012, Bapak Yani bekerja di sebuah perusahaan yang membuat antara lain kerudung. Di perusahaan itu dia mendapat sebuah ide untuk membuat kain yang dicat. Kebetulan desa di mana dia tinggal memiliki banyak orang yang berbakat melukis. Berawal dari keikutsertaannya di dalam sebuah komunitas seni di desanya, Bapak Yani memindahkan kegiatan melukisnya dari dinding dan kanvas ke kain. Selain itu, anak-anak muda di sekitar rumahnya yang membuat berbagai lukisan kreatif diarahkan oleh Yani untuk melukis di atas kain. Lukisan-lukisannya di atas kain yang diberi nama *Painted Fabric*

of Nasrafa (yang diambil dari nama anak-anaknya, yaitu Naswa, Raffa, dan Fadhil) menerima tanggapan positif dari pelanggan lokal maupun luar negeri. Kini produk-produk andalan Nasrafa adalah jilbab, sarung, kemeja dan mukena.

Setelah sekian tahun, pada akhir 2012 untuk pertama kali Bapak Yani mendapatkan beberapa pembeli dari sejumlah negara termasuk Singapura, Kanada, Malaysia dan AS mengunjungi galeri dan bengkelnya yang berlokasi di Petoran, Jebres, Solo. Mereka membeli banyak produknya dengan motif bunga. Sejak itu dia mempertahankan hubungan bisnis dengan mereka yang membuatnya mampu mempertahankan ekspornya ke negara-negara tersebut. Untuk meningkatkan ekspornya, Yani melakukan banyak hal selain membuat rencana ekspor yang baik, termasuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan khususnya mengenai prosedur ekspor, mengembangkan strategi ekspor yang tepat, dan merundingkan proposal ekspor dengan Pusat Pelatihan Ekspor (PPEI) dari Kementerian Perdagangan. Selain PPEI, Yani juga menghadiri beberapa kali pelatihan ekspor yang diberikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun pertama ekspor, hasil ekspor kurang dari 30 persen dari total pendapatan dari perusahaan ini. Pada 2015 hingga pertengahan tahun 2016 persentasenya sedikit naik hingga 30 persen. Produk ekspor pertama waktu itu adalah kerudung yang dicat, dan sekarang perusahaan ini sudah mengekspor berbagai lukisan kain. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor Nasrafa telah diperluas ke beberapa negara di Eropa dan di Timur Tengah. Hingga saat ini di kawasan ASEAN, baru hanya Singapura dan Malaysia yang merupakan tujuan ekspornya. Namun, Yani memiliki rencana jangka menengah untuk memperluas ekspornya ke negara-negara lain di kawasan itu, terutama Thailand dan Vietnam.

Bapak Yani sering menghadiri pameran-pameran besar di sejumlah kota di tanah air seperti Jakarta, Solo, dan Semarang. Dalam pameran-pameran tersebut, selain memamerkan karya-karyanya, dia juga sering kali membawa sejumlah peragawati untuk peragaan busana.

Keberhasilan Yani sebagai seorang pengusaha yang mulai dari hanya melayani pasar lokal dan setelah itu berkembang ke pasar lebih luas di dalam negeri dan akhirnya ekspor juga tercerminkan pada banyaknya penghargaan yang dia dapat dalam beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya adalah *Best Quality Product of the Year* (Indonesia Business Development Award 2017), dan juara 1 “Kategori Produk Kreatif” dalam Pameran *Cooperative Fair* ke-14 di Bandung (Provinsi Jawa Barat).

9. Kerajinan Tenun dari Toraja

Kerajinan tenun sangat populer di Indonesia. Ini adalah aktivitas tradisional, dan salah satu sumber utama bagi banyak wanita yang tinggal di rumah di pedesaan. Perempuan menenun dengan alat sederhana dapat ditemukan di semua provinsi di Indonesia. Akan tetapi, sekarang aktivitas tenun tradisional ini terancam karena persaingan yang berat dari pabrik tenun yang menggunakan mesin-mesin modern yang meniru motif asli mereka. Akibatnya, banyak perempuan meninggalkan kegiatan menganyam dan pergi ke kota-kota sebagai buruh atau pembantu rumah tangga.

Untuk meningkatkan kondisi hidup para penenun perempuan di desa-desa di seluruh Indonesia dan pada saat yang sama untuk menghidupkan kembali seni tenun dan budaya di desa-desa, Ibu Dinny Jusuf, didukung oleh adik perempuannya Ibu Nina Jusuf membentuk, pertama-tama secara informal, sebuah perusahaan sosial di Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008. Kemudian, karena di Indonesia tidak ada badan hukum khusus untuk bisnis sosial, pada tahun 2010 mereka mendirikan Yayasan Torajamelo untuk melaksanakan program pengorganisasian masyarakat dan PT Torajamelo untuk melakukan aspek bisnis. Dengan demikian, PT Torajamelo dianggap sebagai sebuah perusahaan sosial dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan petani. Perusahaan ini memproduksi beragam pakaian dan berbagai macam souvenir yang sangat kreatifitas dan berkualitas tinggi. Semua terbuat dari kain tenun tangan asli dari Toraja bekerjasama dengan sekitar 100 wanita miskin di berbagai kota termasuk Jakarta, Bandung dan DI Yogyakarta sebagai penjahit, pembuat sepatu, pembuat tas, dan lain-lainnya. Mereka fokus pada perancangan busana untuk generasi muda yang dapat dipakai di berbagai belahan dunia.

Awalnya, perusahaan ini hanya melayani pasar domestik karena pasar terbesar untuk produknya adalah Indonesia, khususnya Jakarta dan Bali. Namun, pada tahun 2012 ada permintaan dari Jepang dan Singapura. Dengan demikian, perusahaan ini mulai terlibat dalam kegiatan ekspor pada tahun 2012, dan Jepang dan Singapura adalah dua negara tujuan pertama. Pada tahun itu, barang-barang yang diekspor adalah berbagai tas dan sandal yang terbuat dari tenunan tangan dan kulit. Kemudian perusahaan ini juga mengeksport barang-barang tenunnya ke Perancis dan AS.

10. Kerajinan Berbasis Tongkol Jagung dari Desa Kareloe

Hingga dua tahun lalu, tongkol jagung selalu menjadi masalah bagi warga Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tongkol jagung berserakan dan menggunung di sejumlah sudut desa. Tidak ada tempat pembuangan. Bahkan tidak ada

juga angkutan sampah. Namun, sekarang tongkol jagung menjadi sangat berarti bagi ibu-ibu rumah tangga di desa tersebut. Tidak ada lagi tongkol jagung yang berserakan dan menumpuk, karena sekarang sudah menjadi bahan baku utama pembuatan berbagai macam barang kerajinan seperti kap lampu, tempat tisu, tempat pensil, dan beragam wadah lain dengan bentuk menarik. Barang-barang itu adalah hasil kreatif para ibu dari pengolahan tongkol jagung.

Sebelumnya, pada saat warga di desa itu belum memiliki kompor tongkol jagung digunakan untuk memasak. Sisanya dibuang begitu saja atau dibakar. Namun setelah mereka memiliki kompor, tongkol jagung tidak lagi digunakan sehingga menjadi sampah dan berserakan di mana-mana. Sekarang tongkol jagung itu telah berubah menjadi barang bernilai pasar yang tinggi. Barang-barang kerajinan berbahan baku tongkol jagung dijual dengan harga bervariasi, berkisar antara Rp 25.000 hingga paling mahal Rp 500.000 per buah, tergantung pada model dan ukuran. Misalnya, untuk bingkai cermin besar harganya mencapai Rp 500.000, sedangkan tempat pensil dijual seharga Rp 25.000, dan satu buah kap lampu berharga paling murah Rp 250.000 dan paling mahal mencapai Rp 300.000.

Ide awal memanfaatkan tongkol jagung ini menjadi berbagai macam barang kerajina dicetuskan oleh Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI). Tujuan pembentukan FPPI itu sendiri adalah untuk memberdayakan kaum ibu di seluruh Indonesia. Program FPPI ini kemudian didukung oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan. Tahun 2017, Desa Kareloe adalah satu dari 29 desa yang mendapat dukungan dana untuk kegiatan keaksaraan dan keterampilan.

11. Berbagai Produk Makanan Berbasis Pertanian dan Peternakan dari Kecamatan Biromaru

Sebelum adanya program pembangunan 40 kawasan ekonomi perdesaan dari pemerintah pusat, kegiatan ekonomi di Kecamatan Biromaru di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, hanyalah pertanian dan peternakan. Namun dengan adanya program pemerintah ini, terjadi perubahan besar, khususnya di tujuh desa yang menjadi salah satu prioritas dari 40 kawasan tersebut, yakni Jono Oge, Sidera, Oloboju, Watunonyu, Pombewe, Solowe, dan Bora. Dengan dukungan dari Kementerian Desa dan komitmen dari pemerintah setempat, sekarang warga di tujuh desa tersebut telah menghasilkan beragam jenis makanan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan seperti bawang goreng, keripik ubi, keripik pisang, dan beras ketan organik. Produk-produk ini dikemas dalam volume kecil dan besar disertai merek, nama kelompok masyarakat penghasil dan jaminan halal.

Perubahan ekonomi di tujuh desa tersebut dari awalnya yang hanya mengandalkan produksi komoditas-komoditas primer (pertanian, perkebunan dan peternakan) menjadi ekonomi berbasis pengembangan komoditas-komoditas primer tersebut menjadi produk-produk bernilai tambah tidak lepas dari adanya dana desa selama ini yang digunakan antara lain untuk penyediaan sarana produksi, dan adanya dukungan penuh dari Kementerian Desa dan pemerintah setempat dalam bentuk antara lain pendampingan dan pelatihan mengolah produk-produk rumah tangga.

E. Ekonomi Kreatif sebagai Motor Penggerak

Desa-desa di Indonesia pada prinsipnya memiliki peluang besar untuk memposisikan ekonomi kreatif sebagai motor utama penggerak pembangunan atau pertumbuhan ekonomi mereka karena setiap desa atau setiap kelompok desa di setiap kecamatan atau kabupaten memiliki keunggulan komparatif (atau keunggulan yang ada secara alamiah) dan kemampuan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif (keunggulan yang harus diciptakan).

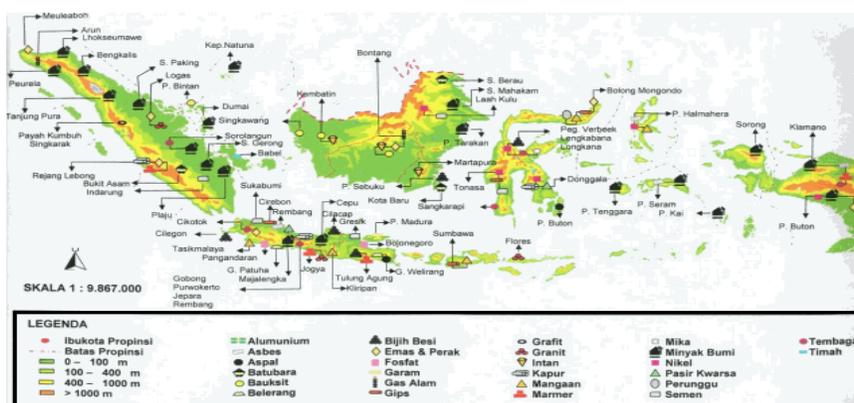
1. Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sebuah desa atau sejumlah desa di sebuah kecamatan atau kabupaten bisa berupa sumber daya alam (SDA) atau/dan keahlian masyarakat dalam membuat sesuatu yang sudah turun-temurun (keahlian tradisional), seperti misalnya menenun; membuat batik; membuat meubel berbahan baku bambu, rotan atau kayu; atau pandai besi. Mengembangkan sebuah industri di sebuah desa berdasarkan SDA dan/atau keahlian tradisional masyarakatnya adalah yang dimaksud dengan mengembangkan industri atau kegiatan ekonomi berdasarkan kearifan lokalnya. Dalam kata lain, sangatlah tepat apabila ekonomi kreatif di desa-desa dikembangkan sesuai kearifan lokal atau keunggulan komparatif yang mereka miliki. Prinsip ini sesuai dengan pemikiran Adam Smith dalam pandangannya pada abad ke 18 mengenai perdagangan antar negara yang mengatakan bahwa sebaiknya sebuah negara membuat sebuah barang atau jasa yang mana negara tersebut memiliki keunggulan atas negara lain, atau yang dimaksud dengan spesialisasi.

Bukan sebuah rahasia umum bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya akan SDA, bukan hanya dalam bentuk kesuburan tanahnya yang didukung oleh iklim subtropis yang membuat hampir segala macam tanaman perkebunan dan pertanian dapat tumbuh, tetapi juga kekayaan tambang yang heterogen dan terdapat hampir di semua wilayah di tanah air (Gambar 2.4). Dari berbagai macam tambang yang ada di dalam bumi Nusantara ini, minyak dan gas (migas) menjadi salah satu

kekayaan tambang yang sangat berharga. Selain itu, bersama dengan batu bara, migas merupakan sumber-sumber energi fosil yang sangat dibutuhkan bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia.

Jika prinsip yang disebutkan di atas dilaksanakan, yakni setiap desa atau wilayah di Indonesia mengembang ekonomi kreatif sesuai kearifan lokalnya, dan dalam hal ini sesuai kekayaan SDA yang dimilikinya, maka Gambar 2.4 dapat juga menggambarkan potensi penyebaran ekonomi kreatif yang bervariasi antar wilayah. Jadi misalnya, daerah Tulung Agung di provinsi Jawa Timur mengembangkan barang-barang kreatif berbahan baku utama marmer, atau Tonasa, Sulawesi, membuat barang-barang kreatif berbahan baku nikel.



Sumber: <https://www.google.co.id/search?q=peta+indonesia+menurut+sumber+daya+alam+....>

Gambar 2.4
Keberadaan SDA di Indonesia Menurut Pulau

Selanjutnya, Tabel 2.4 menunjukkan banyaknya desa atau kecamatan di provinsi-provinsi di Indonesia menurut spesialisasi industri oleh UMK. Untuk industri yang membuat barang-barang berbahan baku kulit, jumlah desa/kecamatan di Provinsi Jawa Timur adalah yang terbanyak; disusul kemudian oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Karena kulit binatang pada dasarnya dapat diperoleh di semua wilayah di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa desa-desa atau kecamatan-kecamatan ini melakukan spesialisasi lebih berdasarkan keahlian tradisional masyarakatnya dalam membuat berbagai macam barang dari kulit. Untuk kelompok-kelompok industri lainnya di Tabel 2.4, pulau Jawa juga unggul dalam jumlah desa atau kecamatan. Struktur menurut provinsi ini konsisten dengan Gambar 2 bahwa pusat kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia adalah pulau Jawa, dan ini mau menegaskan bahwa sebaiknya ekonomi atau industri kreatif yang dikembangkan di pulau Jawa, khususnya di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan

Jawa Timur, adalah terutama di kelompok-kelompok industri tersebut karena paling tidak masyarakatnya secara tradisional sudah memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut.

Tabel 2.4 Jumlah Desa/Kecamatan
Menurut Provinsi dan Spesialisasi Industri UMK, 2014

Provinsi	Industri							
	Kulit	Kayu	Logam mulya & bahan dari logam	Anyaman	Gerabah/ keramik/batu	Kain/tenun	Makanan & minuman	Lainnya
Naggroe Aceh Darussalam	17	1,093	256	788	315	277	1,648	438
Sumatra Utara	59	919	282	710	345	475	1,624	613
Sumatra Barat	96	704	163	217	317	379	688	200
Riau	16	825	165	301	304	207	611	168
Jambi	6	761	193	199	203	129	524	79
Sumatra Selatan	18	1,214	248	585	487	448	1,159	310
Bengkulu	7	511	96	239	165	105	579	110
Lampung	22	1,337	190	618	821	340	1,133	244
Kcp. Bangka Belitung	1	268	84	131	188	41	275	22
Kep. Riau	3	217	19	113	102	37	255	68
DKI Jakarta	101	145	200	36	10	165	202	66
Jawa Barat	530	3,987	612	2,266	1,828	1,779	4,023	1,380
Jawa Tengah	433	5,617	851	2,992	2,481	3,167	6,554	2,134
D.I. Yogyakarta	116	402	102	280	148	192	397	132
Jawa Timur	709	5,658	1,159	2,806	2,567	1,574	5,557	1,574
Banten	220	871	139	602	500	455	1,087	212
Bali	42	436	287	375	364	357	555	414
NTB	12	712	105	414	533	266	579	204
NTT	6	1,161	85	405	363	1,121	818	193
Kalimantan Barat	3	666	116	310	237	108	609	323
Kalimantan Tengah	9	397	68	290	175	47	492	151
Kalimantan Selatan	13	520	165	483	233	165	1,006	299
Kalimantan Timur	9	269	24	155	146	52	330	104
Kalimantan Utara	-	69	23	63	45	10	48	50
Sulawesi Utara	6	463	52	164	200	77	573	117
Sulawesi Tengah	5	1,031	158	490	305	108	817	225
Sulawesi Selatan	19	1,610	338	570	437	444	1,601	490
Sulawesi Tenggara	11	1,265	145	708	530	283	1,352	206
Gorontalo	2	409	33	230	242	120	472	79
Sulawesi Barat	5	282	22	135	127	156	267	119
Maluku	1	281	26	156	66	52	256	57
Maluku Utara	3	407	23	263	101	16	335	46
Papua Barat	2	118	9	125	74	22	115	35
Papua	17	270	26	718	108	73	138	61

Sumber: BPS (<https://www.bps.go.id/statictable/2015/02/09/1770/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-dan-jenis-industri-kecil-dan-mikro-2014-.html>).

2. Keunggulan Kompetitif

Mungkin kualitas pendidikan formal dan kesehatan rata-rata masyarakat dapat dianggap sebagai faktor keunggulan kompetitif terpenting, dan salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat faktor ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari *United Nations Development Programme* (UNDP), yang pada dasarnya menggambarkan bagaimana penduduk di suatu wilayah dapat menikmati hasil pembangunan dalam bentuk dapat memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Data BPS (2017b) menunjukkan IPM Indonesia yang terus membaik setiap tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,18 pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 69,55. Antar provinsi, IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, dengan nilai 79,60 dan terendah adalah provinsi Papua yang hanya 58,05 (Tabel 5). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, AHH saat lahir paling rendah adalah 64,31 tahun di provinsi Sulawesi Barat dan tertinggi 74,71 tahun di DI Yogyakarta. Sementara pada dimensi pengetahuan, HLS berkisar antara terendah 10,23 tahun di provinsi Papua hingga tertinggi 15,23 tahun di DI Yogyakarta, serta RLS yang berkisar antara terendah 6,15 tahun di provinsi Papua dan tertinggi 10,88 tahun di DKI Jakarta. Untuk pengeluaran per kapita di tingkat provinsi berkisar antara terendah 6,6 juta rupiah per tahun di provinsi Papua dan tertinggi 17,5 juta rupiah di DKI Jakarta.

Akan tetapi, seperti yang dapat dilihat, semua provinsi mengalami perbaikan dalam IPM dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Ada tiga provinsi dengan laju kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yakni provinsi Papua dengan kenaikan 1,40 persen yang didorong oleh kemajuan dalam dimensi pendidikan, disusul kemudian oleh provinsi Sumatera Selatan 1,16 persen yang dimotori oleh perbaikan standar hidup layak, dan provinsi Jawa Timur 1,15 persen yang lebih disebabkan oleh perbaikan dalam dua hal yakni pendidikan dan standar hidup layak.

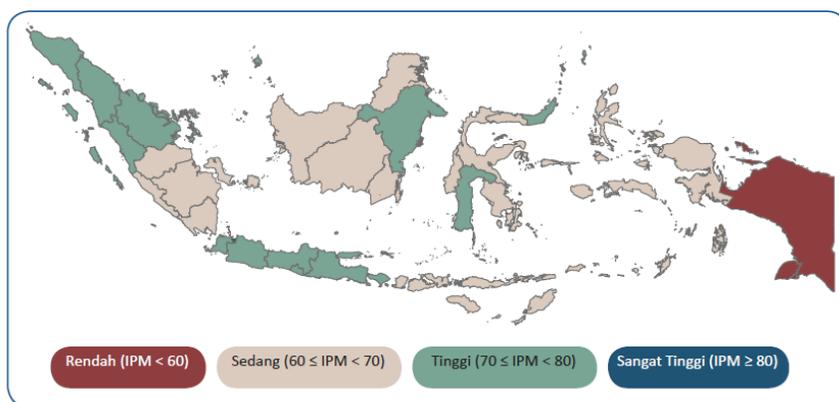
Tabel 2.5 IPM Menurut Provinsi, 2015-2016

Provinsi	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran p.k. (Rp000)		IPM		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Capaian		Pertumbuhan (%) 2015-2016
									2015	2016	
Naggroe Aceh Darussalam	69,50	69,51	13,73	13,89	8,77	8,86	8533	8768	69,45	70,00	0,79
Sumatra Utara	68,29	68,33	12,82	13,00	9,03	9,12	9563	9744	69,51	70,00	0,70
Sumatra Barat	68,66	68,73	13,60	13,79	8,42	8,59	9804	10126	69,98	70,73	1,07
Riau	70,93	70,97	12,74	12,86	8,49	8,59	10364	10465	70,84	71,20	0,51
Jambi	70,56	70,71	12,57	12,72	7,96	8,07	9446	9795	68,89	69,62	1,06
Sumatra Selatan	69,14	69,16	12,02	12,23	7,77	7,83	9474	9935	67,46	68,24	1,16
Bengkulu	68,50	68,56	13,18	13,38	8,29	8,37	9123	9492	68,59	69,33	1,08
Lampung	69,90	69,94	12,25	12,35	7,56	7,63	8729	9156	66,95	67,65	1,05
Kep. Bangka Belitung	69,88	69,92	11,60	11,71	7,46	7,62	11781	11960	69,05	69,55	0,72
Kep. Riau	69,41	69,45	12,60	12,66	9,65	9,67	13177	13359	73,75	73,99	0,33
DKI Jakarta	72,43	72,49	12,59	12,73	10,70	10,88	17075	17468	78,99	79,60	0,77
Jawa Barat	72,41	72,44	12,15	12,30	7,86	7,95	9778	10035	69,50	70,05	0,79
Jawa Tengah	73,96	74,02	12,38	12,45	7,03	7,15	9930	10153	69,49	69,98	0,71
D.I.Yogyakarta	74,68	74,71	15,03	15,23	9,00	9,12	12684	13229	77,59	78,38	1,02
Jawa Timur	70,68	70,74	12,66	12,98	7,14	7,23	10383	10715	68,95	69,74	1,15
Banten	69,43	69,46	12,35	12,70	8,27	8,37	11261	11469	70,27	70,96	0,98
Bali	71,35	71,41	12,97	13,04	8,26	8,36	13078	13279	73,27	73,65	0,52
NTB	65,38	65,48	13,04	13,16	6,71	6,79	9241	9575	65,19	65,81	0,95
NTT	65,96	66,04	12,84	12,97	6,93	7,02	7003	7122	62,67	63,13	0,73
Kalimantan Barat	69,87	69,90	12,25	12,37	6,93	6,98	8279	8348	65,59	65,88	0,44
Kalimantan Tengah	69,54	69,57	12,22	12,33	8,03	8,13	9809	10155	68,53	69,13	0,88
Kalimantan Selatan	67,80	67,92	12,21	12,29	7,76	7,89	10891	11307	68,38	69,05	0,98
Kalimantan Timur	73,65	73,68	13,18	13,35	9,15	9,24	11229	11355	74,17	74,59	0,57
Kalimantan Utara	72,16	72,43	12,54	12,59	8,36	8,49	8354	8434	68,76	69,20	0,64
Sulawesi Utara	70,99	71,02	12,43	12,55	8,88	8,96	9729	10148	70,39	71,05	0,94
Sulawesi Tengah	67,26	67,31	12,72	12,92	7,97	8,12	8768	9034	66,76	67,47	1,06
Sulawcsi Selatan	69,80	69,82	12,99	13,16	7,64	7,75	9992	10281	69,15	69,76	0,88
Sulawesi Tenggara	70,44	70,46	13,07	13,24	8,18	8,32	8697	8871	68,75	69,31	0,81
Gorontalo	67,12	67,13	12,70	12,88	7,05	7,12	9035	9175	65,86	66,29	0,65
Sulawesi Barat	64,22	64,31	12,22	12,34	6,94	7,14	8260	8450	62,96	63,60	1,02
Maluku	65,31	65,35	13,56	13,73	9,16	9,27	8026	8215	67,05	67,60	0,82
Maluku Utara	67,44	67,51	13,10	13,45	8,37	8,52	7423	7545	65,91	66,63	1,09
Papua Barat	65,19	65,30	12,06	12,26	7,01	7,06	7064	7175	61,73	62,21	0,78
Papua	65,09	65,12	9,95	10,23	5,99	6,15	6469	6637	57,25	58,05	1,40

Sumber: BPS (2017b).

Kemajuan pembangunan manusia yang dicapai setiap provinsi selama ini dapat juga dilihat di Gambar 2.5 yang menunjukkan perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus “sedang” berkurang dari 21 provinsi pada tahun 2016 menjadi 18 provinsi pada tahun 2017. Tiga provinsi yang berstatus “sedang” pada

tahun 2016 berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2017. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, terdapat 14 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Untuk kali pertama di Indonesia, terdapat satu provinsi yang berhasil mencatat pembangunan manusia “sangat tinggi” yaitu DKI Jakarta. Sementara itu, sejak 2010 hingga 2017, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah”, yaitu Papua (BPS, 2018).



Sumber: dikutip dari Gambar 5 di BPS (2018; halaman 5).

Gambar 2.5
IPM dan Status Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2018

Kondisi infrastruktur di suatu daerah, fasilitas transportasi yang menghubungkan daerah tersebut dengan wilayah lainnya serta ketersediaan pelayanan dasar di daerah itu, termasuk pelayanan yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku usaha juga merupakan faktor-faktor keunggulan kompetitif. Salah satu indikator untuk tiga faktor ini adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang dibuat oleh BPS untuk semua desa di Indonesia. IKG merupakan sebuah indeks komposit tertimbang dengan skala 0 hingga 100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yakni: 1) ketersediaan pelayanan dasar; 2) kondisi infrastruktur; dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin besar nilai IKG menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

Berdasarkan laporan BPS tahun 2015, Tabel 2.6 menyajikan IKG setiap provinsi di Indonesia. Nilai IKG bervariasi antar desa dengan rentang antara terendah 6,83 di Desa Sudagaran (Provinsi Jawa Tengah) dan tertinggi 97,89 di Desa Dorera (Provinsi Papua). Pada tingkat nasional, nilai tengah IKG adalah sebesar 40,91. Lebih dari 50 persen dari jumlah

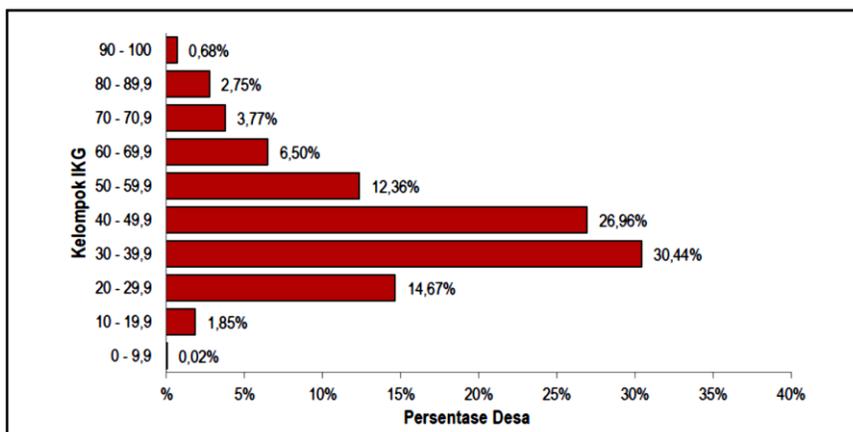
desa di Indonesia termasuk di dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen dari jumlah desa termasuk di dalam kelompok IKG di atas 70 (Gambar 2.6)

Tabel 2.6
IKG Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Terendah	Tengah	Tertinggi
Naggroe Aceh Darussalam	9,10	44,65	79,90
Sumatra Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatra Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatra Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kep. Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
D.I.Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
NTB	16,41	35,69	67,96
NTT	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98

Provinsi	Terendah	Tengah	Tertinggi
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

Sumber: BPS (2016)

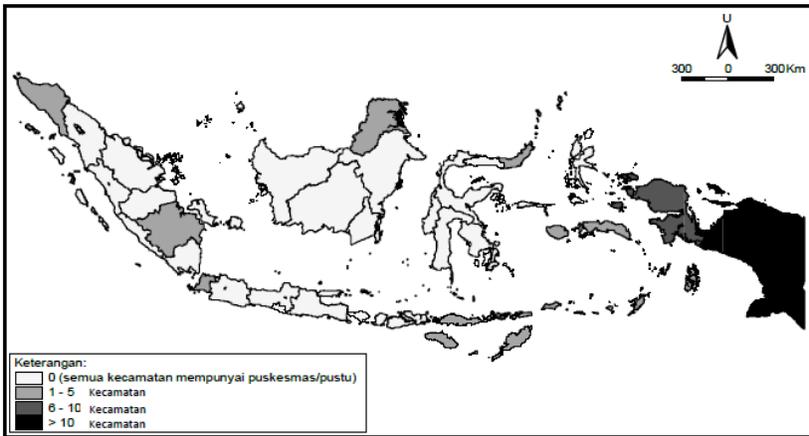


Sumber: dikutip dari Gambar 5.1 di BPS (2015; halaman 9)

Gambar 2.6
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014

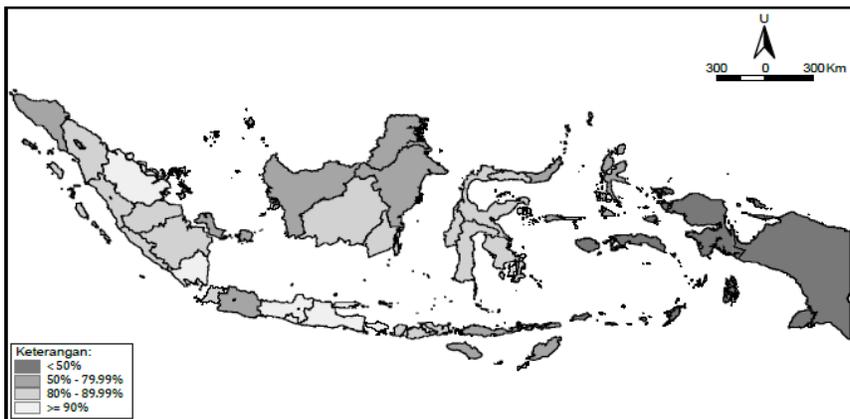
BPS dalam laporannya mengenai potensi desa tahun 2014 (BPS, 2015a) menunjukkan bahwa terdapat 10.985 desa/kelurahan (atau sekitar 13,37 persen dari jumlah desa atau kelurahan di Indonesia yang tidak ada sekolah dasar (SD) (termasuk Madrasah Ibtidaiyah/MI); 275 kecamatan (3,89%) tidak ada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP); 816 kecamatan (11,54%) tidak ada sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA); 117

kecamatan (1,65%) tidak memiliki Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di 9 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua (Gambar 7); 1.495 kecamatan (21,13%) tidak ada pasar dengan bangunan (Gambar 8); 12.659 desa/kelurahan (15,40%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN; 31.387 desa/kelurahan (38,19%) tidak ada penerangan di jalan utama desa; dan sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73%) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.



Sumber: dikutip dari Gambar 2.2 di BPS (2015; halaman 3).

Gambar 2.7
Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014



Sumber: dikutip dari Gambar 2.3 di BPS (2015; halaman 4).

Gambar 2.8
Persentase Kecamatan yang Ada Pasar/dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

F. Indeks Pembangunan Desa: Kasus Provinsi Bali

Provinsi Bali termasuk di dalam kelompok provinsi di Indonesia yang tingkat pembangunannya ekonominya cukup baik, terutama karena sektor pariwisatanya yang berkembang pesat. Namun demikian, ini bukan berarti semua desa atau kecamatan atau kabupaten di Bali memiliki kinerja atau tingkat pembangunan yang sama. Di setiap provinsi, termasuk di provinsi-provinsi yang paling maju seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, selalu ada desa-desa tertinggal. Untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan desa-desa di Indonesia, BPS mengembangkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 dimensi yaitu: (i) pelayanan dasar, (ii) kondisi infrastruktur, (iii) aksesibilitas/transportasi, (iv) pelayanan publik, dan (v) penyelenggaraan pemerintahan. Nilai IPD diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun IPD. Nilai IPD setiap desa kisaran antara 0 dan 100. Nilai indeks 100 merefleksikan kondisi desa sangat maju, sebaliknya angka indeks 0 mencerminkan desa yang sangat tertinggal. Secara teoritis, BPS mengklasifikasi desa menjadi 3 kategori yaitu: desa tertinggal apabila nilai IPD ≤ 50 ; desa berkembang jika nilai IPD di atas 50 hingga 75, dan desa mandiri jika nilai IPD di atas 75.

Pada tahun 2016 BPS provinsi Bali menerbitkan hasil penilaian IPD tahun 2014 di semua desa di provinsi tersebut. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 2.7, ada enam (6) desa di Provinsi Bali yang masuk kategori desa tertinggal, atau hampir 1 persen dari jumlah desa di provinsi itu. Dari enam desa tersebut, lima (5) di antaranya adalah di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yaitu Mengani, Abuan, Ulian, Biyan, dan Langgahan, dan satu desa berada di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yaitu Sepang Kelod. Adapun jumlah desa yang masuk kategori desa berkembang di provinsi itu adalah 530 atau sekitar 83,3 persen dari total, dan yang masuk kategori desa mandiri sebanyak 100 desa atau 15,7 persen dari total.

Tabel 2.7
Jumlah Desa di Provinsi Bali
Menurut Tingkat Pembangunan, 2014

Jumlah desa	Bali		Indonesia	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tertinggal	6	0,94	20.175	27,2
Berkembang	530	83,3	51.014	68,9
Mandiri	100	15,7	2.904	3,9
Total	636	100,0	74.093	100,0

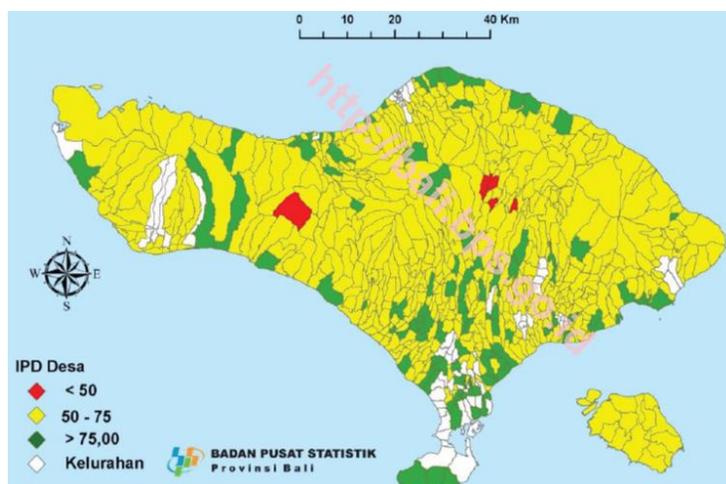
Sumber: BPS (2016).

Adapun Tabel 2.8 menyajikan persentase desa menurut tingkat pembangunan dan kabupaten/kota. Seperti yang dapat dilihat, ada dua kabupaten dengan desa tertinggal yakni Kabupaten Bangli dengan persentase tertinggi dan Kabupaten Buleleng. Adapun untuk kategori desa berkembang, kabupaten dengan skor tertinggi adalah Kabupaten Bangli, dan untuk kategori desa mandiri kabupaten terbaik adalah Kabupaten Denpasar yakni sekitar 52,26 persen dari jumlah desanya (lihat juga Gambar 9 mengenai sebaran desa menurut ketiga kategori tersebut).

Tabel 2.8
Persentase Desa Menurut Tingkat Pembangunan
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/kota	Desa tertinggal	Desa berkembang	Desa mandiri	Jumlah desa
Jembrana	0	90,24	9,76	41
Tabanan	0	87,22	12,78	133
Badung	0	63,04	36,96	46
Gianjar	0	76,56	23,44	64
Klungkung	0	88,68	11,32	53
Bangli	7,35	91,18	1,47	68
Karangasem	0	90,67	9,33	75
Buleleng	0,78	86,05	13,18	129
Denpasar	0	40,74	59,26	27
Bali	0,94	83,33	15,72	636

Sumber: BPS (2016).



Sumber: dikutip dari gambar peta di BPS (2016; halaman 15).

Gambar 2.9
Peta Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Bali, 2014

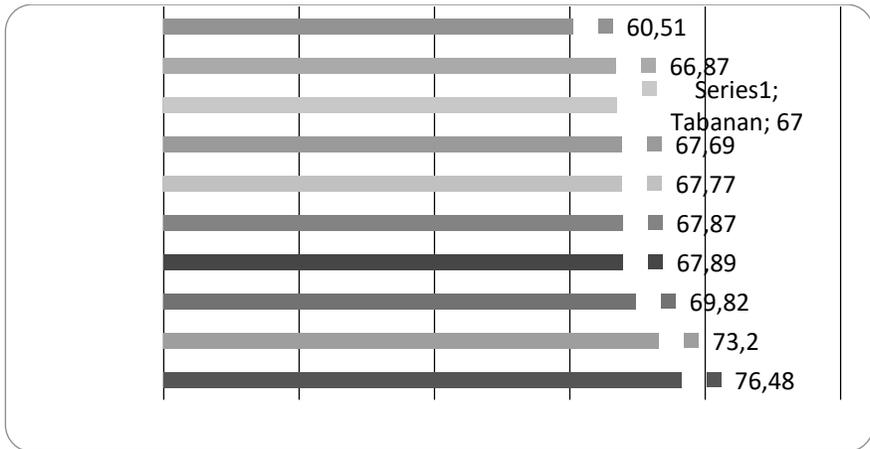
Berikut, Tabel 2.9 memperlihatkan nilai IPD dari kelima dimensi tersebut menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara keseluruhan, nilai IPD untuk dimensi aksesibilitas/transportasi adalah 79,92; dimensi penyelenggaraan pemerintahan 72,02; dimensi pelayanan dasar 71,83; dimensi pelayanan umum 56,46; dan dimensi kondisi infrastruktur 55,78. Yang menarik dari tabel ini adalah bahwa Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali tidak unggul untuk semua kelima dimensi tersebut. Hanya untuk pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan pelayanan umum, Denpasar memiliki nilai IPD tertinggi, bahkan juga tertinggi dibandingkan nilai IPD Bali. Adapun untuk dua dimensi lainnya, yakni aksesibilitas/transportasi dan penyelenggaraan pemerintahan, yang unggul adalah, masing-masing, Provinsi Karangasem dan Provinsi Badung.

Tabel 2.9
Nilai IPD Menurut Dimensi dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali, 2014

Kabupaten/ kota	Dimensi				
	Pelayanan dasar	Kondisi infrastruktur	Aksesibilitas/ transportasi	Pelayanan umum	Penyeleng- garaan pemerintahan
Jembrana	71,67	54,44	78,90	54,17	71,55
Tabanan	70,84	53,67	81,12	53,08	73,91
Badung	75,92	66,43	78,97	63,96	79,19
Gianjar	75,61	64,70	70,46	60,79	72,21
Klungkung	72,55	52,27	83,26	53,50	73,90
Bangli	66,18	42,69	72,11	52,34	71,31
Karangasem	71,58	52,32	88,64	53,49	68,31
Buleleng	70,45	55,56	83,13	58,49	69,21
Denpasar	81,02	79,49	73,20	66,04	72,51
Bali	71,83	55,78	79,92	56,46	72,02

Sumber: BPS (2016).

Sementara, nilai IPD untuk Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dapat dilihat di Gambar 2.9. Ada empat (4) kabupaten dengan nilai IPD lebih rendah apabila dibanding dengan nilai IPD Provinsi Bali (67,77), yaitu Kabupaten Klungkung (67,69), Kabupaten Tabanan (67,00), Kabupaten Jembrana (66,87), dan Kabupaten Bangli (60,51). Secara teori, perbedaan nilai IPD ini menurut kabupaten/kota memberi kesan bahwa sumber pengembangan ekonomi kreatif di Kota Denpasar lebih besar daripada di kabupaten/kota lainnya itu. Tentu, pendugaan ini hanya didasarkan pada lima dimensi yang diukur dengan IPD. Adapun masih banyak faktor lain yang juga sangat berpengaruh pada pembangunan sebuah industri atau ekonomi di suatu wilayah, di antaranya spirit kewirausahaan dan etos kerja masyarakat di desa itu.



Sumber: BPS (2016).

Gambar 2.10
Nilai Indeks Pembangunan Desa Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2014

REFERENSI

- BPS (2016), *Peta Tematik Indeks Pembangunan Desa Provinsi Bali 2014*, Januari, Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- BPS (2017a), *Analisa Ketenagakerjaan Usaha Mikro Kecil*, Sensus Ekonomi 2016. Analisa Hasil Listing, November, Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional.
- BPS (2017b), "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016", Berita Resmi Statistik, No.37/04/Th.XX,17 April, Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional.
- BPS (2018), "Indeks Pembangunan Manusia 2017", Berita Resmi Statistik, No.33/04/Th.XXI, 16 April, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hidayat, Andy Riza (2014), "Berjaya dalam Keterbatasan", Kompas, Metropolitan, Senin, 2 Juni, halaman 27.
- Irandoust, Said (2014), "Reformasi Pendidikan Tinggi dan Universitas Kreatif", Kompas, Opini, Rabu, 7 Mei, halaman 7.
- Rajab, Budi (2015), "Persyaratan bagi Dinamika Ekonomi Kreatif", Kompas, Opini, Senin, 29 Juni, halaman 7.
- Samosir, Omas Bulan (2015), "Bonus Demografi dan Ekonomi Kreatif", Kompas, Opini, Sabtu, 28 Februari, halaman 6.
- Setiawan, Aris (2015), "Tantangan Badan Ekonomi Kreatif", Kompas, Opini, Kamis, 3 Maret, halaman 7.
- Tambunan, Tulus T.H. (2017), *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

BAB III

SMART ECONOMY

UNTUK PENGUATAN EKONOMI LOKAL KOTA SURAKARTA

**M. Yusuf Indra Purnama
Suryanto**

A. Pendahuluan

Salah satu isu yang menjadi prioritas dalam dokumen RPJP di Kota Surakarta saat ini dan pada masa yang akan datang adalah pengembangan *Smart Economy*. Isu ini menjadi prioritas pertama di samping pengembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor unggulan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan pangan dan gizi, dan penguatan budaya cinta produk dalam negeri.

Pengembangan *Smart Economy* adalah wujud dari tuntutan perubahan zaman sekarang. Zaman di mana kegiatan ekonomi yang dapat memenangkan persaingan adalah ekonomi yang bercirikan empat indikator seperti *simpler* (lebih mudah), *cheaper* (lebih murah), *accessible* (lebih terjangkau), dan *faster* (lebih cepat). Empat indikator tersebut dapat dicapai dengan penguasaan terhadap teknologi informasi dan juga teknologi internet. Seperti yang dikemukakan oleh Klaus A. Schwab, pendiri *World Economic Forum*, menyatakan bahwa dunia kini berada dalam tahapan awal Revolusi Industri (RI) keempat atau 4.0. Revolusi pertama menggunakan air dan mesin uap, revolusi kedua menggunakan listrik untuk produksi massal, ketiga menggunakan elektronik dan teknologi informasi, dan pada era saat ini mengandalkan teknologi internet dan digitalisasi di semua lini.

Smart economy adalah salah satu komponen dari *smart city*. Konsep *smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, 2010:3). Komponen smart city antara lain meliputi: *Smart Environment*, *Smart Economy*, *Smart government*, *Smart Living*, *Smart People*, dan *Smart Mobility*.

Smart economy atau ekonomi pintar (inovasi dan persaingan) ditandai dengan semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Perwujudan dari *smart economy* adalah apabila Kota Surakarta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan kegiatan ekonominya. Berdasarkan Griffinger dkk (2007:10-14) ada tujuh indikator untuk mencapai *smart economy*. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang dapat diberikan untuk mendukung Kota Surakarta mencapai *Smart Economy* adalah semangat berinovasi dan berkreasi, kewirausahaan, citra dan siri khas kota, produktivitas, pasar tenaga kerja yang fleksibel, konektivitas dengan dunia internasional. serta kemampuan untuk bertransormasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta lima tahun terakhir mengandalkan pada kegiatan ekonomi andalan yaitu kategori konstruksi, jasa, serta perdagangan besar dan eceran. Kegiatan-kegiatan lain seperti pariwisata yang diharapkan dapat berperan sebagai andalan baru, sumbangannya pada kisaran 5 persen pada tahun 2017. Kajian mengenai pengembangan *smart economy* Kota Surakarta menjadi penting untuk dapat memetakan tantangan ekonomi Kota Surakarta pada masa yang datang.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Sekor Ekonomi di Kota Surakarta Tahun 2009-2016 (%)

Kategori	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata2
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.25	2.35	8.24	2.40	5.03	1.87	1.80	0.79	3.46
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.02	-0.13	-5.31	-0.42	-0.41	-2.29	-2.62	-0.44	-1.46
C	Industri Pengolahan	4.21	4.38	6.76	7.35	9.02	6.85	3.66	3.71	5.74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.81	4.21	8.17	12.5 5	7.90	2.71	-3.79	6.65	5.65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.31	6.54	2.36	-2.54	-1.67	2.55	1.77	2.40	1.72
F	Konstruksi	8.52	6.72	1.91	5.45	3.92	3.65	5.36	6.43	5.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.16	6.06	10.4 5	2.06	7.44	4.32	4.17	4.55	4.90
II	Transportasi dan Pergudangan	5.66	4.89	4.54	6.44	10.3 2	7.95	8.08	5.28	6.65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.07	5.49	8.16	7.82	5.73	6.95	6.18	5.09	6.31
J	Informasi dan Komunikasi	5.37	6.09	8.50	11.8 1	8.27	8.94	6.67	6.08	7.72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.63	7.15	4.50	2.98	3.49	4.08	6.69	8.32	4.85
L	Real Estate	5.42	5.80	7.09	7.07	5.20	6.41	7.22	6.40	6.33
M,N	Jasa Perusahaan	8.43	8.00	11.1 9	7.18	9.36	6.86	9.28	8.34	8.58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.67	6.03	2.81	1.66	3.88	1.23	6.46	2.34	3.76
P	Jasa Pendidikan	6.13	7.20	13.0 6	10.5 6	7.95	7.98	6.85	3.76	7.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.58	4.67	12.0 5	7.49	8.16	12.5 9	6.26	7.02	7.98
R,S,T,U	Jasa lainnya	9.29	6.61	3.27	4.35	6.03	4.25	3.09	5.63	5.31
Laju Pertumbuhan PDRB		4.79	6.11	6.42	5.58	6.25	5.28	5.44	5.32	

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Sementara itu, dalam beberapa tahun pengamatan, sektor konstruksi merupakan sektor yang menjadi andalan yang terbesar di Kota Surakarta. Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil sumbangannya terhadap total PDRB Kota Surakarta nomor dua paling tinggi dibanding dengan sektor lainnya.

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Kota Surakarta di Kota Surakarta
Tahun 2009-2016 (%)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian	0.50	0.51	0.49	0.49	0.47	0.46	0.44
B	Pertambangan	0.0028	0.0025	0.0023	0.0022	0.0020	0.0019	0.0018
C	Industri Pengolahan	7.62	7.64	7.77	7.97	8.09	7.96	7.88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.21	0.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17
F	Konstruksi	28.23	27.03	27.00	26.40	25.99	25.97	26.39
G	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil	23.82	24.72	23.89	24.16	23.94	23.65	23.61
H	Transportasi dan Pergudangan	2.64	2.59	2.61	2.71	2.78	2.85	2.87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.87	4.95	5.05	5.03	5.11	5.14	5.16
J	Informasi dan Komunikasi	11.36	11.58	12.27	12.50	12.93	13.08	13.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.65	3.58	3.49	3.40	3.36	3.40	3.52
L	Real Estate	4.23	4.25	4.31	4.27	4.32	4.39	4.46
M,N	Jasa Perusahaan	0.64	0.66	0.67	0.69	0.70	0.73	0.75
O	Administrasi Pemerintahan	6.46	6.24	6.01	5.88	5.65	5.71	5.58
P	Jasa Pendidikan	3.66	3.89	4.07	4.14	4.24	4.30	4.26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	0.90	0.91	0.93	1.00	1.00	1.03
R,S,T	Jasa Lainnya	1.04	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.97

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

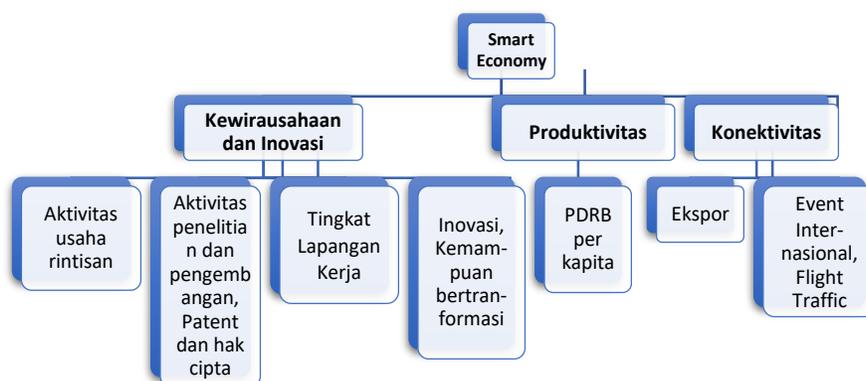
1. Konsep *Smart Economy*

Metode pertama yang dilakukan dalam kajian ini adalah melalui studi literatur untuk mengetahui indikator-indikator yang terkait dengan kesiapan Kota Surakarta dalam menerapkan *Smart Economy*. Melalui metode ini akan coba diurai perkembangan terkini terkait implementasi *Smart Economy* di berbagai daerah yang dapat memberikan gambaran indikator-indikator dalam mendefinisikan *Smart Economy* dalam berbagai tahapan. Setelah indikator dan tolak ukur terkait dengan *Smart Economy* terbentuk maka akan dilakukan pengukuran dan pemetaan terkait kondisi yang ada di Kota Surakarta melalui analisis deskriptif, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyebaran kuesioner.

Beberapa literatur dan *best practice* yang diterapkan di beberapa daerah menyatakan bahwa *Smart Economy* merupakan bagian terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *Smart City* di mana di dalamnya

terdapat *Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living* (lihat Griffinger et al, 2007)

Mavrič (2015) menyusun indikator *Smart Economy* menjadi empat aspek, yaitu spirit inovasi, kewirausahaan, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan konektivitas internasional. Sementara itu Cohen (2014) secara spesifik menyusun beberapa indikator *Smart Economy* berupa aspek kewirausahaan dan inovasi, produktivitas (PDRB), dan konektivitas lokal-global (ekspor, penyelenggaraan event internasional).



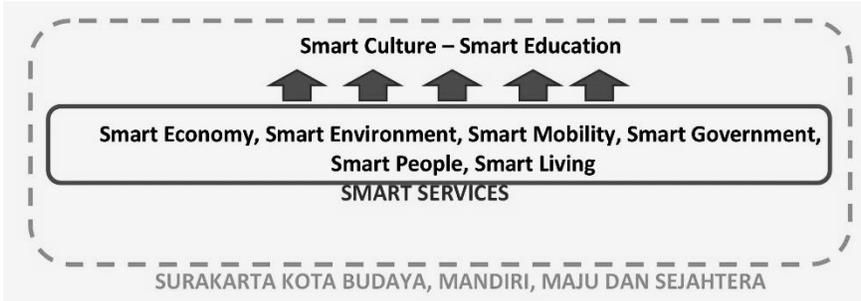
Gambar 3.1
Ringkasan Indikator *Smart Economy* Terpilih

2. *Smart Economy* dan RPJMD Kota Surakarta

Berdasarkan dokumen RPJMD 2016-2021, Kota Surakarta memiliki visi “Terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera”. Strategi dan arah kebijakan Kota Surakarta yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dituangkan dalam strategi Misi Waras (mewujudkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani maupun secara sosial dalam lingkungan hidup yang sehat), Misi Wasis (mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah), Misi Wareg (mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani), Misi Papan (pemenuhan kebutuhan pemukiman dan infrastruktur), Misi Mapan (mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif, dan melayani).

Mengingat *Smart Economy* merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka *smart city* maka melalui gambar 3.3 dapat diringkaskan keterkaitan

antara konsep *smart city* Kota Surakarta yang berbasis pada landasan hukum dokumen perencanaan daerah dengan *Smart Culture* dan *Smart Education* sebagai pilar refleksi visi kota budaya yang mandiri maju dan sejahtera dengan *Smart Services* sebagai pendukung dan pendorong.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penulis

Gambar 3.2
Konsep *Smart City* Kota Surakarta

3. *Smart Economy* untuk Penguatan Ekonomi Lokal

Dalam rangka penguatan ekonomi lokal terkait dengan konsep *Smart Economy* di Kota Surakarta maka diperlukan tahapan pelaksanaan prioritas program guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan berbasis indikator *Smart Economy* terpilih, penelitian ini menggunakan metode *Analysis Hierarchy Project* (AHP) dengan narasumber beberapa pihak yang dianggap kompeten dalam merumuskan skala prioritas (lihat lampiran untuk profil narasumber).

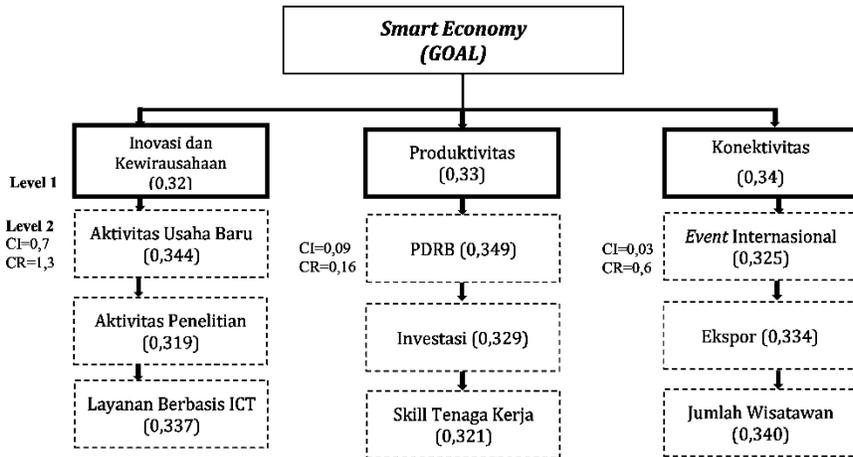
Dari hasil pengolahan hasil kuesioner AHP didapatkan rekomendasi prioritas penguatan ekonomi berbasis indikator *Smart Economy* seperti yang tertera dalam tabel 3.2. Pada kategori level 1 nampak bahwa program-program yang terkait dengan peningkatan konektivitas domestik dan internasional perlu menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan (priority vector=0.34) Sementara itu program-program terkait peningkatan produktivitas dan inovasi daerah menjadi program prioritas berikutnya. Nilai *Consistency Ratio* di bawah 10 % menunjukkan hasil yang didapat masih dapat diterima meskipun *Consistency Index* (CI) yang cukup rendah.

Tabel 3.2 Matrik Berpasangan Level 1

	Inovasi	Produktivitas	Konektivitas	Eigen Value	Priority Vector
Inovasi	1.00	0.97	1.06	0.34	0.32
Produktifitas	0.97	1.00	1.14	0.37	0.33
Konektivitas	1.06	1.14	1.00	0.40	0.34
Jumlah	3.03	3.11	3.20	1.12	1.00

CI= 0.004; RI (3)=0.58; CR=0.7%

Sementara itu, jika melihat lebih dalam pada hasil pembobotan kriteria alternatif dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini. Peningkatan jumlah wisatawan menjadi prioritas yang mendapat skor pembobotan alternatif tertinggi dibandingkan kriteria alternatif yang lain. Sementara itu, terkait aspek Produktifitas, peningkatan PDRB menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kriteria alternative lainnya. Sementara itu pada aspek Inovasi dan Kewirausahaan, peningkatan aktivitas usaha baru menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kriteria alternatif yang lain.



Gambar 3.3
Hierarki Kategori dan Alternatif *Smart Economy* Kota Surakarta

Guna mempertajam prioritas program dalam rangka penguatan ekonomi lokal di Kota Surakarta, penelitian ini juga menggunakan metode analisis SWOT yang didapat dengan *Focus Group Discussion* dan studi literature terkait yang diringkaskan ke dalam gambar matriks SWOT 3.4 di bawah ini.

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p><u>Kekuatan (Strenghts)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Image</i> yang kuat sebagai kota budaya - Lokasi yang strategis sebagai jalur perdagangan - UKM yang mendominasi jenis usaha di masyarakat - Pasar Tradisional sebagai sentra aktivitas perdagangan 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan pendapatan yang masih tinggi - Layanan publik yang belum terintegratif - Ketergantungan akan pasokan pangan dari daerah lain - Rendahnya inovasi daerah
<p><u>Peluang (Opportunities)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan era Industri 4.0 - Pengembangan infrastruktur Hub transportasi Jawa Tengah - Pergeseran perekonomian berbasis komoditas menuju jasa 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Re-branding</i> kota dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (media sosial, internet) - Peningkatan pelayanan transportasi publik dengan system elektronik (<i>e-ticketing, digital payment</i>) - Peningkatan akses pasar UKM dengan peningkatan <i>skill</i> dan keahlian di bidang ICT (<i>e-commerce, e-marketing</i>) 	<p>Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan publik yang terintegratif melalui optimalisasi ICT - Pengembangan database kemiskinan dan monitoring berbasis ICT - Pengembangan sistem manajemen dan kontrol stok pangan yang terintegratif

<u>Ancaman (Threats)</u>	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> - Pasar modern yang berkembang pesat - Perubahan gaya hidup masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan regulasi terkait penataan pasar modern - Peningkatan pelayanan pasar tradisional (kebersihan, parkir, kenyamanan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses masyarakat menengah ke bawah pada pasar melalui optimalisasi ICT (market place) - Penguatan strategi pendidikan berbasis budaya lokal

Gambar 3.4
Matriks dan Strategi Eksternal-Internal (SWOT Analysis)

4. Penutup

Dalam rangka penguatan ekonomi lokal di Kota Surakarta berbasis *Smart Economy* yang memiliki dominasi sektor perdagangan dan jasa dalam struktur perekonomiannya serta kekuatan *image* sebagai kota budaya, lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan, dan Usaha Kecil dan Menengah yang mendominasi skala usaha yang ada di masyarakat, maka diperlukan prioritas pengembangan yang terarah dan konsisten.

Potensi sebagai kota Budaya dan dominasi sektor perdagangan dan jasa akan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi lokal jika konektivitas domestik dan internasional dapat diprioritaskan untuk dibangun. Ekskalasi tingkat kunjungan domestik dan internasional tentunya akan membawa *multiplier effect* yang potensial bagi Kota Surakarta. Upaya mereduksi kesenjangan pendapatan juga akan terfasilitasi jika UKM dan pasar tradisional mendapat tempat utama sebagai mata rantai perdagangan dan jasa.

Pelayanan publik yang terintegratif termasuk di dalamnya terkait dengan layanan adminisitratif dan transportasi publik tentunya akan membawa sinergi positif dalam mengembangkan aspek konektivitas domestik dan internasional. Pendidikan masyarakat berbasis budaya lokal juga patut untuk menjadi perhatian guna mengantisipasi perubahan gaya hidup yang dapat mereduksi kekuatan Kota Surakarta menuju visi sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera.

REFERENSI

- Cohen, B, 2014. *The smartest cities in the world 2015*.
<https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>.
- Griffinger, R., et al, 2007. *Smart cities Ranking of European medium-sized cities*. Final report October ^[1]_[SEP]
- Mavrič , Jasmina, Bobek, Vito, 2015. *Measuring Urban Development and City Performance*. Business, Management, and Economics DOI: 10.5772/61063
- Saaty, L. Thomas, Vargas, L.G., 2012. *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process*, Springer New York Heidelberg Dordrecht London

LAMPIRAN

KUESIONER AHP

Petunjuk pengisian kuesioner

Anda diminta memberikan penilaian tingkat preferensi (mana yang lebih diutamakan) antara setiap pasangan kriteria dan alternatif pilihan yang diberikan. Skala penilaian preferensi yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 9 dengan arti sebagai berikut:

Skala Penilaian	Arti
1	Sama-sama diutamakan
2	Antara sama-sama diutamakan dan lebih diutamakan
3	Lebih diutamakan
4	Antara lebih diutamakan dengan diutamakan
5	Diutamakan
6	Antara diutamakan dengan sangat diutamakan
7	Sangat diutamakan
8	Antara sangat diutamakan dengan sangat diutamakan sekali
9	Sangat diutamakan sekali

Berikan tanda “V” pada kolom yang disediakan untuk menunjukkan tingkat preferensi antar setiap pasangan kriteria dan alternatif pilihan yang diberikan.

Identitas Narasumber:

Instansi :

Jabatan :

A. Tingkat preferensi antar kriteria Inovasi dan kewirausahaan, produktivitas, atau konektivitas

1. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan perekonomian Kota Surakarta antara peningkatan **inovasi dan kewirausahaan** (jumlah usaha baru, penelitian, layanan masyarakat berbasis Teknologi informasi) atau **produktivitas** (PDRB, pendidikan/ skill tenaga kerja)

Inovasi dan kewirausahaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan perekonomian Kota Surakarta antara peningkatan **inovasi dan kewirausahaan** (jumlah usaha baru, penelitian, layanan masyarakat berbasis Teknologi informasi) atau **konektivitas** (event internasional/nasional, jumlah wisatawan LN/domestik, ekspor/impor)

Inovasi dan kewirausahaan Konektivitas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

3. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan perekonomian Kota Surakarta antara peningkatan **produktivitas** (PDRB, skill tenaga kerja, investasi) atau **konektivitas** (event internasional/nasional, jumlah wisatawan LN/domestik, ekspor/impor).

Produktivitas Konektivitas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. Tingkat preferensi alternatif terhadap setiap upaya peningkatan inovasi dan kewirausahaan

1. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan di Kota Surakarta antara peningkatan **jumlah usaha baru** di masyarakat atau peningkatan jumlah dan kualitas **penelitian**

Jumlah usaha baru Penelitian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan di Kota Surakarta antara peningkatan **jumlah usaha baru** di masyarakat atau peningkatan **layanan berbasis I**

Jumlah usaha baru Layanan Berbasis IT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

3. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan di Kota Surakarta antara peningkatan **jumlah usaha baru** di masyarakat atau peningkatan kegiatan **penelitian**

Penelitian Layanan Berbasis IT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

C. Tingkat preferensi alternatif terhadap setiap upaya peningkatan produktivitas

1. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Kota Surakarta antara peningkatan **PDRB** atau peningkatan **Investasi**

PDRB Investasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan di Kota Surakarta antara peningkatan **PDRB** atau peningkatan **skill tenaga kerja**

PDRB Skill Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

3. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan di Kota Surakarta antara peningkatan **Investasi** atau peningkatan **Skill Tenaga Kerja**

Investasi Skill Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

D. Tingkat preferensi alternatif terhadap setiap upaya peningkatan konektivitas

1. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan konektivitas di Kota Surakarta antara peningkatan **event internasional** atau peningkatan kegiatan **ekspor**

Event Internasional Ekspor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan konektivitas di Kota Surakarta antara peningkatan **event internasional** atau peningkatan **jumlah wisatawan**

Event Internasional Jumlah wisatawan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	

3. Manakah yang lebih diutamakan dalam meningkatkan inovasi dan kewirausahaan di Kota Surakarta antara peningkatan **jumlah wisatawan** atau peningkatan kegiatan **ekspor**

Jumlah Wisatawan Ekspor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Identifikasi Aspek Internal–Eksternal:

Menurut bapak/ibu, faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi **kekuatan** dari Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya yang dapat menjadi kontributor positif pengembangan *Smart Economy*?

Menurut bapak/ibu, faktor-faktor apa saja yang menjadi **kelemahan** dari Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya yang dapat menjadi penghambat pengembangan *Smart Economy*?

Menurut bapak/ibu, faktor-faktor apa saja yang dapat berpotensi menjadi **ancaman** dari Kota Surakarta yang dapat menjadi penghambat pembangunan dan pengembangan *Smart Economy*?

Menurut bapak/ibu, faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi **peluang** dari Kota Surakarta yang dapat menjadi ruang percepatan pengembangan *Smart Economy*?

Identitas Responden

Responden	Instansi	Jabatan
1	BAPPPEDA	Staf Litbang
2	Kominfo	Kepala Bidang
3	Dinas Perdagangan	Kepala Sub Bagian PEP
4	BPS	Kepala Seksi
5	Dinas Perdagangan	Kabid Peningkatan produktivitas sertifikasi dan inovasi industri

BAB IV

SENI REYOG PONOROGO

DALAM PERSPEKTIF STRATEGI

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

INDUSTRI KREATIF

Rochmat Aldy Purnomo
Suryanto

A. Pendahuluan

Munculnya apresiasi terhadap seni Reyog Ponorogo dari berbagai kalangan sungguh di luar dugaan. Kecepatannya jauh melebihi perkembangan seni Reyog itu sendiri. Hingga awal tahun 90-an, masyarakat hanya mengenal seni Reyog Ponorogo versi obyog atau obyogan. Seni Reyog yang terkenal populis dan bernuansa kerakyatan yang menonjolkan sisi hiburan. Pentas atau pertunjukan Reyog di manapun dan untuk keperluan apapun, hingga saat itu, memiliki karakteristik yang sama, baik dari sisi instrumen, ragam tari, maupun bentuk pertunjukannya.

Fenomena baru tentang perkembangan Reyog Ponorogo muncul bersamaan dengan dilaksanakannya pertemuan yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Ponorogo dengan melibatkan pihak-pihak terkait, yakni; seniman Reyog, pemerhati Reyog, termasuk para akademisi pada tanggal 24 Nopember 1992 bertempat di gedung Korpri Kabupaten Ponorogo. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah rumusan tentang aturan dasar tari Reyog Ponorogo dalam bentuk buku berjudul “Pedoman dasar Kesenian Reyog Ponorogo dalam Pentas Budaya Bangsa.” Buku ini berisi tentang pembakuan tari Reyog Ponorogo dan dikenal dengan sebutan “Buku Kuning” disebabkan karena warna sampulnya adalah kuning. Secara substantif buku ini mensyaratkan agar seni reyog Ponorogo memiliki standar baku, yakni; setiap unit harus memiliki pelaku minimal

40 orang; gamelan harus lengkap; memiliki narasi atau alur cerita yang jelas berbasis kisah lamaran Prabu Kelanasewandana kepada Dewi Sanggalangit. Sejak saat inilah, versi Reyog Garapan / Panggung/Vestival lahir atau muncul.

Jika selama ini, seni Reyog Ponorogo terkesan monoton dan lebih menonjolkan hiburan, maka dengan munculnya varian seni Reyog Garapan ini seni Reyog menjadi sangat kaya dari berbagai aspek; seni, hiburan, maupun aspek yang lain. Kehadirannya di panggung festival melalui event spektakuler Festival Reyog Ponorogo Nasional atau Festival Nasional Reyog Ponorogo (diubah oleh Bupati Ipong Muchlissoni tahun 2016) membuat seni Reyog ini semakin terkenal hingga ke dunia internasional. Keterlibatan masing-masing unit Reyog dari berbagai Kabupaten dan Propinsi di luar Ponorogo telah sangat mendukung dikenal dan dipahaminya seni adiluhung ini, sehingga mengantarkan seni Reyog menjadi seni yang dimiliki oleh masyarakat secara nasional.

Selanjutnya dalam waktu yang tidak lama berselang, seni Reyog Ponorogo dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Seni Reyog menjadi bernuansa akademis dan elegan. Bahkan ketika seni Reyog masuk dunia kampus melalui kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, seni Reyog ini seolah menemui keluarga baru, yakni masyarakat intelektual berbasis nilai-nilai islami. Demikian halnya ketika seni Reyog Ponorogo mendapatkan apresiasi dari sejumlah pesantren di lingkungan Kabupaten Ponorogo, seni Reyog ini menjadi tidak lagi “minir” karena persepsi dan penilaian “sepihak” terkait dengan lekatnya seni ini dengan sejumlah “penyimpangan” dari perspektif pesantren, yakni di antaranya; akrobnya kesenian ini dengan ritual mistik yang mengarah pada perbuatan “pagan” atau syirk (menyekutukan Tuhan); tarian jatil yang mengarah pada erotisme, perilaku sombong atau marok dan sebagainya. Beberapa pesantren tidak sekedar menerima seni reyog Ponorogo, tetapi bahkan mendirikan unit atau grup di pesantren masing-masing, yakni; Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Pondok Modern Ar Risalah Selahung Ponorogo, Pondok Pesantren.

B. Identitas Diri sebagai Komoditas

Dengan semakin baiknya prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan di negara-negara ASEAN, taraf hidup manusia juga semakin meningkat yang mengakibatkan sudut pandang manusia terhadap sesuatu juga semakin berkembang. Globalisasi dan internasionalisasi sudah menciptakan suatu “strata” di mana tidak relevan lagi jika ada pembeda antara negara maju maupun negara berkembang.

Saat ini, setiap negara berlomba untuk mendagangkan “identitas diri” kepada negara lain dengan harapan akan semakin banyak pemasukan dari penjualan “identitas diri” itu. Sebagai contoh saat ini di Indonesia sudah digalakan program kreatif seperti desa wisata, hal ini diharapkan bahwa dengan semakin banyak para wisatawan baik pribumi maupun non-pribumi yang berkunjung ke desa wisata, maka akan menambah pundi-pundi pendapatan secara lingkup mikro (pendapatan masyarakat setempat) maupun kontribusi secara makro (PDRB).

Dalam konteks perdagangan bilateral maupun multilateral, semakin lama masyarakat menyukai barang atau jasa yang tidak hanya mampu memberikan kepuasan secara fungsional saja, namun juga bisa memberikan dirinya suatu identitas serta membuat dirinya bisa diterima dan dihargai oleh masyarakat disekitarnya. Industri fesyen, industri informasi dan komunikasi bisa menjadi contoh yang menarik untuk menggambarkan kondisi ini.

Pada industri Reyog Ponorogo, hasil barang turunan seperti pakaian, celana, sepatu, sandal yang memikat, dapat bersifat fungsional, dan tidak monoton terhadap suatu gaya. Maka masyarakat dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Di sinilah sisi kreatif berperan, karena industri fesyen harus bisa menyerap fenomena-fenomena sosial di masyarakat dan menuangkannya ke konsep produk yang akan dilepas ke pasar.

Menjadi manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi merupakan suatu bentuk kesuksesan, untuk dapat memperbaiki pola hidup sendiri dan orang lain. Dalam proporsi yang pas, masyarakat yang kurang mengecap pendidikan tinggi pun memiliki motivasi sosial, motivasi aktualisasi diri dan motivasi percaya diri yang sama untuk bisa menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa semakin lama, faktor selera semakin mendominasi perilaku manusia dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Permintaan konsumen dapat mengubah pendekatan industri. Saat ini model pendekatan industri ialah berorientasi konsumen (*demand driven*).

Pada model ini, produk yang dibuat tidak terlalu banyak namun memiliki variasi-variasi yang beragam dengan waktu tertentu. Waktu tertentu di sini ialah jarak *launching* produk satu dengan produk baru lainnya yang tergantung dari kebijakan perusahaan. Namun dengan waktu yang pas, maka masyarakat dapat menerima pembaruan produk tersebut. Sebagai contoh pada industri Reyog Ponorogo, pengembangan variasi jenis seni Reyog Ponorogo yang terjadi saat ini sangat beragam dengan waktu yang tergolong cepat apabila dibandingkan dengan pengembangan awal tahun 1990-an. Yang tidak disadari oleh banyak orang dari fenomena ini adalah karena adanya faktor emosional dan selera dari masyarakat itu sendiri.

C. Bagaimana Memberdayakan Seni Tradisi untuk Penguatan Ekonomi Lokal

Terdapat kondisi bahwa keberadaan seni tradisi dan kearifan lokal kurang diperhatikan dalam usaha peningkatan ekonomi lokal dan mulai terancam oleh nilai-nilai luar. Nilai-nilai luar tersebut sebagian besar tidak bisa diadopsi oleh masyarakat asli dikarenakan keterbatasan yang ada pada mereka. Padahal kehidupan sosial ekonomi masyarakat asli tidak bisa dipisahkan dengan seni tradisi dan kearifan lokal.

Di sisi lain, kondisi ekonomi lokal saat ini dipengaruhi juga oleh iklim globalisasi. Salah satu program dari globalisasi adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia yang dikapitalisasi. Konsepnya yaitu seseorang yang memiliki ide dan gagasan, dapat memproteksi atau melindungi idenya itu dan tidak memperbolehkan orang lain untuk menggunakannya tanpa seijin dari penemu atau penciptanya. Ide bisa didaftarkan sebagai hak cipta, hak merk, hak paten atau hak desain. Apabila kita cermati, kondisi ini membuat orang lain tidak bisa semaunya sendiri membajak dan mengeksploitasi produk, merk, desain ataupun paten seseorang secara bebas. Inovasi berlandaskan kearifan dan warisan budaya nusantara tercermin melalui indikasi jumlah paten, hak cipta, merek dan desain industri yang diciptakan oleh *entrepreneur* nasional.

Kondisi yang terjadi, masih sering dijumpai pelanggaran hak cipta. Contoh mudahnya kita bisa melihat banyaknya pembajakan ide souvenir Reyog, pola tarian Reyog Ponorogo, mulai dari yang bertema Obyog sampai dengan Reyog Santri. Walaupun demikian, produk-produk berbasis hak cipta asal Ponorogo masih memiliki kesempatan yang besar dalam menembus mancanegara, dengan daya tawar (*bargaining position*) dan diplomasi negara yang baik, serta produk yang kreatif, inovatif dan menarik serta dibantu pemerintah dalam hal perlindungan karya cipta, maka tidak menutup kemungkinan ekspor produk berbasis hak cipta dari Ponorogo bisa meningkat. Dari sinilah, perlu pemahaman pemberdayaan produk seni Reyog Ponorogo agar dapat dilindungi, dan di satu sisi, masyarakat serta pelaku seni dan industri berbasis Reyog Ponorogo, dapat lebih berdaya dan diakui.

D. Sejarah Perkembangan Seni Tradisi Reyog Ponorogo

Varian Reyog Obyog, Reyog Panggung/Garapan/Festival, Reyog Pelajar, dan Reyog Santri diakui oleh semua pihak sebagai para pejuang seni Reyog Ponorogo dari sisi pelestarian dan pengembangan. Oleh karena

itu diperlukan apresiasi berbagai pihak, baik di kalangan konco Reyog seluruh varian, para tokoh, para seniman, maupun pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo, terutama dalam bentuk saling mendukung dan menyemangati. Dalam konteks ini, perbedaan persepsi tidak lagi menjadi pemicu konflik, melainkan justru menjadi pilar “kekuatan” dalam berkreasi sesuai dengan konteks masing-masing varian Reyog. Basis pengembangan, yakni karakter Ponoragan cukuplah menjadi garis atau norma baku dalam aksi pelestarian dan pengembangan Reyog Ponorogo.

Reyog memiliki basis pelestarian yang sangat kuat. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa fakta terkait dengan aspek-aspek penguat pelestarian, yakni; berkelanjutan, didukung masyarakat luas, dan menjadi bagian nyata dari kehidupan masyarakat Ponorogo. Strategi pelestarian berkelanjutan (*sustainable*), karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan, bukan pelestarian yang hanya sesaat, berbasis proyek, berbasis donor, dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan masyarakat Ponorogo itu sendiri. Strategi inilah yang disebut oleh Hadiwinoto, bahwa pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas.

Di samping itu, dalam seni Reyog Obyog juga telah terbentuk muatan ideologis yang sangat kuat dan mengakar, yakni terkait dengan gerakan menguatkan kebudayaan, sejarah, dan identitas Reyog sebagai jati diri masyarakat Ponorogo. Strategi pelestarian budaya ini dijelaskan Lewis, bahwa pelestarian budaya lokal juga mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas. Sementara dari aspek kepedulian masyarakat, seni Reyog memperoleh dukungan dan kepedulian dari masyarakat luas. Bahkan sifatnya yang populis, seni Reyog memperoleh dukungan masyarakat Ponorogo yang tidak pernah surut. Dampaknya terhadap Konco Reyog terutama adalah munculnya rasa memiliki terhadap seni Reyog Ponorogo. beberapa aksi yang menguatkan dukungan masyarakat luas adalah dalam bentuk pementasan seni Reyog Obyog yang sangat sering, baik untuk memenuhi permintaan pentas maupun sekedar untuk mementaskannya. Para anggota grup seni Reyog Obyog merelakan diri untuk ikut mendanai pentas dari uangnya sendiri melalui iuran/sumbangan sukarela. Dalam Teori Smith, strategi pelestarian seperti ini disebut sebagai teori kepedulian. Ia menuliskan, bahwa budaya lokal merupakan penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama di antara anggota komunitas.

E. Kasus Keberhasilan Pelestarian Reyog Ponorogo Berbasis Ekonomi Kreatif

Varian Reyog Santri merupakan varian yang dikembangkan dari penelitian di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Varian ini dikembangkan berdasarkan adanya fenomena dan fakta sebagaimana strategi pengembangan varian melalui “Rekayasa Komunitas” dengan cara mendirikan grup seni Reyog Ponorogo yang akan melakukan pertunjukan berbasis nilai-nilai kepesantrenan dengan rujukan karakter Ponoragan tersebut. Komunitas yang dijadikan model Reyog Santri adalah para siswa SMAN 2 Ponorogo. SMAN 2 dipilih sebagai rekayasa komunitas Reyog Santri oleh karena sekolah ini merupakan satu di antara 12 (duabelas) sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran seni Reyog Ponorogo dengan sistem yang relatif baik. Sekalipun pembelajaran Reyog hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler (setelah regulasi mulok diganti dengan Bahasa Jawa), tetapi sekolah ini tetap aktif melakukan pembinaan dan pembelajaran seni Reyog, baik melalui kegiatan di kelas maupun luar kelas.



Pewarisan budaya Berbasis Rekayasa Komunitas

Gambar 4.1 Proses Pembelajaran Reyog Pelajar di SMAN 2 Ponorogo
(foto: okicahyo)

Pewarisan budaya seni Reyog Ponorogo melalui varian Reyog Santri dilakukan melalui kerjasama dengan para siswa dari SMAN 2 Ponorogo. Secara rinci rekayasa komunitas seni Reyog Santri ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Aspek Instrumen

Secara umum dari aspek instrumen, seni Reyog Santri tidaklah banyak berbeda. Jenis dan macamnya sama dengan seni Reyog pada umumnya, hanya saja terdapat modifikasi pada busana mulai dari pengrawit, wiraswara, penari warok, penari jatil, penari pujangganong, penari kelana sewandana. Busana pengrawit dan wiraswara menggunakan

seragam hitam-hitam seperti biasanya dan ditambah surban berwarna putih dilekatkan pada blangkon. Adapun wiraswara dari kalangan wanita menggunakan jilbab berwarna putih.



Gambar 4.2. Pengrawit dan Wiraswara Seni Reyog Santri
(foto: okicahyo)

Busana penari warok menggunakan busana seperti biasa ditambah dengan penutup tubuh dari kaos berwarna krem (biasanya pemeran warok tanpa menggunakan penutup tubuh bagian atas atau dada terbuka).



Gambar 4.3. Busana Warok pada Rekeyasa Komunitas Reyog Santri
Menggunakan Kaos Lengan Panjang dan Penadon
(foto: okicahyo)

Busana penari jatil menggunakan jenis pakaian jatil seperti biasanya, hanya saja pakaian dalam perspektif rekeyasa Reyog Santri ini menutup seluruh aurat, yakni celana panjang, baju lengan panjang dan

berjilbab. Kemudian untuk pertimbangan keindahan pada bagian kepala dipasang rumbai-rumbai dari kain berwarna hitam, sehingga ketika penari jatil bergerak, maka rumbai-rumbai tersebut akan menyertai gerakan penari jatil layaknya rambut asli.



Gambar 4.4. Busana penari jatil pada rekayasa komunitas Reyog Santri menggunakan celana panjang, baju lengan panjang, dan berjilbab
(foto: okicahyo)

Penari Pujangganong atau Ganongan menggunakan busana seperti lazimnya, tetapi ditambah busana dalam berwarna krem, lengan panjang dan celana panjang hingga menutup mata kaki. Sementara penari Kelanasewandana juga mengenakan busana dengan asesoris seperti lazimnya penari pujangganong versi Panggung, tetapi ditambah dengan baju lengan panjang dan celana panjang hingga menutup mata kaki.



Gambar 4.5. Penari pujangganong pada rekayasa komunitas Reyog Santri menggunakan kaos panjang
(foto: okicahyo)

2. Aspek Ragam Tari

Adapun secara khusus, ragam tari seni Reyog Santri didesain berdasarkan makna simbol yang diturunkan dari nilai-nilai pendidikan Islam yang dipentaskan dalam bentuk gerakan-gerakan tari ditambah dengan narasi dari wiraswara dan/atau pembaca ayat-ayat suci Alqur'an (*qari'*). Pada bagian pembuka, dibacakan Alqur'an Surat Ali 'Imran ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”



Gambar 4.6. Pelantun tilawah Al-Qur'an pada Rekeyasa komunitas seni Reyog Santri (foto: okicahyo)

Selanjutnya pada penari Kelanasewandana menggunakan pakaian seperti biasanya, hanya saja ditambah dengan baju penutup tubuh bagian atas (kaos lengan panjang).



Gambar 4.7. Busana Kelanasewandana pada rekeyasa komunitas seni Reyog Santri (foto: okicahyo)

Teks Alqur'an dilantunkan pada 3 (tiga) titik scenario rekayasa komunitas seni Reyog Santri, yakni; di bagian awal (pembuka) dengan lantunan Surah Ali Imran ayat 110 seperti dijelaskan di atas. Kemudian dalam tari warok dengan melantunkan ayat Al qur'an Surah Shad: 20:

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ

Artinya: “Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.”

Adapun pada bagian akhir, yakni disaat Kelanasewandana menjelang memukul Singobarong dengan menggunakan senjata pamungkas Pecut Samandiman, ayat Alqur'an yang dilantunkan adalah Surah Al-Isra ayat 81:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُطْلُ إِنَّ الْبُطْلَ كَانَ زَهُوقًا

Artinya: “Dan Katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”

Pada sisi perlindungan, konsep Reyog Santri pun sudah dilindungi dengan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mulai dari skenario, video tarian hingga instrumentasi yang digunakan. Dari hal ini, diharapkan dapat memberdayakan para pelaku seni Reyog Santri di Ponorogo. Dari hal ini, konsep Reyog Santri merupakan salah satu pengembangan adat dan tradisi yang memiliki nilai kreativitas dan dapat diakui sebagai kesenian tradisi, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku Reyog Santri.

F. Kesimpulan

Ekonomi lokal berbasis seni tradisi dapat menjadi salah satu kunci dalam penguatan perekonomian. Dengan pengembangan industri dan kreatifitas tentunya. Industri kreatif sudah menjadi pusat perhatian karena kontribusi positifnya terhadap perekonomian Indonesia, secara umum. Sebenarnya industri kreatif dapat memberikan manfaat yang tidak hanya dari sudut pandang ekonomi saja, namun juga meningkatkan citra dan identitas bangsa, kemudian dapat meningkatkan inovasi dan mengolah kreativitas masyarakat Indonesia, dan juga memberikan pola industri yang memanfaatkan sumber daya yang tidak terbatas dan selalu terbarukan.

Pembangunan ekonomi yang mengarah pada sektor industri kreatif berbasis budaya bisa menciptakan dan memperkenalkan serta lebih

memamerkan karakter budaya suatu tempat. Salah satu misi industri kreatif ialah memperjuangkan Hak dan Kekayaan Intelektual yang salah satu upayanya ialah memperjuangkan secara proaktif, bentuk warisan budaya dan pengembangannya.

Potensi pasar di Ponorogo sangatlah besar dengan ragam segmentasinya. Sebagai contoh ragam minuman bernama Dawet Jabung yang merupakan bukti riset dan pengembangan (sektor industri kreatif) dari masyarakat Ponorogo pada masa lalu yang sampai saat ini, eksis berkembang. Berbagai penelitian dan pengembangan dibidang keragaman hasil cipta karya masyarakat Ponorogo yang kemudian didaftarkan untuk mendapatkan Hak kekayaan Intelektual, juga merupakan komitmen dari industri kreatif di Kabupaten Ponorogo.

Pelestarian warisan budaya dengan mengkombinasikan kreasi dan semangat jiwa muda juga dapat menjadi daya dongkrak untuk lebih dapat dinikmati masyarakat, baik skala nasional maupun internasional. Sebagai contoh permainan berbasis android dengan tema Reyog Ponorogo, dan juga game online berbasis Reyog Ponorogo. Hal ini terjadi, karena pada prinsipnya talenta masyarakat Ponorogo, ketrampilan dan kreativitas merupakan suatu rahmat dan pemberian dari Tuhan yang patut kita syukuri. Potensi itu diberikan dengan tujuan agar manusia dapat menjadi pemimpin di muka bumi dan memanfaatkan sumber daya yang sudah disiapkan Sang Pencipta. Pembangunan yang berdasar pada sumber daya insani, maka dapat berperan juga pada peningkatan kualitas pada sumber daya insani di Ponorogo.

Pengetahuan bisa berbentuk kreasi dan inovasi. Inovasi pada prinsipnya bisa dikatakan sebagai penguasaan terhadap suatu teknologi dan mampu mengembangkan teknologi yang sudah ada, menjadi lebih baik lagi. Bisa dikatakan bahwa inovasi adalah penciptaan nilai yang lebih baik dan baru. Kemudian pada harapannya, pembangunan bermodalkan pengetahuan dan kreativitas yang terarah dan tepat sasaran, pada jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan dan keadilan (*growth and equity*), sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup (*well being*).

Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi berbasis kreativitas bisa berefek kepada aspek sosial (*social innovation*). Inovasi dan kreativitas berperan dalam memberdayakan masyarakat di lapisan bawah (*the bottom of the pyramid*) sebagai pekerjanya. Motivasi dari inovasi sosial adalah mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik dari sisi kebahagiaan (*happiness*). yang dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan (*togetherness*) dan saling berbagi (*sharing*) karena perlu dipahami bahwa profesi sebagai pekerja kreatif adalah profesi yang cukup menjanjikan untuk saat ini dan di masa depan.

REFERENSI

- Ar- Riyadh. 2015. *Al-Qur'anulkarim*, Bandung, Cordoba.
- AW., Munawwir. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Hadiwinoto, S.. 2002. "Beberapa Aspek Pelestarian Warisan Budaya". *Makalah disampaikan pada Seminar Pelestarian dan Pengembangan Masjid Agung Demak, di Demak, 17 Januari 2002.*
- Hoy, Tarter, dan Kottkamp. 2013. "*Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Bangsa, editor Siti Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh*", hlm. 12. Globethics.net Focus 7, diakses tanggal 30 Oktober 2017.
- Iman, Nurul. 2017. *Obyog Garapan Pelajar Santri*. Buku Litera: Yogyakarta.
- Kumarahadi, Tugas. 2004. *Reyog Obyogan; Perubahan dan Keberlanjutan Cara Penyajian dalam Pertunjukan Reyog Ponorogo*, Surakarta, PPS STSI.
- Kurnianto, Rido dan Niken Lestarini. 2016. "*Pendidikan Karakter Konco Reyog Ponorogo Berbasis Pendidikan Islam*", Laporan Penelitian tidak Dipublikasikan, Ponorogo, LPPM UNMUH Ponorogo.
- Kurnianto, Rido dan Niken Lestarini. 2016. *Modul Pendidikan Karakter Konco Reyog Ponorogo Berbasis Pendidikan Islam, Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.*
- Kurnianto, Rido dan Niken Lestarini. 2017. *Seni Reyog Ponorogo; Sejarah, Nilai, dan Dinamika dari Waktu ke Waktu, Yogyakarta, Buku Litera: Yogyakarta.*
- Lewis, . M. 1983. "*Conservation: A Regional Point of View*" dalam *M. Bourke, M. Miles dan B. Saini (eds). Protecting the Past for the Future. Canberra: Australian Government Publishing.*
- Nugroho, Oki Cahyo. 2016. *Gaya Komunikasi dalam Reyog Ponorogo (Studi Kasus Gaya Komunikasi dalam Pertunjukan Reyog Obyogan dan Reyog Festival di Kabupaten Ponorogo). Tesis tidak Dipublikasikan, Program pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.*
- Ortner, Sherry B. "On key symbols", in William Armand Lessa and Evon Z. Vogt (eds), *Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, (New York: Harper & Row Publisher: 1979), h. 94.*

Pemkab Daerah Tingkat II, *Pedoman Dasar Kesenian Reyog Ponorogo dalam Pentas Budaya Bangsa (Ponorogo, 1993), hlm. 1993.*

Purnomo, Rochmat Aldy. *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Nulisbuku.com: Jakarta.

Putra, Heddy Shri Ahimsa. “Penutup: suatu refleksi antropologis”, dalam *J.W.M. Bakker, Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984.

Soemarto. 2014. *Menelusuri Perjalanan Reyog Ponorogo*, Ponorogo: CV. Kotareog.

Smith, L. 1996. “Significance Concepts in Australian Management Archaeology” dalam L. Smith dan A. Clarke (eds). *Issue in Management Archaeology, Tempus, vol 5.*

Sunan Ibnu Majah Hadis nomor 4138, tt.: 1386.

BAB V

KONSEP *BLUE ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI ENERGI MELALUI PEMANFAATAN BIOGAS

**Izza Mafruhah
Nurul Istiqomah**

A. Pendahuluan

Energi merupakan salah satu input dalam kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga. Energi bisa berasal dari yang tidak terbarukan dan terbarukan. Indonesia dulu terkenal sebagai penghasil energi yang tidak terbarukan, yaitu minyak bumi dan gas alam sehingga menjadi salah satu negara eksportir minyak dunia dan masuk menjadi bagian negara-negara OPEC. Seiring berjalannya waktu, dalam dua dasawarsa terakhir, konsumsi energi masyarakat Indonesia sangat tinggi, melebihi produksi yang dilakukan. Terdapat tiga dampak utama konsumsi BBM yang berlebihan yaitu: (1) biaya energi yang tinggi; (2) polusi lingkungan khususnya udara yang tinggi; dan (3) cadangan minyak yang semakin berkurang. Data produksi dan impor BBM Indonesia selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Produksi dan Impor BBM Indonesia 2010 - 2015

Tahun	Produksi (juta barel)		Impor BBM (juta barel)
	BBM	NON BBM	
2010	235,7	85,8	163,6
2011	237,1	104,2	195,0
2012	240,3	111,9	201,1
2013	237,5	85,2	205,6
2014	245,5	97,1	209,0
2015	248,8	80,7	175,4

Sumber: Energi outlook 2016

Menipisnya cadangan minyak bumi di dalam negeri dan meningkatnya konsumsi BBM di dalam negeri telah menyebabkan Indonesia menjadi negara *net oil importer* semenjak tahun 2004. Gap produksi konsumsi semakin melebar, di mana pada tahun 1975-1995, produksi minyak Indonesia masih di atas 1 juta barel, bahkan pada 1980-an dan 1991-an produksi minyak Indonesia hampir mendekati 2 juta barel. Sementara konsumsi BBM dalam negeri pada 1975-1985 di bawah 500.000 barel per hari. Namun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat hingga pada 2004 produksi minyak tidak mencukupi untuk menutupi konsumsi dalam negeri. Mulai periode 2004 konsumsi BBM dalam negeri sudah berada di level 1 juta barel per hari, sementara produksinya terus turun.

Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia tidak dapat lagi menggantungkan penyediaan energi bersumber dari minyak bumi karena harga minyak mentah dunia sangat fluktuatif sehingga dapat menguras devisa negara dan mengancam ketahanan energi nasional. Upaya penghematan energi dilakukan karena pasokan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas maupun batu bara semakin berkurang sementara permintaan terus mengalami kenaikan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan adanya Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa penyusunan KEN tersebut harus memperhatikan prinsip keadilan, keberkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional yang sesuai dengan arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemahaman baru tersebut menuntut adanya pengembangan energi alternatif terbarukan dan bersifat ramah lingkungan. Pemahaman masyarakat sangat diperlukan dalam kondisi pemanasan global yang terjadi sekarang ini dan adanya penurunan kualitas lingkungan. Pengembangan energi alternatif terbarukan yang bersifat ramah lingkungan dan tersedia di tingkat lokal dapat menjadi instrumen yang bermanfaat ganda, yaitu mampu mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, mewujudkan keberlanjutan lingkungan, dan menyediakan energi yang mudah diakses oleh masyarakat lokal baik secara kuantitas, kualitas, maupun daya beli (Setyawan, 2010).

Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu perwujudan dari *green economy*, yaitu pemanfaatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Energi alternatif masih mendapatkan porsi yang relatif kecil, tetapi nilainya memang semakin naik dari tahun ke tahun. Gambar 1 mengenai *Blue Print* Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2006 sumber energi masih didominasi oleh minyak bumi sebesar 53 %, kemudian diikuti oleh batu bara sebesar 22% dan gas bumi sebesar 21 %, sedangkan energi

lain penggunaannya baru sekitar 4 %. *Blue print* tersebut mempunyai tujuan pada tahun 2025, penggunaan energi minyak bumi sudah berkurang hanya menjadi sebesar 20 % saja dan energi lain yang berasal dari panas bumi, pencairan batu bara, biofuel, nukir, CBM, biomass dan hydrogen akan mengalami peningkatan menjadi 17 %, sebagaimana pada gambar 1.



Gambar 5.1. *Blue Print* Kebijakan Energi Nasional

B. Elastisitas Energi

Elastisitas energi adalah perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi terhadap pertumbuhan produk atau pertumbuhan agregat dengan kata lain pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengukur kebutuhan energi terhadap perkembangan ekonomi di sebuah negara. Angka elastisitas energi apabila nilainya di bawah 1 ma apemanfaatan energi tersebut sudah produktif, sedangkan jika hasil perhitungan elastisitas energi lebih dari 1 berarti dibutuhkan banyak konsumsi energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Energi penting dalam perekonomian, seperti yang tertuang dalam Model Ekonomi Ekologi yang menempatkan energi sebagai factor primer yang disediakan oleh alam. Dalam pandangan teori pertumbuhan neoklasik misalnya, sebagian besar studi mengeksplorasi kemungkinan adanya

substitusi atau komplementer antara energi dan faktor input lainnya serta interaksinya dalam mempengaruhi produktivitas. Menurut pandangan neoklasik ini, kontribusi energi terhadap perekonomian relatif dilihat dari biaya produksinya. Di lain pihak pandangan para ahli ekonomi ekologi, energi merupakan kebutuhan mendasar bagi produksi. Dengan menerapkan hukum termodinamika, perekonomian dipandang sebagai subsistem yang terbuka dari ekosistem global. Adapun, teori neoklasik dipandang *under estimate* terhadap peranan energi dalam aktivitas ekonomi (Okcwell, 2008).

Menurut Yusgiantoro (2000), salah satu komponen yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah jumlah pemakaian energi secara nasional. Meningkatnya pemakaian energi mendorong proses industrialisasi. Permintaan energi pada industri manufaktur untuk menjalankan mesin-mesin memang sangat tinggi. Di sisi lain, dukungan kontribusi energi, terutama dalam penerimaan ekspor dan penerimaan pemerintah, menjadi sarana akumulasi modal pembangunan. Dengan menyadari bahwa pemakaian energi sangat erat berhubungan dengan PDB, maka dapat diperkirakan berapa kenaikan yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat output tertentu. Besarnya kenaikan pemakaian energi yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dapat diketahui dengan menghitung elastisitas energi terhadap output nasional. Elastisitas tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$EE = (DEC/EC)/(DPDB/PDB)$$

EE = Elastisitas energi

EC = Pemakaian energi nasional pada waktu tertentu

PDB = Produk domestik bruto waktu tertentu

DEC = *Incremental* pemakaian energi selang waktu tertentu (EC_2-EC_1)

$DPDB$ = *Incremental* PDB selang waktu tertentu (PDB_2-PDB_1)

Rata-rata pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia berkisar 7% sampai dengan 8% per tahun, sedangkan pertumbuhannya berkisar 5% sampai 6% pertahun. Angka tersebut digunakan untuk menghitung elastisitas energi, maka elastisitas energi di Indonesia berkisar 1,6 yang mencerminkan penggunaan energi di Indonesia belum efisien. Negara maju biasanya lebih efisien dalam penggunaan energy sehingga elastisitasnya rendah, antara lain elastisitas energi Jepang hanya sebesar

0,1 dan 0,2 untuk Amerika Serikat. Adapun elastisitas energi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura yang sebesar 1,1 dan Thailand sebesar 1,4. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perlu adanya pembenahan dalam pemanfaatan energi di Indonesia.

C. Konsep *Blue Economy*

Elastisitas energi yang masih besar tidak didukung oleh cadangan energi yang dipunyai oleh Indonesia. Cadangan minyak di Indonesia tinggal 3,7 milyar barrel dari semula 27 milyar barrel. Cadangan tersebut akan bertahan untuk 10 tahun lagi. Adapun potensi gas bumi pada tahun 2008 mencapai 170 TSCF dan produksi per tahunnya adalah sebesar 2,87 TSCF, berdasarkan perbandingan data tersebut maka bisa diperkirakan cadangan gas di Indonesia bisa bertahan selama 59 tahun. Kesadaran masyarakat bahwa cadangan energi yang ada di Indonesia tidak lagi melimpah perlu dilakukan sehingga akan memanfaatkannya secara efisien.

Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar adalah dengan mengurangi penggunaan *unrenewable energy* dan mencari sumber energi baru yang *renewable*. Terdapat beberapa sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tersedia di tingkat lokal. Salah satu sumber energi terbarukan dan bisa dimanfaatkan secara optimal di Indonesia adalah energi yang berasal dari biogas. Biogas adalah energi yang berasal dari suatu gas yang dihasilkan oleh proses anaerobik/ fermentasi bahan organik yang berasal dari bahan organik seperti kotoran manusia, limbah rumah tangga dan juga kotoran hewan.

Konsep *green economy* sudah mulai bergeser ke *blue economy*, yaitu suatu konsep yang menerapkan keperdulian social (*social inclusiveness*), efisiensi sumber daya alam, dan sistem produksi tanpa menyisakan limbah (*zero waste*). *Blue economy* atau ekonomi biru merupakan sebuah konsep ekonomi yang tengah dikembangkan untuk menjawab tantangan atas sistem ekonomi dunia yang cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Kerusakan utama disebabkan oleh adanya limbah, eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Moto utama *Blue Economy* adalah tidak ada sampah/limbah yang terbuang.

Terminologi "*blue economy*" merupakan dinamika pemikiran konsep pembangunan terbaru yang kini sedang berkembang dengan mengandalkan sumber daya laut atau perairan yang berlandaskan pada tiga pilar terintegrasi yaitu ekosistem, ekonomi dan sosial. Istilah *blue economy* tersebut telah diangkat dalam berbagai kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat *Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Konsep tersebut adalah konsep pengembangan yang membidik tiga kepentingan, yakni Pertumbuhan, Kesejahteraan masyarakat dan Penyehatan lingkungan.

Blue Economy dirancang untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengefisienkan sumber daya alam sehingga tidak merusak sistem alam. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi dijadikan bahan baku untuk produk lain sehingga limbah tersebut dapat menghasilkan banyak produk lain serta pendapatan. Arah kebijakan pembangunan *blue economy* adalah *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*. Secara rinci konsep *Blue Economy* mengandung pengertian:

1. Suatu kegiatan masyarakat khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi di mana semua bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja.
2. Model Ekonomi masa depan yang akan memperhitungkan keuntungan dan strategi inovasi dengan upaya meminimalkan kerusakan alam. Semua kembali ke alam dengan nilai lebih dalam peningkatan ekonomi.
3. Ekonomi Biru diharapkan akan menjadi pemikiran yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang telah kurang baik.
4. Penciptaan lebih banyak kegiatan dalam bentuk model yang berkesinambungan di mana komunitas terkecil dalam masyarakat digunakan sebagai ujung tombak kegiatan.
5. Memberikan solusi terbaik dengan cara mentransfer ekonomi dan menghasilkan komunitas untuk masa yang akan datang sehingga akan lebih baik.

Ekonomi biru sebenarnya merupakan suatu keniscayaan dilakukan oleh masyarakat mulai dari tataran yang paling kecil yaitu keluarga. Ekonomi Biru akan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi apabila dikembangkan dalam suatu komunitas. Tingkat keberhasilan Ekonomi Biru ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dan didukung kebijakan pemerintah, dunia pendidikan serta dunia usaha. Keempat pelaku tersebut sering disebut dengan konsep ABCG yaitu *Academic, Business, Community* dan *Government*.

Pengembangan konsep *blue economy* di Indonesia didukung dengan adanya kongres *Blue Economy* ke-9 yang diselenggarakan di Surabaya sebagai kelanjutan kongres yang dilakukan di Madrid Spanyol. Kongres tersebut bertujuan untuk mempercepat realisasi keterlibatan masyarakat dengan memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pihak industri yang mengelola sumber daya alam, seperti ditetapkan oleh Undang-undang No. 47 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012.

D. Implementasi *Blue Economy*

Blue economy mengarah pada pengembangan energi terbarukan. Konsep energi terbarukan selalu mengarah konsep energi alternatif yang terdiri dua jenis yaitu:

1. Energi alternatif terbarukan dengan skala besar yang dibangun oleh pemerintah, Ciri energi alternatif ini adalah *high investation*, *high product scale*, dan *high technology* sehingga menjadi mega proyek. Salah satu contoh energi alternatif yang dikembangkan antara lain pemanfaatan sampah skala besar. Saat ini sedang dilakukan proses kelayakan proyek per sampahan pada beberapa kota besar di Indonesia. Untuk mendukung proses pembangkit listrik tenaga sampah ini pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Energi alternatif berbahan dasar sampah ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat bagus, karena menyelesaikan dua permasalahan sekaligus, yaitu masalah sampah sebagai masalah lingkungan dan masalah ketersediaan energi. Namun dalam kenyataannya, energi berbahan dasar sampah ini ternyata masih menyisakan permasalahan karena terkait dengan tingginya dana investasi dan peraturan pembebasan lahan yang belum menemukan titik temu. Meski sudah terdapat Perpres yang mengatur masalah ini, namun belum bisa menyentuh permasalahan yang sifatnya teknis.

Investor yang akan masuk dalam proyek tersebut masih tarik ulur kaitannya dengan dana pendamping yang harus disediakan oleh pemerintah untuk pengelolaan dan model pengelolaan setelah menjadi energi terbarukan khususnya listrik. Tarik ulur kepentingan masyarakat, pemerintah dan swasta ini perlu untuk diselesaikan dengan solusi terbaik agar segera bisa dilaksanakan.

2. Energi alternatif berbasis kearifan lokal, model energi alternatif ini sudah mulai dilakukan dengan pendekatan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di daerah. Model ini memberikan nilai positif khususnya dalam kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lingkungan di sekitarnya.

E. Energi Terbarukan Berbasis Kearifan Lokal

Menipisnya sumber daya minyak yang menyebabkan kelangkaan energi berimbas pada semakin mahalnya harga energi, kondisi ini mendorong pemikiran masyarakat untuk mulai memanfaatkan potensi

lokal sebagai bahan baku pengganti BBM, namun tanpa melakukan perusakan terhadap lingkungan. Ciri – ciri energi terbarukan berbasis kearifan lokal ini adalah:

1. Berbasis teknologi tepat guna yang berbiaya rendah
2. Bahan baku berasal dari lingkungan sekitar
3. Biaya operasional rendah
4. Mudah dilakukan dan direplikasikan

Salah satu energi terbarukan yang mulai mendapatkan perhatian adalah biogas. Beberapa tahun terakhir ini pemanfaatan biogas melalui kotoran ternak menjadi alternatif yang dianggap menguntungkan dan berdampak positif bagi masyarakat. Sistem ternak tani terpadu dan ternak industri terpadu yang sudah digalakkan oleh masyarakat saat dikembangkan bukan hanya untuk dipanen hasilnya saja, namun residu atau kotoran yang dihasilkan oleh ternak bisa digunakan menjadi berbagai alternatif yang bukan hanya memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga mengatasi masalah kelangkaan energi. Prinsip pembuatan biogas sangat sederhana sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa membutuhkan teknologi yang tinggi.

Secara umum Biogas diartikan sebagai gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi feces (kotoran) ternak, misalnya, sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain dalam suatu ruangan yang disebut “digester”. Komponen-komponen biogas adalah gas metana, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, karbon monoksida, oksigen, dan hidrogen. Prinsip kerja pembentukan biogas adalah pengumpulan feces ternak ke dalam suatu tangki kedap udara yang disebut “digester” (pencerna). Di dalam digester tersebut, kotoran dicerna dan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan komponen-komponen biogas. Gas yang timbul dari proses ini ditampung di dalam digester. Penumpukan produksi gas akan menimbulkan tekanan sehingga dapat disalurkan ke rumah dengan pipa. Gas yang dihasilkan dapat dipakai untuk masak dengan menggunakan kompor gas atau untuk penerangan dengan mengubah lampu petromaks sesuai dengan bahan bakar gas tadi. Gas yang dihasilkan ini sangat baik untuk pembakaran karena mampu menghasilkan panas yang cukup tinggi, apinya berwarna biru, tidak berbau, dan tidak berasap.

Prinsip kerja yang sangat sederhana dan *low investasion* tersebut menyebabkan biogas menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk dimasukkan dalam sistem ternak tani terpadu. Pola pengembangan yang dilakukan pada model energi alternatif terbarukan berbasis kearifan lokal adalah dengan Desa Mandiri Energi.

Potensi biogas ini menjadi sangat penting karena sektor peternakan menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Data dari Direktorat Jenderal Peternakan, angka populasi sapi pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan populasinya pada tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut: sapi potong sebanyak 14,73 juta ekor yang mengalami peningkatan sebesar 16,09 persen sedangkan sapi perah mengalami peningkatan sebesar 0,5 juta ekor yang mengalami peningkatan sebesar 13,11 persen jika dibandingkan pada tahun 2013. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah populasi ternak besar di Indonesia.

Tabel 5.2. Jumlah Populasi Ternak Besar di Indonesia (000 ekor)

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015
Sapi potong	14,824	15,981	12,686	14,272	15,494
Sapi perah	597	612	444	503	525
Kerbau	1,305	1,438	1,110	1,335	1,381
Kuda	409	437	434	428	436

Sumber: Badan Pusat statistik berbagai tahun

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa potensi sapi yang begitu banyak menyumbangkan emisi gas metana yang besar pula, di mana sumbangan emisi gas metana merupakan emisi terbesar kedua setelah karbon dioksida yaitu sebesar 13 % dari total emisi. Pemanfaatan limbah peternakan khususnya kotoran ternak sapi mendukung program *blue energy* atau konsep *zero waste* sehingga terwujud sistem pertanian berkelanjutan dan ekonomi ramah lingkungan. Beberapa keuntungan menggunakan kotoran ternak sebagai penghasil biogas adalah (Santi dalam Waskito, 2011):

1. Mengurangi pencemaran lingkungan terhadap air dan tanah, serta pencemaran udara.
2. Terciptanya energi alternatif untuk rumah tangga dari pemanfaatan limbah kotoran sebagai bahan bakar biogas.
3. Meningkatkan kesejahteraan peternak karena bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk energi bagi kegiatan rumah tangga.
4. Terciptanya Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*) terhadap pemanfaatan biogas.

Berdasarkan sejarah, pengolahan limbah sapi menjadi biogas (Waskito, 2011) pertama kali dibangun pada tahun 1900 yang dilakukan di Negara Jerman dan Perancis pada masa antara dua perang dunia. Pada saat

Perang Dunia II, banyak petani menggunakan dan memanfaatkan biogas untuk menjalankan traktor, terutama di Negara Inggris dan Benua Eropa. Tetapi pada tahun 1950, akses untuk memperoleh BBM semakin mudah dan murah, harga maka membuat pemakaian biogas mengalami penurunan. Kebutuhan akan energi dengan harga yang murah dan harus selalu tersedia sangat diperlukan oleh Negara-negara sedang berkembang, oleh karena itu pemanfaatan biogas seperti di Negara India masih terus dilakukan semenjak abad ke-19 dan riset pengembangannya terus dilakukan oleh Negara China, Filipina, Korea, Taiwan dan Papua Nugini.

F. Penelitian Tentang Energi Biogas

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2010) menghasilkan bahwa pengembangan biogas merupakan salah satu bentuk solusi alternatif terhadap terjadinya krisis energi fosil di tingkat daerah maupun nasional. Potensi pengembangan biogas di Indonesia masih bisa terus dikembangkan karena adanya program swasembada daging yang akan segera diwujudkan sehingga menyebabkan jumlah persediaan daging dan produk sampingan yaitu limbah kotoran sapi juga akan mengalami peningkatan.

Gebregziabher et al (2014) menyatakan sampah bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan nilai tambah, atau hanya menjadi sampah saja yang tidak mempunyai nilai ekonomi. diperlukan manajemen pengolahan sampah yang bagus untuk peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan di negara sedang berkembang. Pemanfaatan biogas mempunyai karakter yang berbeda antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pemanfaatan biogas biasanya dilakukan di pedesaan, sedangkan apabila di perkotaan kesinambungan antara kelayakan secara teknis, berjalannya proses ekonomi, penerimaan social dan lingkungan yang berkelanjutan. biasanya kota-kota besar menghadapi masalah yang serius mengenai tekanan populasi yang besar dan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai juga. untuk menentukan biaya yang efektif dan penggunaan energi terbarukan yang berkelanjutan maka pemanfaatan biogas sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah social ekonomi.

Galvez, et al (2015), biogas merupakan sumber energi potensial yang bisa digunakan untuk kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Tahap pertama dalam suatu proses pemanfaatan biogas adalah keputusan untuk membangun jaringan/ saluran yang digunakan untuk menyalurkan energi biogas tersebut. Keputusan ini menggunakan AHP karena adanya pengambilan keputusan yang kompleks yang meliputi factor ekonomi, social dan lingkungan. hasil yang diperoleh agar pihak penghasil sampah menyadari mengenai pentingnya penyortiran sampah

dan pengelompokkan sampah kembali sehingga pemanfaatan sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif bisa dilakukan secara efektif.

Mwirigi et al (2014) menyatakan bahwa kesadaran untuk menggunakan energi fosil untuk kehidupan yang berkelanjutan semakin menurun. Di Afrika, hampir 70% rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak. Afrika ingin supaya pada tahun 2030 akses terhadap energi yang lebih modern dapat dilakukan secara menyeluruh. Penggunaan energi modern salah satunya adalah dengan pemanfaatan biogas yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk di desa dan pencapaian *Millenium Development Goals*. Penggunaan biogas sebagai salah satu sumber energi terbarukan merupakan usaha yang menarik pemerintah untuk mendorong produksi energi terbarukan. Energi biogas yang berasal dari kotoran hewan penggunaannya lebih banyak digunakan sebagai energi untuk memasak atau penerangan. di Afrika, pengenalan program biogas dilakukan dengan proyek percontohan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ternyata, belum membawa hasil seperti yang diinginkan. demonstrasi atau proyek percontohan yang dilakukan oleh pemerintah belum memberikan motivasi kepada masyarakat. Permasalahan lain yang timbul adalah penggunaan digester kadang mengalami kegagalan karena ukurannya yang tidak sesuai dengan limbah kotoran hewan yang ada. Semangat Negara-negara Afrika dalam menggunakan biogas sebagai sumber energi alternative sangat luar biasa, pada tahun 2010 telah 2.000 biogas unit. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Winrock International memberikan kesimpulan bahwa masih memungkinkan untuk membuat 100.000 instalansi biogas selama tahun 2009 sampai 2010. Pertumbuhan instalansi biogas yang paling tinggi adalah di China dengan membangun instalansi biogas sebanyak 5 juta unit pada tahun 2010. Yang membedakan antara Negara Asia dan Sub Sahara Afrika (SSA) dalam perkembangan pemakaian biogas adalah jumlah hewan ternak yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biogas, biaya pembuatan digester lebih mahal di Afrika dibandingkan dengan Asia. Yang membuat biaya pembuatan biogas mahal adalah bahan baku semen, dan dikombinasikan dengan pendapatan disposibel yang rendah. Hampir 86 % instalansi biogas yang ada di Bangladesh dibiayai dengan kredit. Di China, petani menerima 69 % subsidi untuk biaya pembuatan digester. Secara umum, Negara-negara di SSA masih tertinggal dibandingkan dengan Negara Asia.

Demarest et al (1993) mendeskripsikan pengaruh karakteristik sosial ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan dari kepala rumah tangga terhadap adopsi teknologi penggunaan biogas. Factor lain yang mempengaruhinya adalah jumlah limbah/ kotoran sapi serta akses terhadap air. Di Uganda, factor yang mempengaruhi terhadap adopsi biogas adalah umur dari kepala rumah tangga, ukuran rumah, bahan bakar tradisional yang digunakan serta tingkat pendidikan. Peningkatan usia dan

tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan kesediaan untuk mengadopsi biogas, sedangkan ketersediaan bahan bakar tradisional dan ukuran rumah tangga berpengaruh positif terhadap kesediaan mengadopsi teknologi pemanfaatan biogas. Survey social ekonomi di Uganda dan Kenya memberikan hasil bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah sebagai penyebab utama terbatasnya akses perempuan untuk mengambil keputusan dalam pengistalalan biogas sebagai bahan bakar alternatif. Di Kenya, luasnya lahan peternakan, adanya keamanan kepemilikan lahan, jumlah susu yang dihasilkan, serta sistem pertanian dan biaya pemeliharaan sapi mempunyai korelasi positif terhadap adopsi teknologi untuk menggunakan biogas.

G. Desa Mandiri Energi

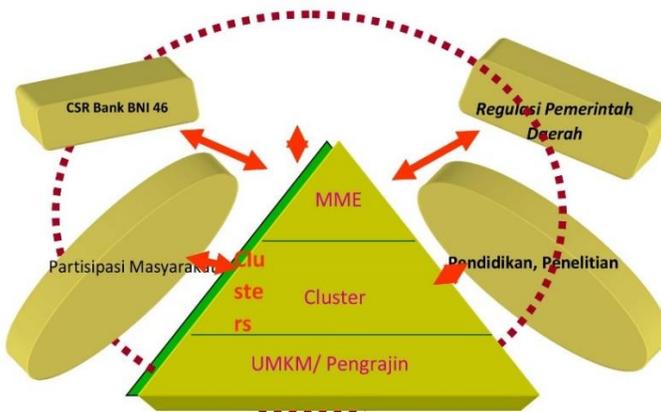
Peraturan menteri ESDM no 32 tahun 2008 mendefinisikan Desa Mandiri Energi sebagai desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri. Atau dengan kata lain, Desa Mandiri Energi adalah desa di mana masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60 % kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat.

Energi terbarukan (*renewable energy*) yang dimanfaatkan haruslah memiliki syarat yang mencakup aspek keberlanjutan, *regional development*, dan ramah lingkungan. Keberlanjutan diartikan sebagai energi yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa batas waktu, sehingga tidak terbentur dengan permasalahan keterbatasan sumber daya energi. Adapun *regional development* merupakan pembangunan bersifat regional yang berupaya mengembangkan kemandirian berbasis kelebihan yang ada pada masing-masing daerah. Kemudian, selain itu aspek ramah lingkungan menyempurnakan konsep kemandirian energi yang berusaha untuk selaras dengan lingkungan, tidak berdampak buruk di kemudian hari, dan tidak bersifat eksploitasi.

Berdasarkan aspek ekonomi, Desa Mandiri Energi bertujuan untuk membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Adapun, tujuan utama pengembangan Desa Mandiri Energi adalah mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja untuk mensubstitusi bahan bakar minyak. Di sisi lain, pengembangan Desa Mandiri Energi harus mencakup aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat agar dapat mendayagunakan

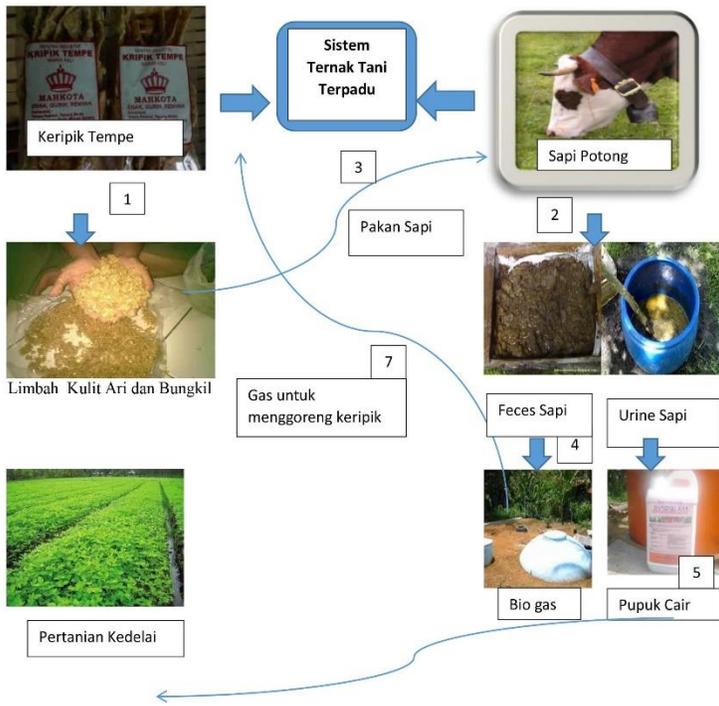
sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan keberdayaan. Proses ini dilakukan dalam bentuk penguatan lembaga masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan perdesaan secara berkelanjutan, penguatan usaha kecil dan menengah, dan pengembangan prasarana berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, keterampilan analitis dan perencanaan pembangunan yang dimulai dari daerah tempat mereka berkarya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengembangan Desa Mandiri Energi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam semua tahapan prosesnya. Dengan demikian diharapkan program Desa Mandiri Energi dapat terlaksana secara berkelanjutan

Desa Mandiri energi merupakan konsep yang melibatkan keikutsertaan seluruh *Stakeholder* meliputi pemerintah daerah, swasta dan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Masing-masing *Stakeholder* memiliki peran penting sesuai dengan porsinya. Model kerjasama ini merupakan pengembangan dari model yang disusun dalam Program Dasar Pembangunan Partisipatif. Model tersebut tepat digunakan dalam kegiatan Implementasi *Blue Economy*.



Gambar 5.2. Kemitraan Swasta, Masyarakat, Pemda, dan Akademisi

Program *Blue Economy* menggunakan sistem ternak industri terpadu, yaitu menyatukan unsur-unsur dalam industri dengan peternakan sehingga bisa saling mendukung dan memanfaatkan sisa produksi masing-masing menjadi input yang bermanfaat. Secara detail proses *blue economy* bisa digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 5.3. Sistem Ternak Tani Terpadu

Gambar di atas menunjukkan dengan jelas contoh hubungan yang dapat dibangun antara ternak dan industri untuk saling memanfaatkan dan menjadi ekonomi tanpa sisa. Ekonomi tanpa sampah ini yang akan mendorong lingkungan tetap bersih.

Hasil data empirik menunjukkan bahwa dengan menggunakan 2 ekor sapi dan digester biogas sebesar 9 kubik, ternyata mampu menghasilkan kompor yang bisa digunakan untuk memasak selama 6 jam per hari sehingga apabila dihitung bisa memberikan penghematan biaya rumah tangga antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 250.000. Di sisi lain pemanfaatan bio gas ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kayu bakar berkurang sehingga aspek kelestarian hutan bisa terjaga.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan berbasis kearifan lokal dengan pemanfaatan biogas merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar *non renewable*.

2. Kerjasama ABCG (*Academic, Bussines, Community, Government*) merupakan hal yang mutlak dalam kegiatan pembangunan di daerah.
3. Sistem ternak industri terpadu merupakan salah satu implementasi dalam pengembangan *Blue Economy* yang mampu mengembangkan kegiatan tanpa sisa.

REFERENSI

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Gaya Gava Media. Yogyakarta.
- Arsyad. Lincolin.1999. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Demarest EJ, Reisner ER, Anderson LM, Humprey DC, Farquhar E, Stein SE. Review of Research on Achieving the Nation’s Readiness Goal. Washington D.C: U.S.Department of Education; 1993. p. 82.
- Direktori Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, 2012, *Policy Paper Keselarasan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Galvez,et all, 2015, Reverse Logistics Network Design For a Biogas Plant: An Approach Based on MILP Optimization and Analytical Hierarchical Process (AHP), *Journal of Manufacturing Systems* 37, Page 616-623, Elsevier.
- Gebreegziabher et all, 2014, Prospect and Challenges for Urban Application of Biogas Installations in Sub-Saharan Africa, *Biomass and Bioenergy* 70, Page 130-140. Elsevier.
- Lipton & Ravallion, 1995, *Poverty and Policy*. Dalam Chenery and Srinivasan, Handbook of Development Economics, Volume IIIB, Amsterdam Netherland; Elsevier Science B.V.
- Mudrajat, 2000, “Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan,” Airlangga, Surabaya.
- Mwirigi et all, 2014, Socio-Economic Hurdles to Widespread Adaption of Small-Scale Biogas Digesters in Sub-Saharan-African: A Review, *Biomass and Bioenergy* 70, Page 17-25, Elsevier.
- Setyawan, Albertus Hendri, 2010, Pengembangan Biogas Berbahan Baku Kotoran Ternak Upaya Mewujudkan Ketahanan Energi di Tingkat Rumah Tangga. *Tugas Akhir*. Tidak untuk dipublikasikan. Institut Teknologi Bandung.
- Todaro Michael, 2000, “Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yusgiantoro, Purnomo.2000. *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*. LP3ES. Jakarta.

Waskito, Didit. 2011. Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dengan Pemanfaatan Kotoran Sapi di Kawasan Usaha Peternakan Sapi. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

www.Wikipedia.org

www.bps.go.id

www.kompas.com

BAB VI

PERAN TRANSPORTASI LAUT PADA POROS MARITIM DALAM PENGURANGAN DISPARITAS ANTAR WILAYAH DI INDONESIA

**Adenantha L Dewa
Izza Mafruhah
Indah Susilowati**

A. Poros Maritim Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau besar dan kecil yang terpisahkan oleh 12 lautan dan 47 selat dengan luas 5,8 juta km² yang terdiri atas 2,8km² perairan pedalaman, 0,3juta km² laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif dengan garis pantai sepanjang 95,181 km. Kondisi ini menyebabkan sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia meliputi aspek ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan, lingkungan dan sosial budaya. Kondisi pulau yang terpisah–pisah tersebut mempunyai konsekwensi dibutuhkannya fasilitas transportasi laut yang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi baik secara regional, nasional maupun internasional. Pelabuhan sebagai infrastuktur penting dalam membangun ekonomi daerah khususnya pemerataan pembangunan (Yudhistira & Sofiyandi, 2017).

Era pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut diturunkan ke dalam tujuh misi pembangunan, di mana revitalisasi kebijakan kelautan sebagai upaya pembangunan poros maritim. Misi maritim tersebut adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim;
3. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

(Republik Indonesia, 2007)

Berdasarkan misi tersebut maka Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 menyusun rencana aksi kebijakan kelautan yang dijelaskan ke dalam lima kelompok program prioritas meliputi (1) Batas Maritim, ruang laut dan diplomasi laut yang merupakan unsur hukum dan kedaulatan bangsa termasuk di dalamnya pertahanan dan keamanan; (2) Industri maritim dan konektivitas laut; (3) Industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut yang meliputi usaha pengembangan potensi perikanan dan sumber daya alam yang berada di lepas pantai dan lautan ; (4) Pertahanan dan keamanan laut; (5) Budaya bahari.

Satu rencana aksi yang penting karena kondisi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan terpisahkan oleh lautan adalah industri maritim dan konektivitas laut. Poros ini merupakan upaya dalam menurunkan kesenjangan ekonomi antara wilayah khususnya barat dan timur. Poros industri maritim dan konektivitas laut mempunyai lima kegiatan prioritas yaitu (1) pelayaran; (2) pelabuhan laut; (3) Industri perkapalan; (4) Keselamatan pelayaran dan (5) insentif usaha dan iklim investasi. Kelima kegiatan proritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.1. Industri maritim dan konektivitas laut
(Sekretariat Kabinet RI, 2017)

Mobiltas logistik dan penumpang antarpulau menjadi sangat penting dalam menyelaraskan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya bagi masyarakat Indonesia. Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) merupakan pedoman utama dalam pengembangan transportasi nasional sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan yaitu Permen Perhubungan No. KM. 49 Tahun 2005. Sistranas menjelaskan bahwa jaringan transportasi laut meliputi dua unsur utama yaitu jejaring layanan transportasi laut yang berupa rute yang dibedakan menurut aktivitas dan sifat pelayanannya serta jejaring fasilitas transportasi laut yang meliputi *hub* yang berupa pelabuhan laut dan wilayah lalu lintas yang berupa jalur pelayaran (Kementerian Perhubungan RI, 2005).

B. Posisi Poros Maritim Indonesia di ASEAN

Selain pengembangan internal, potensi laut Indonesia juga memiliki sisi strategis dalam perdagangan internasional. *Global Trade Flow and Indonesia Context* menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang cukup tinggi karena kegiatan ekonomi dan pemasaran terutama antar kawasan Eropa, Afrika dan Asia Pasifik yang sudah tanpa batas negara sehingga transportasi menjadi kebutuhan utama dalam rangka mendukung mata rantai perdagangan global (Hanouz, Geiger, & Sean, 2014).

Beberapa fakta menunjukkan bahwa sektor maritim nasional masih menyisakan beberapa persoalan yang harus diselesaikan. *Pertama*, Pelabuhan memiliki peranan yang utama bagi peningkatan ekonomi nasional, namun *eksisting condition* menunjukkan bahwa Indonesia belum mempunyai pelabuhan dengan sistem tata kelola yang bagus menurut pandangan para penggunanya (Bappenas, 2017). Indikator kinerja pelabuhan komersial utama menunjukkan keseluruhan sistem pelabuhan belum efisien dan memerlukan peningkatan mutu pada hampir semua pelabuhan. Salah satu indikator utama yaitu tingkat okupansi tambatan kapal, rata-rata waktu persiapan perjalanan pulang (*turn-around*) dan waktu kerja sebagai persentase waktu *turn-around* masih berada di bawah standar internasional dan mengindikasikan bahwa kapal-kapal terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat tambatan kapal atau untuk mengantri di luar pelabuhan (Andiri, 2015; Pantouvakis, Chlomoudis, & Dimas, 2008; Ray, 2008)

Kedua, berdasarkan laporan Bappenas, peningkatan peran transportasi laut Indonesia baru mencapai 4% dari seluruh transportasi Indonesia di mana *share* tersebut sangat kecil untuk sebuah negara kepulauan.

Ketiga, posisi *Global Competitiveness Index (GCI)* Indonesia. GCI merupakan penilaian yang dilakukan oleh *World Economic Forum* terhadap 12 pilar yaitu *Pilar Institutions*, *Pillar 2. Infrastructure Pillar*, *3. Macroeconomic Environment*, *Pillar 4. Health and primary education*, *Pillar 5 Higher education and training*, *Pillar 6 Goods market efficiency*, *Pillar 7 Labor market efficiency*, *Pillar 8 Financial market development*, *Pillar 9 Technological Readiness*, *Pillar 10 Market size*, *Pillar 11 Business Sophistication*, *Pillar 12 Innovation*. Berdasarkan pilar dalam GCI tersebut, kondisi Indonesia selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan negara ASEAN adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Peringkat *Global Competitiveness Index (GCI)*
Indonesia dibanding ASEAN

Negara	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Rangking	Score	Rangking	Score
Indonesia	41	4.52	37	4.52
Malaysia	25	5.16	18	5.23
Thailand	34	4.64	32	4.64
Singapore	2	5,72	2	5.68
Philipina	57	4.36	47	4.39
Brunei	58	4.35	n/a	n/a
Vietnam	60	4.31	56	4.30

Sumber: (*World Economic Forum*, 2016)

Peringkat GCI Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Indonesia mengalami loncatan yang luar biasa di mana pada tahun 2008/2009 berada pada peringkat 55 dan berada di posisi 37 pada tahun 2016/2017. Loncatan tersebut disumbang dari peningkatan pengembangan infrastruktur. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur tersebut dirasa masih belum cukup dikelola dengan baik untuk mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia.

Tabel 6.2. Pilar Infrastruktur Berdasarkan Ranking GCI Tahun 2017

NEGARA	INFRASTRUCTURE TAHUN 2017									
	OVERALL		ROAD		RAILROAD		PORT		AIR TRANSPORT	
	RANK	SCORE	RANK	SCORE	RANK	SCORE	RANK	SCORE	RANK	SCORE
SINGAPURA	2	6,4	2	6,3	5	5,7	2	6,7	1	6,9
MALAYSIA	19	5,5	20	5,5	15	5,1	17	5,4	20	5,7
BRUNEI	67	4,1	41	4,7			87	3,7	84	4,1
THAILAND	72	4	60	4,2	77	2,5	65	4,2	42	5
INDONESIA	80	3,8	75	3,9	39	3,8	75	3,9	62	4,5
VIETNAM	85	3,6	89	3,5	52	3,1	77	3,8	86	4,1
KAMBOJA	95	3,4	93	3,4	98	1,6	76	3,9	99	3,9
PILIPHINA	112	3	106	3,1	89	2	113	2,9	116	3,2

Sumber: *Global Competitiveness Indeks (World Economic Forum, 2016)*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ternyata posisi Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN, sementara apabila dibandingkan infrastruktur antar moda maka bisa ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6.3. Perbandingan Antar-Infrastruktur

Kriteria	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2016/2017
Infrastruktur	82	82	72	80
Kereta Api	54	44	41	39
Trans. Laut	104	89	77	75
Trans. Udara	89	68	64	62

Sumber: (Bapenas, 2017)

Data pada tabel 6.3 menunjukkan bahwa selama periode 2012/2013 dan 2014-2015 sektor transportasi darat (yang diwakili oleh transportasi kereta api), transportasi laut dan udara mengalami peningkatan. Peringkat indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi khususnya transportasi laut meningkat dari tahun 2012 berada pada peringkat 104 menjadi peringkat 75 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, peningkatan peringkat sektor transportasi laut masih berada di posisi paling bawah jika dibandingkan dengan sektor transportasi lainnya.

C. Transportasi Laut

Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Perhubungan mengestimasi bahwa nilai potensi ekonomi nasional dari aktivitas transportasi laut adalah sebesar US\$ 20 miliar per tahun, sementara sampai tahun 2011 tercatat PDB sektor transportasi laut baru mencapai Rp 18.5 Miliar (US\$ 1,95 Miliar) atau hanya sekitar 9,7 % dari nilai potensi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan sektor perhubungan laut belum optimal memacu pertumbuhan ekonomi aktivitas transportasi laut nasional. Temuan ini menguatkan bahwa potensi transportasi laut belum terkelola dengan baik. (Indonesian Marine Council, 2012)

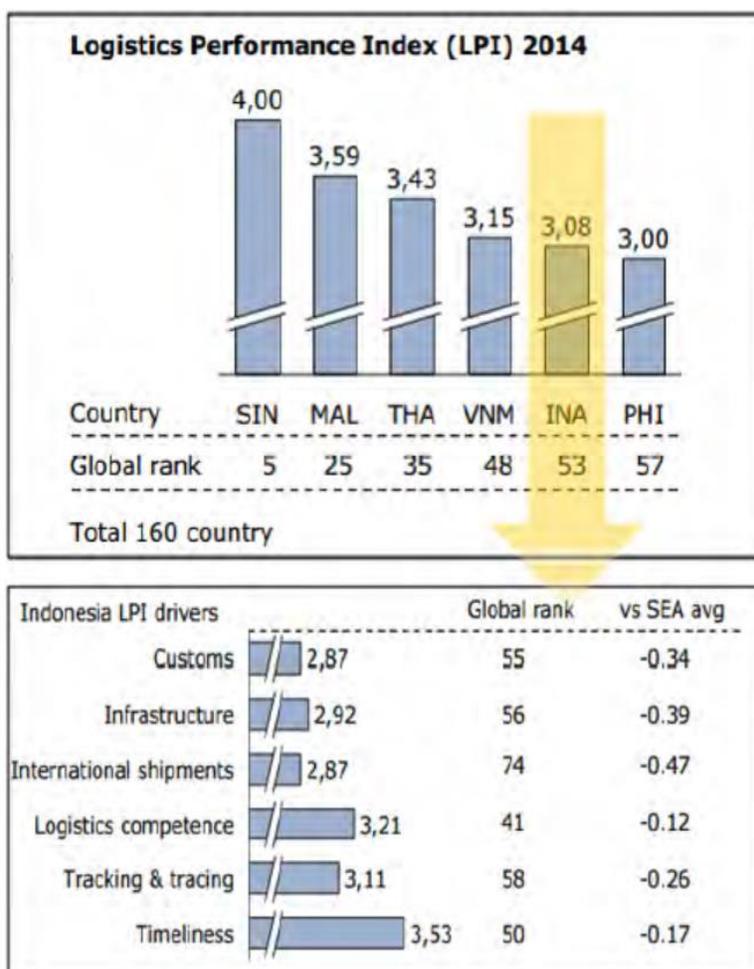
Data lain menunjukkan bahwa sebanyak 75% kapal-kapal Indonesia yang berlayar di perairan nusantara sudah berumur tua, walaupun masih laik pakai untuk pelayaran. Kapal laut yang sudah kuno mempunyai konsekuensi adanya pemborosan waktu pelayaran, sebagai contoh kapal *Lawit* yang melintasi Semarang-Sampit-Kumai-Surabaya mempunyai kecepatan hanya sekitar 10 knot per jam, sehingga dengan arus gelombang yang mencapai 2 knot per jam perjalanan antar pelabuhan menjadi lebih lama dan sering mengalami penundaan karena kapal datang terlambat. Di sisi lain kapal *Kelimutu* yang mempunyai peralatan lebih modern memiliki kecepatan 15 knot perjam sehingga mempunyai masa tempuh yang lebih cepat.

Permasalahan lain adalah bahwa infrastruktur pelabuhan di Indonesia juga belum mampu melayani kapal-kapal berteknologi terkini karena membutuhkan pelabuhan dengan kedalaman tinggi, sedangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia rata-rata dangkal sehingga *Indonesian National Shipowner Association* (INSA) belum bisa menggunakan kapal-kapal teknologi terkini (Indonesian Marine Council, 2012).

Uraian di atas menunjukkan bahwa sektor perhubungan laut, utamanya pelayaran nasional, secara umum dapat dinyatakan belum memiliki tata kelola bidang kelautan yang berjalan dengan baik, terintegrasi, efektif, dan efisien. Kondisi ini membutuhkan kebijakan tata kelola yang tepat agar dapat tumbuh secara efisien dan mampu bersaing dengan pelayaran asing. Tata kelola kelautan merupakan proses interaksi antara sektor publik dan sektor privat yang dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan kelautan serta meningkatkan potensi kondisi sosial ekonomi di bidang kelautan, misalnya peningkatan peluang kerja, peningkatan pendapatan, pelestarian sumberdaya dan lain sebagainya. Konsep ini menunjukkan bahwa tata kelola mempunyai wilayah pemikiran yang lebih luas karena persoalan kelautan merupakan persoalan publik yang harus diselesaikan melalui interaksi komprehensif antara sektor

publik dan privat, di mana sektor publik biasanya menjadi domain pemerintah, sedangkan sektor privat menjadi domain pelaku pemanfaatan sumberdaya kelautan. (Indonesian Marine Council, 2012)

Pengembangan transportasi laut yang tertinggal, berdampak pada rendahnya daya saing rantai logistik nasional, data world bank tentang *Logistic Performance Index* (LPI) menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 63 dari 160 negara pada tahun 2016. Peringkat ini menurun dibandingkan data tahun 2014 di mana Indonesia menempati peringkat 53. Meskipun sudah berada pada level tengah ke atas, namun masih menempatkan Indonesia di bawah negara tetangga seperti Singapura (peringkat 5), Malaysia (peringkat 25), Thailand (peringkat 35), dan Vietnam (peringkat 48) , (World Bank, 2016).



Gambar 6.2 Peringkat *Logistic Performance Index* (LPI) Tahun 2014
Sumber: (World Bank, 2016)

Kinerja sistem logistik Indonesia saat ini dapat dikatakan belum optimal yang ditunjukkan dari keadaan logistik nasional yang selama ini berjalan. Penggerak utama (*key commodity factor*) sebagai penggerak aktivitas logistik belum terkoordinasi secara efektif, infrastruktur transportasi belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas di antaranya peran pelabuhan *hub* yang belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermoda transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi dan wilayah *hinterland* (Cetak Biru Sislognas, 2010). Fenomena ini dipertegas kembali dalam laporan Bappenas (2015) bahwa dalam enam komponen yang diukur di dalam *Logistics Performance Index* (LPI), menunjukkan sektor kepelabuhanan memiliki permasalahan yang paling besar di mana komponen custom, infrastruktur dan *international shipments* masih berada di bawah rerata LPI.

D. Disparitas Antarwilayah dan Tol Laut

Kesenjangan ekonomi antarwilayah merupakan salah satu permasalahan utama di negara berkembang. Salah satu indikator kesenjangan adalah Gini Rasio yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini Ratio di Indonesia menunjukkan nilai yang kurang bagus karena mencapai 0,4 untuk daerah perkotaan dan 0,3 untuk daerah perdesaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.4. Indeks Gini di Indonesia

TAHUN		PERKOTAAN	PERDESAAN
2002		0.344	0.260
2005		0.351	0.280
2007		0.374	0.302
2008		0.367	0.300
2009	Semester 1	0.372	0.295
2010	Semester 1	0.382	0.315
2011	Semester	0.422	0.340
	Semester 2	0.396	0.329
2012	Semester 1	0.425	0.330
	Semester 2	0.425	0.327
2013	Semester 1	0.431	0.320
	Semester 2	0.424	0.324

2014	Semester 1	0.428	0.319
	Semester 2	0.433	0.336
2015	Semester 1	0.428	0.334
	Semester 2	0.419	0.329
2016	Semester 1	0.410	0.327
	Semester 2	0.409	0.316
2017	Semester 1	0.407	0.320
	Semester 2	0.404	0.320

Sumber: Laporan BPS 2018

World Bank melaporkan bahwa kondisi indeks Gini di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur. Angka yang terus menerus tinggi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan permasalahan sosial yang memicu perpecahan. *World Bank* telah mengidentifikasi adanya keberadaan empat faktor penyebab meningkatnya kesenjangan ekonomi tersebut, yaitu 1) *inequality of opportunity* (ketidaksamaan kesempatan); 2) *Unequal jobs* (ketidaksamaan dalam pekerjaan); 3) *High wealth concentration* (terkonsentrasinya aset pada kelompok kaya); 4) *low resiliency* (rendahnya resiliensi).

Pada kasus di Indonesia kesenjangan ekonomi antardaerah di Indonesia terus meningkat karena beberapa faktor, di antaranya:

1. Kawasan industri manufaktur yang terkonsentrasi pada perkotaan di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera
2. Kawasan Timur Indonesia memiliki pembangunan yang lebih rendah dibandingkan kawasan Barat yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi regional
3. Pembangunan kawasan perkotaan yang lebih cepat memicu kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan yang tinggi
4. Kegiatan pembangunan antar wilayah berjalan secara parsial
5. Kawasan – kawasan terluar (daerah perbatasan), pesisir dan kepulauan sering tidak memperoleh perhatian yang semestinya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan data bahwa pada tahun 2015 jumlah daerah tertinggal di kawasan Indonesia Barat jauh lebih sedikit dibandingkan kawasan Indonesia Timur. Sebanyak 84,43% atau 103 kabupaten di kawasan timur Indonesia termasuk dalam daerah tertinggal. Artinya hampir seluruh kabupaten memiliki rata – rata PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan

rata-rata nasional. Sementara pada kawasan Barat Indonesia hanya ada 19 kabupaten atau 15,57% yang masuk ke dalam kawasan tertinggal.

Kondisi di atas memicu pertumbuhan ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Barat yang tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan wilayah timur Indonesia. Data BPS pada tahun 2013 menunjukkan bahwa PDRB berdasarkan kawasan terhadap PDB adalah sebagai berikut, Jawa masih menjadi kontributor tertinggi yaitu sebesar 58,0%; Sumatera mempunyai kontribusi terhadap PDB sebesar 23,8% sebagai peringkat kedua, disusul oleh Kalimantan yang mencapai 8,7%; Sulawesi berada pada peringkat ke empat dengan kontribusi 4,8%; Bali dan Nusa Tenggara berada posisi ke lima yaitu 2,5% dan Papua dengan kontribusi 2,2% pada peringkat terakhir (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Apabila dilihat potensi Papua dan Kalimantan sebenarnya kontribusi yang dibukukan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, namun karena berbagai kendala khususnya dalam bidang transportasi maka kondisi ini belum memungkinkan untuk dilakukan pembangunan yang optimal.

Pemerintahan Jokowi dengan kebijakan poros maritim memprogramkan pemerataan pembangunan dengan membuat program tol laut. Pengertian tol laut adalah peningkatan transportasi laut yang dilakukan dengan membuka trayek pelayaran yang selama ini dianggap tidak menguntungkan. Pembangunan tol laut bukan merupakan kebijakan populis karena membutuhkan biaya infrastruktur yang besar, memakan waktu yang lama untuk menunjukkan hasilnya, namun dalam jangka panjang akan cukup efektif dalam mengeliminir disparitas regional antar wilayah barat dan timur. Mahalnya ongkos transportasi yang berdampak pada tingginya biaya saluran distribusi selama ini meningkatkan kesenjangan antara berbagai wilayah di kawasan timur.

Tol laut akan mendorong mobilitas penduduk antarpulau, meningkatkan perputaran komoditas barang dan jasa antar wilayah, memangkas biaya distribusi yang selama ini menjadi kendala. Disparitas harga yang sangat tinggi khususnya pada kawasan timur mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu maka tol laut merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan transportasi pada negara kepulauan seperti Indonesia.

Tol laut diharapkan menjadi solusi untuk memperlancar arus pertukaran komoditas, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Disparitas harga yang sangat tinggi selama ini dirasakan oleh masyarakat di Wilayah Timur Indonesia karena biaya logistik yang tinggi, contohnya Papua.

Langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 1) Pembangunan pelabuhan pada beberapa tempat strategis; 2) Perbaikan

fasilitas pelabuhan sehingga memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna; 3) Peningkatan kualitas kapal dan pelayanan kapal termasuk dalam aspek ketepatan waktu; 4) Pengusahaan pelayaran perintis yang lebih murah, berkualitas dan merata.

Salah satu upaya kongkrit yang dilakukan adalah dengan membuka enam rute yang selama ini dianggap tidak menguntungkan yaitu 1) Tanjung priok – Papua; 2) Tanjung Priok – Natuna; 3) Tanjung Perak ke seluruh pelabuhan di NTT; 4) Tanjung Perak – Maluku; 5) Tanjung Perak Papua; 6) Tanjung Perak Papua Barat. Pembukaan tol laut tersebut untuk memangkas biaya saluran distribusi yang tinggi, sehingga akan mengurangi harga barang di tangan konsumen. Penurunan biaya yang berkonsekwensi pada penurunan harga secara langsung akan mengurangi inflasi barang dan kesenjangan harga antardaerah.

E. Penutup

Disparitas antar wilayah di Indonesia membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan holistik, bukan hanya pembangunan infrastruktur namun juga kualitas jaringan antar wilayah yang terbangun melalui transportasi laut. Kebijakan tol laut sebagai salah satu andalam dalam Poros Maritim, diharapkan akan menjadi salah satu solusi.

Langkah – langkah dalam pengembangan transportasi laut anara lain adalah dengan 1) Pembangunan pelabuhan – pelabuhan di berbagai pulau yang terpencil dan terluar sehingga akan membuka saluran distribusi barang dan jasa yang lebih merata; 2) Dukungan terhadap upaya pembuatan kapal-kapal modern yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri seperti PT PAL, sehingga selain meningkatkan jumlah dan modernisasi kapal, membuka lapangan kerja dan juga memberikan kesempatan terhadap putra bangsa untuk bekerja lebih aktif dalam pembangunan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan bagi pengguna sehingga meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan baik kapal penumpang maupun kargo; 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola transportasi laut.

REFERENSI

- Andiri, S. A. (2015). Quality of Public Transport Service (Descriptive Study About Quality of Passenger Ship Service Gresik Route - Bawean Port Gresik). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–7.
- Bappenas. (2017). The Direction of maritime development in Indonesia. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hanouz, M. D., Geiger, T., & Sean, D. (2014). *The Global Enabling Trade Report 2014*. *World Economic Forum*. <https://doi.org/92-95044-53-3>
- Indonesian Marine Council. (2012). *Kebijakan Kelautan Indonesia Buku I*. Jakarta: Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.
- Kementerian Perhubungan RI. Peraturan Menteri Perhubungan no KM 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (2005).
- Pantouvakis, A., Chlomoudis, C., & Dimas, A. (2008). Testing the SERVQUAL scale in the passenger port industry: A confirmatory study. *Maritime Policy and Management*, 35(5), 449–467. <https://doi.org/10.1080/03088830802352095>
- Ray, D. (2008). *Reformasi Sektor Pelabuhan Indonesia Dan Uu Pelayaran Tahun 2008*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (2007). Indonesia. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sekretariat Kabinet RI. Rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia 2016-2019 (2017). Indonesia.
- World Bank. (2016). International LPI from 2007 to 2016. New York: The world bank group. Retrieved from <http://lpi.worldbank.org/international/global>
- World Economic Forum. (2016). *The Global Competitiveness Report 2016–2017*. *World Economic Forum Reports 2016*. Geneva. <https://doi.org/92-95044-35-5>
- Yudhistira, M. H., & Sofiyandi, Y. (2017). Seaport status, port access, and regional economic development in Indonesia. *Maritime Economics & Logistics*, (4), 1–22. <https://doi.org/10.1057/s41278-017-0089-1>

BAB VII

PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK PENGELOLAAN EKONOMI LOKAL DI SUBOSUKA WONOSRATEN

Lukman Hakim

A. Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak reformasi membawa banyak pelajaran yang penting. Di beberapa tempat di Indonesia lahir berbagai praktik-praktik terbaik (*best practices*) kebijakan publik. Praktik-praktik terbaik pada tingkat local ini pada gilirannya akan menjadi menjadi sumber inspirasi bagi kabupaten kota untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Berikut ini ada beberapa praktik-praktik terbaik ekonomi local dari beberapa Kab/kota di Wilayah eks Karesidenan Surakarta yang terdiri atas Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten atau disingkat menjadi Subosuka Wonosraten. Ada tiga praktik terbaik yang akan diangkat dalam tulisan ini yakni sistem pelayanan terpadu, penataan kaki lima, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

B. Sistem Pelayanan Terpadu

Sekitar tahun 2005 kemitraan (*partnership*) mengadakan pemilihan sistem Sistem Pelayanan Terpadu terbaik yang diterapkan di Kabupaten/Kota. Terjaringlah tiga (3) kabupaten yang mempunyai praktik terbaik yakni Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Kabupaten Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sragen Provinis Jawa Tengah. Ketiga kabupaten tersebut pantas untuk diangkat karena telah teruji di masing-masing daerahnya.

Dalam diskusi yang dilakukan oleh Partnership bekerjasama dengan USAID ketika itu, ketiga kabupaten itu yang dianggap mempunyai sistem

pelayanan terpadu yang paling baik. Namun setelah dievaluasi, ternyata ada perbedaan yang mendasar. Yakni pada Kabupaten Pare-pare dan Kabupaten Jembrana, posisi Sistem Pelayanan Terpadu di kedua kabupaten itu masih seperti “tukang pos”. Yakni kantor Sistem Pelayanan Terpadu menerima pengajuan perijinan, kemudian diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengeksekusinya. Kelemahan dari sistem ini, penyelesaian perijinan tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena sangat tergantung dengan kecepatan kerja SKPD masing-masing. Sementara posisi Kantor Sistem Pelayanan Terpadu hanya bisa menunggu saja. Maka sistem ini dianggap kurang efisien dan efektif.

Sementara itu, untuk Sistem Pelayanan Terpadu di Kabupaten Sragen lebih maju dari kedua kabupaten di atas. Karena justru Kantor Sistem Pelayanan Terpadu itu sudah menarik kewenangan SKPD untuk mengeluarkan ijin. SKPD diminta mengirim stafnya yang paham tentang perijinan untuk berkantor di Kantor Sistem Pelayanan Terpadu tersebut. Dalam penjelasan yang lebih detil, model Sistem Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen ini sangat menarik. Dimulai dari koordinasi antara Bupati dan Kepala SKPD, di mana Bupati menarik seluruh kewenangan perijinan SKPD. Jika ada Kepala SKPD yang tidak setuju dengan kebijakan ini langsung dimutasi, maka tentu saja seluruh SKPD menyerahkan kewenangan itu kepada Bupati. Yang kemudian oleh Bupati kewenangan perijinan itu diserahkan kepada Kantor Sistem Pelayanan Terpadu. Dengan sistem seperti ini waktu penyelesaian perijinan dapat diprediksi. Misalnya perijinan SIUP hanya satu hari, perijinan gangguan (HO) hanya tiga hari, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Partnership menetapkan bahwa sistem pelayanan terpadu Kabupaten Sragen adalah paling baik di antara kabupaten kota se Indonesia.

Kantor Sistem Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen melayani 52 izin, sedangkan di kecamatan 16 izin, dan 8 kewenangan yang diserahkan ke desa. Layanannya antara lain dari pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, sampai izin 106iding106106 skala kecil. Sebagai contoh untuk pelayanan KTP hanya memerlukan waktu paling lima menit. Selain itu setelah di dalam terkait dengan Sistem Pelayanan Terpadu ini, Kabupaten Sragen juga membuat sistem teknologi informasi yang bisa online sampai tingkat kecamatan dengan melalui gelombang radio. Sehingga menghemat pulsa telpon untuk melakukan komunikasi. Bahkan dengan sistem komunikasi, Bupati bisa langsung berdialog dan memberikan instruksi kepada semua lurah yang berkumpul di kantor Kecamatan, secara *on line*. Selain itu, untuk tata persuratan sudah menerapkan sistem *paperless*, sehingga dapat melakukan penghematan baik untuk pulsa telepon dan faks sampai jasa kurir ekspedisi surat (Koran Tempo, 2006).

C. Penataan Kaki Lima

Salah satu yang paling monumental dari kebijakan Walikota Joko Widodo adalah penataan kaki lima di Kota Surakarta. Sebagai dampak krisis ekonomi 1998 melahirkan banyak pedagang kaki lima terutama yang terpusat di sebuah Kawasan Monumen 45 Banjarsari. Mereka biasa disebut sebagai pedagang “obrokan” atau klithikan yakni menjual barang-barang bekas seperti onderdil motor, mobil dan juga barang-barang elektronik dengan hanya menggelar tikar untuk dagangannya itu. Jika mereka memerlukan listrik tinggal ambil “nyanthol” PLN di tepi jalan itu. Pada mulainya hanya hanya sedikit pedagang, namun dengan seiringnya waktu pedagang obrokan itu semakin banyak. Bahkan jumlahnya mencapai 107iding 1000 pedagang. Selain membuat jalan macet, pemandangan daerah itu juga semakin terlihat kumuh kotor yang tidak sedap di pandang mata, sedangkan bila malam tiba daerah itu menjadi pusat tindak kemesuman dan prostitusi. Jadi memang situasi seperti ini menyebabkan lahirnya keresahan warga, maka harus segera di atasi.

Sesuai dengan RUTRK Kota Surakarta, kawasan ini seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau 107iding. Untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota segera menyiapkan tempat untuk melakukan relokasi, maka segera dibangun khusus pasar oprokan atau klitikan di daerah Semanggi. Yang kemudian dikenal dengan Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi. Penyiapan pasar untuk relokasi PKL itu sebenarnya hal yang biasa saja. Yang luar biasa dari proses relokasi itu sendiri, karena di berbagai tempat di Indonesia merelokasi PKL sering melahirkan ekse 107iding107107 antara lain konflik antara pedagang dan aparat. Apalagi Kota Solo sudah cukup lama terkenal dengan kota “sumbu pendek”. Beberapa fase konflik horizontal sering terjadi di Kota Solo, misalkan kerusuhan anti China tahun 1980-an, kemudian aksi kerusuhan pada tahun 1998, dan 1999. Bahkan pada tahun 1999 Kantor Balaikota sempat dibakar oleh massa. Dalam beberapa aksi kerusuhan itu salah satunya sebabnya adalah adanya komunikasi yang tersumbat antara masyarakat dan pemerintah. Maka untuk mengatasi itu, pemerintah perlu dilakukan tindakan dan langkah komunikasi kerakyatan yang lebih santun dan humanis.

Supaya proses relokasi itu berjalan lancar, maka Walikota Joko Widodo melakukan upaya yang sangat unik. Para pedagang oprokan itu diajak makan siang di rumah dinas Walikota di Loji Gandrung. Pada mulanya para pedagang itu karena sudah dengar-dengar akan direlokasi sudah menyiapkan perlawanan. Bahkan beberapa LSM sudah disiapkan untuk melakukan pembelaan. Ketika untuk pertama kali diundang makan

siang oleh Walikota di Rumah Dinas Lodji Gandrung, para PKL sudah menyiapkan berbagai sepanduk yang isinya menolak relokasi. Namun hebatnya Walikota pada pertemuan pertama, tidak menyampaikan apa-apa.

Bahkan undangan makan siang sampai Ini yang menyebabkan para PKL menjadi Selama 54 kali makan siang itu, tak sepele kata pun dari Walikota terlontar untuk melakukan relokasi. Sampai akhirnya, malah para pedagang itu yang bertanya ke Walikota apa maksudnya diajak makan siang berkali-kali itu, Pada akhirnya ketika Walikota menjelaskan maksudnya bahwa mereka akan direlokasi ke Pasar Klitikikan Notoharjo, tidak ada satu pun para pedagang yang protes. Ini menandakan pendekatan Walikota sukses, dengan mengundang makan siang sebanyak 54 kali, para PKL merasa “diwongke” atau diorangkan. Atau dengan kata lain dengan menggunakan filosofi jawa bahwa orang jawa itu kalau “di pangku mati”, maka membuat proses pembuatan kebijakan itu menjadi lancar tanpa penolakan.

Beberapa permintaan dari para pedagang PKL seperti agar kios digratiskan langsung diperjuangkan ke DPRD sehingga menghasilkan kompromi bahwa pedagang tidak perlu membayar uang muka, namun cukup membayar retribusi harian sebesar Rp2.600/hari. Dengan retribusi itu, dalam delapan tahun, modal Rp 8 Miliar yang digelontorkan untuk membangun pasar itu akan kembali. Selain itu, Pemerintah juga membantu mensosialisasikan dan mengkampanye keberadaan pasar itu melalui berbagai media, untuk tetap menjamin agar para pelanggan berkunjung ke pasar baru itu. Selain itu, dalam memboyong para pedagang tersebut dilakukan prosesi kirab yang diarak sepanjang jalan 108iding108108 Kota Solo yang disaksikan masyarakat luas. Semua pedagang menggunakan baju adat yang diarah oleh prajurit 108iding108. Sehingga prosesi kirab menjadi sangat meriah, megah dan manusiasi. Prosesi ini diikuti hampir seluruh pedagang yaitu sebanyak 989 PKL (Mahendrata, 2010).

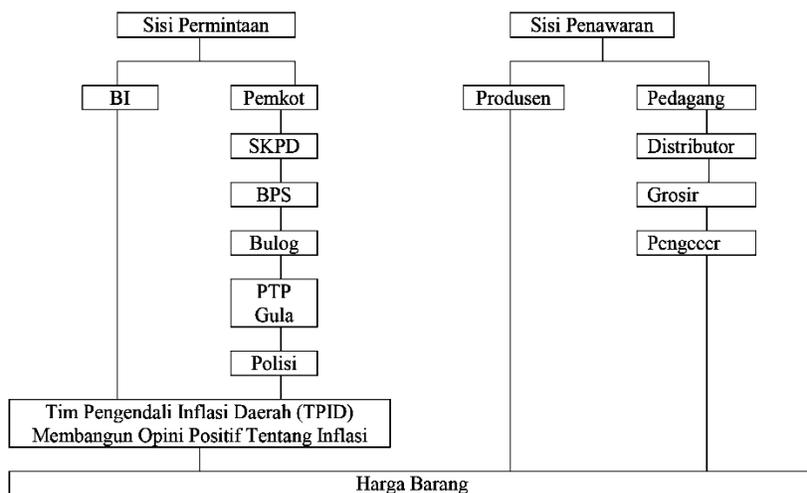
D. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Ketika berlangsung Debat Calon Presiden 2014-2019, Joko Widodo menyampaikan pertanyaan kepada Prabowo Subiyanto apa itu TPID? jawab Prabowo saya tidak hafal singkatan-singkatan. Yang menarik dari cerita di atas, tampakan Joko Widodo sangat terkesan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengapa? Karena Joko Widodo menganggap bahwa TPID merupakan “karyanya”, bersama dengan Bank Indonesia (BI) Solo. Waktu itu Wali Kota Joko Widodo bersama dengan Kepala BI Solo Dewi Setyowati bersepakat untuk membuat TPID. Pada waktu itu yang sudah ada ada Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) di mana anggotanya adalah Bank Indonesia dan BPS pada tingkat pusat. Maka ide untuk melahirkan TPID di daerah merupakan ide orisinil dari

Pemerintah Kota Solo di mana untuk pertama kali diterapkan di daerah yang kemudian dicontoh oleh daerah lain.

Dari analisis yang dibuat oleh Hakim (2014) terlihat bahwa TPID merupakan sebuah model ketahanan pangan pada masa otonomi daerah, ketika Bulog mengalami pelemahan peran. Seperti kita ketahui bersama, Ketahanan pangan Orde Baru sangat kuat, manakala lembaga penyangga seperti Bulog berperan mengendalikan ketersediaan logistic sejak awal Orde Baru. Namun atas desakan tangan-tangan internasional, posisi Bulog pada masa reformasi harus dikurangi, sehingga Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak lagi mempunyai kewenangan luas dalam mengendalikan ketersediaan pangan seperti pada masa Orde Baru lalu. Saat ini Bulog telah berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan hanya mendapatkan tugas yang sangat terbatas yakni mengendalikan harga dan ketersediaan beras. Bulog juga tidak bisa melakukan operasi pasar langsung seperti era dulu, melainkan atas permintaan Kepala Daerah setempat. Praktis pengendalian harga bahan kebutuhan pokok selain beras, saat ini benar-benar dikendalikan oleh pasar. Situasi ini memerlukan sebuah lembaga yang bertugas mengendalikan harga yang melibatkan seluruh *Stakeholders*, inilah menjadi alasan lahirnya TPID.

Skema Jalur Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Inflasi



Dengan TPID beberapa hal-hal fundamental masalah inflasi dan ketahanan pangan dapat di atasi. Ini merupakan salah satu respons di mana di Kota Solo sering terjadinya kenaikan harga beberapa komoditi kebutuhan pokok. TPID akan melakukan kajian berdasarkan data yang

disediakan oleh BPS. Kemudian TPID akan memberikan sosialisasi dan solusi ke masyarakat bagaimana mengatasi kenaikan harga tersebut. Dalam bahasa ekonomi makro, TPID dapat membantu pemerintah Kota untuk mengurangi apa yang disebut dengan informasi yang tidak simetris (asymmetric information). Karena informasi yang tidak simetris akan melahirkan kepanikan, seperti pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998 dan ujung-ujungnya adalah akan meningkatkan inflasi. Sebagai contoh pada medo 2008 terjadi kenaikan harga cabe di Kota Solo. TPID melakukan 110iding, berdasarkan data yang dipunyai oleh BPS dan informasi dari para pedagang besar cabe, ditemukan bahwa kenaikan harga cabe disebabkan adanya masalah distribusi. Maka TPID memberikan keterangan kepada masyarakat melalui mass media, agar masyarakat tidak perlu panic, karena masalah kelangkaan cabe disebabkan oleh masalah distribusi, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama pasokan akan tiba. Dengan moral suatif yang dilakukan oleh TPID itu, harga-harga berangsur-angsur turun. Dalam perkembangannya secara umum TPID di Solo telah banyak membantu Pemerintah Kota untuk menstabilkan harga dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.

Maka, pada 16 Mei 2012, Kota Solo mendapatkan penghargaan dari Pemerintah pusat sebagai kota dengan “Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik bersama dengan Kota Pematang Siantar, Kota Balikpapan, Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada mada itu terdapat 44 pusat TPID yang tersebar di seluruh provinsi, mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan kenaikan harga, khususnya harga pangan di daerah-daerah. Pada masa itu memang yang mempunyai TPID biasanya kab/kota yang ada kantor BI, namun saat ini semua Kabupaten/Kota diwajibkan mempunyai TPID.

E. Penutup

Terakhir sebenarnya masih banyak beberapa praktik terbaik dari pembuatan kebijakan ekonomi lokal yang bisa diangkat misalnya adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sentra atau kluster industri sebagai penjawantahan program one village one product (OVOP), penataan pasar tradisonal dan masih banyak lagi yang mungkin bisa dieksplorasi dalam kajian berikutnya. Secara umum dapat dinyatakan di sini, bahwa dari semua praktik-praktik terbaik yang dibahas di atas dapat lahir lebih banyak disebabkan oleh kemauan politik dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota. Sehingga visi, misi dan kepemimpinan Bupati dan Walikota merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan daerah dan yang berkontribusi paling besar bagaimana kebijakan yang diterapkan menjadi praktik-praktik terbaik pembangunan daerah.

REFERENSI

- Bakhtiar, Arief Rizky (2012). Relokasi PKL & Revitalisasi Pasar Tradisional: Belajar dari Solo <http://arief-rizky-bakhtiar.blog.ugm.ac.id/2012/05/14/relokasi-pkl-revitalisasi-pasar-tradisional-belajar-dari-solo/>
- Hakim, Lukman, et al (2014). Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan Daerah: Penatalaksanaan dan Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan. *Quantitative Economic Journal*, Unimed Vol 03 No 02, Juni.
- Layanan Satu Pintu Kabupaten Sragen (2006). *Koran Tempo*. diambil dari <https://antikorupsi.org/id/news/layanan-satu-pintu-kabupaten-sragen>
- Mehendrata, Gading, (2010). Joko Widodo: CEO “Kaki Lima” Mengubah Wajah Surakarta dari <https://gadingmahendrata.wordpress.com/2010/11/07/joko-%E2%80%98jokowi%E2%80%99-widodo-ceo-%E2%80%98kaki-lima%E2%80%99-mengubah-wajah-surakarta/>
- Wibawa, Fahmi, (2007). *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: Grasindo

BAB VIII

KEARIFAN LOKAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DAN REGULASI: STUDI KASUS TRADISI SASI DI MALUKU

Bhimo Rizky Samudro
Dinarjati Eka Puspitasari
Yogi Pasca Pratama

A. Pendahuluan

Perspektif kearifan lokal mengarahkan pemahaman publik terhadap bagaimana peran masyarakat secara budaya dan tradisi menjaga keberlanjutan lingkungan sosial dan alam. Dalam hal ini, peran tradisi dan kebudayaan diperlukan untuk mengatur masyarakat secara alamiah dalam melakukan aktivitas yang bersifat konstruktif terhadap lingkungan (Kapp 1970, Valentinov 2014). Di sisi lain, arus globalisasi dalam tiga dekade terakhir ini semakin mengurangi kesadaran masyarakat terhadap nilai manfaat dari kebudayaan lokal di Indonesia. Penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal secara tidak langsung akan berdampak pada melemahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap tata nilai sosial dan lingkungan.

Proses penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai manfaat dari kearifan dan kebudayaan lokal juga disebabkan karena masyarakat masih awam terhadap beragam jenis kebudayaan bangsa Indonesia yang konstruktif bagi lingkungan sosial dan alam. Di samping itu, masyarakat juga kurang memahami tentang makna dan hakekat dari suatu tradisi atau budaya. Sebagai contoh, masyarakat di perkotaan terkadang sudah tidak mempedulikan arti penting tradisi “mis-merti”. Tradisi mis-merti memiliki beberapa nilai manfaat yang hakekatnya wajib

diketahui oleh masyarakat terutama generasi muda. Mis-merti mengarahkan kesadaran masyarakat untuk secara kolektif membersihkan lingkungan alam. Disamping itu, tradisi ini cukup dapat membina kerjasama dan kebersamaan masyarakat dalam lingkungan sosial. Di sisi lain, ketidakpedulian dan lemahnya pengetahuan terhadap makna nilai budaya dan tradisi lokal maka beragam manfaat positif terhadap lingkungan alam dan sosial juga tidak terealisasikan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka studi ini akan mencoba memberikan perspektif konstruktif terhadap peran salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia. Secara spesifik, studi ini melakukan kajian terhadap tradisi budaya Sasi di Maluku. Sasi merupakan tradisi tata nilai yang membatasi atau melarang pemanfaatan terhadap sumberdaya alam tertentu atas dasar untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam (Thorburn 2000). Novaczek dkk. (2001) dan MacDonald, MacFaydden dan Novaczek (2016) menjelaskan bahwa tradisi Sasi juga berupa peraturan yang bermanfaat untuk mengarahkan masyarakat memelihara tata karma hidup bermasyarakat dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Sasi yang cukup terkenal adalah Sasi terhadap ikan Lompa di pulau Haruku. Populasi ikan Lompa dijaga habitat dan regenerasinya melalui tradisi ini. Di sisi lain, tradisi Sasi juga mengadakan upacara panen ikan Lompa yang melibatkan masyarakat apabila populasi ikan Lompa telah memasuki usia produktif untuk dipanen secara teratur.

Dalam melakukan pembahasan terhadap tradisi Sasi tersebut, studi ini akan mempergunakan prinsip dasar dari ekonomi politik heterodoks (*heterodox political economy*). Prinsip dasar dari ekonomi politik heterodoks memiliki manfaat dalam mendukung penelitian yang bertema sosial-kemasyarakatan (O'Hara 2007). Studi ini mempergunakan pendekatan ekonomi politik heterodoks yang dapat membantu memberikan pemahaman terhadap tradisi Sasi dan sekaligus dapat melakukan kajian umum terhadap hakekat Sasi sebagai salah bentuk kearifan lokal di Indonesia yang bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Landasan Teori

Salah satu prinsip dasar dari ekonomi politik heterodoks adalah prinsip *Circular and Cumulative Causation (CCC)*. Di dalam ekonomi politik, prinsip CCC dapat menjelaskan hubungan dari beragam jenis variabel yang ada dalam sistem global, di mana akumulasi dari interaksi antar variabel bersifat dinamis dalam periode waktu tertentu (O'Hara 2008). Gunnar Myrdal (1968), Samudro, Bloch dan Salim (2015)

berpendapat bahwa CCC adalah sebuah hipotesa riset yang mampu melihat hubungan interaksi dinamis antar variabel sosio-ekonomi. Proses sirkulasi hubungan antar beragam variabel akan membentuk akumulasi sebagai bentuk adanya hubungan sebab-akibat. Akumulasi sebab-akibat akan membentuk dampak yang semakin besar di dalam proses sirkulasi dinamis antar variabel. Proses ini dapat memiliki arti positif atau negatif dalam setiap dampak yang dihasilkan secara berkesinambungan.

Sejalan dengan prinsip CCC tersebut, studi ini membahas nilai manfaat dari tradisi Sasi yang diterapkan oleh masyarakat di Maluku. Nilai manfaat dari kearifan lokal ini diasumsikan sebagai dampak dari proses sirkulasi hubungan antar masyarakat dan lingkungan yang mengalami amplifikasi dalam periode waktu tertentu. Dalam studi ini, proses analisis akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu survei nilai manfaat dan pembuatan model untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari pemanfaatan tradisi Sasi.

Pada tahap analisis, prinsip CCC akan didukung dengan metode pembahasan yang berbasis pada simplifikasi dan generalisasi subjek permasalahan. Kaldor (1957) memperkenalkan konsep *stylized fact* dalam menganalisa suatu permasalahan. Konsep *stylized fact* mengarahkan analisa pada pengambilan pola umum (*general pattern*) terhadap suatu hubungan relasi antar beberapa aspek atau variabel. Pengambilan pola umum ini akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengambilan kesimpulan. Dalam studi ini, tradisi Sasi akan dianalisis dalam perspektif *stylized fact* sebagai generalisasi pemahaman terhadap kemanfaatan suatu bentuk kearifan lokal terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam memudahkan dalam pengamatan *stylized fact* terhadap tradisi Sasi, studi ini akan membagi nilai manfaat ke dalam tiga aspek dengan mengacu pada tiga inti analisis dari Joseph Schumpeter dari siklus bisnis, yaitu *amplitude*, *periodicity* dan *regularity*. Untuk lebih memudahkan analisa, Tabel 8.1 memperlihatkan secara lebih sederhana tentang *stylized fact* nilai manfaat tradisi Sasi terhadap lingkungan hidup dikaji dari sudut pandang ekonomi politik heterodoks (prinsip CCC).

Tabel 8.1. *Stylized Fact*-Nilai Manfaat Tradisi Sasi terhadap Lingkungan Hidup

	Lingkungan Alam	Sistem Relasi Sosial	Sosio-ekonomi
<i>Amplitudo</i>	Menjaga populasi SDA dalam jangka waktu tertentu	Mengurangi eksploitasi masyarakat terhadap SDA	Membatasi pola konsumtif masyarakat Membatasi pola monopoli dalam pemanfaatan SDA
<i>Periodicity</i>	Mengatur regenerasi SDA secara periodik	Mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan SDA di saat regenerasi SDA telah berlangsung (Sasi mengarahkan masyarakat untuk melakukan panen massal pada saat tertentu saja—misal:panen ikan Lompa)	Mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan nilai ekonomis pada saat telah ada keberlanjutan SDA (misal: masyarakat dapat memanfaatkan dan menjual hasil panen ikan Lompa)
<i>Regularity</i>	Keberlanjutan dari aspek tradisi dan sejarah menjamin keberlanjutan dari aspek lingkungan hidup-SDA	Menjaga kebersamaan dan sistem relasi sosial masyarakat dalam jangka waktu lama (misal:kebersamaan warga saat panen massal)	Tradisi ini mengarahkan pola hidup yang tidak konsumtif dan non-monopolistik dalam usaha dengan basis kepedulian terhadap alam dan sistem relasi-sosial

Sources: Penulis melakukan survey stylized facts dari Thorburn (2000), Novacek dkk (2001), MacDonald, MacFaydden dan Novacek (2016)

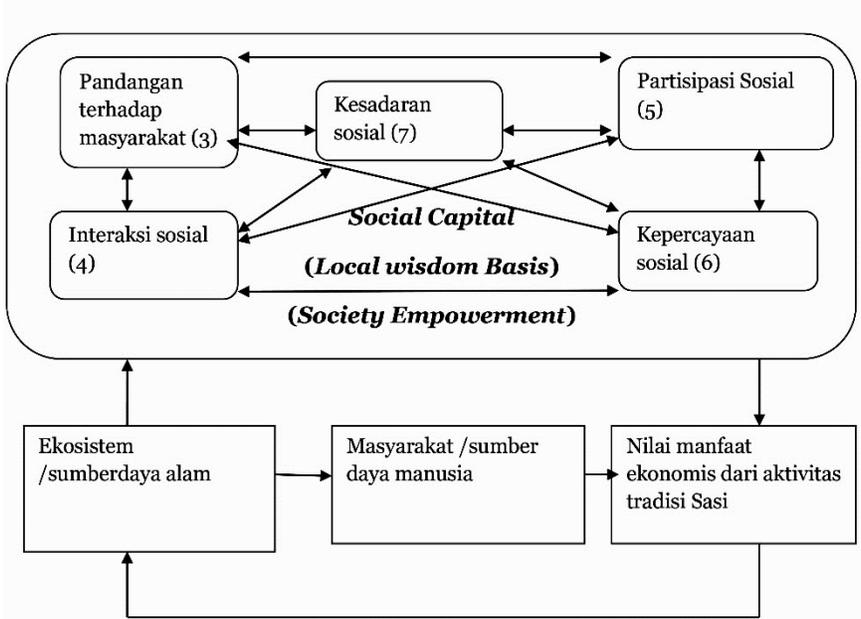
C. Pembahasan: *Circular and Cumulative Causation* (CCC) dalam Tradisi Sasi

Dengan berdasarkan data pada Tabel 8.1, studi ini mencoba melakukan konstruksi model dalam menjelaskan prinsip CCC dalam proses tradisi Sasi. Untuk itu, studi ini juga memasukkan beberapa asumsi dasar sebelum melakukan konstruksi dalam prinsip CCC. Berikut ini beberapa asumsi dasar yang dibangun berdasarkan stylized fact dan beberapa kajian pustaka yang relevan tentang tradisi Sasi:

1. Studi ini menggunakan konsep *social capital* karena melihat bahwa tradisi Sasi adalah sebuah bentuk kearifan lokal dan juga sekaligus sebagai *social capital*.
2. Studi ini melakukan investigasi dalam kajian pustaka dari Putnam (2000), Harper (2001), van Schaik (2002), Harper and Kelly (2003), sehingga *social capital* didefinisikan sebagai beberapa faktor sosial utama yang terdiri dari persepsi sosial, interaksi sosial, kesadaran sosial, partisipasi sosial dan kepercayaan sosial-masyarakat.
3. Tradisi Sasi mengarahkan persepsi masyarakat bahwa sosial, masyarakat dan lingkungan hidup adalah sesuatu yang harus dihargai dan dijaga keberlanjutannya.
4. Tradisi Sasi membuat sebuah konstruksi interaksi sosial dengan didasari pada kepentingan bersama secara berkesinambungan (misal: interaksi sosial pada saat panen massal).
5. Berkaitan dengan poin no 4, tradisi Sasi juga mengarahkan pada partisipasi sosial yang berkelanjutan.
6. Tradisi Sasi juga mengarahkan pada adanya kepercayaan yang tinggi terhadap sistem relasi sosial dan lingkungan hidup (*social trust*).
7. Kepercayaan yang tinggi terhadap sistem relasi sosial memudahkan terbentuknya kesadaran sosial dari masyarakat dalam waktu yang lama.
8. Poin 3, 4, 5, 6 and 7 merupakan komponen pembentuk *social capital* dan kearifan lokal yang ada dalam tradisi Sasi.

Berdasarkan asumsi di atas, studi ini akan menjelaskan sirkulasi dari komponen budaya, sistem relasi sosial-kemasyarakatan dalam membentuk kearifan lokal yang berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Gambar 8.1 di bawah ini menunjukkan kombinasi antara tradisi dan sistem relasi sosial dapat menjaga lingkungan hidup dengan bentuk

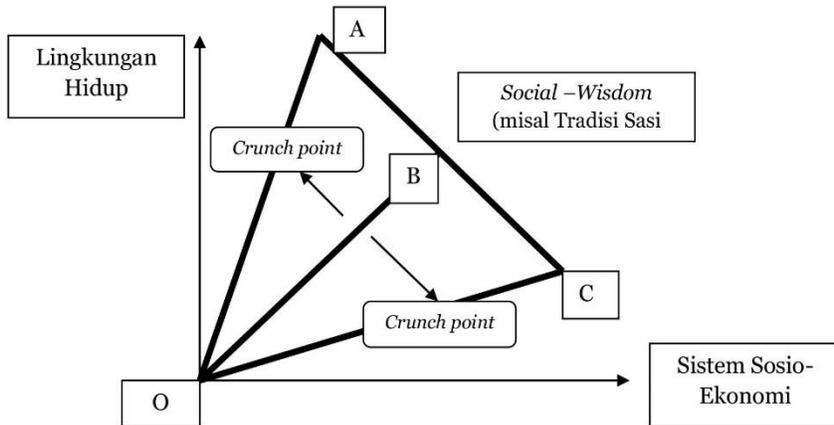
akumulasi kearifan lokal. Secara khusus di Figure 1, kotak segi-empat menunjukkan 3 aspek utama yang berkaitan yaitu lingkungan alam, sistem relasi sosial dan nilai sosio-ekonomi. Sementara segi-empat tanpa sudut menunjukkan rangkaian dari sistem CCC dari social capital dan kearifan lokal (misal interaksi sosial—mengacu pada asumsi poin 4). Tanda panah adalah merupakan tanda sirkulasi hubungan sosio-kemasyarakatan antara berbagai aspek dalam suatu proses tradisi yang berkelanjutan dalam historis-periode waktu tertentu.



Gambar 8.1. Circular and Cumulative Causation dalam Tradisi Sasi

Proses CCC dalam tradisi Sasi tersebut membentuk kearifan lokal yang berperan dalam menjaga lingkungan hidup. Sebagai sebuah inovasi, studi ini mencoba memaparkan sebuah *Social Wisdom Regulation Model* (SWRM). Model SWRM merupakan inovasi model yang berusaha menjelaskan dengan sederhana tentang keseimbangan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup dengan tetap mendapatkan manfaat secara sosial dan ekonomi. Sejalan dengan tujuan ini, studi ini menggunakan dasar konsep dari model Jagung (*corn model*) ala Thorstein Veblen. Thorstein Veblen (1898) mengembangkan corn model untuk menjelaskan konflik antara bisnis dan industri sebagai akibat dari sumberdaya yang terbatas. Model ini juga kemudian dikembangkan untuk melihat kontradiksi antara lingkungan hidup dan ekonomi (O’Hara 1993, 2007).

Sebagai modifikasi dari model Veblen (1898) and O'Hara (1993, 2007), Gambar 2 menunjukkan bahwa SWRM dapat melihat peran dari *social/local wisdom* (kearifan lokal/sosial) dapat menjaga lingkungan hidup dan sekaligus mengatur sistem relasi sosial dan ekonomi.



Gambar 8.2 *Social Wisdom Regulation Model (SWRM)*—Lingkungan Hidup dan Sistem Sosio-Ekonomi (studi kasus: Tradisi Sasi)

Berdasarkan Gambar 2, apabila masyarakat terlalu fokus pada aspek sosio-ekonomi maka diasumsikan akan mengalami titik kritis di *crunch point* pada garis O-C, karena mereka mengabaikan aspek lingkungan hidup. Sebaliknya masyarakat juga dapat mengalami *crunch point* pada garis O-A, apabila mereka terlalu ekstrim fokus terhadap lingkungan sehingga mengabaikan sistem sosio-ekonomi. Di antara garis O-A dan O-B terdapat garis A-B-C yang menunjukkan tingkat kepedulian sosial dalam berbagai derajat atau kadar tertentu. Pada garis A-B-C terdapat titik B yang merupakan area keseimbangan bagi pengelolaan lingkungan hidup dan sistem-relasi sosio-ekonomi. Dalam hal ini, tradisi Sasi diharapkan mampu menjaga area B ini agar tetap berjalan berkesinambungan dalam jangka panjang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, studi ini mengambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan peran Tradisi Sasi:

1. Tradisi Sasi dapat berperan memberikan manfaat positif pada 3 aspek secara sinergi yang meliputi aspek lingkungan hidup, sistem relasi sosial dan sistem ekonomi.

2. Tradisi Sasi dapat mengarahkan potensi social capital dalam masyarakat untuk menumbuhkan kearifan lokal melalui proses sirkulasi dan kumulatif (CCC). Dengan demikian kearifan lokal dapat terbentuk untuk menjaga lingkungan hidup sekaligus sistem sosio-ekonomi.
3. Tradisi Sasi dalam jangka panjang dapat berperan menjaga keseimbangan karakteristik dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan juga dalam memanfaatkan sistem sosio-ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam model inovatif *Social Wisdom Regulation Model* (SWRM).
4. Model SWRM merupakan model inovasi dalam studi ini untuk menjelaskan tradisi dan regulasi yang bermanfaat dalam menjaga lingkungan hidup dan sistem sosio-ekonomi masyarakat secara harmoni. Namun sebagai keterbatasan penelitian, studi ini belum memasukkan data yang bersifat primer ke dalam studi ini.

REFERENSI

- Harper, Rosalyn. (2001). "Social Capital: A Review of the Literature". Social Analysis and Reporting Division Office for National Statistics, Working Paper, National Statistics, United Kingdom, pp. 1-45.
- Harper, Rosalyn and Kelly, Maryanne. (2003). *Measuring Social Capital in the United Kingdom*, Working Paper, National Statistics United, Kingdom, pp. 1-23
- Kaldor, Nicholas. (1957). "A Model of Economic Growth". *The Economic Journal*, Volume 67, (Number 268):pp. 591-624.
- Kapp, Karl William. (1970). "Environmental Disruption and Social Cost: A Challenge to Economics". *Kyklos*, Volume 23 (Number 4):pp. 833-848.
- MacDonald, E., MacFadyen, J., & Novaczek, I. (Eds.). (2016). *Time and a Place: An Environmental History of Prince Edward Island*. McGill-Queen's Press-MQUP.
- Myrdal, Gunnar. (1968). *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*. 3 vols. New York: Twentieth Century Fund.
- Novaczek, Irene , Harkes, I H T, Sopacua, J and Tatuhey, Marcus D. D (2001). *An Institutional Analysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia*, IDRC-Canada
- O'Hara, Philip Anthony. (1993). "Veblen's Analysis of Business, Industry and the Limits of Capital". *History of Economic Review*, Volume 20,;pp. 95-119.
- . (2007). "Social Structure of Accumulation in the US and China: The Index of System Contradiction for Long Waves". *Working Paper-Global Political Economy Research Unit (GPERU) Curtin University*:33 pp.
- . (2008b). "Principle of Circular and Cumulative Causation: Fusing Myrdallian and Kaldorian Growth and Development Dynamics". *Journal of Economics Issues*, Volume XLII, (Number 2):pp. 375-387.
- Patriana, R., Adiwibowo, S., Kinseng, R. A., & Satria, A. (2016). The Dynamics of Sasi in Kaimana: the Institutional Change over Traditional Marine Resource Management. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3).

- Putnam, R. (2000) *Bowling Alone - The Collapse and Revival of American Community* New York: Simon & Schuster.
- Samudro, B. R., Bloch, H., & Salim, R. (2015). The uneven regional pattern of ecological capital in Indonesia: a political economy perspective. *International Journal of Green Economics*, 9(3-4), 258-272.
- Schumpeter, Joseph A. (1954). *History of Economic Analysis*. London: Oxford University Press.
- van Schaik. (2002). "Social Capital in the European Values Study Surveys". Paper Conference OECD-ONS International Conference on Social Capital Measurement London, pp. 1-23.
- Thorburn, Craig (2000), Changing Customary Marine Resource Management Practice and Institutions: The Case of Sasi Lola in the Kei Islands, Indonesia, *World Development*, Volume 8, Issue 8, pp. 1461-1479.
- Valentinov, V. (2014). K. William Kapp's theory of social costs: A Luhmannian interpretation. *Ecological Economics*, 97, 28-33.
- Veblen, Thorstein. (1898). *The Theory of Leisure Class: An Economic Study in the Evolution Institutions*. New York: Macmillan.

BAB IX

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHATANI

Akhmad Daerobi

A. Pendahuluan

Sejauh ini belum ada pengertian tunggal mengenai apa yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan. Hammergren (1998) mengartikan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) sebagai tindakan yang ditujukan untuk mereorganisasi atau mereorientasi kelembagaan agar mampu berfungsi secara lebih efektif (Hammergren, 1998). Deborah Eade dan Suzane, dalam Tim O'Shaughnessy with Leane Black and Helen Carter (1999), mengartikan penguatan kelembagaan sebagai upaya memperkuat kapasitas orang untuk menentukan nilai dan prioritas mereka sendiri dan bertindak dalam kegiatan yang merupakan dasar dari pengembangan. Demikian pula, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (1997), menyatakan bahwa proses penguatan kelembagaan berarti meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan fungsinya.

Kapasitas seringkali didefinisikan dalam pengertian kemampuan dan kinerja. Sebagai contoh *The United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (UNDP, 1997). Demikian pula Fukuda, et al (2002) mengartikan kapasitas sebagai suatu kemampuan untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, menyusun dan mencapai tujuan. Sementara itu, konsep kapasitas kelembagaan lebih luas daripada pengertian kapasitas itu sendiri. Kelembagaan lebih mengacu pada seperangkat aturan, proses atau praktik peran pelaku, kendala aktivitas, dan bentuk harapan (Keohane, 1988). Kelembagaan bertahan lama; mereka sumber otoritas (formal atau tidak formal), di mana interaksi individu, perusahaan, kelompok, pemerintah, dan entitas lainnya saling berinteraksi.

Kelembagaan merupakan basis interaksi individu dan organisasi. Dalam konteks ini, training individu dan penguatan organisasi hanya dapat berjalan dalam jangka panjang jika konsisten dengan kelembagaan yang ada. Karena itu, menurut Segnestam et. al (2003) kapasitas kelembagaan seringkali mengimplikasikan suatu fokus yang luas dari pemberdayaan, modal social, dan suatu penguatan lingkungan, budaya, nilai, dan relasi kekuatan yang berpengaruh.

Sementara itu, penguatan kapasitas diasosiasikan dengan peningkatan aktivitas dan kinerja melalui proses transformasi dari aktivitas yang berbeda (Kamaruzzaman and Takeyas, 2008). The *Canadian Aga Khan Foundation* (dalam Stavros, 1998)) mendefinisikan penguatan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu hubungan timbal balik kelembagaan dan organisasi. *Northern* NGO (NNGO) mengartikan penguatan kapasitas sebagai “*what makes an organization strong* “ (CRWRC, 1997). Menurut Philbin (1996), penguatan kapasitas merupakan suatu proses pengembangan dan penguatan skill, insting, kemampuan organisasi dan komunitas agar survive, beradaptasi, dan berkembang dan perkembangan dunia yang cepat, atau aktivitas untuk meningkatkan suatu kemampuan organisasi dalam mencapai misi, atau kemampuan orang untuk mendefinisikan dan merealisasikan sasarannya atau melakukan pekerjaannya secara efektif.

B. Penguatan dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan

Perhatian utama ekonomi kelembagaan adalah bagaimana suatu transaksi berkembang. Suatu perekonomian dapat dikonsepsikan sebagai suatu domain di antara berbagai transaksi. Setiap transaksi mencakup transfer dari hak kepemilikan dalam barang, jasa, pengetahuan, dan asset. Tanpa kemampuan untuk melakukan transaksi, kesejahteraan individu, komunitas, ataupun suatu negara mengalami keterbatasan. Ketika semua anggota masyarakat melakukan transaksi secara berulang-ulang, ekonomi menjadi berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan pertukaran multilateral untuk memfasilitasi kekompleksan divisi tenaga kerja dan spesialisasi aktivitas ekonomi; di mana perolehan pertukaran dalam berbagai aset, mengantarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transaksi yang berulang-ulang dapat terjadi dalam lingkungan kelembagaan yang kondusif. Permasalahannya, tidak selamanya kelembagaan efisien. Stiglitz (1998) dan Bardhan (2004 and 2005) menunjukkan kelembagaan sosial yang disfungsi (*dysfunctional social institutions*), misalnya Kolombia, Amerika Serikat, Meksiko, dan lainnya akan menjadi lebih baik tanpa adanya perdagangan narkoba (*narcotics trafficking*). Tanpa adanya perdagangan narkoba, maka tingkat

pendapatan yang sama (*the same level of income*) akan dapat lebih dinikmati. Kelembagaan pun tidak selalu didesain agar efisien secara sosial (*socially efficient*). Bahkan, kerap kali kelembagaan didesain hanya untuk melayani kepentingan dari pihak yang memiliki kuasa untuk membuat peraturan-peraturan (North 1995). Kelembagaan dapat didesain untuk mengurangi biaya transaksi, tetapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya (Rao 2003). Kelembagaan yang lemah, membuka peluang suap-menyuap, ketidakpastian, dan perilaku *rent seeking*, sehingga meningkatkan biaya transaksi. Lingkungan demikian tidak mendorong pelaku ekonomi melakukan kegiatan produktif, sehingga membawa rendahnya pembangunan ekonomi, dan menyuburkan kemiskinan (North, 1990; Bardhan, 1999).

Dorward, et al. (2004) menunjukkan adanya *vicious circle* di banyak Negara Afrika dikarenakan tingginya biaya transaksi dan resiko di pasar input, output, dan kredit. Lebih lanjut, Dorward et al., (2005) menegaskan, suatu perekonomian yang tidak berkembang dikarakteristikkan oleh tingginya biaya transaksi dan resiko, lemahnya informasi, dan lemahnya lingkungan kelembagaan. Tingginya biaya transaksi menyebabkan pula tidak berkembangnya pasar, ketidakcukupan koordinasi, dan tingginya unit biaya bagi pembangunan infrastruktur.

Kelembagaan yang tidak efisien, menyebabkan tingginya biaya transaksi, dan pada gilirannya, memperkecil investasi produksi dan inovasi, dan memperbesar perilaku *rent seeking* dan korupsi. Mengikuti argumen ini, kecenderungan kemiskinan yang terjadi di negara sedang berkembang disebabkan tingginya biaya transaksi yang disebabkan tidak bekerjanya pasar secara sempurna, dan tidak memadainya kerangka kerja kelembagaan sehingga melemahkan struktur formal pertukaran bagi dukungan pasar yang efisien (North, 1990).

Menurut Kherallah dan Kirsten (2002), kegagalan pasar ataupun ketidaksempurnaan pasar di negara sedang berkembang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu ekonomi neo klasik dan memerlukan suatu analisis kelembagaan. Menurut Buchanan (1979), ekonomi neo klasik terlalu banyak mencurahkan perhatiannya terhadap permasalahan alokasi *per se*. Akibat dari hal tersebut adalah hasil yang pernah diperoleh dari ilmu ekonomi bukanlah pemahaman tentang dunia ekonomi tetapi teknik tentang menghitung. Buchanan menyatakan bahwa ekonomi perlu merubah haluan dari mendalami masalah *choice* ke pendalaman tentang *exchange*.

Ilmu ekonomi kelembagaan menawarkan alternatif untuk mengatasi kegagalan pasar. Pertama, petani melakukan kontrak. Kontrak merupakan suatu kesepakatan dua kelompok di mana satu kelompok menjual,

sedangkan kelompok yang lain membeli dengan suatu jumlah dan kualitas tertentu, dan diserahkan pada waktu tertentu pula. Kontrak bisa formal atau informal, tertulis atau tidak tertulis, dan kontrak dapat diperbarui dan transaksi berulang-ulang (Costello, et.al; 2008). Di bidang pertanian dikenal istilah kontrak farming (*contract farming*), yaitu kesepakatan petani dengan pedagang untuk memasok produk pertanian di masa mendatang, dan seringkali harga ditentukan terlebih dahulu (Eaton and Shepherd, 2001).

Kedua, aliansi strategik. Aliansi ini merupakan hubungan antara pemasok dan pembeli untuk melakukan kegiatan produksi dan pemasaran secara berdekatan pada suatu produk yang memiliki nilai tinggi dalam rangka menghasilkan profit bersama (Costello, et.al; 2008). Menurut Martin et. al (1993) terdapat tiga karakteristik aliansi strategik, yaitu adanya tujuan bersama, pengendalian bersama, resiko dan profit ditanggung bersama. Dengan demikian mekanisme koordinasi adalah adanya kesepakatan bersama pihak yang terlibat, atau dapat dikatakan koordinasi muncul dengan adanya pengendalian bersama (*mutual control*).

Ketiga, kerjasama formal. Kerjasama formal merupakan suatu kontrak jangka panjang di mana dua kelompok memiliki sumberdaya dan kekayaan bersama dalam suatu kegiatan produksi atau pemasaran suatu produk. Kerjasama bisa mengambil bentuk organisasi produsen, yang bertujuan memberikan jasa untuk mendukung aktivitas anggotanya. Sebagai suatu organisasi ekonomi, seringkali memiliki legalitas, sehingga dapat dibedakan dengan kelompok advokasi. Koperasi dapat dimasukkan ke dalam kerjasama formal yang secara kolektif memiliki aktivitas, aset, dan strategi (Eaton, et.al; 2008).

Keempat, hirarkhis. Aransemen kelembagaan hirarkhis (*The Institutional Arrangement of Hierarchy*) adalah pengaturan oleh mekanisme melalui kontrol dalam bentuk integrasi vertikal atau intervensi pemerintah (Milgrom and Roberts, 1992). Dalam integrasi vertikal, semua kendali dibuat oleh satu unit, karena berbagai transaksi lebih efisien bila disatukan dan diputuskan sebagai satu entitas, perusahaan ataupun pemerintah. Hak kepemilikan, perencanaan, manajemen, pembiayaan dan produksi terintegrasi oleh satu entitas yang bersangkutan.

C. Penguatan Kelembagaan Usaha Tani

Manakala petani kecil masuk ke dalam pasar input maupun output, mereka selalu berhadapan dengan struktur pasar yang terkonsentrasi oleh beberapa pedagang, sementara jumlah petani kecil relatif banyak. Pedagang memiliki posisi tawar (*bargaining power*), karena lebih

menguasai informasi, opsi alternatif, kecepatan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan, maupun karakteristik produk. Lemahnya posisi tawar menyebabkan produknya dinilai rendah dan memperoleh sedikit bagian dari mata rantai pemasaran. Petani juga lemah dalam posisi tawar di pasar input. Skala produksinya dan keinginan berinovasi relatif rendah, sehingga petani kecil menghadapi *diseconomies* dalam pembelian input (Bijman, et al 2007).

Dalam lingkungan demikian, usaha tani hanya memproduksi sebatas untuk konsumsi karena perlindungan sosial bagi keamanan pangan tidak tersedia melalui pasar dan intervensi pemerintah (de Janvry et al. 1991), mencegah investasi sektor swasta dalam pelayanan yang dibutuhkan bagi pembangunan pertanian di area desa miskin, terutama pengolahan bahan pangan (Dorward, et al, 2005). Ketidakstabilan karena resiko produksi, misalnya cuaca, hama, dan penyakit; dan resiko pasar, misalnya harga, secara sistemik membawa ketidaksempurnaan pasar dan kegagalan transaksi (Dorward and Kydd 2004).

Poverty trap seringkali dikombinasikan dengan turunnya kesuburan tanah dan pendapatan, mengunci petani ke dalam spiral kemiskinan dan ketidakmampuan membeli input yang diperlukan bagi peningkatan produktivitas. Subsidi pupuk, kredit, dan bahan pokok diperlukan agar petani dapat lebih produktif dan keluar dari *the vicious poverty spiral* (UN Millennium Project 2005a,b). Namun seringkali pemerintah gagal mengimplementasikan kebijakan pasar, terutama pasokan pupuk, kredit, dan pasar bahan pokok (Kherallah et al, 2000; Jayne et al, 2002). Kegagalan pemerintah di berbagai negara sedang berkembang juga ditandai lemahnya perlindungan bagi kepemilikan, terutama melindungi kepemilikan usaha tani. Petani menghadapi tingginya resiko bagi pengembalian investasi, sehingga mereka menahan pengeluaran investasi dalam pengetahuan, skill, atau modal (Kirsten, et al, 2009).

D. Langkah Memperkuat Kelembagaan Usahatani

Langkah pertama untuk memperkuat kelembagaan adalah memahami aransamen kelembagaan usahatani, yaitu aktivitas transaksi yang dilakukan secara rutin. Badan Pengembangan SDM Pertanian Reptan (2009), mencatat adanya lima aransemen kelembagaan usahatani. Pertama, kelembagaan pengadaan sarana input produksi. Dalam kelompok ini misalnya termasuk kelembagaan kredit atau kelembagaan permodalan usahatani, kelembagaan pupuk, kelembagaan benih, serta kelembagaan penyediaan dan distribusi pestisida. Kedua, kelembagaan dalam aktivitas budidaya, mencakup kelembagaan tenaga kerja, kelembagaan irigasi, kelembagaan lahan (*land tenure*) dalam hal tata hubungan antara pemilik

dan petani penggarap, serta kelembagaan panen. Ketiga, kelembagaan terkait dengan aktivitas pengolahan hasil produksi. Dalam tahapan ini misalnya termasuk pengorganisasian sebuah penggilingan padi (*huller*), pemrosesan, dan pembuatan industri makanan. Keempat, Kelembagaan pemasaran, mencakup proses penyampaian produksi pertanian ke konsumen. Kelima, kelembagaan pendukung. Dalam kelompok ini termasuk kelembagaan koperasi, kelembagaan penyuluhan pertanian, serta kelembagaan penelitian.

Terkait dengan aransemen di atas, terdapat beberapa upaya untuk memperkuat kelembagaan usahatani.

1. Strategi Penguatan Kelembagaan Aktivitas

Upaya yang bisa dilakukan adalah perlunya kemitraan petani dengan pihak pemasar output dan penyedia input. Dalam hal ini diharapkan pihak mitra dapat memberikan jaminan harga dan pasokan input maupun menerima komoditas dari petani. Pola kemitraan terpadu antara petani plasma dengan mitra usaha besar, antara petani plasma dengan mitra usaha besar sebagai perusahaan inti perlunya dibuat nota kesepakatan tertulis yang mengatur kerjasama antara keduanya dengan berdasarkan kedudukan hukum dan kepentingan serta dapat memberikan saling keuntungan yang sama antara kedua belah pihak. Dalam jangka pendek kemitraan dapat memudahkan petani dalam pengembangan teknologi, sehingga komoditas yang dihasilkan dapat mudah diserap oleh pasar. Dalam jangka panjang, pengembangan kemitraan dapat dijadikan titik tolak pengembangan agribisnis, sehingga industry pedesaan semakin memperluas penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah komoditas petani.

2. Strategi Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia

Penguatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan manajerial dan kewirausahaan, pengelolaan produksi, pemasaran dan distribusi terkait usahatani. Agar strategi penguatan kelembagaan SDM dapat berjalan sesuai dengan harapan maka diperlukan prioritas pelaksanaannya. Prioritas jangka pendeknya adalah melakukan pelatihan manajerial, kewirausahaan, pemasaran dan distribusi secara intensif. Untuk jangka panjang, pemerintah dapat membuka lembaga pendidikan ketrampilan yang terkait seperti sekolah kejuruan agribisnis, kursus-kursus, dan berbahaya bentuk pelatihan. Skill usahatani berkaitan dengan cara bertani. Selama ini petani menggunakan teknologi yang tradisional dan digunakan secara turun-temurun. Pengolahan lahan, persiapan benih, cara bertanam, penyiangan, cara pemupukan dan cara panen masih tradisional. Demikian pula teknologi pasca panen. seperti sortasi, *grading* dan *packing* masih belum meluas dilakukan petani. Untuk ini aksi tindak peningkatan skill adalah memperbanyak demo-demo aplikasi bibit unggul,

penggunaan pupuk, penanganan pasca panen, dan berbagai praktik cara bertani yang baik. Di samping itu, perlunya petani mengembangkan jaringan dengan *Stakeholder* dalam melakukan usaha taninya. Hubungan ini dapat menciptakan sinergi antara petani dengan bisnis (industri pengolahan), koperasi, perbankan, LSM, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.

3. Strategi Penguatan Kelembagaan Sarana Pendukung

Berbagai sarana pendukung sangat diperlukan bagi penguatan kelembagaan petani di ahribisnis lahan kering. Fasilitasi ini menyangkut di antaranya sumur bor. Selama ini petani lahan kering lebih mengandalkan air hujan, karena itu perlunya pemerintah membangun sumur-sumur bor di lahan kering. Di samping itu, sebagai upaya meningkatkan inovasi teknologi di bidang peningkatan nilai tambah (*added value*) produk-produk pertanian lahan kering, perlunya pemerintah menyediakan alat-lat produksi pertanian seperti alat perontok, pengiris, alat panen, pengolah lahan, dan sebagainya. Hal ini mengingat masih rendahnya teknologi pasca-panen dalam pemanfaatan produk-produk pertanian. Selain itu, perlunya ada pendampingan di lingkungan petani, khususnya dalam proses pemasaran. Pendamping akan membantu para petani dalam menghadapi kesulitan pemasaran. Pendamping dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh dinas-dinas pemerintah, perguruan tinggi, LSM, ataupun unsur swasta. Dimungkinkan pula dikembangkan *Business Development Services* (BDS) sebagai lembaga parallel telah dikembangkan oleh berbagai negara untuk membantu perusahaan agribisnis kecil dalam mengembangkan bisnisnya.

4. Strategi Penguatan Kelembagaan Organisasi

Lembaga organisasi yang membantu kegiatan agribisnis di antaranya lembaga keuangan, kelompok tani, penyuluh, dan koperasi. Berbagai strategi yang bisa dijalankan di antaranya adalah memperkuat jaringan permodalan, dalam hal ini perlunya dikembangkan perbankan yang berfokus pada pertanian, termasuk pertanian lahan kering pada khususnya. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, dan lain-lain. Keberadaan kelompok tani dapat memperkuat posisi tawar petani dalam pengadaan dan pemasaran produk pertanian. Untuk ini perlunya kelompok tani mengembangkan diri sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya di wilayahnya. Dalam hal ini penyuluh desa dapat mendorong partisipasi aktif petani dalam berbagai kegiatan kelompok tani.

Dalam jangka panjang koperasi perlu dikembangkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yaitu menjadi wadah aktivitas ekonomi rakyat

yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini koperasi dapat mengembangkan pemasaran komoditas aktivitas anggotanya. Secara teoritis ketika terjadi kegagalan pasar maka peran koperasi sangat dibutuhkan oleh anggotanya dalam pengadaan sarana produksi maupun memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Beberapa aksi tindakan yang bisa dilakukan adalah pertama pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus dan pengelolanya, terkait dengan pengelolaan, pencarian peluang usaha, pengembangan promosi, dan sebagainya. Kedua, secara kreatif koperasi melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan di bidang pengadaan, pengolahan, dan pemasaran; sehingga koperasi dapat berperan dari sisi hulu sampai hilir dalam sistem agribisnis komoditas anggotanya.

E. Rekomendasi Tindak Lanjut Strategi Penguatan Usahatani

Aksi tindak dan prioritas penguatan kelembagaan usahatani dapat dirumuskan model penguatan kelembagaan. Tujuan pengembangan model penguatan kelembagaan haruslah berparadigma holistik, yaitu penguatan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek spasial, yaitu menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani lahan kering, baik pada sisi internal maupun eksternal. Untuk ini, strategi perlu dikembangkan bersama *stakeholder* terkait yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan terhadap keberlanjutan usaha petani lahan kering. Pemerintah berkepentingan dalam membuat tata aturan penggunaan lahan termasuk mempromosikan kesejahteraan petani; swasta berkepentingan dalam memasok kebutuhan dan membeli produk petani; LSM berkepentingan dalam memberikan advokasi; komunitas petani berkepentingan dalam menjaga nilai-bersama, dan akademisi berkepentingan dalam riset, pengembangan teknologi, dan pendidikan komunitas petani.

REFERENSI

- Badan Pengembangan SDM Pertanian Reptan; 2009; *Modul Kelembagaan Petani. Departemen Pertanian, Jakarta.*
- Bijman, J. G. Ton, G. Meijerink. 2007. *Empowering Small Holder Farmers in Markets: National and International Policy Initiatives.* WUR: Wageningen.
- CRWRC. 1997. 'Using Appreciative Inquiry to build capacity', in S. Johnson and J. Ludema (eds.) *Partnering to Build and Measure Organizational Capacity, Grand Rapids. Christian Reformed World Relief Committee, MI.*
- De Janvry, A. and E. Sadoulet. 2000. *Growth, Poverty and Inequality in Latin America: Causal Analysis, 1970-94, Review of Income and Wealth* 46(3): 267-87.
- Dorward, A. R., J. G. Kydd and C. Poulton. 2005. "Beyond Liberalisation: Developmental Coordination Policies for African Smallholder Agriculture." *IDS Bulletin* 36(2): 80-85.
- Dorward, A. R., J. G. Kydd, J. A. Morrison and I. Urey (2004). "A Policy Agenda for Pro-Poor Agricultural Growth." *World Development* 32(1): 73-89.
- Easton, Steven T., and Michael A. Walker (1997). *Income, Growth, and Economic.*
- Escobal and Denice Cavero Cavero (2007). *Transaction Costs and Institutional Arrangements in Potato Marketing by Small Producers in Rural Peru: Discussion Paper Series Number Twelve June 2007, University of Manchester.*
- Fogel, K., Hawk, A., Morck, R., & Yeung, B. (2006). *Institutional Obstacles to Entrepreneurship*, n M. Casson, B. Yeung, A. Basu & N. Wadeson (Eds.), *Oxford Handbook of Entrepreneurship.* Oxford University Press, Oxford
- Fukuda-Parr, S., Lopes, C., and Malik, K. (eds.) 2002. "Capacity for development: newsolutions to old problems," UNDP, New York and Earthscan, London.\
- International Fund for Agricultural Development (IFAD).* 2002. *Regional Assessment of Rural Poverty. Asia and the Pacific.*
- Jayne, T.S., Yamano, T., Weber, M., Tschirley, D., Benfica, R., Neven, D., Chapoto, A., Zulu, B., 2001. *Smallholder Income and Land*

- Distribution in Africa: Implications for Poverty Reduction Strategies. International Development Paper 24*, Department of Agricultural Economics, MSU, East Lansing
- Kherallah M. and Kirsten J. 2001. *The New Institutional Economics: Applications for agricultural policy research in developing countries*. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
- Kirsten, et al, (2009). Kirsten, Johann F., Andrew R. Dorward, Colin Poulton, and Nick Vink. 2009. *Institutional Economics Perspectives on African Agricultural Development. International Food Policy Research Institute*, Washington, D.C.
- Madison, D.S. 2005. *Critical ethnography: Methods, ethics, and performance*. A thousand Oaks, CA: Sage
- Nkhori, Police A .2004. *The impact transaction cost on the choices cattle markets in Mahalipye District, Bostwan. Dissertation*. University of Pretoria.
- Nkya, E. 2003. *Institutional Barriers to Small-Scale Business Development: A Need for Flexibility in Tanzanian Tax and Regulatory Systems. Journal of Entrepreneurship*, 12(1), 43-73.
- North, Douglass.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.
- North, Douglass.C. 2005. *Understanding the Process of Economic Change*. Princeton University Press, NJ
- Philbin, Ann. 1996. *Capacity Building in Social Justice Organizations*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Segnestam, Lisa; Åsa Persson; Måns Nilsson; Anders Arvidsson and Ede Ijjasz. 2003. "Country-Level Environmental Analysis. A review of international experience". *Environment S Strategy Papers* No. 8.
- Stavros, Jacqueline M. 1998. *Capacity Building an Appreciative Approach. Dissertation Case Western Reserve University Cleveland, Ohio*.
- UN. 2005. *Halving hunger: It can be done*. New York: UN Task Force on Hunge
- UNDP. 1997. *Capacity Development Resources Book*. UNDP: New York

BAB X

KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA SURAKARTA

**Suryanto
Hermada Dekiawan
Johadi**

A. Pendahuluan

Investasi adalah prasyarat utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika kebutuhan pendanaan pembangunan hanya dari pemerintah maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak sesuai dengan target. Kemampuan pemerintah yang terbatas dalam penganggaran harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan berinvestasi dari swasta.

Investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Oleh karena, investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat di mana pada akhirnya akan menambah pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Iklm investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Selain iklim investasi yang baik, faktor yang diduga berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia.

Menurut teori Harrod Domar, investasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebab investasi dapat menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Kegiatan investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan karena investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, yang diharapkan

dari investasi adalah dampak yang ditimbulkan dari investasi terhadap pembangunan wilayah regional maupun nasional.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) secara fisik suatu negara dan hal itu jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan *output* di masa-masa mendatang.

Bab ini mengangkat beberapa masalah antara lain berapa nilai investasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi unggulan di Kota Surakarta dan penyerapan tenaga kerja berdasarkan masing kategori ekonomi unggulan di Kota Surakarta. Lebih khusus lagi investasi yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi lokal.

B. Investasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kota Surakarta sebagai salah satu bentuk daerah didasarkan pada pengelompokkan administrasi. Jadi Kota Surakarta merupakan daerah yang termasuk dalam kelompok daerah perencanaan dan bukan termasuk dalam daerah yang memiliki kesamaan sifat atau ekonomi ruang yang menguasai beberapa pusat kegiatan ekonomi yaitu (Arsyad, 1999).

Masalah pokok dalam pembangunan di Kota Surakarta dan juga daerah yang lain adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi di Kota Surakarta dalam RPJMD 2016-2021 memiliki visi “TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA” dapat diartikan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai Kota Surakarta yang menonjolkan sisi budaya dengan diikuti oleh kemajuan secara ekonomi. Misi untuk mencapai cita—cita tersebut diformulasikan dalam 3 WMP (Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan. 3WMP di Surakarta diwujudkan dalam

kegiatan untuk pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Pembentukan institusi baru seperti Technopark diharapkan dapat menjadi pusat alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Sementara itu, pembangunan institusi pendidikan baru seperti Akademi Pertekstil diharapkan dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik serta pengembangan wirausaha-wirausahawan baru berdasarkan kekuatan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mempersempit kesenjangan ekonomi.

Langkah selanjutnya adalah pengembangan ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi baru bagi daerah. Upaya yang dapat dilakukan dapat diciptakan dengan cara mempertinggi peranan kategorial dan memodernkan keseluruhan kegiatan ekonomi. Usaha ini perlu untuk mencapai dua tujuan. Pertama, langkah tersebut perlu untuk menjaga agar jenis ekspor diperbanyak dan dengan demikian dapat mengurangi goncangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di luar daerah terhadap perekonomian daerah tersebut, terutama perubahan yang secara langsung mempengaruhi ekspor daerah tersebut.

Dampak positif penguatan ekonomi daerah tersebut adalah efek *multiplier* dari bergeraknya roda ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat tersebut. Semakin baik produk yang dihasilkan akan meningkatkan permintaan produk di pasar. Apabila produk dapat diterima dengan baik oleh pasar termasuk pasar ekspor maka dampak berikutnya adalah pertumbuhan konsumsi barang dan jasa masyarakat Kota Surakarta.

Menurut Bappenas pengembangan ekonomi lokal dapat ditempuh dengan memperbesar partisipasi dari modal daerah tersebut dalam pengembangan kategori ekspor. Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi semakin penting karena garda depan masuknya investasi melalui DPMPTSP. Investasi menjadi modal dasar karena dapat mengurangi pengaliran pendapatan dan keuntungan keluar daerah dan selanjutnya akan memperbesar pendapatan masyarakat di daerah yang akhirnya akan memperbesar efek *multiplier* bagi Kota Surakarta.

C. Kinerja Kategori dan Subkategori Ekonomi

Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh kategori konstruksi, kategori perdagangan, serta kategori informasi dan komunikasi. Hal ini

terlihat dari besarnya kontribusi kategori-kategori tersebut dalam PDRB. Pada tahun 2010 misalnya, kontribusi kategori konstruksi mencapai 28,23 persen, kategori perdagangan 23,82 persen, serta kategori informasi dan komunikasi mencapai 11,36 persen. Dengan demikian kontribusi ketiga kategori tersebut dalam PDRB tahun 2010 mencapai 63,41 persen. Bila ditambah dengan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang besarnya 4,87 persen maka kontribusinya menjadi 68,28 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Surakarta merupakan kota perdagangan dan jasa.

Kategori industri pengolahan yang pada tahun 2010 mencapai 7,62 persen tidak mendominasi struktur PDRB. Kontribusi kategori industri pengolahan dengan kategori konstruksi, kategori perdagangan, serta kategori informasi dan komunikasi terlihat cukup besar. Di Surakarta kategori industri pengolahan didominasi oleh subkategori industri makanan dan minuman, subkategori industri tekstil dan pakaian jadi, serta subkategori pengolahan tembakau.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan struktur ekonomi di berbagai kategori bila dibandingkan tahun 2010. Selama kurun waktu 6 tahun tersebut kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi yang negatif yaitu -2,20 persen. Hampir semua subkategori menunjukkan proporsi yang semakin kecil, terutama subkategori tanaman pangan yang proporsinya rata-rata menunjukkan pertumbuhan -10,10 persen. Hanya subkategori jasa pertanian dan perburuan yang memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi positif meski sangat kecil yaitu 0,41 persen. Rata-rata pertumbuhan subkategori yang negatif ini juga terjadi pada kategori-kategori ekonomi lainnya. Di kategori industri pengolahan, meski sangat kecil terjadi rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 0,46 persen. Subkategori yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi negatif terbesar adalah subkategori industri kertas dan barang dari kertas, percetakan yaitu -3,96 persen. Subkategori ini selama 2010-2015 menunjukkan tren negatif, namun dari 2015-2016 terjadi tren positif dalam hal proporsi terhadap PDRB.

Tabel 10.1
Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016
Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,51	0,49	0,49	0,47	0,46	0,44	0,48	-2,20
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,23
Industri Pengolahan	7,62	7,64	7,77	7,97	8,09	7,96	7,84	7,84	0,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,23	0,22	0,20	0,18	0,18	0,17	0,17	0,19	-4,66
Konstruksi	28,23	27,03	27,00	26,40	25,99	25,97	26,25	26,70	-1,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	24,72	23,89	24,16	23,93	23,63	23,46	23,94	-0,25
Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,59	2,61	2,71	2,79	2,87	2,87	2,73	1,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,95	5,05	5,03	5,11	5,14	5,13	5,04	0,88
Real Estate	4,23	4,25	4,31	4,27	4,32	4,39	4,45	4,32	0,80
Jasa Perusahaan	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,73	0,75	0,69	2,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,46	6,24	6,01	5,88	5,65	5,71	5,54	5,93	-2,52
Jasa Pendidikan	3,66	3,89	4,07	4,14	4,24	4,30	4,24	4,08	2,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,90	0,92	0,93	1,00	1,00	1,02	0,95	3,02
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	100,00								

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, data subkategori perhatikan Lampiran 1

Berdasarkan informasi dari Tabel 10.1 dapat diketahui bahwa kategori konstruksi yang memiliki kontribusi besar bagi PDRB Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan kontribusi yang negatif. Kategori pertanian dan pertambangan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang negatif karena karakteristik Kota Surakarta bukan penghasil tambang. Sub kategori asuransi dan dana pensiun memiliki rata-rata pertumbuhan output per tahun tertinggi yaitu 12,78 persen dan disusul kemudian subkategori industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 12,17 persen. Tinjauan terhadap kategori industri pengolahan, terdapat cukup banyak subkategori industri pengolahan yang memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 5,00 persen.

Tabel 10.2
Rata-rata Pertumbuhan 10 Sub Kategori Periode 2010-2016

No	Kategori/Subkategori	Rata-rata Pertumbuhan Output
1	Asuransi dan Dana Pensiun	12,78
2	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12,17
3	Jasa Keuangan Lainnya	10,44
4	Jasa Penunjang Keuangan	9,31
5	Angkutan Rel	9,16
6	Industri Makanan dan Minuman	8,92
7	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90
8	Jasa Perusahaan	8,69
9	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	8,59
10	Informasi dan Komunikasi	8,36

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 diolah

Dengan melihat proporsi dan pertumbuhan, dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pergeseran struktur perekonomian di Kota Surakarta. Kategori perdagangan, industri, dan informasi merupakan kategori yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Surakarta. Pertumbuhan output kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan misalnya dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, sedangkan industri pengolahan dari 2010-2013 menunjukkan peningkatan namun setelah 2013 pertumbuhan output cenderung mengalami penurunan. Penurunan di kategori industri pengolahan tersebut terjadi pada semua subkategori. Penurunan terbesar terjadi pada subkategori industri tekstil dan pakaian jadi, dari 15,10 persen di tahun 2013 menjadi hanya 2,52 persen di tahun 2014. Subkategori penyediaan akomodasi sejak 2011 hingga 2016 menunjukkan penurunan sementara subkategori penyediaan makan minum cenderung stabil. Persaingan yang semakin ketat di bidang tersebut merupakan salah satu faktor penyebab semakin menurunnya pertumbuhan subkategori penyediaan akomodasi.

D. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu kategori atau subkategori secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu kategori atau subkategori tertentu di antara kategori atau subkategori yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu kategori atau subkategori untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah.

Berdasarkan nilai LQ, semua subkategori pertanian memiliki nilai LQ di bawah 1. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di bidang pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain, misalnya Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Ngawi, dan sebagainya. Di kategori industri pengolahan nilai LQ secara keseluruhan hanya sekitar 0,22. Terdapat dua subkategori yang memiliki nilai LQ di atas satu, yaitu subkategori industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, serta subkategori industri kertas dan barang dari kertas, percetakan. Tingginya nilai LQ menandakan bahwa di bidang kedua industri tersebut Kota Surakarta memiliki keunggulan di banding daerah lain di provinsi Jawa Tengah untuk jenis industri yang sama. Hal ini menjadikan Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan dari kedua subkategori industri tersebut, serta mengeksport ke daerah lain. Subkategori industri dengan LQ sekitar 0,8 adalah industri karet, barang dari karet dan plastic serta subkategori industri tekstil dan pakaian jadi. Meski Kota Surakarta dikenal

sebagai kota tekstil, namun output tekstil masih lebih rendah dibandingkan dengan output tekstil daerah lain di Jawa Tengah.

Kategori konstruksi serta perdagangan memiliki nilai LQ yang tinggi. Demikian pula dengan *real estate*, angkutan rel (kereta api), penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta kesehatan dan kegiatan sosial semuanya memiliki nilai LQ yang tinggi. Nilai LQ tertinggi adalah bidang penyediaan akomodasi. Kota Surakarta memiliki fasilitas akomodasi yang sangat memadai dengan tingkat hunian yang tinggi. Kondisi ini ditunjang dengan destinasi wisata mengingat Surakarta juga merupakan kota budaya.

Di dalam LQ dinamis, nilai untuk industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki di atas 1 yang menandakan bahwa di bidang industri tersebut Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula dengan beberapa bidang lain seperti industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik; industri karet, barang dari karet dan plastic; industri mesin dan perlengkapan; serta industri furniture, yang semuanya memiliki nilai LQ dinamis di atas 1. Bila LQ kurang dari 1 namun LQ dinamis lebih besar dari 1 (seperti industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan) hal ini menggambarkan bahwa industri tersebut merupakan industri yang mampu memenuhi kebutuhan dalam Kota Surakarta, namun dibandingkan dengan daerah lain rata-rata pertumbuhannya masih lebih rendah.

Tabel 10.3
Nilai LQ Statis dan LQ Dinamis 2010-2016
Atas Dasar Harga Konstan 2010

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,032	0,03	0,03	0,034	0,03	0,03	0,03	1,02
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
Industri Pengolahan	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	1,02
Pengadaan Listrik dan Gas	2,15	2,14	2,19	2,15	2,08	2,08	2,05	2,12	0,96

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,58	2,56	2,52	2,45	2,43	2,43	2,43	2,48	0,94
Konstruksi	2,73	2,69	2,66	2,61	2,59	2,58	2,57	2,63	0,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1,62	1,63	1,63	1,66	1,65	1,65	1,64	1,64	1,02
Transportasi dan Pergudangan	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,86	0,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,64	1,67	1,67	1,66	1,66	1,63	1,65	1,01
Informasi dan Komunikasi	3,40	3,38	3,44	3,41	3,28	3,20	3,13	3,30	0,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,32	1,31	1,30	1,28	1,28	1,26	1,25	1,28	0,94
Real Estate	2,47	2,47	2,50	2,41	2,40	2,39	2,38	2,43	0,96
Jasa Perusahaan	2,22	2,23	2,23	2,15	2,13	2,15	2,10	2,17	0,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,04	2,02	2,04	2,04	2,05	2,07	2,07	2,05	1,02
Jasa Pendidikan	1,39	1,32	1,24	1,21	1,19	1,18	1,14	1,22	0,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,31	1,28	1,27	1,29	1,28	1,25	1,28	0,96

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

E. Analisis *Shift-Share*

Dari tinjauan *shift-share*, hanya sedikit yang memiliki nilai negatif yaitu subkategori tanaman pangan, subkategori kehutanan dan penebangan kayu, serta subkategori pertambangan dan pengalihan. Semua kategori dan subkategori memiliki nilai regional share yang positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Tengah memberikan

dampak positif bagi perekonomian Surakarta. Sebagai ilustrasi nilai regional shift industri pengolahan sebesar 593 Miliar rupiah yang berarti kondisi perekonomian di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi terhadap output kategori industri pengolahan di Surakarta sebesar 593 Miliar rupiah. Sementara itu proportional shift menggambarkan pengaruh struktur ekonomi Kota Surakarta terhadap suatu kategori atau subkategori. Industri pengolahan misalnya memiliki nilai proportional shift sebesar 22,7 Miliar rupiah. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian di Kota Surakarta mampu mendukung output industri sebesar Rp22,7 Miliar.

Nilai proportional shift negatif terjadi di beberapa jenis industri yaitu industri pengolahan tembakau, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri logam, industri karet, industri mesin dan perlengkapan, serta industri pengolahan lainnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian yang ada tidak memberikan pengembangan industri-industri tersebut. Untuk *differential shift*, cukup banyak yang memiliki nilai negatif yang berarti daya kompetitif bidang-bidang tersebut masih belum tinggi atau masih kalah dibandingkan yang sejenis di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, meskipun kinerja kategori-kategori tersebut dari aspek rata-rata pertumbuhan dan proporsi tergolong baik atau tinggi, namun dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Tengah masih kurang. Perkembangan yang terjadi masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Jawa Tengah serta struktur perekonomian Kota Surakarta, bukan karena daya kompetitifnya.

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Jawa Tengah memberikan dampak besar bagi perekonomian Kota Surakarta. Total nilai regional shift menunjukkan bahwa dari total output perekonomian Kota Surakarta yang tercermin melalui PDRB, sebesar Rp7,79 triliun akibat pengaruh perekonomian Jawa Tengah dan Rp1,09 triliun akibat struktur perekonomian internal Kota Surakarta.

Perhitungan shift-share dinamis memberikan gambaran apakah suatu subkategori tersebut terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu subkategori memiliki daya saing atau tidak dibandingkan dengan subkategori yang sama di Jawa Tengah. Nilai negatif efek spesialisasi menggambarkan bahwa subkategori tersebut bukan merupakan subkategori yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa subkategori tersebut belum menjadi subkategori yang “leading” dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa subkategori tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan subkategori sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu subkategori tersebut merupakan subkategori yang terspesialisasi di

Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu subkategori bukan merupakan kategori yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing di banding subkategori sejenis di wilayah Jawa Tengah. Kategori yang unggulan merupakan kategori yang memiliki efek spesialisasi dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Tabel 10.4
Shift-Share Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-3,322,559	0.0538
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-2,971,295	0.0544
	a. Tanaman Pangan	-1,341,867	-0.3007
	b. Tanaman Hortikultura	-501,590	-0.1972
	c. Tanaman Perkebunan	-95,598	-0.6622
	d. Peternakan	-446,950	-0.1044
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-56,840	0.0130
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-137,391	0.0188
3	Perikanan	-213,873	-0.2584
Pertambangan dan Penggalian		-459,173	-0.5375
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam	-	-
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-387,149	-0.4325
Industri Pengolahan		-5,775,907	0.0583
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	-1,643,718	0.0350
3	Industri Pengolahan Tembakau	-1,358,400	0.0168
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-156,417	0.0168
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-24,667	0.0431
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-345,548	-0.0233

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	54,177	-0.0145
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-329,120	0.2775
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-20,709	0.0888
10	Industri Barang Galian bukan Logam	-138,455	-0.0692
11	Industri Logam Dasar	-67,661	-0.1258
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-71,195	0.2150
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-9,574	0.1248
14	Industri Alat Angkutan	-48,495	-0.0654
15	Industri Furnitur	-66,776	0.0341
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	16,922	0.0240
Pengadaan Listrik dan Gas		25,139	-0.0309
1	Ketenagalistrikan	25,131	-0.0339
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	8	0.0630
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		29,589	-0.0373
Konstruksi		3,840,867	-0.0506
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		1,955,105	0.0529
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	33,622	0.0064
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,921,484	0.0599
Transportasi dan Pergudangan		-76,098	-0.0149
1	Angkutan Rel	4,952	0.0315
2	Angkutan Darat	-4,482	-0.0116
3	Angkutan Laut	-	-
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
5	Angkutan Udara	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-2,744	-0.0290
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		398,233	0.0508
1	Penyediaan Akomodasi	354,462	-0.0254
2	Penyediaan Makan Minum	43,770	-0.0064
Informasi dan Komunikasi		1,721,869	-0.0972
Jasa Keuangan dan Asuransi		189,335	-0.0458
1	Jasa Perantara Keuangan	90,860	-0.1186
2	Asuransi dan Dana Pensiun	28,372	0.0946
3	Jasa Keuangan Lainnya	70,035	-0.0798
4	Jasa Penunjang Keuangan	67	0.0273
Real Estate		539,920	-0.0191
Jasa Perusahaan		74,957	-0.0522
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		706,661	0.0479
Jasa Pendidikan		222,453	-0.3148
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		42,121	-0.0237
Jasa lainnya		-112,513	-0.0769
	PDRB	-0.0097	-1.0372

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 diolah

F. Penentuan Potensi Ekonomi

Penentuan kriteria potensi ekonomi dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: (a) kurang potensial, (b) potensi kecil, (c) potensi sedang, dan (d) potensi tinggi. Kriteria tersebut didasarkan pada indikator sebagai berikut: (a) nilai LQ, (b) nilai DLQ, (c) nilai rata-rata pertumbuhan, (d) efek spesialisasi, (e) efek kompetitif, dan (f) proporsi terhadap PDRB. Bobot masing-masing indikator diberikan secara arbitrer berdasarkan *professional judgement*, sebagai berikut:

Tabel 10.5. Ringkasan Hasil

No	Indikator	Bobot (%)
1	LQ	20
2	DLQ	10
3	Rata-rata Pertumbuhan	15
4	Efek Spesialisasi	20
5	Efek kompetitif	25
6	Proporsi terhadap PDRB	10

Bobot dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berjalan dinamis. Skor akhir diberikan berdasarkan pendekatan kuartil sebagai berikut:

Tabel 10.6. Penentuan Kelas Potensi

No	Indikator	Bobot (%)
1	Kuartil 1	Kurang Potensial
2	$(\text{Kuartil 1} + \text{Kuartil 2})/2$	Potensi Kecil
3	$(\text{Kuartil 2} + \text{Kuartil 3})/2$	Potensi Sedang
4	Kuartil 3	Potensi Tinggi

Penentuan potensi ekonomi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan investasi pada kategori potensial tersebut. Kebutuhan investasi di kategori potensial bukan berarti mengabaikan investasi di kategori yang lain, karena antar variable ekonomi memiliki keterkaitan *forward* dan *backward linkages*. PDRB mengukur output akhir dari saling keterkaitan antar kategori atau subkategori tersebut. Selain itu, melalui identifikasi potensi ekonomi, diharapkan kebijakan dan strategi dapat fokus pada bidang-bidang tersebut sehingga upaya pencapaian pendapatan perkapita sesuai target RPJMD dapat lebih efektif.

Berdasarkan perhitungan kuartil, diperoleh hasil perhitungan skor sebagai berikut:

Tabel 10.7
Potensi Subkategori Ekonomi Kota Surakarta

Uraian	LQ	DLQ	RATA2 PERTUMBUHAN	EFEK SPESIALISASI	EFEK KOMPETITIF	PROPORSI	JUMLAH	SKOR	STATUS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan									Potensi Sedang
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0	1	0	0	1	0	2	0.35	Potensi Sedang
a. Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
b. Tanaman Hortikultura	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
c. Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
d. Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0	0	1	0	1	0	2	0.40	Potensi Sedang
2. Kehutanan dan Pencabangan Kayu	0	0	0	0	1	0	1	0.25	Potensi Kecil
3. Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
Pertambangan dan Penggalian									Kurang Potensial
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
Industri Pengolahan									Potensi Tinggi
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	0	0	1	0	1	0	2	0.40	Potensi Sedang
3. Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	1	0	1	0.25	Potensi Kecil
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0	0	1	0	1	0	2	0.40	Potensi Sedang
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	1	1	0	1	0	3	0.50	Potensi Sedang
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 diolah

Dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta 2016-2021, target pendapatan per kapita riil selama 2016-2021 disajikan pada tabel di bawah ini. Pendapatan per kapita riil merupakan pendapatan per kapita yang dihitung dengan menggunakan pendekatan harga konstan, sehingga hanya mendasarkan pada output perekonomian dan menghilangkan faktor inflasi atau kenaikan harga barang. Untuk dapat memenuhi target pendapatan per kapita tersebut, terdapat dua aspek yang dipertimbangkan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Dalam kajian ini, pertumbuhan ekonomi dipenuhi melalui kegiatan investasi sehingga akan menghasilkan informasi kebutuhan investasi yang diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

Tabel 10.8

Target Pendapatan Per Kapita dalam RPJMD Kota Surakarta 2016-2021

2017	2018	2019	2020	2021
60,922,565.68	63,823,145.56	66,534,165.91	69,337,235.56	72,163,382.69

Penentuan besarnya kebutuhan investasi didasarkan pada nilai ICOR. Hasil perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$\text{ICOR} = \Delta K / \Delta Y, \text{ karena } \Delta K = I \text{ maka } \text{ICOR} = I / \Delta Y$$

Dalam struktur PDRB, ΔK atau Investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dengan demikian, kebutuhan investasi untuk setiap kategorial adalah:

$$\text{PMBTB}_i = \{(\text{PMTB}_{\text{Total}} / \Delta Y) \times g \times \Delta Y_i\} / g_i$$

$$\text{PMTB}_i = \text{Besarnya investasi pada kategori } i$$

$$\text{PMTB}_{\text{Total}} = \text{Besarnya investasi total}$$

$$g = \text{pertumbuhan ekonomi}$$

$$g_i = \text{pertumbuhan ekonomi kategori } i$$

$$\Delta Y = \text{Pertambahan PDRB}$$

$$\Delta Y_i = \text{Pertambahan PDRB kategori } i$$

Hasil perhitungan ICOR Kota Surakarta selama 2010-2016 dengan menggunakan pendekatan harga berlaku rata-rata adalah 6,8. Nilai ICOR ini termasuk sangat tinggi, artinya untuk menghasilkan output sebesar Rp 1 dibutuhkan investasi sebesar Rp 6,8. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi karena tingginya nilai ICOR. Semakin tinggi nilai ICOR semakin

besar adanya inefisiensi yang terjadi dan semakin kecil nilai ICOR, semakin tinggi tingkat efisiensi. Tinggi rendahnya efisiensi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya faktor proses perizinan, kenaikan biaya produksi, atau faktor tingkat persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, diperlukan upaya yang semakin besar untuk menghadapi persaingan tersebut. Kajian yang pernah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Surakarta menunjukkan bahwa kinerja DPMPTSP Kota Surakarta menurut investor atau pelaku usaha adalah bagus dalam pelayanan perizinan. Dengan demikian, inefisiensi yang muncul bukanlah disebabkan oleh masalah perizinan tersebut tetapi karena faktor lain.

Semakin tinggi nilai ICOR membawa dampak semakin tingginya kebutuhan investasi. Berdasarkan hal di atas, kebutuhan investasi untuk masing-masing kategori disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10.9
Kebutuhan Investasi 2017-2021 (Juta Rupiah), dengan ICOR=6.8

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	30278.28719	31308.07945	32372.89589	33473.92771	34612.40662
a. Tanaman Pangan	-	-	-	-	-
b. Tanaman Hortikultura	642.1541956	646.7837361	651.4466528	656.1431864	660.873579
c. Perkebunan	26.62984638	27.18265092	27.74693103	28.32292494	28.91087582
d. Peternakan	30473.57232	31697.83397	32971.27976	34295.88565	35673.70696
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1220.586946	1295.56693	1375.152893	1459.627778	1549.291909
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
3. Perikanan	22.02702873	22.16384318	22.30150741	22.4400267	22.57940636
Pertambangan dan Penggalian					
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan					
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	456884.6313	497648.1343	542048.5799	590410.4581	643087.2103
3. Pengolahan Tembaku	95202.03216	98368.08178	101639.4219	105019.5541	108512.0964
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	280904.5372	300018.9817	320434.0888	342238.3632	365526.3325
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	32833.30612	35654.45575	38718.00818	42044.79148	45657.42334
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	17364.03951	18091.33048	18849.08395	19638.57585	20461.13553
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	15153.36251	15384.31555	15618.78856	15856.83518	16098.50988
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	28551.57649	32025.25061	35921.5428	40291.87008	45193.90505
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	38861.97367	40903.25769	43051.76325	45313.12231	47693.26269
10. Industri Barang Galian bukan Logam	1593.562871	1670.253684	1750.63527	1834.885251	1923.189794
11. Industri Logam Dasar	270.2506663	283.6677421	297.7509325	312.533308	328.0495809
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	25429.22167	27160.97269	29010.65739	30986.30715	33096.50028
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	9606.573722	10186.23168	10800.86604	11452.58726	12143.63316
14. Industri Alat Angkutan	697.0989008	741.719352	789.195904	839.7113722	893.460274
15. Industri Furnitur	6578.101876	6976.133608	7398.249683	7845.90741	8320.65228

Sumber: data diolah

Besarnya investasi di atas dapat diimplementasikan melalui kebijakan yang dirancang secara komprehensif dan integratif antar OPD terkait. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat setiap kategori atau subkategori memiliki potensi yang berbeda. Selain itu, prioritas dapat dipertajam lagi melalui kriteria-kriteria tertentu dalam rangka lebih memastikan dampak investasi daerah dalam rangka mencapai target pendapatan per kapita sesuai RPJMD Kota Surakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Kota Surakarta untuk merancang skala prioritas pemenuhan kebutuhan investasi berdasarkan ketentuan atau kriteria yang dirumuskan, seperti kriteria ketenagakerjaan, penggunaan sumberdaya, komoditas, lokasi, dan sebagainya. Kebijakan investasi memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan lain, sehingga akan lebih optimal hasilnya apabila dikaitkan dengan kebijakan kemudahan dan insentif, serta kebijakan yang mendukung program *ease of doing business* (EoDB) yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini.

G. Penutup

Berdasarkan hasil kajian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kategori-kategori unggulan di Kota Surakarta adalah kategori konstruksi dan perdagangan, real estate, angkutan rel (kereta api), penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta kesehatan. Kategori-kategori tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar daripada kategori-kategori yang lain.
2. Kebutuhan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta apabila diukur dengan menggunakan ICOR maka nilainya 6,8. Angka ini menunjukkan bahwa untuk tumbuh 1 rupiah maka dibutuhkan investasi 6,8 rupiah. Bila dibandingkan dengan angka ICOR Indonesia, Kota Surakarta tergolong lebih tinggi. Kategori perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasi membutuhkan investasi sebesar 300 Miliar per tahun. Adapun perdagangan besar eceran membutuhkan investasi 2,5 hingga 3 trilyun per tahun. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum membutuhkan investasi sebesar 650 Miliar per tahun.

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan investasi, dapat direkomendasikan untuk:

1. Mempertahankan kategori-kategori unggulan di Kota Surakarta dengan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi (*smart city*).
2. Meningkatkan daya saing industri khususnya pada kategori yang terspesialisasi namun belum kompetitif. Upaya yang dilakukan antara lain: Inovasi kreativitas, memperkuat infrastruktur ekonomi daerah, memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, memetakan potensi ekonomi, mengurangi inefisiensi.
3. Membuat iklim investasi yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan.

REFERENSI

- Antara, Made. 2007. Analisis kebutuhan investasi kategori basis dan non basis dalam perekonomian regional Bali. *Jurnal SOCA*, Vol. 7, No.2.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Tengah dalam angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Surakarta dalam Angka 2016*. Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Profil Ketenagakerjaan 2016*. Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2016*. Semarang.
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Daerah. 2008. *ICOR Kabupaten Bandung Tahun 2008*. Kabupaten Bandung.
- Bank Indonesia. 2009. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Tengah*. Vol. 9 No.10 ISSN 1411-7363. Semarang: Kantor Bank Indonesia.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Kategori Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Imelia, Amelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Irawan, dan Suparmoko. 1997. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanani, Nuhfil dan Iwan Nugroho. 2004. Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Kategori Pertanian: Suatu Pendekatan *Input-Output*. *Jurnal AGRIVITA*, Vol.26, No.2.
- Jhingan, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Nugroho, Iwan. 2007. Pengembangan dan Kebutuhan Investasi Kategori Air Bersih Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol.1
- Nugroho, Iwan dan Nuhfil Hanani. 2007. Studi Investasi untuk Pengembangan Komoditi Pertanian di Propinsi Lampung: Pendekatan input-output. *Jurnal Ekonomi*, Vol.12, No.1.

- Purwanti, Putu Ayu P. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Kategorial di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *Jurnal Piramida*, Vol.V, No.1.
- Simanjuntak, Payaman S. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Sobri. *Ekonomi Makro*. 1987. Yogyakarta: BPFU Universitas Islam Indonesia. Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE UI.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swasono, Yudo, Endang S. 1987. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: BPFU.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

BAB XI

KINERJA KEUANGAN DAN TREN PENDAPATAN DAERAH DARI POS PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

**Mulyanto
Lukman Hakim**

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya dari komponen Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015 sekaligus untuk melihat trend /hasil proyeksinya selama tahun 2016-2020.

Untuk mengukur kinerja Pajak, digunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: (i) Rasio Pengumpulan Pajak Daerah, (ii) Kontribusi Pajak Daerah, (iii) Pertumbuhan Pajak Daerah, dan (iv) Matrik Potensi Pajak Daerah. Keempat model tersebut dianalisis berdasar perkembangan target dan realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015. Sementara untuk membuat ramalan/proyeksi besarnya Pajak Daerah untuk kurun waktu 2016-2020 digunakan pendekatan *trend* dengan metode rerresi OLS (*Ordinary Least Square*).

Dari hasil studi ditemukan bahwa dibanding nilai targetnya, nilai realisasi capaian Pajak Daerah dan pos-pos pembentuknya selalu di atas targetnya. Target Pajak Daerah yang pada tahun 2013 sebesar Rp.51,18 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp.76,91 miliar. Pada tahun 2015, target pajak yang besarnya mencapai Rp.70,91 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp 177,40 miliar. Pos-pos dalam Pajak Daerah yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap perolehan Pajak Daerah

adalah: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pos Pajak Daerah yang mengalami peningkatan pertumbuhan ada 3 (tiga) yaitu: (i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Hiburan, dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dari sisi Matrik Potensi, pos Pajak Daerah yang menempati status **Prima**, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); dan (iii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Pengukuran prestasi kerja dalam penerimaan Pajak Daerah masih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), dan bukan dari rasio cakupan (*coverage ratio*), yang merupakan rasio dari realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi yang benar-benar ada dan dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar.

Hasil kajian ini, diharapkan bisa dikembangkan ke jenis pos Retribusi Daerah dan juga pos-pos yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis retribusi dan juga pos-pos lain yang termasuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Kabupaten Karanganyar

JEL Classification: r12, r5

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal pada era Reformasi secara resmi telah dimulai sejak 1 Januari 2001, yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Kedua regulasi tersebut sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah. Selain asas desentralisasi kedua UU tersebut juga mengatur tentang azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan

antar daerah dengan daerah lainnya. Berdasar pada konteks ini, maka implementasi otonomi daerah harus mampu memberikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan kemandirian daerah dengan menggali potensi pendapatan daerahnya sendiri terutama sumber-sumber pendapatan lokal yang tercantum dalam pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kaputra, 2013: 66-7).

Dalam hal kemandirian keuangan daerah, maka analisis terhadap kinerja keuangan daerah di Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta telah memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan dalam pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang telah dan akan terjadi.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "*self supporting*" dalam bidang keuangan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Soloraya yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, industri dan pariwisata dan mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi. Selain itu juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 dan tahun 2015 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga dapat disimpulkan terdapat pencatatan dan pengungkapan data-data keuangan yang sudah sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang ada.

Gambaran perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010-2014 dapat

dilihat pada Tabel 11.1 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, perolehan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.1 berikut.

Tabel 11.1
Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2014
(dalam Rp dan persen)

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	23.588.206.084	80.483.855.648	29,3
2011	40.731.984.055	104.080.774.286	39,1
2012	45.658.231.047	116.706.893.419	39,1
2013	77.015.249.349	161.724.333.711	47,6
2014	79.986.748.082	187.719.041.754	42,6

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

Berdasarkan Tabel 11.1 dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 39,6%. Pada tahun 2010 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 29,3% dengan nilai Rp.23,59 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya mencapai Rp. 80,48 miliar. Pada Tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah naik menjadi 47,6% dengan nilai sebesar Rp.77,02 miliar dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 161,72 miliar.

Di lain pihak, perkembangan realisasi pendapatan dari pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pasang surut. Pada setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Daerah paling besar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.25,49 miliar dari target Pajak Daerah sebesar Rp 51,53 miliar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010-2014 (dalam Rp dan persen)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	22.204.999.000	23.588.206.084	1.383.207.084	106,23
2011	28.849.400.000	40.731.984.055	11.882.584.055	141,19
2012	32.566.730.000	45.658.231.047	13.091.501.047	140,20
2013	51.528.299.000	77.015.249.349	25.486.950.349	149,46
2014	61.995.000.000	79.986.748.082	17.991.748.082	129,02

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan di atas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya dari komponen Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015 sekaligus untuk melihat trend /hasil proyeksinya selama tahun 2016-2020

B. METODE PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan dalam studi ini, khususnya yang terkait dengan alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Model Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*)

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi Rasio Pengumpulan (*collection ratio*) dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Rumus secara matematisnya adalah sebagai berikut:

$$RPP_{xi} = \frac{Realisasi_{xi}}{Target_{xi}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.1)$$

Di mana:

RPP : Rasio Pengumpulan Pungutan dari berbagai Jenis Pajak Daerah

xi : Komponen dari Jenis Pajak Daerah.

2. Model Kontribusi

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi tingkat sumbangan/kontribusinya terhadap total Pajak Daerah, dirumuskan sebagai berikut:

$$PSP_{xi} = \frac{X_i}{X_{total}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.2)$$

Di mana:

PSP : Potensi Sumbangan dari berbagai jenis Pajak Daerah.

X_i : Komponen dari Jenis Pajak Daerah.

3. Model Pertumbuhan

Untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi pertumbuhan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RP_{xit} = \frac{X_{it} - X_{it-1}}{X_{it-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.3)$$

Di mana:

RPP : Rasio Potensi Pungutan dari berbagai Jenis Pajak Daerah.

X_{it} : Komponen dari Jenis Pajak Daerah tahun t.

X_{it-1} : Komponen dari Jenis Pajak Daerah tahun t-1.

4. Model Matrik Potensi

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi penggolongan masing-masing jenis Pajak Daerah, apakah termasuk dalam kategori Prima, Potensial, Berkembang atau Terbelakang, dapat dihitung dalam suatu Matrik Potensi kinerja Pajak seperti pada tabel berikut.

Pertumbuhan \ Proporsi	$\frac{\Delta Xi}{Rata - Rata X} > 1$	$\frac{\Delta Xi}{rata - rata X} < 1$
$\frac{\Delta Xi}{\Delta Xtotal} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{\Delta Xi}{\Delta Xtotal} < 1$	Potensial	Terbelakang

Catatan:

- Xi : Retribusi Daerah (Retribusi Parkir diTepi Jalan Umum)
- X : Jumlah Total Jenis Retribusi Daerah.
- ▲ : Pertumbuhan (▲ Xi=[(Xit-Xit-1)/Xit-1] x 100%)

5. Analisis Trend

Analisis *trend* yang digunakan dalam studi ini, menggunakan pendekatan regresi tunggal/sederhana dengan variabel terikatnya (*dependent variable*) adalah komponen Pajak Daerah, dan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah waktu. Secara matematisnya dirumsukan sebagai berikut:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \dots\dots\dots (2.4)$$

Di mana:

- Y_i** : Jenis Pajak Daerah.
- X_i : variabel waktu (2013=1; 2014=2; dan 2015=3)
- b₀ : Konstanta
- b₁ : intersep / *sloope* / kemiringan
- e_i : Kesalahan pengganggu

Proyeksi untuk tahun 2016 – 2020 menggunakan persamaan hasil regresi trend, dengan indeks proyeksi untuk tahun sebesar 3.2 (tahun 2016); sebesar 3.4 (tahun 2017); sebesar 3.6 (tahun 2018); sebesar 3.8 (tahun 2019); dan sebesar 4.0 (tahun 2020). Hasil proyeksi ini masuk kategori optimis. Sedang untuk proyeksi moderat, hasil proyeksi dikalikan pertumbuhan -0.01 (1%); dan pesimis dikalikan pertumbuhan -0.05 (5%).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pajak Daerah

Dari Tabel 11.3 dapat dilihat bahwa dibanding nilai targetnya, nilai realisasi capaian Pajak Daerah dan pos-pos pembentuknya selalu di atas targetnya. Target Pajak Daerah yang pada tahun 2013 sebesar Rp 51,18 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp 76,91 miliar. Nilai realisasi sebesar ini, sekali lagi merupakan akumulasi nilai realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Sementara pada tahun 2015, target pajak yang besarnya mencapai Rp 70,91 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp 177,40 miliar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dan diamati pada Tabel 11.3.

Tabel 11.3
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam Rp Ribu)

NO.	JENIS PAJAK	2013		2014		2015	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Hotel	825,000	1,037,119	855,000	1,969,948	1,057,965	2,618,378
02.	Restoran	475,000	1,311,410	540,000	2,628,017	1,127,821	3,849,458
03.	Hiburan	110,000	288,936	150,000	432,278	304,289	726,161
04.	Reklame	375,761	580,239	420,000	1,000,399	438,104	1,192,064
05.	PPJU	25,226,000	34,795,344	27,650,000	69,696,169	35,000,000	89,015,956
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	110,000	290,802	125,000	159,954	8,000	30,774
07.	Parkir	55,000	136,305	80,000	256,882	69,297	269,115
08.	Pajak Air Tanah	750,000	961,399	775,000	1,809,768	902,438	1,960,166
09.	BPHTB	7,250,000	14,817,812	7,250,000	21,917,409	11,000,000	31,328,842
10.	PBB	16,000,000	22,685,550	17,150,000	41,276,547	21,000,000	46,407,030
	Pajak Daerah	51,176,761	76,904,916	54,995,000	117,020,824	70,907,914	177,397,942

Catatan: Angka realisasi merupakan hasil penjumlahan akumulasi capaian bulanan, dari bulan Januari-Desember selama kurun waktu 2013-2015. Angka ini kemungkinan akan berbeda dengan laporan yang dibuat oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar, karena sudah merupakan nilai bersih (dikurangi upah/biaya pungut dari masing-masing pos Pajak Daerah).

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

2. Rasio Pengumpulan Pajak Daerah (Cr: *Collection Ratio*)

Hasil perhitungan potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) yang dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dengan Target pada tahun 2013-2015 menunjukkan angka yang relatif besar. Gambaran hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.4
Besaran Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*)
Pos-Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 (dalam persen)

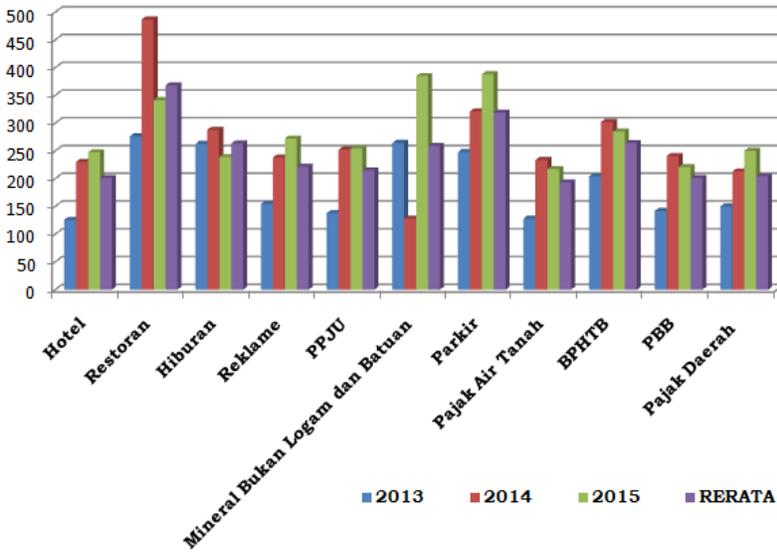
No.	JENIS PAJAK	2013	2014	2015	RERATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Hotel	125.71	230.40	247.49	201.20
02.	Restoran	276.09	486.67	341.32	368.02
03.	Hiburan	262.67	288.19	238.64	263.17
04.	Reklame	154.42	238.19	272.10	221.57
05.	PPJU	137.93	252.07	254.33	214.78
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	264.37	127.96	384.67	259.00
07.	Parkir	247.83	321.10	388.35	319.09
08.	Pajak Air Tanah	128.19	233.52	217.21	192.97
09.	BPHTB	204.38	302.31	284.81	263.83
10.	PBB	141.78	240.68	220.99	201.15
Pajak Daerah		150.27	212.78	250.18	204.41

Catatan: Angka realisasi merupakan hasil penjumlahan akumulasi capaian pos-pos Pajak Daerah secara bulanan, dari bulan Januari-Desember pada tahun yang bersangkutan.

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2013-2015, besaran Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) dari pos-pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar yang relatif tinggi adalah Pajak Restoran, dengan rerata sebesar 368,02% selama kurun waktu tersebut. Capaian CR yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 486,67%.

Sementara itu, besaran CR dari pos-pos Pajak Daerah yang relatif rendah adalah Pajak Air Tanah, dengan rerata sebesar 192,97% selama kurun waktu 2013-2015; namun capaian CR yang paling rendah pada Pajak Hotel pada tahun 2013, yaitu sebesar 125,71%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.5 dan juga Gambar 11.1 berikut.



Gambar 11.1
Grafis Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*)
dari Pos-Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 (dalam persen)
Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 4.2.

3. Kontribusi Pajak Daerah

Potensi pungutan dari berbagai jenis pos Pajak Daerah yang dilihat dari sisi sumbangan/kontribusinya terhadap total Pajak Daerah, dihitung dengan cara membandingkan nilai dari setiap jenis Pajak Daerah terhadap total Pajak Daerah. Gambaran hasil perhitungan nilai kontribusi berbagai jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.5.

Dari Tabel 11.5 dapat dilihat bahwa secara umum ada 3 (tiga) besar jenis pos Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar ke Pajak Daerah, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) di mana secara rata-rata selama tahun 2013-2015 memberikan kontribusi sebesar 51,66% atau hampir separuh dari total Pajak Daerah; (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 30,31%; dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) secara rata-rata memberikan sumbangan sebesar 18,55%.

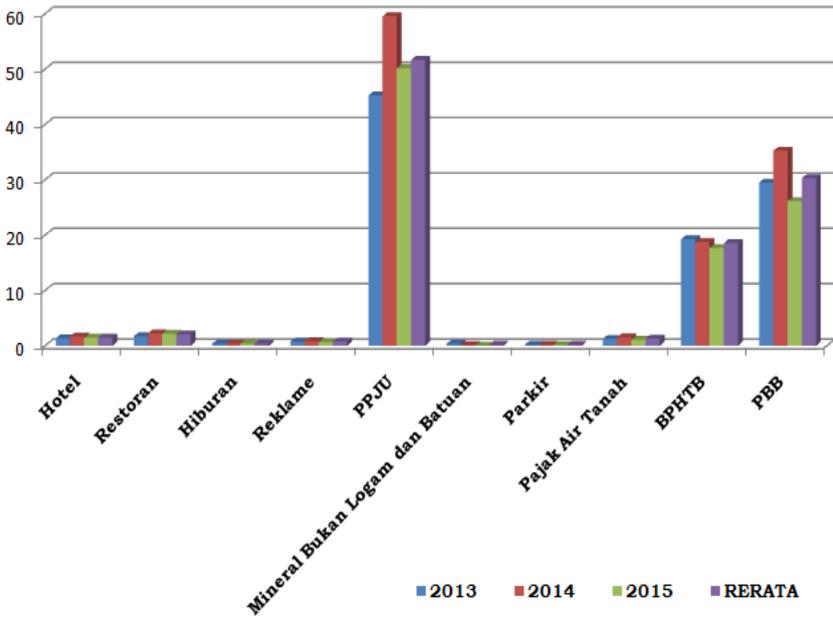
Tabel 11.5
Perkembangan Nilai Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 (dalam persen)

No.	JENIS PAJAK	2013	2014	2015	RERATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Hotel	1.35	1.68	1.48	1.50
02.	Restoran	1.71	2.25	2.17	2.04
03.	Hiburan	0.38	0.37	0.41	0.38
04.	Reklame	0.75	0.85	0.67	0.76
05.	PPJU	45.24	59.56	50.18	51.66
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.38	0.14	0.02	0.18
07.	Parkir	0.18	0.22	0.15	0.18
08.	Pajak Air Tanah	1.25	1.55	1.10	1.30
09.	BPHTB	19.27	18.73	17.66	18.55
10.	PBB	29.50	35.27	26.16	30.31
Pajak Daerah		100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pos-pos Pajak Daerah selain ketiga pos yang telah disebutkan di atas (PPJU, PBB dan BPHTB) memberikan kontribusi yang relatif rendah, yaitu kurang dari 5%; bahkan ada 2 (dua) pos Pajak Daerah yang memberikan sumbangan kurang dari 1%; yaitu: (i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan (ii) Pajak Parkir. Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013-2015, sehingga terus mengalami pertumbuhan yang negatif.

Dari Tabel 11.5 juga dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2013-2015 tidak ada satupun jenis Pajak Daerah yang mengalami kenaikan kontribusi yang kecenderungan / trennya semakin meningkat, tetapi naik turun selama kurun waktu tersebut. Selain Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jenis pajak yang kontribusinya semakin menurun adalah Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yaitu dari sebesar 19,27% pada tahun 2013; turun menjadi sebesar 18,73% pada tahun 2014; serta turun lagi menjadi sekitar 17,66% pada tahun 2015. Gambaran hasil perhitungan nilai kontribusi berbagai jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar secara grafis, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.6.



Gambar 11.2
 Grafis Perkembangan Nilai Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Daerah
 di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam persen)
 Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 4.3.

4. Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan dari berbagai jenis pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar dihitung dengan membandingkan besaran realisasi setiap jenis pos Pajak Daerah pada tahun berjalan dengan kondisi 1 (satu) tahun sebelumnya. Gambaran hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pos-pos Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.6

Dari Tabel 11.6 dapat dilihat bahwa rerata pertumbuhan yang paling tinggi adalah pos Pajak Restoran, dengan tingkat pertumbuhan mencapai hingga 104%. Pertumbuhan Pajak Restoran yang tinggi dicapai pada tahun 2015, yaitu sebesar 108,86%. Di lain pihak, untuk pos Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tingkat pertumbuhannya terus menurun dari sebesar -45,00% pada tahun 2014, menurun lagi menjadi sebesar -93,60% pada tahun 2015; sehingga secara rerata mempunyai pertumbuhan yang negatif sebesar -69,30%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

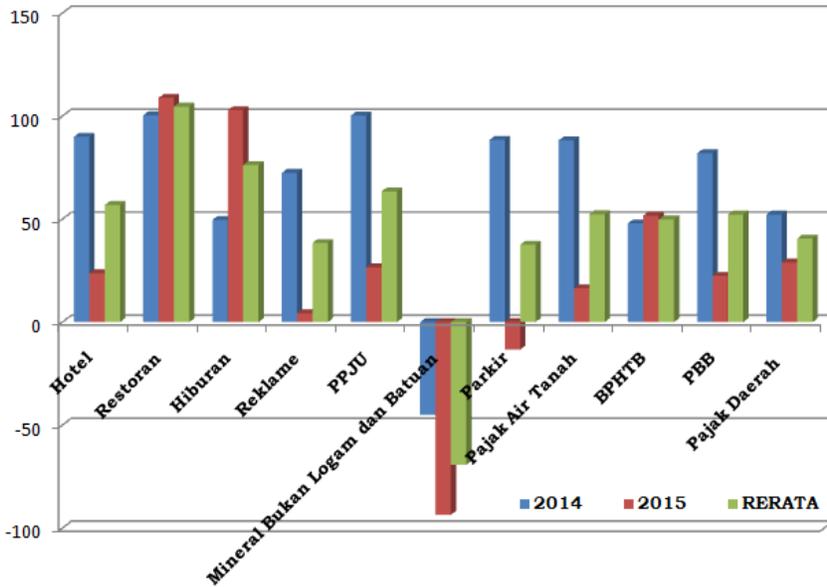
Tabel 11.6
Pertumbuhan Berbagai Jenis Pos Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 (dalam persen)

No.	JENIS PAJAK	2014	2015	RERATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Hotel	89.94	23.74	56.84
02.	Restoran	100.40	108.86	104.63
03.	Hiburan	49.61	102.86	76.23
04.	Reklame	72.41	4.31	38.36
05.	PPJU	100.30	26.58	63.44
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	(45.00)	(93.60)	(69.30)
07.	Parkir	88.46	(13.38)	37.54
08.	Pajak Air Tanah	88.24	16.44	52.34
09.	BPHTB	47.91	51.72	49.82
10.	PBB	81.95	22.45	52.20
	Pajak Daerah	52.16	28.94	40.55

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari Tabel 11.6 juga dapat dilihat bahwa selama tahun 2014-2015 yang mempunyai daya tumbuh meningkat, selain pos Pajak Restoran adalah Pajak Hiburan dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Secara keseluruhan pertumbuhan untuk pos Pajak Daerah pada tahun 2015 (sebesar 28,94%) lebih rendah dibanding dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 (sebesar 52,16%). Sementara itu, untuk pos Pajak Parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2015, yaitu sebesar -13,38%; dibanding dengan tahun 2014 yang besarnya mencapai 88,46%. Selain Pajak Parkir, pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Pajak Reklame, yaitu turun dari sebesar 72,41% pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,31% pada tahun 2015.

Secara keseluruhan dari 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah, ada 7 (tujuh) jenis pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yaitu: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Reklame, (iii) Pajak PJU (Penerangan Jalan Umum), (iv) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (v) Pajak Parkir, (vi) Pajak Air Tanah, dan (vii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11.3
 Grafis Laju Pertumbuhan Berbagai Jenis Pos Pajak Daerah
 di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 (dalam persen)
 Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 6.

5. Matrik Potensi Pajak Daerah

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi penggolongan masing-masing jenis Pajak Daerah, apakah termasuk dalam kategori Prima, Potensial, Berkembang atau Terbelakang, digunakan pendekatan Matriks Potensi.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bagian 2, maka suatu pos Pajak Daerah, dapat menempati salah satu dari 4 (empat) kemungkinan sebagai berikut:

- a. **Terbelakang**, Kode 0 0 (baik sumbangan maupun pertumbuhan di bawah rerata);
- b. **Berkembang**, Kode 0 1 (sumbangan di bawah rerata, tetapi tingkat pertumbuhan di atas rerata);
- c. **Potensial**, Kode 1 0: (sumbangan di atas rerata, tetapi tingkat pertumbuhan masih di bawah rerata); dan
- d. **Prima**, Kode 1 1: (baik sumbangan maupun pertumbuhan berara di atas rerata).

Gambaran hasil perhitungan Matriks Potensi dari 10 (sepuluh) jenis pos Pajak Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.7
Matriks Potensi dari Berbagai Jenis Pos Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dan 2015

No.JENIS PAJAK		Kode Status 1)		Status Kinerja 2)	
		2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Hotel	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
02.	Restoran	0 1	0 1	Berkembang	Berkembang
03.	Hiburan	0 0	0 1	Terbelakang	Berkembang
04.	Reklame	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
05.	PPJU	1 1	1 0	Prima	Potensial
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	0 0	0 0	Terbelakang	Terbelakang
07.	Parkir	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
08.	Pajak Air Tanah	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
09.	BPHTB	1 0	1 1	Potensial	Prima
10.	PBB	1 1	1 0	Prima	Potensial

Catatan: 1) Kode 0 menunjukkan nilai besaran (kontribusi dan pertumbuhan) yang kurang dari 1 sedang kode 1 menunjukkan besaran yang lebih besar dari 1 dibanding rerata sumbangan dan pertumbuhan Pajak Daerah.

2) Kode 0 0: Terbelakang (baik sumbangan maupun pertumbuhan di bawah rerata); Kode 0 1: Berkembang (pertumbuhan di atas rerata); Kode 1 0: Potensial (sumbangan di atas rerata); dan Kode 1 1: Prima (sumbangan maupun pertumbuhan di atas rerata).

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke-10 jenis Pajak Daerah, hanya ada 3 (tiga) pos Pajak Daerah yang bisa menempati status **Prima**, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); dan (iii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Pada tahun 2014, jenis Pajak Daerah yang masuk kategori **Terbelakang**, adalah Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara pada tahun 2015 bertambah banyak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) dan PBB

(Pajak Bumi dan Bangunan), pada tahun 2015 masuk dalam kategori **Potensial**, di mana daris isi sumbangannya besar namun tingkat pertumbuhannya berada di bawah tingkat pertumbuhan Pajak Daerah. Gambaran selengkapnya lihat pada Tabel 11.7.

6. *Trend Pajak Daerah*

Sebagaimana yang telah dibahas dalam BAB I, analisis *trend* yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan regresi tunggal/ sederhana dengan variabel terikatnya (*dependent variable*) adalah komponen / pos-pos Pajak Daerah dan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah variabel waktu.

Untuk variabel waktu diberikan kode 1 sampai dengan 3, di mana untuk tahun 2013 = 1; tahun 2014 = 2; dan tahun 2015 = 3. Hasil analisis untuk parameter konstanta (b_0) dan intersep/slope/kemiringan (b_1) dan parameter lain adalah sebagai berikut:

Tabel 11.8
Parameter Model *Trend* dengan Pendekatan Regresi Tunggal/Sederhana
($Y = b_0 + b_1.X_i + e_i$)

No.	JENIS PAJAK	Konstanta	Intersep	Adj. R ²	t-Test	Signifikansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Hotel 3)	293.89	790.63	97.9%	9.63	6.6%
02.	Restoran 2)	58.25	1,269.02	99.9%	46.19	1.4%
03.	Hiburan	45.23	218.61	92.4%	5.03	12.5%
04.	Reklame	312.41	305.91	91.1%	4.64	13.5%
05.	PPJU	10,281.88	27,110.31	94.6%	6.03	10.5%
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan 1)	420.54	-130.01	100.0%	-270.15	0.2%
07.	Parkir	87.96	66.41	63.7%	2.12	28.0%
08.	Pajak Air Tanah	578.35	499.38	72.0%	2.48	24.4%
09.	BPHTB 3)	6,176.99	8,255.52	98.7%	12.37	5.1%
10.	PBB	13,068.23	11,860.74	80.6%	3.05	20.2%
	Pajak Daerah	23,281.53	50,246.51	97.3%	8.59	7.4%

- Catatan:** 1) Model *trend* jenis pajak ini mempunyai tingkat kesalahan 1%, yaitu model *trend* untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2) Model *trend* jenis pajak ini mempunyai tingkat kesalahan 5%, yaitu model *trend* untuk Pajak Restoran
3) Model *trend* jenis pajak ini mempunyai tingkat kesalahan 10%, yaitu model *trend* untuk Pajak Hotel dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Sumber: Dirangkum dari Hasil Pengolahan Data Sekunder (2016)

Dari parameter model tersebut di atas, dapat diproyeksikan pos-pos Pajak Daerah untuk untuk 2016-2020. Proyeksi yang dilakukan berbasis data realisasi dari 10 (sepuluh) jenis / pos Pajak Daerah selama tahun 2013-2015. Hasil proyeksi pos-pos Pajak Daerah untuk tahun 2016-2020; selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Dari Tabel 9 dapat bahwa pos Pajak Daerah yang relatif besar adalah: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Ketiga jenis Pajak Daerah ini masih akan tetap mendominasi perolehan pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar hingga masa-masa mendatang, jika tidak ada reformasi perpajakan secara mendasar.

Jenis pos Pajak Daerah yang relatif besar dan bisa menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Karanganyar setelah ketiga pos pajak di atas adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Selain itu Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak Reklame juga merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah yang cukup besar. Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBL_B) masih memberikan kontribusi yang relatif kecil, bahkan untuk MBL_B hasil proyeksinya negatif yang semata-mata menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan yang semakin besar.

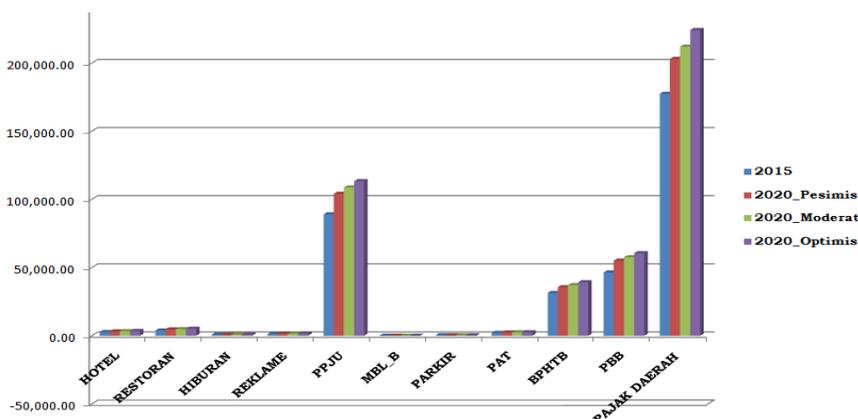
Untuk gambaran hasil proyeksi optimis, moderat dan pesimis, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.9 dan Gambar 11.4. Proyeksi OPTIMIS diperoleh dari model *trend* dengan memberi bobot masing-masing sebesar 3.2 (tahun 2016); sebesar 3.4 (tahun 2017); sebesar 3.6 (tahun 2018); sebesar 3.8 (tahun 2019); dan sebesar 4.0 (tahun 2020). Sementara, model proyeksi MODERAT didapatkan dari hasil proyeksi OPTIMIS dikurangi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun model proyeksi PESIMIS, diperoleh dari hasil proyeksi OPTIMIS dikurangi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%.

Tabel 11.9
Data Realisasi Pos Pajak Daerah (Tahun 2013-2015)
dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah
Tahun 2016-2020 (dalam Rp Juta)

TAHUN	HOTEL	RESTORAN	HIBURAN	REKLA- ME	PPJU	MBI_B	PARKIR	PAT	BPHTB	PBB	PAJAK DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DATA DASAR BASIS PROYEKSI TAHUN 2013-2015											
2013	1,037.12	1,311.41	288.94	580.24	34,795.34	290.80	136.31	961.40	14,817.81	22,685.55	76,904.92
2014	1,969.95	2,628.02	432.28	1,000.40	69,696.17	159.95	256.88	1,809.77	21,917.41	41,276.55	117,020.82
2015	2,618.38	3,849.46	726.16	1,192.06	89,015.96	30.77	269.12	1,960.17	31,328.84	46,407.03	177,397.94
PROYEKSI OPTIMIS POS PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 1)											
2016	2,823.90	4,119.12	744.79	1,291.33	97,034.86	4.49	300.45	2,176.37	32,594.64	51,022.37	184,070.38
2017	2,982.03	4,372.93	788.51	1,352.51	102,456.92	(21.51)	313.73	2,276.25	34,245.74	53,394.52	194,119.68
2018	3,140.15	4,626.73	832.24	1,413.69	107,878.98	(47.51)	327.02	2,376.12	35,896.85	55,766.66	204,168.98
2019	3,298.28	4,880.54	875.96	1,474.87	109,776.70	(73.52)	340.30	2,476.00	37,547.95	58,138.81	214,218.28
2020	3,456.41	5,134.34	919.68	1,536.06	113,301.04	(99.52)	353.58	2,575.88	39,199.05	60,510.96	224,267.59
PROYEKSI MODERAT POS PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 2)											
2016	2,590.14	3,808.27	718.71	1,179.15	88,045.61	30.73	266.11	1,938.40	31,002.90	45,896.81	175,557.24
2017	2,794.08	4,075.40	736.91	1,277.80	96,010.29	4.71	297.32	2,153.61	32,252.18	50,488.42	182,129.18
2018	2,950.63	4,326.66	780.19	1,338.37	101,378.13	(21.03)	310.46	2,252.49	33,886.77	52,836.85	192,077.99
2019	3,107.17	4,577.93	823.48	1,398.94	106,781.21	(46.78)	323.61	2,351.36	35,521.37	55,185.28	202,026.80
2020	3,263.72	4,829.20	866.76	1,459.51	108,643.69	(72.52)	336.76	2,450.24	37,155.96	57,533.70	211,975.61
PROYEKSI PESIMIS POS PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 3)											
2016	2,477.18	3,643.50	688.92	1,127.50	84,164.21	30.55	254.09	1,851.35	29,699.11	43,855.91	168,194.42
2017	2,674.80	3,900.48	705.37	1,223.70	91,912.01	5.57	284.77	2,062.56	30,882.35	48,352.64	174,364.39
2018	2,825.02	4,141.59	746.90	1,281.83	97,062.97	(19.13)	297.38	2,157.44	32,450.90	50,606.18	183,911.23
2019	2,975.24	4,382.71	788.44	1,339.95	102,390.14	(43.84)	310.00	2,252.32	34,019.45	52,859.72	193,458.07
2020	3,125.46	4,623.82	829.98	1,398.07	104,111.65	(68.54)	322.62	2,347.21	35,588.00	55,113.26	203,004.90

- Catatan:**
- 1) Indeks proyeksi OPTIMIS adalah sebesar 3.2 (tahun 2016); sebesar 3.4 (tahun 2017); sebesar 3.6 (tahun 2018); sebesar 3.8 (tahun 2019); dan sebesar 4.0 (tahun 2020).
 - 2) Indeks proyeksi MODERAT adalah hasil proyeksi OPTIMIS dikurang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%.
 - 3) Indeks proyeksi PESIMIS adalah hasil proyeksi OPTIMIS dikurang Dengan tingkat pertumbuhan 5%.

Sumber: Dirangkum dari Hasil Pengolahan Data Sekunder (2016)



Gambar 11.4

Grafik Data Realisasi Pos Pajak Daerah Tahun 2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (dalam Rp Juta)

Catatan: (i) PPJU: Pajak Penerangan Jalan Umum, (ii) MBL_B: Mineral Bukan Logam dan Batuan, (iii) PAT: Pajak Air Tanah, (iv) BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta (v) PBB: Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 4.7.

7. Simpulan

Dalam kajian ini semua pos Pajak Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dikaji (kecuali Pajak Sarang Burung Walet, yang di Kabupaten Karanganyar tidak dipungut). Keseluruhan Pajak Daerah yang dikaji adalah: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU); (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan; dan (x) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pos-pos dalam Pajak Daerah yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap perolehan Pajak Daerah adalah: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Ketiga jenis Pajak Daerah ini masih akan tetap mendominasi perolehan pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar hingga masa-masa mendatang.

Selama kurun waktu 2013-2015 tidak ada satupun jenis Pajak Daerah yang mengalami kenaikan kontribusi yang kecenderungan atau trennya semakin meningkat, tetapi naik turun selama kurun waktu tersebut. Selain Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jenis pajak yang

kontribusinya semakin menurun adalah Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yaitu dari sebesar 19,27% pada tahun 2013; turun menjadi sebesar 18,73% pada tahun 2014; serta turun lagi menjadi sekitar 17,66% pada tahun 2015.

Secara keseluruhan dari 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah, ada 7 (tujuh) jenis pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yaitu: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Reklame, (iii) Pajak PJU (Penerangan Jalan Umum), (iv) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (v) Pajak Parkir, (vi) Pajak Air Tanah, dan (vii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sementara yang mengalami peningkatan pertumbuhan ada 3 (tiga) yaitu: (i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Hiburan, dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Secara keseluruhan pertumbuhan untuk pos Pajak Daerah pada tahun 2015 (sebesar 28,94%) lebih rendah dibanding dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 (sebesar 52,16%). Sementara untuk pos Pajak Parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2015, yaitu sebesar -13,38%; dibanding dengan tahun 2014 yang besarnya mencapai 88,46%. Selain Pajak Parkir, pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Pajak Reklame, yaitu turun dari sebesar 72,41% pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,31% pada tahun 2015.

Pajak Daerah yang menempati status **Prima**, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); dan (iii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pada tahun 2015 masuk dalam kategori **Potensial**, di mana daris isi sumbangannya besar namun tingkat pertumbuhannya berada di bawah tingkat pertumbuhan Pajak Daerah. Di lain pihak, jenis Pajak Daerah yang masuk kategori **Terbelakang**, adalah Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara pada tahun 2015 bertambah banyak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

8. Rekomendasi

Upaya peningkatan kinerja Pajak Daerah untuk masing-masing pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar dari hasil analisis realiasi pos-pos Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel pada tahun 2013 masuk dalam kategori pajak yang mempunyai Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) dari pos-pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar paling rendah, yaitu sebesar 125,71%. Artinya, dibanding dengan pos-pos pajak lainnya, Pajak Hotel mempunyai tingkat pencapaian realisasi dibanding target yang relatif rendah. Kondisi yang demikian perlu dicari akan permasalahannya, khususnya jika dikaitkan dengan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar yang seharusnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masih rendahnya rerata kontribusi dari pos Pajak Hotel ini, yang selama kurun waktu 2013-2015 baru mencapai 1,50%. Status kinerja dari pos Pajak Hotel ini turun dari **Berkembang** menjadi **Terbelakang**. Hal ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pos Pajak Hotel dari sebesar 89,94% pada tahun 2014, turun menjadi sebesar 23,74% pada tahun 2015.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran mempunyai besaran Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) yang paling tinggi, yaitu rata-rata selama 2013-2015 sebesar 368,02%. Hal ini mempunyai implikasi bahwa dibanding dengan target yang ditetapkan, capaian realisasi Pajak Restoran mempunyai tingkat capaian realisasi yang paling besar. Artinya jenis pajak ini pada masa-masa mendatang dapat dikategorikan pajak yang mempunyai prospek peningkatan yang sangat baik dibanding dengan jenis Pajak Daerah lainnya, walaupun untuk saat ini nilainya masih kalah jauh dibanding dengan perolehan pajak dari pos PPJU, PBB dan BPHTB. Di samping itu, Pajak Restoran juga mempunyai rerata pertumbuhan yang paling tinggi, dengan tingkat pertumbuhan mencapai angka 104%. Pertumbuhan Pajak Restoran yang tinggi dicapai pada tahun 2015, yaitu sebesar 108,86%. Oleh karenanya jenis pajak ini selain mempunyai CR yang tinggi juga mempunyai daya tumbuh yang relatif besar.

c) Pajak Hiburan

Pada tahun 2014, Pajak Hiburan masuk dalam kategori **Terbelakang**, sedang pada tahun 2015 masuk kategori **Berkembang**. Hal ini mengindikasi bahwa jenis pajak ini mengalami transformasi ke arah yang lebih baik; khususnya jika dilihat dari sisi pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan dari jenis pajak ini, mengalami peningkatan dari sebesar 49,61% pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 102% pada tahun 2015. Walaupun secara kontribusinya masih kurang dari 1% dari keseluruhan Pajak Daerah. Ke depan penggalan Pajak Hiburan yang berbasis pada potensi yang sebenarnya perlu dilakukan dengan baik.

d) **Pajak Reklame**

Pajak Reklame memberikan sumbangan ke Pajak Daerah kurang dari 1%. Di samping itu, selama kurun waktu 2013-2015; jenis Pajak Reklame juga mengalami penurunan tingkat pertumbuhannya, yaitu dari sebesar 72,41% pada tahun 2014, turun menjadi sebesar 4,31% pada tahun 2015. Oleh karenanya status kinerjanya mengalami penurunan dari kategori **Berkembang** ke kategori **Terbelakang**. Perolehan Pajak Reklame idealnya akan cenderung semakin besar seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat. Oleh karenanya berbagai usaha yang diarahkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat sangat diperlukan untuk memperbesar perolehan pendapatan dari pos Pajak Reklame pada masa-masa mendatang.

e) **Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)**

PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) memberikan kontribusi yang paling besar terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karangayar, di mana secara rata-rata selama kurun waktu 2013-2015 memberikan kontribusi sebesar 51,66% atau hampir separuh dari total Pajak Daerah. Status kinerja dari pos pajak ini turun dari kondisi **Prima** menjadi **Potensial**. Artinya walaupun mempunyai sumbangan besar, tetapi daya tumbuhnya semakin menurun. PPJU mempunyai peran besar bagi perolehan Pajak Daerah di Kabupaten Karangayar, sehingga upaya mempertahankan jenis pajak masih menjadi bagian yang penting dalam tatalaksana perpajakan di Kabupaten Karangayar.

f) **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan kurang dari 1% terhadap Pajak Daerah. Di samping itu, jenis pajak ini cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013-2015. Oleh karenanya tingkat pertumbuhan dari jenis pajak ini terus mengalami pertumbuhan yang negatif. Tingkat pertumbuhan dari pos pajak ini terus mengalami penurunan dari sebesar -45,00% pada tahun 2014, menurun lagi menjadi -93,60% pada tahun 2015; sehingga secara rerata mempunyai pertumbuhan yang negatif sebesar -69,30% selama tahun 2014-2015. Ke depan harus dicari permasalahan yang terjadi terhadap pos pajak ini, apakah masih potensial atau memang kurang optimal dalam usaha penggaliannya.

g) **Pajak Parkir**

Pajak Parkir, seperti halnya dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, memberikan sumbangan kurang dari 1% terhadap Pajak Daerah. Di samping itu, pos Pajak Parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2015, yaitu sebesar -13,38%; dibanding dengan

tahun 2014 yang besarnya mencapai 88,46%. Sebagaimana Pajak Hotel, Pajak parkir ini juga mengalami penurunan status kinerjanya dari **Berkembang** (tahun 2014) menjadi **Terbelakang** (tahun 2015). Hal ini terjadi karena penurunan tingkat pertumbuhan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Optimalisasi terhadap Pajak Parkir perlu dilakukan, agar tingkat kontribusi maupun daya tumbuhnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

h) **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah, sebagaimana Pajak Hotel dan Pajak Parkir; mengalami penurunan status kinerjanya dari **Berkembang** (tahun 2014) menjadi **Terbelakang** (tahun 2015). Hal ini terjadi karena penurunan tingkat pertumbuhan dari sebesar 88,24% pada tahun 2014 menjadi sebesar 16,44% pada tahun 2015. Pajak Air Tanah memberikan kontribusi ke Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015 secara rata-rata sebesar 1,30%. Optimalisasi terhadap Pajak Air Tanah, sebagaimana juga Pajak Parkir perlu dilakukan, agar tingkat kontribusi maupun daya tumbuhnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

i) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) memberikan sumbangan secara rata-rata selama kurun waktu 2013-2015 sebesar 18,55%. Besaran sumbangan ini menempati urutan ke-3 setelah PPJU dan PBB. BPHTB ini walaupun relatif besar sumbangannya, namun mempunyai kecenderungan pertumbuhan yang semakin menurun; yaitu dari sebesar 19,27% pada tahun 2013; turun menjadi sebesar 18,73% pada tahun 2014; serta turun lagi menjadi sekitar 17,66% pada tahun 2015. Upaya untuk peningkatan BPHTB harus terus dicari akar permasalahannya, sehingga keberadaannya diharapkan selain memberikan kontribusi yang besar juga mempunyai daya tumbuh yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

j) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan**

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Karanganyar secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 30,31%. Artinya keberadaan jenis pajak ini masih sangat penting untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang, karena kontribusinya menempati urutan ke-2 setelah PPJU. Pembaharuan pendataan basis pajak untuk PBB perlu terus dilakukan, khususnya di kompleks perumahan karena banyak model bangunan dan nilai objek pajak saat ini masih belum banyak yang mengalami perubahan dibanding pada masa awal kepemilikan oleh pihak pertama. Banyak lokasi yang sistem penamaan jalannya sudah tidak sesuai dengan kondisi nama jalan yang ada pada saat ini. Kondisi tersebut jelas menyulitkan petugas di

tingkat desa ketika hendak menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) kepada pemilik yang sekarang

Pengukuran prestasi kerja dalam penerimaan Pajak Daerah masih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah dari target penerimaan Pajak Daerah, dan bukan dari rasio cakupan (*coverage ratio*), yang merupakan rasio dari realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi yang benar-benar ada dan dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar.

Hasil kajian ini, diharapkan bisa dikembangkan ke jenis pos Retribusi Daerah dan juga pos-pos yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis retribusi dan juga pos-pos lain yang termasuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

REFERENSI

- Ahmad, Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Prakosa, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Badan Pusat Statistik Kab. Karanganyar. 2014. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2013*. Karanganyar: BPS.
- _____. 2015. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2014*. Karanganyar: BPS.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar. (2016). *Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015*. Karanganyar: DPKKAD.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPFU UGM.
- Kaputra, Iswan. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sidik, Macfud. 2002. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Simanjuntak, Robert. 2002. *Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, dalam 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi Indonesia pada Era Politik Baru. Jakarta: Gramdia Pustaka.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN 1 REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 (RP JUTA)

NO.	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI PEROLEHAN PAJAK DAERAH												TOTAL
			JANU- ARI	FEBRU- ARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS- TUS	SEPTEM- BER	OKTO- BER	NOPEM- BER	DESEM- BER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Hotel	825	100	84	39	89	75	82	131	36	87	123	44	145	1,862
02.	Restoran	475	84	71	58	101	85	100	133	42	84	162	75	353	1,823
03.	Hiburan	110	23	27	9	43	21	16	28	14	20	41	22	30	404
04.	Reklame	376	30	53	53	76	36	62	57	51	51	33	26	52	956
05.	PPJU	25.226	2.628	2.638	2.751	2.605	2.821	2.911	2.999	2.970	3.188	2.823	3.122	3.338	60.021
06.	Mineral Bukan Logam Dan Batu	110	11	3	4	4	11	11	13	12	21	50	51	102	403
07.	Parkir	55	6	7	6	11	8	10	15	14	18	15	12	14	191
08.	Pajak Air Tanah	750	73	98	74	57	104	40	105	58	101	84	83	88	1.717
09.	BPHTB	7.250	134	827	1.606	682	918	729	916	681	1.561	1.921	809	4.094	22.129
10.	PBB	16.000	61	181	324	1.103	2.777	2.284	2.536	1.731	9.021	1.722	505	440	38.686
	Pajak Daerah	51,177	3,151	3,989	4,925	4,772	6,856	6,245	6,933	5,611	14,152	6,974	4,751	8,656	128,192

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

LAMPIRAN 2 REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 (RP. JUTA)

NO.	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI PEROLEHAN PAJAK DAERAH												TOTAL
			JANU- ARI	FEBRU- ARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS- TUS	SEPTEM- BER	OKTO- BER	NOPEM- BER	DESEM- BER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Hotel	855	57	88	66	65	89	79	118	49	96	107	189	113	1,115
02.	Restoran	540	33	86	65	66	74	143	232	113	156	205	361	553	2,088
03.	Hiburan	150	12	24	12	23	21	17	50	14	28	20	34	27	282
04.	Reklame	420	71	24	70	29	45	17	95	34	50	64	51	31	580
05.	PPJU	27,650	3,256	3,283	3,275	3,100	3,377	3,330	3,493	3,422	3,405	3,692	4,104	4,309	42,046
06.	Mineral Bukan Logam Dan Batu	125	3	2	-	5	-	-	-	-	-	2	-	23	35
07.	Parkir	80	12	13	12	25	12	14	16	22	13	11	13	13	177
08.	Pajak Air Tanah	775	87	75	98	89	74	67	74	113	95	84	47	130	1,035
09.	BPHTB	7.250	339	1,595	628	1,418	1,178	1,597	1,002	887	1,407	1,172	1,133	2,312	14,667
10.	PBB	17,150	333	459	2,193	2,314	2,148	2,110	1,193	2,637	8,707	1,078	532	421	24,127
	Pajak Daerah	54,995	4,202	5,651	6,418	7,135	7,019	7,375	6,273	7,291	13,958	6,434	6,463	7,933	86,152

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

LAMPIRAN 3

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 (RP. JUTA)

NO.	JENIS PAJAK	REALISASI PEROLEHAN PAJAK DAERAH													
		TARGET	JANU- ARI	FEBRU- ARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS- TUS	SEPTEM- BER	OKTO- BER	NOPEM- BER	DESEM- BER	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Hotel	1,058	100	40	84	134	51	90	82	118	175	109	271	306	1,560
02.	Restoran	1,128	98	79	104	222	180	185	237	178	203	209	292	736	2,722
03.	Iliburan	304	51	17	33	21	11	30	25	38	51	10	50	83	422
04.	Reklame	438	77	42	56	61	67	42	86	70	121	37	52	44	754
05.	PPJU	35,000	4,553	4,552	4,467	4,102	4,413	4,425	4,677	4,647	3,978	4,719	4,688	4,794	54,016
	Mineral														
06.	Logam Dan Batuan	8	0	11	5	1	1	0	0	2	0	1	0	2	23
07.	Parkir	69	13	12	24	24	12	16	15	26	13	13	15	18	200
08.	Pajak Air Tanah	902	86	80	67	89	83	114	58	102	104	80	67	128	1,058
09.	BPHTB	11,000	456	3,007	1,412	892	708	2,055	690	984	1,272	1,888	3,768	3,196	20,329
10.	PBB	21,000	630	1,203	2,918	3,573	2,350	1,926	1,285	2,805	6,825	678	616	597	25,407
	Pajak Daerah	70,908	6,065	9,042	9,170	9,120	7,876	8,884	7,154	8,969	12,742	7,743	9,819	9,905	106,490

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar, (2016). Data diolah.

BAB XII

DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP RELOKASI INDUSTRI DAN KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH

**Yunastiti Purwaningsih
Sutomo**

A. Pendahuluan

Penentuan lokasi industri atau lokasi pabrik tergantung pada apakah di daerah yang dipilih terdapat ketersediaan bahan mentah, tenaga kerja, sumber energi, transportasi, pasar, perangkat hukum dan kondisi lingkungan yang menunjang operasional dan keberadaan pabrik tersebut. Dari kesemua faktor tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan adalah biaya operasional suatu pabrik. Pertimbangan apakah lokasi pabrik dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar, lebih didasarkan pada biaya operasional dan biaya transportasi yang rendah, sehingga menguntungkan. Pada umumnya lokasi pabrik akan berkumpul di suatu lokasi, sehingga suatu daerah berkembang menjadi daerah lokasi industri. Terdapat dampak positif dari pengelompokan industri yang terpusat di suatu lokasi, yaitu kemudahan hubungan satu sama lain dan hubungan ke beberapa lembaga perijinan, pajak, perbankan, ekspor-impor dan lain-lain. Namun pemusatan industri di suatu wilayah juga berdampak negatif terhadap daya dukung ekonomi dan lingkungan.

Secara teori, terdapat tiga pendekatan dalam penentuan lokasi industri yaitu: pendekatan meminimumkan biaya atau biaya terkecil, pendekatan wilayah pemasaran, dan pendekatan memaksimalkan keuntungan (Budiharsono, 2001). Pendekatan biaya terkecil dikemukakan oleh Alfred Weber di mana penentuan lokasi industri didasarkan pada

biaya transportasi terkecil, biaya tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi. Asumsi teori ini adalah bahwa biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh dan berat barang, sehingga titik yang membuat biaya terkecil adalah bobot total pergerakan pengumpulan berbagai input dan pendistribusian hasil industri. Pendekatan wilayah pemasaran dikemukakan oleh Losch, bahwa penentuan lokasi industri mempertimbangkan ukuran optimal dari pasar. Lokasi optimal adalah tempat di mana terjadi keuntungan maksimal dengan asumsi penyebaran faktor input merata, faktor penyebaran penduduk dan selera masyarakat sama, serta tidak ada ketergantungan lokasi antar perusahaan. Pendekatan keuntungan maksimum, dikemukakan oleh Smith, bahwa dipilih lokasi yang memberikan keuntungan yang maksimal setelah memperhatikan lokasi yang menghasilkan ongkos terkecil dan lokasi yang memberikan penerimaan terbesar, dengan mengintrodusir konsep *average cost* (biaya rata-rata) dan *average revenue* (penerimaan rata-rata) yang terkait dengan lokasi.

Dewasa ini, lokasi industri atau lokasi dari sekumpulan pabrik di Indonesia, terpusat di kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Dengan berkelompoknya industri di tempat-tempat tertentu tersebut, pada akhirnya akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan. Pada pusat pertumbuhan, kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah pekerja relatif tinggi dibanding di daerah belakang, atau daerah selain pusat pertumbuhan. Dampak negatif yang diakibatkan dengan adanya pusat pertumbuhan tersebut adalah pembangunan yang tidak merata, di mana terdapat daerah yang sangat maju tetapi terdapat juga daerah yang kurang berkembang. Hirschman (1958) menyatakan secara geografis pertumbuhan ekonomi terjadi tidak seimbang, bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum disebar ke berbagai pusat pertumbuhan (*Growing Centre*). Kondisi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan Hirschman, terjadi di Indonesia, bahwa pola pembangunan ekonomi dewasa ini masih terpusat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya dan kota-kota lain, terutama di pulau Jawa. Untuk mengurangi dampak negatif yang berupa ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, Hirschman menyarankan untuk membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif.

Provinsi Jawa Tengah kemungkinan akan menjadi titik pertumbuhan yang baru. Dugaan ini berdasar pada kondisi yang menunjukkan banyaknya industri baru yang merupakan pindahan dari kota lain. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) per Agustus 2015 menyatakan terdapat 47 industri tekstil merelokasi pabrik ke Jawa Tengah, di mana 47 perusahaan itu menyerap tenaga kerja sebanyak 70 ribu orang. Relokasi itu telah

dilakukan oleh para pengusaha secara bertahap pada tahun sebelumnya (tahun 2014). Sejumlah pengusaha tekstil menganggap Jateng merupakan wilayah potensial untuk pengembangan industri padat karya ini (Anonim, 2016a). Selanjutnya data BKPM menyebutkan realisasi investasi sektor tekstil di Jawa Tengah selama semester I/2015 senilai Rp 2,4 triliun dari 72 proyek yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 25.800 orang. Jumlah ini menjadikan Jateng sebagai provinsi dengan realisasi investasi tekstil terbesar di Indonesia (Anonim, 2016a). Daerah Jawa Tengah sangat menarik sebagai tujuan investasi di sektor tekstil dan garmen, karena memiliki iklim investasi yang kondusif dan infrastrukturnya sudah terbangun baik, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh sarana angkutan darat, udara dan laut (Kurniawan, 2014).

Industri baru yang ada di Provinsi Jawa Tengah diduga merupakan pindahan pabrik dari daerah mempunyai upah minimum tinggi, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang atau terkenal dengan istilah Jabodetabek. Upah pekerja merupakan salah satu komponen biaya produksi dan operasional perusahaan. Apabila upah pekerja meningkat maka akan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian tingginya upah pekerja membuat perusahaan merelokasi pabriknya ke daerah dengan upah minimum lebih rendah.

Data besaran upah minimum DKI Jakarta dan kabupaten/kota terpilih di Banten (yaitu Tangerang) serta kabupaten/kota terpilih di Jawa Barat (yaitu Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang) pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan peningkatan yang tinggi, seperti upah minimum DKI Jakarta yang meningkat sebesar 43,87%, Bogor meningkat sebesar 70,50%, Tangerang meningkat sebesar 59,70% dan Karawang meningkat sebesar 57,58%. Selengkapnya dapat dilihat di tabel 12.1.

Tabel 12.1.
Besaran Upah Minimum DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Terpilih
di Banten dan Jawa Barat Tahun 2012-2013

Kabupaten/Kota	Besaran Upah Minimum (Rp/bulan)		Pertumbuhan (%)
	2012	2013	
Jakarta	1.529.150	2.200.000	43,87
Bogor	1.174.200	2.002.000	70,50
Depok	1.424.797	2.042.000	43,32
Tangerang	1.379.000	2.203.000	59,75
Bekasi	1.491.866	2.002.000	34,19
Karawang	1.269.227	2.000.000	57,58

Sumber: SK Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Tahun 2011 dan 2012 (diolah).

Besaran upah minimum yang tinggi berdampak pada meningkatnya ongkos produksi perusahaan, sehingga kemudian mendorong terjadinya relokasi industri. Relokasi industri adalah perpindahan pabrik dari suatu tempat (suatu daerah) ke tempat lain (daerah lain). Dalam hal ini, relokasi terjadi dari daerah dengan besaran upah minimum tinggi ke daerah dengan besaran upah minimum yang lebih rendah. Naiknya upah minimum Jakarta yang mencapai 43,87% dari tahun 2012 ke tahun 2013 (tabel 12.1) menyebabkan pengusaha menderita kerugian besar, sehingga kemudian mendorong terjadi relokasi industri. Ade Sudrajat (Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API) menyatakan bahwa selisih upah Rp 1 juta untuk satu orang pekerja, maka perusahaan akan mengeluarkan tambahan ongkos Rp 1 miliar per bulan. Tambahan biaya ini jika dihitung dalam beberapa bulan, bisa dimanfaatkan untuk membangun pabrik baru di daerah yang besaran upah minimumnya lebih rendah. Dalam satu perusahaan, selisih upah tersebut dalam 6 bulan bisa untuk membangun pabrik baru (<http://indonesian.irib.ir>).

Bagi daerah yang kedatangan industri baru, akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Dengan demikian secara tidak langsung relokasi industri mampu menekan jumlah pengangguran yang ada. Selain itu adanya relokasi industri akan mendorong peningkatan mutu dan ketrampilan sumber daya manusia. Hal ini dipicu oleh adanya dorongan kebutuhan dari perusahaan pendatang akan kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Relokasi industri juga akan memacu perkembangan kegiatan ekonomi lainnya, seperti penyediaan jasa kos-kosan untuk pekerja pabrik, warung, jasa penitipan sepeda dan sepeda motor di sekitar pabrik. Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari relokasi industri, maka akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu daerah yang menjadi tujuan relokasi industri adalah provinsi Jawa Tengah. Kondisi Jawa Tengah menunjukkan masih tersedianya lahan untuk kawasan industri. Selain itu, besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lebih rendah dibanding daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang), membuat Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan relokasi industri. Data besaran upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2013 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 765 ribu pada tahun 2012 dan Rp 830 ribu pada tahun 2013 (BPS, 2016). Besaran upah minimum ini jauh lebih rendah dibanding upah minimum di Jabodetabek (tabel 1). Kondisi ini juga didukung dengan karakteristik pekerja di Jawa Tengah yang tidak banyak berulah (baca melakukan demo).

Relokasi industri ke daerah yang upah pekerjaannya rendah diduga merupakan suatu keberhasilan pemerintah dengan kebijakan

“kesengajaan” menetapkan upah minimum yang tinggi di kota-kota besar. Dengan relokasi industri berarti ada pemerataan industri, dan lambat laun akan tercipta pemerataan pembangunan di Indonesia. Dampak kehadiran industri di suatu daerah akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah yaitu peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pembukaan kesempatan kerja, serta berkurangnya pengangguran. Kehadiran industri juga akan meningkatkan mutu dan ketrampilan sumber daya manusia di daerah sekitar. Hal ini dikarenakan perusahaan akan membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya untuk melakukan proses produksi perusahaan (Reiyschreiben, 2013).

B. Perkembangan Besaran Upah Minimum di Indonesia

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai upah minimum tahun 1999). Upah ini berlaku bagi pekerja lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun. Besaran upah minimum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Dewan Pengupahan, dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Dewan Pengupahan terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dan Akademisi. Perwakilan Pemerintah terdiri dari BPS, Departemen/Dinas Tenaga Kerja, Departemen/Dinas Perdagangan, selanjutnya perwakilan Pengusaha adalah APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), perwakilan Serikat Pekerja dari SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), serta akademisi berasal dari Perguruan Tinggi. Terdapat Dewan Pengupahan Provinsi untuk menentukan upah minimum tingkat provinsi, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menentukan upah minimum tingkat Kabupaten/kota.

Besaran upah minimum ditentukan berdasar undang-undang atau peraturan pemerintah. Dasar penentuan besaran upah minimum ini telah mengalami perubahan beberapa kali:

1. Pada tahun 1999, penentuan upah minimum ditentukan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Upah Minimum, bahwa upah minimum ditentukan berdasar pertimbangan: (1) Kebutuhan Hidup Minimum atau KHM, (2) Indeks harga konsumen atau IHK, (3) kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan, (3) upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, (4) kondisi pasar kerja, dan (5) tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

2. Pada tahun 2003, upah minimum ditentukan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengupahan, di mana penentuan upah minimum didasarkan pada pertimbangan: (1) Kebutuhan Hidup Layak atau KHL, (2) produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
3. Pada tahun 2013, penentuan upah minimum didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, bahwa besaran upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut diarahkan pada pencapaian KHL, yaitu perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama. Pencapaian KHL ditetapkan oleh gubernur dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.
4. Pada tahun 2015, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, dengan rumus sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

UM_n adalah besaran upah minimum pada tahun yang ditentukan (satu tahun ke depan), UM_t adalah besaran upah minimum tahun sekarang, inflasi_t adalah tingkat inflasi tahun sekarang, PDB_t adalah Produk Domestik Bruto tahun sekarang.

Perkembangan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel 2. Besaran upah minimum tertinggi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Upah minimum per bulan DKI Jakarta pada tahun 2010 sebesar Rp 1.118.009 menjadi sebesar Rp 3.355.750 pada tahun 2017, sedangkan Provinsi Banten sebesar Rp 955.300 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 1.931.180 pada tahun 2017. Besaran upah minimum Provinsi lainnya di Pulau Jawa pada periode yang sama (2010-2017) menunjukkan nilai yang hampir sama. Apabila besaran upah minimum dilihat secara keseluruhan provinsi di Indonesia, rata-rata upah minimum Provinsi Jawa Tengah (sebesar Rp 660 ribu pada tahun 2010 dan Rp 1,367 juta pada tahun 2017) merupakan provinsi yang memiliki upah minimum terendah. Besaran upah minimum tersebut sangat jauh berbeda dengan upah minimum DKI Jakarta. Dengan demikian sangat beralasan apabila Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lokasi yang menjadi tujuan relokasi industri, dikarenakan rendahnya besaran upah minimum.

Apabila dicermati data besaran upah minimum propinsi (tabel 12.2), maka terdapat kenaikan upah yang tinggi dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kenaikan upah yang tinggi dari tahun 2012 ke tahun 2013 disebabkan adanya desakan para pekerja melalui demonstrasi buruh besar-besaran di seluruh Indonesia pada akhir 2012, yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja. Pada waktu itu disepakati kenaikan upah pekerja yang cukup tinggi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Jakarta, di mana Gubernur DKI saat itu Joko Widodo menyetujui upah buruh naik 43 % (Anonim, 2012a dalam Anonim, 2016c). Keputusan tersebut memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar dari Indonesia atau menutup usahanya (Anonim, 2012b dalam Anonim, 2016c). Akhirnya disepakati bahwa upah buruh tetap naik, tetapi bagi pengusaha yang keberatan akan diberi tenggang waktu enam bulan untuk mematuhi upah minimum tahun 2013 (Anonim, 2016c).

Tabel 12.2.
Besaran Rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia, 2010-2017

Provinsi	Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah/bulan)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	1,300,000	1,350,000	1,400,000	1,550,000	1,750,000	1,900,000	2,118,500	2,500,000
Sumatera Utara	965,000	1,035,500	1,200,000	1,375,000	1,505,850	1,625,000	1,811,875	1,961,354
Sumatera Barat	940,000	1,055,000	1,150,000	1,350,000	1,490,000	1,615,000	1,800,725	1,949,284
Riau	1,016,000	1,120,000	1,238,000	1,400,000	1,700,000	1,878,000	2,095,000	2,266,722
Jambi	900,000	1,028,000	1,142,500	1,300,000	1,502,300	1,710,000	1,906,650	2,063,000
Sumatera Selatan	927,825	1,048,440	1,195,220	1,630,000	1,825,000	1,974,346	2,206,000	2,388,000
Bengkulu	780,000	815,000	930,000	1,200,000	1,350,000	1,500,000	1,605,000	1,737,412
Lampung	767,500	855,000	975,000	1,150,000	1,399,037	1,581,000	1,763,000	1,908,447
Kep. Bangka Belitung	910,000	1,024,000	1,110,000	1,265,000	1,640,000	2,100,000	2,341,500	2,534,673
Kep. Riau	925,000	975,000	1,015,000	1,365,087	1,665,000	1,954,000	2,178,710	2,358,454
DKI Jakarta	1,118,009	1,290,000	1,529,150	2,200,000	2,441,000	2,700,000	3,100,000	3,355,750
Jawa Barat	671,500	732,000	780,000	850,000	1,000,000	1,000,000	2,250,000	1,420,624
Jawa Tengah	660,000	675,000	765,000	830,000	910,000	910,000	1,421,626	1,367,000
DI Yogyakarta	745,694	808,000	892,660	947,114	988,500	988,500	1,318,534	1,337,645
Jawa Timur	630,000	705,000	745,000	866,250	1,000,000	1,000,000	1,745,405	1,388,000
Banten	955,300	1,000,000	1,042,000	1,170,000	1,325,000	1,600,000	1,784,000	1,931,180
Bali	829,316	890,000	967,500	1,181,000	1,542,600	1,621,172	1,807,600	1,956,727
Nusa Tenggara Barat	890,775	950,000	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,330,000	1,482,950	1,631,245
Nusa Tenggara Timur	800,000	850,000	925,000	1,010,000	1,150,000	1,250,000	1,425,000	1,525,000
Kalimantan Barat	741,000	802,500	900,000	1,060,000	1,380,000	1,560,000	1,739,400	1,882,900
Kalimantan Tengah	986,590	1,134,580	1,327,459	1,553,127	1,723,970	1,896,367	2,057,558	2,258,000
Kalimantan Selatan	1,024,500	1,126,000	1,225,000	1,337,500	1,620,000	1,870,000	2,085,050	2,227,307
Kalimantan Timur	1,002,000	1,084,000	1,177,000	1,752,073	1,886,315	2,026,126	2,161,253	2,354,800
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	2,026,126	2,175,340	2,358,800
Sulawesi Utara	1,000,000	1,050,000	1,250,000	1,550,000	1,900,000	2,150,000	2,400,000	2,598,000
Sulawesi Tengah	777,500	827,500	885,000	995,000	1,250,000	1,500,000	1,670,000	1,807,775
Sulawesi Selatan	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	2,000,000	2,250,000	2,435,625
Sulawesi Tenggara	860,000	930,000	1,032,300	1,125,207	1,400,000	1,652,000	1,850,000	2,002,625
Gorontalo	710,000	762,500	837,500	1,175,000	1,325,000	1,600,000	1,875,000	2,030,000
Sulawesi Barat	944,200	1,006,000	1,127,000	1,165,000	1,400,000	1,655,500	1,864,000	2,017,780
Maluku	840,000	900,000	975,000	1,275,000	1,415,000	1,650,000	1,775,000	1,925,000
Maluku Utara	847,000	889,350	960,498	1,200,622	1,440,746	1,577,617	1,681,266	1,975,000
Papua Barat	1,210,000	1,410,000	1,450,000	1,720,000	1,870,000	2,015,000	2,237,000	2,663,646
Papua	1,316,500	1,403,000	1,585,000	1,710,000	2,040,000	2,193,000	2,435,000	2,421,500
Indonesia	908,824	988,829	1,088,903	1,296,908	1,584,391	1,790,342	1,997,819	2,074,685

Sumber:

1. BPS. 2016. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>.
2. TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG; <http://jateng.tribunnews.com/2015/11/21/daftar-umk-kabupaten-dan-kota-di-jateng-2016>.
3. Anonim. 2015. <http://www.kotawates.com/mau-tahu-upah-minimum-umk-2016-diy-kulon-progo-bantul-sleman-dan-gunung-kidul.html>.
4. <https://regional.kompas.com/read/2015/11/21/05000061/Gubernur.Jatim>.
5. Anonim. 2016b. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/28/inilah-daftar-ump-tahun-2017-dari-34-provinsinaik-825-persen>.

Khusus untuk DKI Jakarta, para pekerja menuntut besaran upah minimum untuk tahun 2013 sebesar Rp 2,799 juta (Asura, 2012) dari sebesar Rp 1,529 pada tahun 2012 (tabel 12.2), sementara Dewan Pengupahan memberikan usulan rekomendasi besaran upah minimum sebesar Rp 1,9 juta (Anonim, 2016c). Pada saat sidang dewan pengupahan berlangsung, yaitu saat penetapan upah minimum sebesar Rp 1,9 juta tersebut, Serikat Pekerja memanggil perwakilannya (Anonim, 2012c dalam Anonim, 2016c), dengan demikian usulan angka tersebut baru mewakili pihak pengusaha. Pada akhirnya sidang menetapkan angka upah minimum sebesar Rp 2,2 juta, di mana besaran itu sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789 (Aziza, 2012 dalam Anonim 2016c).

Selanjutnya kenaikan upah yang tinggi dari tahun 2015 ke tahun 2016 disebabkan karena perbedaan dalam cara perhitungannya. Upah minimum pada tahun 2015 ditentukan dengan KHL (berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum), sedangkan upah minimum tahun 2016 ditentukan dengan formula perhitungan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang telah ditulis di atas (yaitu besaran upah minimum tahun sebelumnya ditambah dengan upah minimum tahun sebelumnya yang dikalikan dengan inflasi dan PDRB tahun sebelumnya). Dengan dasar perhitungan yang berbeda, yang semula hanya berdasar pada satu unsur KHL, menjadi berdasar pada 3 unsur yaitu upah minimum, inflasi dan PDRB tahun sebelumnya, maka besaran upah minimum menjadi naik.

Berangkat dari kenaikan upah minimum yang drastis (naik banyak), maka kemudian banyak perusahaan yang berencana merelokasi pabriknya ke daerah lain, yaitu daerah dengan besaran upah minimum yang rendah, dan Jawa Tengah menjadi pilihannya. Banyak permintaan untuk mempersiapkan lahan di daerah Jawa Tengah untuk dijadikan kawasan industri, dan industri yang berencana masuk adalah tekstil, garmen, alat-

alat mainan, dan industri sepatu. Kebutuhan lahan yang diperlukan sekitar 30-40 hektar untuk tahap pertama yang relokasinya kemungkinan besar di kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang (Baihaqi, 2013). Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi sektor tekstil di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Indonesia pada Triwulan I/2016 (mencapai Rp 2,1 triliun atau sekitar 57,5%, dan menyerap 23.893 tenaga kerja) dibanding Jawa Barat (sebesar Rp 910 miliar dan menyerap 10.603 tenaga kerja), dan Banten (Rp 529 miliar dan menyerap 1.137 tenaga kerja) (Anonim, 2016d).

C. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa, atau 1,70 persen dari luas Indonesia. Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap (2.138,51 km² atau 6,57 persen dari wilayah provinsi) dan Kabupaten Brebes (1.657,73 km² atau 5,09 persen dari wilayah provinsi). Selanjutnya wilayah terkecil adalah Kota Magelang (18,12 km² atau 0,06 persen dari wilayah provinsi), sedangkan Kota Surakarta seluas 44,03 km² atau 0,14 persen dari wilayah provinsi (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017). Gambar 1 menyajikan peta pembagian wilayah Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota.



Gambar 12.1. Peta Provinsi Jawa Tengah

Sumber: <http://indonesia-peta.blogspot.co.id/2010/10/gambar-peta-jawa-tengah-jateng.html>

1. Besaran PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB) selama periode 2010-2016 menunjukkan sekitar 5 persen (BPS Jawa Tengah). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibanding rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang nilainya sekitar 6 persen (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, 2016). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12.3, PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga berlaku, harga konstan tahun 2010 dan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2010-2016.

Tabel 12.3.
Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	623,224,621	692,561,627	754,529,436	830,016,016	922,471,181	1,011,850,969	1,092,030,920
PDRB Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	623,224,621	656,268,130	691,343,116	726,655,118	764,959,151	806,775,362	849,383,565
Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 (%)		5.30	5.34	5.11	5.27	5.47	5.28

Sumber: BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>.

Sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menurut harga konstan tahun 2010 selama periode 2010-2016 menunjukkan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian dan semakin meningkatnya sumbangan sektor industri dan jasa. Sumbangan sektor industri terhadap PDRB selama periode tersebut sekitar 72 persen (71,25 persen pada tahun 2010 menjadi 72,51 persen pada tahun 2017). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12.4.

Tabel 12.4.
Sumbangan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016

Sektor Ekonomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian (Juta Rp)	99,572,441	103,389,333	106,536,703	108,832,111	107,793,381	113,826,299	116,250,932
Sumbangan terhadap PDRB (Persen)	15.98	15.75	15.41	14.98	14.09	14.11	13.69
Industri (Juta Rp)	444,028,111	467,547,891	494,047,209	521,178,458	554,579,044	583,540,006	615,876,386
Sumbangan terhadap PDRB (Persen)	71.25	71.24	71.46	71.72	72.5	72.33	72.51
Jasa (Juta Rp)	79,624,069	85,330,906	90,759,204	96,644,550	102,586,726	109,409,057	117,256,247
Sumbangan terhadap PDRB (Persen)	12.78	13.00	13.13	13.3	13.41	13.56	13.8
PDRB (Juta Rp)	623,224,621	656,268,130	691,343,116	726,655,118	764,959,151	806,775,362	849,383,565
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>. (diolah).

Selanjutnya sumbangan sektor jasa terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 12,78%, meningkat menjadi sekitar 13% pada tahun-tahun selanjutnya (tabel 12.4). Meningkatnya sektor jasa mengindikasikan semakin bertambahnya kegiatan ekonomi di sektor tersebut.

2. Besaran Upah Minimum

Besaran upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2017 menunjukkan besaran upah minimum yang paling rendah adalah upah minimum Kabupaten Banjarnegara (sebesar Rp 662 ribu pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 1,370 juta pada tahun 2017), sedangkan yang tertinggi adalah upah minimum Kota Semarang (sebesar Rp 939,756 ribu pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 2,125 juta pada tahun 2017). Untuk Kota Surakarta, besaran upah minimum sebesar Rp 785 ribu pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 1,535 juta pada tahun 2017 (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam BPS Jawa Tengah). Data besaran upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2017 disajikan pada tabel 12.5.

Tabel 12.5.
Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017

No	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp/bulan)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab Cilacap	698,333	718,667	773,000	887,667	1,016,667	1,195,667	1,527,000	1,693,689
2	Kab Banyumas	670,000	750,000	795,000	877,500	1,000,000	1,100,000	1,350,000	1,461,400
3	Kab Purbalingga	695,000	765,000	818,500	896,500	1,023,000	1,101,600	1,377,500	1,522,500
4	Kab Banjarnegara	662,000	730,000	765,000	835,000	920,000	1,112,500	1,265,000	1,370,000
5	Kab Kebumen	700,000	727,500	770,000	835,000	975,000	1,157,500	1,324,600	1,433,900
6	Kab Purworejo	719,000	755,000	809,000	849,000	910,000	1,165,000	1,300,000	1,445,000
7	Kab Wonosobo	715,000	775,000	825,000	880,000	990,000	1,166,000	1,326,000	1,457,100
8	Kab Magelang	752,000	802,500	870,000	942,000	1,152,000	1,255,000	1,410,000	1,570,000
9	Kab Boyolali	748,000	800,500	836,000	895,000	1,116,000	1,197,800	1,403,500	1,519,289
10	Kab Klaten	735,000	766,022	812,000	871,500	1,026,600	1,170,000	1,400,000	1,528,500
11	Kab Sukoharjo	769,500	790,500	843,000	902,000	1,150,000	1,223,000	1,396,000	1,513,000
12	Kab Wonogiri	695,000	730,000	775,000	830,000	954,000	1,101,000	1,293,000	1,401,000
13	Kab Karanganyar	761,000	801,500	846,000	896,500	1,060,000	1,226,000	1,420,000	1,560,000
14	Kab Sragen	724,000	760,000	810,000	864,000	960,000	1,105,000	1,300,000	1,422,586
15	Kab Grobogan	687,500	735,000	785,000	842,000	935,000	1,160,000	1,305,000	1,435,000
16	Kab Blora	742,000	816,200	855,500	932,000	1,009,000	1,180,000	1,328,500	1,438,100
17	Kab Rembang	702,000	757,600	816,000	896,000	985,000	1,120,000	1,300,000	1,408,000
18	Kab Pati	733,000	769,550	837,500	927,600	1,013,027	1,176,500	1,310,000	1,420,500
19	Kab Kudus	775,000	840,000	889,000	990,000	1,150,000	1,380,000	1,608,200	1,740,900
20	Kab Jepara	702,000	758,000	800,000	875,000	1,000,000	1,150,000	1,350,000	1,600,000
21	Kab Demak	813,400	847,987	893,000	995,000	1,280,000	1,535,000	1,745,000	1,900,000
22	Kab Semarang	824,000	880,000	941,600	1,051,000	1,208,200	1,419,000	1,610,000	1,745,000
23	Kab Temanggung	709,500	779,000	866,000	940,000	1,050,000	1,178,000	1,313,000	1,431,500
24	Kab Kendal	780,000	843,750	893,000	953,100	1,206,000	1,383,450	1,639,600	1,774,867
25	Kab Batang	745,000	805,000	880,000	970,000	1,146,000	1,270,000	1,467,500	1,603,000
26	Kab Pekalongan	760,000	810,000	873,000	962,000	1,145,000	1,271,000	1,463,000	1,583,698
27	Kab Pemalang	675,000	725,000	793,000	908,000	1,066,000	1,193,400	1,325,000	1,460,000
28	Kab Tegal	687,000	725,000	795,000	850,000	1,000,000	1,155,000	1,373,000	1,487,000
29	Kab Brebes	681,000	717,000	775,000	859,000	1,000,000	1,166,550	1,310,000	1,418,100
30	Kota Magelang	745,000	795,000	837,000	915,900	1,145,000	1,211,000	1,341,000	1,453,000
31	Kota Surakarta	785,000	826,252	864,450	974,000	1,170,000	1,222,400	1,418,000	1,534,985
32	Kota Salatiga	803,185	843,469	901,396	1,209,100	1,423,500	1,287,000	1,450,953	1,596,845
33	Kota Semarang	939,756	961,323	991,500	980,000	1,165,000	1,685,000	1,909,000	2,125,000
34	Kota Pekalongan	760,000	810,000	895,500	860,000	1,044,000	1,291,000	1,500,000	1,623,750
35	Kota Tegal	700,000	735,000	795,000	914,276	1,066,603	1,206,000	1,385,000	1,499,500

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>.

3. Jumlah Industri dan Nilai Investasi

Berdasar data BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebanyak 3.887 unit meningkat menjadi 4.368 unit pada tahun 2017, atau meningkat sebanyak 481 unit selama periode 2010-2017. Pada tahun 2010, terdapat 5 kabupaten dengan jumlah industri terbanyak yaitu Kabupaten Jepara (sebanyak 399 unit), Kabupaten Pekalongan (sebanyak 317 unit), Kota Semarang (sebanyak 314 unit) dan Kabupaten Klaten (sebanyak 279 unit). Selanjutnya pada tahun 2017, dari 5 kabupaten/kota tersebut, ada kabupaten/kota yang jumlah industri meningkat seperti Kabupaten Pekalongan (menjadi sebanyak 324 unit), Kota Semarang (menjadi sebanyak 475 unit) dan Kabupaten Klaten (menjadi sebanyak 291 unit), namun ada yang menurun seperti Kabupaten Jepara (menjadi sebanyak 266 unit). Selengkapnya data jumlah perusahaan industri besar dan sedang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel 12.6.

Berdasar data tabel 12.6, dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2017, terdapat 21 kabupaten/kota (60,00%) yang menunjukkan peningkatan jumlah industri besar dan sedang dari tahun 2010 ke tahun 2017. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Brebes serta Kota Salatiga, Semarang dan Tegal. Tambahan jumlah industri yang terbanyak adalah Kota Semarang (sebanyak 161 unit), tambahan yang paling sedikit adalah Kabupaten Purbalingga (sebanyak 6 unit). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tambahan industri diduga selain karena perusahaan yang kemungkinan mengadakan perluasan, namun juga karena adanya relokasi industri dari daerah lain.

Tabel 12.6.
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab Cilacap	28	25	26	22	22	19	25
2	Kab Banyumas	68	66	62	52	51	44	102
3	Kab Purbalingga	90	87	89	84	84	78	96
4	Kab Banjarnegara	24	22	18	18	17	16	21
5	Kab Kebumen	186	226	206	203	200	195	203
6	Kab Purworejo	14	14	17	14	12	14	14
7	Kab Wonosobo	57	65	65	84	75	74	134
8	Kab Magelang	76	74	66	71	66	67	75
9	Kab Boyolali	104	94	77	75	63	70	100
10	Kab Klaten	279	276	270	277	268	237	291
11	Kab Sukoharjo	138	136	138	121	119	114	153
12	Kab Wonogiri	12	15	15	14	14	10	16
13	Kab Karanganyar	153	153	153	130	125	130	149
14	Kab Sragen	47	47	48	51	50	46	69
15	Kab Grobogan	19	20	19	20	20	24	30
16	Kab Blora	22	13	11	13	13	19	30
17	Kab Rembang	88	106	66	56	56	50	63
18	Kab Pati	187	223	209	202	197	192	231
19	Kab Kudus	169	166	173	182	179	169	186
20	Kab Jepara	399	312	277	254	244	237	266
21	Kab Demak	58	55	61	72	69	71	85
22	Kab Semarang	116	117	112	124	124	126	153
23	Kab Temanggung	27	35	44	59	56	51	61
24	Kab Kendal	44	47	56	55	51	47	63
25	Kab Batang	55	54	54	56	46	48	88
26	Kab Pekalongan	317	310	315	282	246	299	324
27	Kab Pemalang	150	128	129	112	98	62	116
28	Kab Tegal	98	98	96	92	86	87	95
29	Kab Brebes	39	46	45	92	75	68	103
30	Kota Magelang	26	25	24	26	25	23	26
31	Kota Surakarta	171	173	172	139	128	126	148
32	Kota Salatiga	23	27	26	32	32	31	38
33	Kota Semarang	314	303	325	300	291	287	475
34	Kota Pekalongan	204	195	179	172	157	117	180
35	Kota Tegal	85	97	93	110	104	86	159
	Jawa Tengah	3,887	3,850	3,736	3,666	3,463	3,334	4,368

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>.

Data mengenai realisasi nilai investasi dan tenaga kerja pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 disajikan pada tabel 12.7. Data tersebut (tabel 12.7) menunjukkan Kota Semarang merupakan kota yang realisasi investasinya tertinggi, yaitu

sebanyak 161 proyek (sebanyak 93 PMDN dan 137 PMA). Data ini mendukung bahwa Kota Semarang merupakan kota yang terbanyak jumlah industrinya di Jawa Tengah. Letak kota Semarang yang strategis, yaitu tersedia secara lengkap sarana dan prasarana sebagai pendukung investasi (seperti jalan, kelistrikan, pelabuhan laut dan udara, komunikasi, perkantoran, perbankan), maka menjadikan kota Semarang menjadi tujuan utama pendirian pabrik.

Tabel 12.7
Realisasi Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016

No	Kabupaten/Kota	PMDN				PMA			
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	TKI (orang)	TKA (orang)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	TKI (orang)	TKA (orang)
1	Kab Cilacap	17	12,162,085	442	-	16	3,119	412	19
2	Kab Banyumas	13	119,900	58	-	13	918	126	2
3	Kab Purbalingga	12	19,782	769	-	48	1,621	9,891	63
4	Kab Banjarnegara	5	20,225	17	-	3	2,000	2,000	2
5	Kab Kebumen	58	41,409	902	-	-	-	-	-
6	Kab Purworejo	6	-	5	-	1	-	-	-
7	Kab Wonosobo	3	-	2,539	-	7	-	31	2
8	Kab Magelang	11	30,638	1,011	-	6	261	-	-
9	Kab Boyolali	17	1,024,112	367	-	26	18,538	2,141	36
10	Kab Klaten	21	62,385	528	14	53	6,373	3,067	35
11	Kab Sukoharjo	43	234,782	6,542	5	39	160,729	28,317	126
12	Kab Wonogiri	301	222,707	4,125	2	19	6,063	2,847	4
13	Kab Karanganyar	47	1,875,249	1,780	4	9	3,479	450	-
14	Kab Sragen	36	965,146	772	1	3	3,052	2	-
15	Kab Grobogan	8	28,717	87	-	14	7,732	1,592	8
16	Kab Blora	1	-	16	-	4	15	160	2
17	Kab Rembang	9	1,550,501	1,964	19	10	742	67	-
18	Kab Pati	35	1,254,317	4,421	-	19	5,407	823	5
19	Kab Kudus	61	881,543	1,567	5	4	-	-	-
20	Kab Jepara	12	21,992	532	4	163	124,256	9,553	126
21	Kab Demak	57	1,003,807	2,211	-	25	17,738	644	5
22	Kab Semarang	38	222,325	4,375	3	91	28,988	8,344	69
23	Kab Temanggung	8	52,097	232	0	8	6,407	1,200	20
24	Kab Kendal	9	-	2,246	24	32	50,722	2,735	49
25	Kab Batang	1	-	541	-	20	411,211	6,255	82
26	Kab Pekalongan	33	1,373,603	6,823	2	3	7	15	2
27	Kab Pemalang	6	252,734	160	-	6	1,497	1,361	5
28	Kab Tegal	9	93,152	272	-	11	2,239	841	6
29	Kab Brebes	1	-	-	-	19	18,133	1,784	8
30	Kota Magelang	3	13,740	-	-	7	57	181	-
31	Kota Surakarta	16	11,658	200	-	36	10,950	656	1
32	Kota Salatiga	7	4,150	1,819	2	13	36,709	5,693	16
33	Kota Semarang	93	501,741	2,207	7	317	101,727	33,030	196
34	Kota Pekalongan	8	15,621	386	-	5	-	-	3
35	Kota Tegal	3	10,238	-	-	10	106	94	-
Jawa Tengah		1,008	24,070,353	49,916	92	1,060	1,030,796	124,312	892

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah dalam BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>.

Dikaitkan dengan dugaan adanya tambahan industri karena adanya relokasi industri dari daerah lain, yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013 (Anonim, 2016a), data berikut (tabel 8) mendukung pernyataan

tersebut, yaitu data mengenai jumlah ijin usaha/realisasi proyek menurut lapangan usaha di Jawa Tengah. Jumlah usaha/realisasi proyek pada tahun 2013 sebanyak 86 unit meningkat menjadi sejumlah 154 unit pada tahun 2014. Pada tahun 2013, sejumlah 86 unit tersebut terdiri dari 46 unit PMDN dan 40 unit PMA. Selanjutnya sejumlah 154 unit pada tahun 2014, terdiri dari 40 unit PMDN dan 114 unit PMA. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa industri baru pada tahun 2013 adalah sebagian besar merupakan industri PMDN, dan pada tahun 2014 sebagian besar merupakan industri dari luar negeri (PMA). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 12.8.

Tabel 12.8.
Jumlah Ijin Usaha/Realisasi Proyek Menurut Lapangan Usaha
di Jawa Tengah Tahun 2013-2014

No	Sektor	Tahun 2013			Tahun 2014		
		Jumlah Proyek			Jumlah Proyek		
		PMDN	PMA	Jumlah	PMDN	PMA	Jumlah
I.	Sektor Primer	1		1		1	1
.	1. Tanaman Pangan & Perkebunan	1		1		1	1
II.	Sektor Sekunder	22	28	50	20	47	67
.	2. Ind. Karet & Plastik	3	1	4	4		4
.	3. Ind. Kayu		12	12	4	24	28
.	4. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain		3	3		1	1
.	5. Ind. Kertas & Percetakan	1		1		2	2
.	6. Ind. Kimia & Farmasi	2	1	3	1		1
.	7. Ind. Lainnya	2	1	3	1	2	3
.	8. Ind. Logam, Mesin dan Elektronik	2	1	3	1	5	6
.	9. Ind. Makanan	5	1	6	6	3	9
.	10. Ind. Tekstil	7	8	15	3	10	13
III.	Sektor Tersier	23	12	35		10	10
.	11. Hotel dan Restoran	2	2	4		1	1
.	12. Jasa Lainnya	2	3	5		3	3
.	13. Konstruksi	1	1	2			
.	14. Perdagangan dan Reparasi	18	5	23		5	5
.	15. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	1	1	1		1	1
	Jumlah	46	40	86	40	114	154

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah dalam BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>.

Dilihat secara sektoral (tabel 12.8), tambahan usaha selama periode 2013-2014 ada di sektor sekunder (50 unit pada tahun 2013 menjadi 67 unit pada tahun 2014). Selanjutnya sektor primer, tidak ada tambahan unit usaha, sedangkan sektor tersier mengalami penurunan unit usaha (35 unit pada tahun 2013 menjadi 10 unit pada tahun 2014). Tambahan unit usaha di sektor sekunder terbanyak pada industri kayu (12 unit pada tahun 2013

menjadi 28 unit pada tahun 2014) dan industri makanan (6 unit pada tahun 2013 menjadi 9 unit pada tahun 2014). Tambahan unit usaha pada industri kayu tersebut, sebagian besar adalah PMA, sedangkan tambahan unit usaha pada industri makanan, sebagian besar adalah PMDN.

Perkembangan izin usaha/realisasi proyek tahun 2013-2014 untuk sektor sekunder pada industri tekstil (tabel 12.8), menunjukkan penurunan (15 unit usaha di tahun 2013 menjadi 13 usaha di tahun 2014). Namun apabila dilihat pendanaannya, industri tekstil PMDN mengalami penurunan (7 unit usaha di tahun 2013 menjadi 3 usaha di tahun 2013), sedangkan industri tekstil PMA mengalami kenaikan (8 unit usaha di tahun 2013 menjadi 10 usaha di tahun 2013). Kondisi Jawa Tengah nampaknya menarik bagi para investor, termasuk investor asing. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa negara-negara Uni Eropa berminat untuk merelokasi industri tekstilnya ke Jawa Tengah, selain juga Amerika Serikat, RRT, Korea Selatan, dan Vietnam (Kurniawan, 2014). Wilayah Jawa Tengah merupakan wilayah yang menarik investor dikarenakan infrastruktur sudah terbangun dengan baik, sehingga akses ke sarana angkutan darat, udara, dan laut mudah untuk dilakukan.

D. Dampak Relokasi Industri Terhadap PDRB dan Kesempatan Kerja

Berdasar data tabel 12.6 di atas, dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2017, terdapat 21 kabupaten/kota yang menunjukkan peningkatan jumlah industri besar dan sedang dari tahun 2010 ke tahun 2017. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Brebes serta Kota Salatiga, Semarang dan Tegal. Berdasar data tersebut, maka 21 kabupaten/kota tersebut diduga sebagai daerah tujuan relokasi industri. Selanjutnya analisis terhadap 21 kabupaten/kota tersebut, yang diduga adanya relokasi industri, dilakukan secara diskripsi yaitu membandingkan rata-rata jumlah industri sebelum dan sesudah relokasi. Sebelum relokasi industri menunjuk pada periode 2010-2012 dan sesudah relokasi industri meliputi periode 2013-2016. Hasil perbandingan rata-rata jumlah industri sebelum dan sesudah relokasi disajikan pada tabel 12.9.

Tabel 12.9
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Menurut Kabupaten/Kota Terpilih
Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri

No	Kabupaten/Kota	Sebelum Relokasi				Sesudah Relokasi				
		2010	2011	2012	Rata-rata	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Kab Banyumas	68	66	62	65	52	51	44	102	62
2	Kab Purbalingga	90	87	89	89	84	84	78	96	86
3	Kab Kebumen	186	226	206	206	203	200	195	203	200
4	Kab Wonosobo	57	65	65	62	84	75	74	134	92
5	Kab Klaten	279	276	270	275	277	268	237	291	268
6	Kab Sukoharjo	138	136	138	137	121	119	114	153	127
7	Kab Sragen	47	47	48	47	51	50	46	69	54
8	Kab Grobogan	19	20	19	19	20	20	24	30	24
9	Kab Blora	22	13	11	15	13	13	19	30	19
10	Kab Pati	187	223	209	206	202	197	192	231	206
11	Kab Kudus	169	166	173	169	182	179	169	186	179
12	Kab Demak	58	55	61	58	72	69	71	85	74
13	Kab Semarang	116	117	112	115	124	124	126	153	132
14	Kab Temanggung	27	35	44	35	59	56	51	61	57
15	Kab Kendal	44	47	56	49	55	51	47	63	54
16	Kab Batang	55	54	54	54	56	46	48	88	60
17	Kab Pekalongan	317	310	315	314	282	246	299	324	288
18	Kab Brebes	39	46	45	43	92	75	68	103	85
19	Kota Salatiga	23	27	26	25	32	32	31	38	33
20	Kota Semarang	314	303	325	314	300	291	287	475	338
21	Kota Tegal	85	97	93	92	110	104	86	159	115

Sumber: Tabel 6 diolah.

Hasil perbandingan rata-rata jumlah industri sebelum dan sesudah relokasi (tabel 12.9) menunjukkan terdapat 13 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan rata-rata jumlah industri, yaitu Kabupaten Wonosobo, Sragen, Grobogan, Blora, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Brebes serta Kota Salatiga, Semarang dan Tegal. Dengan demikian, 13 kabupaten/kota tersebut diindikasikan terjadinya relokasi industri.

Tabel 12.10 menyajikan rata-rata jumlah industri di 13 kabupaten/kota, sebelum dan sesudah relokasi. Data tersebut (tabel 10) menunjukkan persentase kenaikan rata-rata jumlah industri yang terbanyak adalah Kabupaten Brebes (97,67%). Letak Kabupaten Brebes yang berdekatan dengan Jabodetabek, menjadi sangat beralasan untuk menjadi daerah tujuan relokasi. Dengan lokasi yang dekat dengan pabrik lama, menjadikan biaya pemindahan pabrik lebih rendah dibanding apabila memindah pabrik dengan lokasi yang jauh. Pertimbangan lainnya adalah kemungkinan daerah asal pekerja pada pabrik lama adalah daerah sekitarnya (termasuk Brebes), sehingga pemindahan pabrik tidak menimbulkan masalah akan pemenuhan kebutuhan pekerja. Kabupaten lain yang berdekatan dengan Jabodetabek adalah Kota Tegal, yang menunjukkan persentase kenaikan rata-rata jumlah industri yang tinggi (sebesar 25,00%) dari sebelum relokasi ke sesudah relokasi industri.

Tabel 12.10
Rata-rata Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih Di Provinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri

No	Kabupaten/Kota	Relokasi		% Kenaikan Rata-rata
		Sebelum	Sesudah	
1	Kab Wonosobo	62	92	48.39
2	Kab Sragen	47	54	14.89
3	Kab Grobogan	19	24	26.32
4	Kab Blora	15	19	26.67
5	Kab Demak	169	179	5.92
6	Kab Semarang	58	74	27.59
7	Kab Temanggung	35	57	62.86
8	Kab Kendal	49	54	10.20
9	Kab Batang	54	60	11.11
10	Kab Brebes	43	85	97.67
11	Kota Salatiga	25	33	32.00
12	Kota Semarang	314	338	7.64
13	Kota Tegal	92	115	25.00

Sumber: Tabel 9 diolah.

Pada data tabel 12.10 juga dapat dilihat bahwa persentase yang tinggi dari kenaikan rata-rata jumlah industri dari sebelum ke sesudah relokasi industri berada di sekitar Kota Semarang, seperti Kabupaten Temanggung (62,86%), Kota Salatiga (32,00%), Kabupaten Semarang (27,59%), Kabupaten Blora (26,67%), Kabupaten Grobogan (26,32%). Lokasi kabupaten/kota yang berada di sekitar Kota Semarang memberi keuntungan pada sudah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pengembangan industri (seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, perbankan, telekomunikasi, kelistrikan dan sebagainya). Dengan demikian sudah semestinya daerah-daerah tersebut menjadi tujuan relokasi industri.

Berdasar uraian di atas, maka 13 kabupaten/kota (tabel 12.10) merupakan kabupaten/kota yang teridentifikasi sebagai daerah tujuan relokasi industri. Paparan di bawah ini membahas tentang kesempatan kerja di 13 kabupaten/kota tersebut, sebelum dan sesudah relokasi industri, namun sebelumnya diuraikan mengenai data PDRB.

1. Relokasi Industri dan PDRB

Rata-rata PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebelum dan sesudah relokasi industri pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kenaikan (dengan rata-rata kenaikan adalah 20,28 persen). Sebelum relokasi industri menunjuk pada periode 2010-2012 dan sesudah relokasi industri meliputi periode 2013-2016. Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Blora (24,13 persen), Banyumas (23,79 persen), dan Kota Semarang (23,28 persen). Kenaikan terendah terjadi di Kabupaten Kudus (15,20 persen). Dikaitkan dengan data jumlah industri yang meningkat selama periode 2010-2016 (tabel 6), maka dapat dinyatakan bahwa peningkatan jumlah industri mampu meningkatkan PDRB di kabupaten/kota tersebut. Data selengkapnya mengenai PDRB sebelum dan sesudah relokasi industri dari 13 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah disajikan pada tabel 12.11.

Tabel 12.11
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Tengah,
Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Sebelum Relokasi				Sesudah Relokasi				% Kenaikan	
		2010	2011	2012	Rata-rata	2013	2014	2015	2016	Rata-rata	Rata-rata
1	Kab Wonosobo	9.005,926	9.489,550	9.935,905	9.477,127	10.333,757	10.828,169	11.353,870	11.949,926	11.116,430	17,30
2	Kab Sragen	15.832,558	16.870,231	17.902,105	16.868,298	19.102,182	20.169,825	21.390,871	22.614,622	20.819,375	23,42
3	Kab Grobogan	12.766,022	13.172,712	13.842,047	13.260,260	14.474,729	15.064,457	15.962,619	16.674,630	15.544,109	17,22
4	Kab Blora	10.149,080	10.597,723	11.116,866	10.621,223	11.712,505	12.227,201	12.882,588	15.913,432	13.183,931	24,13
5	Kab Demak	11.647,736	12.275,703	12.823,227	12.248,888	13.499,226	14.078,420	14.913,838	15.665,205	14.539,172	18,70
6	Kab Semarang	21.572,137	22.925,457	24.306,718	22.934,771	25.758,121	27.264,113	28.769,678	30.286,381	28.019,573	22,17
7	Kab Temanggung	9.710,199	10.301,570	10.740,983	10.250,917	11.299,343	11.867,680	12.486,495	13.110,796	12.191,078	18,93
8	Kab Kendal	18.798,278	20.032,434	21.075,717	19.968,810	22.386,124	23.536,834	24.771,543	26.159,087	24.213,397	21,26
9	Kab Batang	9.447,328	10.025,045	10.488,457	9.986,943	11.104,697	11.693,897	12.327,739	12.935,491	12.015,456	20,31
10	Kab Brebes	20.158,108	21.498,422	22.482,263	21.379,598	23.812,057	25.074,172	26.572,835	27.867,371	25.831,609	20,82
11	Kota Salatiga	5.845,476	6.230,219	6.574,907	6.216,868	6.989,045	7.378,043	7.759,182	8.164,810	7.572,770	21,81
12	Kota Semarang	80.824,100	86.142,967	91.282,029	86.083,032	96.985,402	103.109,875	109.088,690	115.298,167	106.120,533	23,28
13	Kota Tegal	6.895,713	7.341,540	7.650,480	7.295,911	8.084,176	8.491,325	8.953,880	9.442,941	8.743,080	19,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (Tanpa Tahun). Produk Domestik Bruto Kabupaten/Kota Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (diolah).

2. Relokasi Industri dan Kesempatan Kerja

Relokasi industri atau pemindahan pabrik dari daerah lain yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah diharapkan akan menciptakan kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja, baik di sektor industri dan sektor lainnya (jasa dan pertanian). Pembahasan berikut menguraikan dampak relokasi industri di 13 kabupaten/kota terhadap kesempatan kerja sektor industri dan kesempatan kerja total. Kesempatan kerja sektor industri adalah jumlah orang yang bekerja di sektor industri. Kesempatan kerja total adalah jumlah orang yang bekerja di sektor industri dan di luar sektor industri (yaitu sektor jasa dan pertanian).

Data jumlah orang yang bekerja di sektor industri, sebelum dan sesudah relokasi industri disajikan di tabel 12.12. Dari data tersebut, sebagian besar kabupaten/kota (10 kabupaten/kota) menunjukkan peningkatan rata-rata jumlah orang yang bekerja di sektor industri. Peningkatan rata-rata jumlah orang yang bekerja di sektor industri terbanyak berturut-turut adalah Kota Salatiga (26,95%), Kabupaten Grobogan (12,27%), Kabupaten Blora (11,52%) dan Kota Semarang (11,22%). Kondisi ini adalah kondisi yang diharapkan, bahwa peningkatan jumlah industri disertai dengan peningkatan jumlah orang yang bekerja di sektor tersebut. Dengan pernyataan lain bahwa jumlah industri yang ada mampu menyediakan kesempatan kerja di sektor industri.

Tabel 12.12
Jumlah Orang yang Bekerja di Sektor Industri
Dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih
di Jawa Tengah, Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri (orang)

No	Kabupaten/Kota	Sebelum Relokasi				Sesudah Relokasi			% Kenaikan Rata-rata
		2010	2011	2012	Rata-rata	2013	2014	Rata-rata	
1	Kab Wonosobo	35,955	23,879	34,062	31,299	36,659	31,477	34,068	8.85
2	Kab Sragen	65,804	57,673	66,640	63,372	66,322	71,550	68,936	8.78
3	Kab Grobogan	35,713	51,152	60,506	49,124	48,557	61,745	55,151	12.27
4	Kab Blora	20,240	16,431	17,490	18,054	19,672	20,596	20,134	11.52
5	Kab Demak	75,821	52,059	59,985	62,622	58,190	59,882	59,036	-5.73
6	Kab Semarang	128,091	98,736	124,643	117,157	114,317	127,989	121,153	3.41
7	Kab Temanggung	61,783	77,862	129,184	89,610	74,329	77,442	75,886	-15.32
8	Kab Kendal	53,249	68,091	75,761	65,700	76,760	67,690	72,225	9.93
9	Kab Batang	77,261	95,917	90,950	88,043	88,084	103,399	95,742	8.74
10	Kab Brebes	25,851	41,406	38,936	35,398	37,714	39,790	38,752	9.48
11	Kota Salatiga	12,388	20,572	17,167	16,709	22,449	19,967	21,208	26.93
12	Kota Semarang	156,423	151,878	172,594	160,298	163,707	192,862	178,285	11.22
13	Kota Tegal	16,447	17,138	13,130	15,572	13,450	12,998	13,224	-15.08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>. Diolah.

Selanjutnya data tabel 12.12 menunjukkan ada 3 kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah orang yang bekerja di sektor industri, yaitu Kabupaten Temanggung (sebesar 15,32%), Kota Tegal (sebesar 15,08%), dan Kabupaten Demak (sebesar 5,73%). Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang jumlah industrinya meningkat paling banyak dari kondisi sebelum ke sesudah relokasi, yaitu sebanyak 62,86% (tabel 10), namun mengalami penurunan terbanyak dalam jumlah orang yang bekerja di sektor industri, yaitu sebesar 15,32% (tabel 12.12). Kondisi ini terjadi diduga adanya penutupan industri lama, sehingga jumlah orang yang bekerja menurun, sementara tambahan industri baru dalam tahap awal pembangunan dan belum beroperasi, sehingga belum menyerap kesempatan kerja.

Data jumlah orang yang bekerja (atau total kesempatan kerja) pada kondisi sebelum dan sesudah relokasi industri disajikan di tabel 12.13. Data tersebut menunjukkan hampir semua kabupaten/kota (12

kabupaten/kota) mengalami peningkatan rata-rata jumlah orang yang bekerja. Hanya satu kabupaten (yaitu Kabupaten Brebes) yang mengalami penurunan jumlah orang yang bekerja (0,95%). Berdasar data tersebut maka dapat dinyatakan bahwa relokasi industri di 12 kabupaten/kota tersebut (tabel 12.13) berdampak pada meningkatnya total kesempatan kerja. Kondisi peningkatan jumlah industri yang berdampak pada total kesempatan kerja merupakan kondisi yang baik, bahwa tambahan industri di daerah mampu menyediakan kesempatan kerja di daerah tersebut. Keberadaan industri mampu menciptakan tambahan kesempatan kerja di sektor industri dan sekaligus mampu menciptakan kegiatan ekonomi di luar sektor industri, yaitu terjadi di sekitar lokasi industri (seperti tempat penitipan sepeda motor atau sepeda, rumah kos untuk tenaga kerja, warung kelontong, warung makan dan sebagainya).

Tabel 12.13
Jumlah Orang yang Bekerja
Dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Tengah,
Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri (orang)

No	Kabupaten/Kota	Sebelum Relokasi				Sesudah Relokasi				% Kenaikan Rata-rata
		2010	2011	2012	Rata-rata	2013	2014	2015	Rata-rata	
1	Kab Wonosobo	381.326	369.940	394.042	381.769	354.967	397.002	409.389	387.119	1.40
2	Kab Sragen	463.749	433.620	464.685	454.018	447.375	450.618	464.899	454.297	0.06
3	Kab Grobogan	688.296	649.149	696.085	677.843	663.038	719.573	685.333	689.315	1.69
4	Kab Blora	441.334	424.989	441.652	435.992	441.376	427.038	443.275	437.230	0.28
5	Kab Demak	492.570	505.834	493.747	497.384	493.169	523.462	534.301	516.977	3.94
6	Kab Semarang	502.705	465.735	513.606	494.015	511.957	543.980	564.211	540.049	9.32
7	Kab Temanggung	396.063	360.636	397.169	384.623	390.400	416.958	423.256	410.205	6.65
8	Kab Kendal	447.120	446.514	455.323	449.652	452.169	470.254	435.045	452.489	0.63
9	Kab Batang	353.214	347.725	356.535	352.491	348.259	366.284	361.065	358.536	1.71
10	Kab Brebes	812.098	824.449	736.795	791.114	820.664	763.581	767.841	784.029	-0.90
11	Kota Salatiga	73.329	83.879	83.736	80.315	85.961	88.149	84.380	86.163	7.28
12	Kota Semarang	724.687	770.886	756.906	750.826	784.206	820.317	836.837	813.787	8.39
13	Kota Tegal	107.613	115.187	102.084	108.295	114.182	108.480	110.942	111.201	2.68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>

Pada tabel 12.13 nampak 4 kabupaten/kota menunjukkan peningkatan jumlah orang yang bekerja dari kondisi sebelum ke sesudah relokasi industri, sebesar lebih dari 6%. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Semarang (9,32%), Kota Semarang (8,39%), Kota Salatiga (7,28%) dan Kabupaten Temanggung (6,65%). Data Kabupaten Temanggung menunjukkan fenomena yang menarik. Kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang jumlah industrinya meningkat paling banyak dari kondisi sebelum ke sesudah relokasi, yaitu sebanyak 62,86% (tabel 12.10), sementara mengalami penurunan terbanyak dalam jumlah orang yang bekerja di sektor industri, yaitu sebesar 15,32% (tabel 12.12), namun menunjukkan peningkatan jumlah orang yang bekerja, yaitu sebanyak 6,65% (tabel 12.13). Kondisi ini diduga adanya penutupan industri lama, dan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor industri yang ditutup ke sektor lain di luar sektor industri (seperti sektor jasa dan pertanian), serta

terjadi penambahan orang yang bekerja sektor lain di luar sektor industri (sektor jasa dan pertanian). Tambahan orang yang bekerja di luar sektor industri (sektor jasa dan pertanian), terjadi sebagai respon dari adanya tambahan industri baru yang dalam tahap awal pembangunan dan belum beroperasi. Adanya kegiatan ekonomi yang berupa pembangunan (baca pembangunan industri sebagai relokasi dari daerah lain) berdampak pada kegiatan ekonomi di antaranya berupa toko bangunan, jasa bangunan, warung kelontong, warung makan, rumah kos, tempat penitipan sepeda motor atau sepeda dan sebagainya).

Selanjutnya dipetakan dampak relokasi industri terhadap kesempatan kerja sektor industri dan total kesempatan kerja di 13 kabupaten/kota, disajikan dalam tabel 12.14.

Tabel 12.14
Kondisi Kesempatan Kerja Dari 13 Kabupaten/Kota Terpilih
di Jawa Tengah, Sebelum dan Sesudah Relokasi Industri

No	Kabupaten/Kota	Kesempatan Kerja		Keterangan
		Sektor Industri	Total	
1	Kab Wonosobo	+	+	++
2	Kab Sragen	+	+	++
3	Kab Grobogan	+	+	++
4	Kab Blora	+	+	++
5	Kab Demak	-	+	-+
6	Kab Semarang	+	+	++
7	Kab Temanggung	-	+	-+
8	Kab Kendal	+	+	++
9	Kab Batang	+	+	++
10	Kab Brebes	+	-	+-
11	Kota Salatiga	+	+	++
12	Kota Semarang	+	+	++
13	Kota Tegal	-	+	-+

Keterangan: + kondisi peningkatan dari sebelum dan sesudah relokasi

- kondisi peningkatan dari sebelum dan sesudah relokasi

Sumber: Tabel 12 dan 13.

Dari tabel 12.14 dapat dilihat bahwa dari 13 kabupaten/kota yang menjadi tujuan relokasi industri, 9 kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kesempatan kerja sektor industri dan kesempatan kerja total (ditandai dengan ++ pada tabel tersebut). Sembilan kabupaten/kota

tersebut adalah Kabupaten Wonosobo, Sragen, Grobogan, Blora, Semarang, Kendal, Batang, Kota Salatiga dan Semarang. Selanjutnya 1 kabupaten/kota (yaitu Kabupaten Brebes) menunjukkan peningkatan kesempatan kerja sektor industri namun terjadi penurunan kesempatan kerja total (ditandai dengan +/- pada tabel 12.14), sedangkan 3 kabupaten/kota (meliputi Kabupaten Demak, Temanggung dan Kota Tegal) menunjukkan penurunan kesempatan kerja sektor industri dan peningkatan kesempatan kerja total (ditandai dengan -+ pada tabel 12.14).

REFERENSI

- Anonim. 2012a. “Jokowi Resmi Teken Upah Minimum DKI Rp 2,2 Juta”. *detikFinance*, Selasa, 20 Nov 2012 13:19 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2095690/jokowi-resmi-teken-upah-minimum-dki-rp-22-juta>. Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 11.16 WIB.
- Anonim. 2012b. “Sofjan Wanandi: UKM Tak Mampu Bayar Pegawai Sesuai UMP Rp 2,2 Juta/Bulan”. *detikFinance*, Senin, 19 Nov 2012 14:44 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2094490/sofjan-wanandi-ukm-tak-mampu-bayar-pegawai-sesuai-ump-rp-22-jutabulan> Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 11.22 WIB.
- Anonim. 2012c. “Jokowi Ingatkan Buruh Tak Tinggalkan Rapat Dewan Pengupahan
detikNews. Selasa 13 November 2012, 18:17 WIB. <https://news.detik.com/berita/2090788/jokowi-ingatkan-buruh-tak-tinggalkan-rapat-dewan-pengupahan>. Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 11.29 WIB.
- Anonim. 2015. “Mau Tahu Upah Minimum (UMK) 2016 DIY, Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul?”. <http://www.kotawates.com/mau-tahu-upah-minimum-umk-2016-diy-kulon-progo-bantul-sleman-dan-gunung-kidul.html>. Diunduh Tanggal 15 April 2018. Jam 07.16 WIB
- Anonim. 2016a. *47 Industri Tekstil Relokasi ke Jateng, Serap 70.000 Pekerja*. Jum’at 11 Maret 2016. <http://www.solopos.com/2015/10/15/perlambatan-ekonomi-47-industri-tekstil-relokasi-ke-jateng-serap-70-000-pekerja> 652008. Diunduh tanggal 14 Mei 2016. Jam 20.17 WIB.
- Anonim. 2016b. “Inilah Daftar UMP Tahun 2017 dari 34 Provinsi, Naik 8,25 Persen
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/28/inilah-daftar-ump-tahun-2017-dari-34-provinsinaik-825-persen>. Diunduh Tanggal 15 April 2018. Jam 07.55 WIB.

- Anonim. 2016c. *Penetapan Upah Minimum tahun 2013*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Penetapan_Upah_Minimum_tahun_2013.
Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 08.06 WIB.
- Anonim. 2016d. “Jawa Tengah Tujuan Investasi Favorit Sektor Tekstil”.
- Siaran_Pers_BKPM_110516_Perusahaan_Korea_Selatan_Realisasikan_Investasi_Tekstil_dan_Sepatu.
http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_110516_Perusahaan_Korea_Selatan_Realisasikan_Investasi_Tekstil_dan_Sepatu.pdf. Diunduh Tanggal 12 Juni 2017 Jam 11.10 WIB.
- Asura, Aka. 2012. “Buruh di Jakarta Tuntut Upah Minimum 2,79 Juta. Apaaa?”. *Kompasiana* 24 Oktober 2012 12:20 Diperbarui: 24 Juni 2015 22:26 586 0 0
https://www.kompasiana.com/akademiasuransi/buruh-di-jakarta-tuntut-upah-minimum-279-juta-apaaa_5518b801813311af689debf3. Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 12.32 WIB.
- Aziza, Kurnia Sari. 2012. “Jokowi Sahkan UMP DKI 2013 Rp 2,2 Juta”. *Kompas.com* -20/11/2012, 18:48 WIB.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/18483220/Jokowi.Sahkan.UMP.DKI.2013.Rp.2.2.Juta>. Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 11.38 WIB.
- Baihaqi, Muhamad Bari. 2013. “Pabrik di Jabodetabek Akan Direlokasi Ke Jawa Tengah Dampak Buruk Kenaikan UMP”. *Harian Ekonomi Neraca*. Kamis, 14/02/2013.
<http://www.neraca.co.id/article/25019/dampak-buruk-kenaikan-ump-pabrik-di-jabodetabek-akan-direlokasi-ke-jawa-tengah>.
Diunduh Tanggal 1 Mei 2018. Jam 12.43 WIB.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017.
-
- Produk Domestik Bruto
Kabupaten/Kota Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016.*
- BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id>.
<https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/27/1454/kebutuhan-hidup-layak-dan-upah-minimum-kabupaten-kota-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-tahun-2000---2017--rupiah-.html>.
Diunduh Tanggal 15 April 2018. Jam 14.05 WIB.

BPS. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>. Diunduh Tanggal 13 April 2018. Jam 10.28 WIB.

Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

<https://regional.kompas.com/read/2015/11/21/05000061/Gubernur.Jatim.Tetapkan.UMK.2016> Diunduh Tanggal 15 April 2018. Jam 07.36 WIB.

<http://indonesia-peta.blogspot.co.id/2010/10/gambar-peta-jawa-tengah-jateng.html>. Tanggal 16 April 2018. Jam 8.11 WIB.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Januari 2016. *Perekonomian Indonesia Tahun 2016: Prospek dan Kebijakan. 2016*. https://www.bappenas.go.id/files/9914/6460/2962/Perekonomian_Indonesia_Tahun_2016.pdf. Diunduh Tanggal 16 April 2018. Jam 9.47 WIB.

Kurniawan, Didi. 2014. *Uni Eropa Pertimbangkan Relokasi Industri Tekstil ke Jateng*. Retrieved from <http://www.gatra.com/ekonomi-158819-uni-eropa-pertimbangkan-relokasi-industri-tekstil-ke-jateng.html>. Diunduh tanggal 3 Februari 2017.

Reiyschreiben. 2013. *Analisa Dampak Positif Dan Negatif Dari Relokasi 90 Perusahaan Di Jakarta Ke Daerah Lain. 7 April 2013*. <https://reiyslbs.wordpress.com/2013/04/07/analisa-dampak-positif-dan-negatif-dari-relokasi-90-perusahaan-di-jakarta-ke-daerah-lain/>. Diunduh Tanggal 14 Mei 2016 Jam 20.43 WIB.

Surat Keputusan Gubernur DKI, Provinsi Banten dan Provonisi Jaw Barat Tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten tahun 2012 dan 2013.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG.
<http://jateng.tribunnews.com/2015/11/21/daftar-umk-kabupaten-dan-kota-di-jateng-2016>. Diunduh Tanggal 15 April 2018. Jam 07.16 WIB.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
<http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/28/inilah-daftar-ump-tahun-2017-dari-34-provinsinaik-825-persen>. Diunduh Tanggal 15 April 2018. Jam 20.11 WIB.

BAB XIII

ANALISIS POTENSI WISATA KULINER TERHADAP PENGUATAN EKONOMI LOKAL

(Studi Kasus di Kota Surakarta)

**Agung Slamet Sukardi
Dowes Ardi Nugroho
Fitria Nur Rahmawati**

A. Pendahuluan

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah administrasi memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi tersebut sangat diperlukan informasi mengenai potensi ekonomi. Potensi ekonomi dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang terlebih lagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di harapkan daerah mampu memetakan kondisi wilayah dan berbagai sektor yang ada, sehingga nantinya daerah tersebut memiliki ciri khas dan mampu mendorong perekonomian dari daerah tersebut.

Sebagai Kota yang tidak memiliki sumber daya alam serta keadaan geografisnya tidak mendukung pada sektor yang mengandalkan sumber daya alam seperti sektor pertanian, menjadikan Kota Surakarta bertumpu pada sektor lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Salah satu sektor pendorong perekonomian Kota Surakarta adalah sektor perdagangan dan jasanya. Lokasi Kota Surakarta yang strategis berfungsi sebagai penghubung (*interconnected*) bagi *hinterland* atau daerah

pendukungnya yang berada di kawasan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Dengan berada pada lokasi yang strategis tersebut, menjadikan Kota Surakarta sebagai kawasan pusat bisnis yang penting bagi kawasan Subosukawonosraten. Faktor lokasi strategis inilah yang menjadikan secara tidak langsung menjadi faktor keuntungan bagi Kota Surakarta. Di mana Kota Surakarta dapat bertumpu pada sektor perdagangan, jasa dan pariwisata, yang diuntungkan dari sisi lokasi yang strategis tersebut.

Tabel 13.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta
Dirinci Menurut Kategori Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,40	5,03	1,87	1,80	1,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,42	-0,41	-2,29	-2,62	-0,44
C	Industri Pengolahan	7,35	9,02	6,85	3,66	3,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,55	7,90	2,71	2,51	6,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	-2,54	-1,67	2,55	1,77	2,40
F	Konstruksi	5,45	3,92	3,65	5,36	6,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	2,06	7,44	4,27	4,11	4,55
H	Transportasi dan Pergudangan	6,44	10,32	8,38	8,38	5,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,82	5,73	6,95	6,18	5,09
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	8,27	8,94	6,67	6,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,49	4,08	6,41	8,34
L	Real Estate	7,07	5,20	6,41	7,22	6,40
M,N	Jasa Perusahaan	7,18	9,36	6,86	9,28	8,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,66	3,88	1,23	6,46	2,34
P	Jasa Pendidikan	10,56	7,95	7,98	6,85	3,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	8,16	12,59	6,26	7,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,35	6,03	4,25	3,09	5,63
	Produk Domestik Regional Bruto	5,58	6,25	5,28	5,44	5,32
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA	5,58	6,25	5,28	5,44	5,32

Sumber: PDRB Kota Surakarta (BPS, 2016)

Berdasarkan tabel 13.1 di atas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama 5 tahun terakhir cukup stabil yaitu dikisaran angka 5-6 % kecuali pada tahun 2013 yang cukup tinggi. Ini merupakan potensi ekonomi yang cukup baik dan modal bagi Kota Surakarta untuk bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Dengan semakin banyak investasi yang masuk diharapkan roda pembangunan akan berputar lebih cepat, dan akan membawa Kota Surakarta kearah yang lebih sejahtera. Peningkatan kegiatan ekonomi di Kota Surakarta memiliki perkembangan yang searah dengan Bidang usaha Perdagangan, Bidang usaha Informasi dan Komunikasi, dan Bidang usaha Akomodasi, Makan, Minum. Perkembangan ekonomi di Kota Surakarta ternyata tidak diikuti dengan pola yang sama dengan perkembangan di Bidang usaha Konstruksi. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan Bidang usaha Konstruksi memiliki nilai negatif meski Bidang usaha Konstruksi adalah bidang usaha penyumbang PDRB terbesar Kota Surakarta.

Sesuai dengan tema pembangunan Kota Surakarta tahun 2016 yaitu pemasaran potensi unggulan kota surakarta untuk melanjutkan pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi. Dalam era otonomi daerah, sektor pariwisata memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah karena memiliki keterkaitan sebagai sumber untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Besra (2012) Wisata kuliner menjadi suatu alternative dalam mendukung potensi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari, hal ini menjadi bagian dari jenis wisata yang ada, karena tidak lengkap kalau wisatawan yang datang tidak mencoba kuliner khas di daerah tersebut. Meskipun wisata kuliner sering dianggap sebagai produk wisata pelengkap, tetapi wisata kuliner potensial untuk dikembangkan karena wisatawan yang datang biasanya tertarik untuk mencoba makanan khas daerah tersebut.

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016–2026, Kota Surakarta membentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD. Di mana KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek. Adapun salah satunya adalah Kawasan Strategis Pariwisata Kuliner yang menitikberatkan pada pengembangan kuliner yang ada dan kawasan tersebut tersebar di lima (5) Kecamatan wilayah Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki daya tarik wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain: 1. wisata kreatif (*creative tourism*);

2. wisata kuliner (*culinary tourism*); 3. wisata budaya (*cultural tourism*); 4. wisata sejarah (*heritage tourism*); 5. wisata pendidikan (*educational tourism*); 6. wisata massal (*mass tourism*); 7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*); 8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*); 9. wisata alam (*nature-based tourism*); 10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*); 11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*); 12. wisata desa (*rural tourism*); 13. wisata olahraga (*sport tourism*); 14. wisata kota (*urban tourism*); 15. wisata relawan (*volunteer tourism*); dan 16. wisata belanja (*shopping tourism*).

Kota Surakarta memiliki potensi budaya yang beragam, baik yang *tangible* (bendawi) maupun *intangible* (non bendawi). Untuk itu, upaya awal yang akan dilakukan adalah mengenali beragam potensi *heritage intangible* di seluruh kawasan Kota Surakarta. *Intangible Heritage* Warisan budaya non-bendawi (*Intangible Heritage*) Kota Surakarta di klasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis, di antaranya adalah *art performance* (pertunjukan), kesenian (musik), kuliner, kerajinan, serta ritual adat. Adapun sebaran yang termasuk detail elemen *intangible heritage* di 5 Kecamatan Kota Surakarta, pada Tabel 13.2 berikut:

Tabel 13.2
Sebaran Elemen *Intangible Heritage* di Kecamatan Kota Surakarta

Kecamatan	Kesenian	Kuliner	Kerajinan	Pertunjukan	Adat istiadat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan Pasar Kliwon	32 titik (29 %)	30 titik (27%)	24 titik (21%)	14 titik (12%)	12 titik (11%)
Kecamatan Banjarsari	38 titik (29%)	44 titik (34%)	16 titik (12%)	23 titik (23%)	2 titik (2%)
Kecamatan Sriwedari	27 titik (19%)	38 titik (27%)	53 titik (53%)	14 titik (10%)	10 titik (7%)
Kecamatan Serengan	18 titik (52%)	11 titik (19%)	24 titik (42%)	4 titik (7%)	.
Kecamatan Jebres	31 titik (34%)	18 titik (20%)	5 titik (5%)	22 titik (24%)	16 titik (17%)
TOTAL	146 titik	141 titik	122 titik	77 titik	40 titik

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Surakarta, 2016

Berdasarkan Tabel 13.2 di atas dapat kita lihat bahwa kawasan kuliner menjadi kawasan terbanyak ke dua dengan total 141 titik, setelah

kawasan kesenian sebanyak 146 titik di Kota Surakarta. Dengan banyaknya titik kawasan wisata kuliner di kota Surakarta menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung tertarik untuk berbisnis dalam bidang kuliner. Wisata Kuliner mempunyai potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Potensi wisata menarik untuk dikembangkan menjadi agenda bagi pemerintah Kota Surakarta salah satunya dalam hal wisata kuliner. Wisata jenis ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan sebagai daya tarik wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi Kota Surakarta. Jenis wisata ini berbeda dengan jenis wisata pada umumnya, bukan tentang pemandangan-pemandangan yang indah dan beraneka pernik-pernik yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh namun wisata yang satu ini mengedepankan peranan makanan dan minuman sebagai daya tarik utama para wisatawan.

Tabel 13.3
Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku Kota Surakarta
Tahun 2012 - 2016 (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,54	0,52	0,52	0,52
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,27	8,39	8,70	8,58	8,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,20	0,19	0,19	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	26,99	26,50	26,80	26,90	26,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	23,34	23,52	22,79	22,55	22,45
H	Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,45	2,59	2,68	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,36	5,55	5,70	5,76	5,93
J	Informasi dan Komunikasi	11,23	11,01	10,77	10,62	10,43

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016 **)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,67	3,66	3,78	3,92
Lz	Real Estate	4,09	3,95	4,04	4,11	4,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,72	0,73	0,78	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,17	6,10	5,89	5,96	5,95
P	Jasa Pendidikan	4,87	5,28	5,41	5,37	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,02	1,08	1,10	1,10
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,95	0,94	0,95	0,93	0,95
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 13.3 di atas dapat kita ketahui bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki laju pertumbuhan yang stabil meningkat dari tahun 2012-2016 jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki tingkat kontribusi yang cukup stabil untuk mendorong perekonomian Kota Surakarta. Dalam hal ini peneliti mengkhususkan permasalahan dalam sektor wisata kuliner. Wisata kuliner mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan sumbangsih pajak dari wisata kuliner yang cukup besar pada setiap tahunnya. Selain itu wisata kuliner juga dapat menggambarkan karakteristik suatu daerah tujuan wisata karena jenis makanan yang tersedia di daerah tujuan wisata mempunyai ciri khas masing-masing sesuai karakteristik daerah masing-masing sehingga dapat menambah daya tarik suatu daerah tujuan wisata. Keragaman jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi daya tarik wisatawan, semakin unik dan menarik jenis makanan dan minuman yang tersedia maka wisatawan juga akan semakin banyak yang berkunjung ke daerah tersebut.

Wisata kuliner menjadi jawaban atas kebutuhan dan animo masyarakat yang sangat tinggi tentang informasi makanan khas daerah masing-masing yang sesuai dengan cita rasa yang ingin didapatkan. Selain

menambah pengetahuan wisatawan tentang keanekaragaman makanan yang ada, wisatawan juga dapat melihat proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan cukup beragam, mulai yang tradisional hingga yang modern. Surakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang mempunyai berbagai keistimewaan dan ciri khas makanan. Makanan khas Kota Surakarta telah dikenal tidak saja di Indonesia, namun juga telah dikenal dan dinikmati wisatawan mancanegara. Selain itu Kota Surakarta juga terkenal dengan makanannya yang relatif murah jika dibandingkan dengan kota lain seperti Yogyakarta, Semarang dan kota-kota besar lain. Namun yang masih menjadi persoalan sampai saat ini yaitu faktor higienitas dan sanitasi sentra kuliner, kemudian infrastruktur air bersih dan pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang cukup berarti bagi Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu faktor SDM yang belum kompeten menyebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pemengemasan paket kuliner, hal ini juga masih menjadi persoalan yang cukup menarik bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk dapat meningkatkan inovasi dan kreasi para pedagang kuliner. Pemerintah Kota Surakarta juga sedang berusaha menarik para investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor wisata kuliner dengan tujuan untuk mengembangkan wisata kuliner di Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas peneliti ingin mencoba untuk melakukan Analisis Potensi Wisata Kuliner Terhadap Penguatan Ekonomi Lokal di Kota Surakarta.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini ada dua teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, yakni teori gastronomi dan teori persepsi.

1. Teori Pengembangan Produk

Teori ini membutuhkan Kreativitas Mengemas Paket Wisata Kuliner Dan Dukungan Investasi Sektor Kuliner

Menurut Lupiyoadi (2006) produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberi sejumlah nilai kepada konsumen. Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dan merupakan landasan program pemasaran. Selain menjadi landasan program pemasaran. Dalam industri pemasaran pasti memiliki produk ataupun ciri khas dari suatu produk yang dijual dan yang disediakan untuk pelanggan. Bauran ini terdiri atas setiap elemen yang dapat dilihat dalam suatu industri, termasuk tingkah laku pegawai (*staff behaviour*), penampilan dan seragam karyawan, eksterior bangunan, perlengkapan (*equipment*),

furniture dan perlengkapan tetap, signage (penanda) seperti billboard dan tanda arah, komunikasi dengan pelanggan dan publik lainnya.

Pada dasarnya pengembangan produk adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan bersama untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis yang sudah ada ataupun cara mengemas suatu produk untuk menambah daya beli dari setiap konsumen. Pengembangan produk menurut Kotler dan Armstrong (2004:339) adalah pengembangan produk original, perbaikan produk, modifikasi produk dan merek baru yang perusahaan kembangkan, departemen riset, dan pengembangannya sendiri.

Menurut Bucharin (2000) tujuan pengembangan produk adalah memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, menambah omzet penjualan, memenangkan persaingan, mendayagunakan sumber-sumber daya produksi, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, mendayagunakan sisa-sisa bahan, mencegah kebosanan konsumen, dan menyederhanakan produk dan kemasan.

Teori ini dipergunakan untuk mengkaji permasalahan ketiga dari penelitian ini yaitu Kreativitas Mengemas Paket Wisata Kuliner Dan Dukungan Investasi Sektor Kuliner. Hal tersebut nantinya dapat dikembangkan dengan sinerjitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha kuliner di wilayah solo. Mengembangkan tempat-tempat untuk di jadikan paket wisata kuliner tanpa meninggalkan ciri khas kota solo sebagai kota kuliner dan *central of java*.

2. Teori Persepsi

Teori ini menyebutkan bahwa persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa berpengaruh terhadap tiga faktor, yaitu terhadap 1) tingkat kepentingan pelanggan, yang didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli produk atau jasa, yang akan dijadikan standar acuan dalam menilai kinerja produk atau jasa tersebut; 2) kepuasan pelanggan, yang didefinisikan sebagai respons pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya (harapan) dan kinerja aktual yang dirasakan (persepsi); dan 3) nilai, didefinisikan sebagai pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu produk, yang didasarkan pada persepsi pelanggan atas apa yang telah diterima oleh pelanggan yang telah diberikan oleh produk tersebut.

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomer 10998/MENKES/SK/VII2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran pada pasal (1) terdapat pengertian rumah makan dan restoran. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

3. Pengertian Sanitasi

Pengertian sanitasi lebih mengarah pada usaha konkret dalam mewujudkan kondisi higienis dan usaha ini dinyatakan dengan gerakan di lapangan berupa pembersihan, penataan, sterilisasi, penyemprotan hama, dan sejenisnya. Definisi Sanitasi menurut Ehler's & Steel (1958) dalam Nyoman Sukana Sabudi (1996) adalah usaha-usaha pengawasan yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penularan penyakit. Sanitasi menurut WHO adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi makanan adalah meliputi kegiatan usaha yang ditunjukkan kepada kebersihan dan kemurnian makanan agar tidak menimbulkan penyakit (Sabudi, 2000).

Sanitasi makanan adalah suatu usaha pencegahan untuk membebaskan bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari makanan itu sebelum diproduksi, selama dalam proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, sampai kepada penyajian/pendistribusian sehingga makanan dan minuman tersebut siap dikonsumsi kepada konsumen (Sihite, 2000).

Sasaran Higiene Pada Proses Pengolahan Makanan. Untuk memperoleh hygiene pada proses pengolahan makanan di sebuah Galabo yang menjadi sarannya adalah:

- a. Higiene personal dalam hygiene personal ini yang menjadi sasaran adalah
 - 1) Rambut dipotong rapi atau memakai tutp kepala
 - 2) Jangan menyentuh anggota badan
 - 3) Tidak di perbolehkan merokok
 - 4) Memakai sarung tangan
- b. Higiene makanan Dalam hygiene makanan ini, yang menjadi sasaran meliputi:
 - 1) Menyortir bahan makanan sebelum disimpan
 - 2) Membuang makanan yang basi atau tidak layak makan.
 - 3) Menyimpan makanan dengan stainless container bertutup.
 - 4) Menyimpan makanan secara terpisah-pisah agar tidak terkontaminasi dengan bahan makanan lain.
 - 5) Menyimpan makanan sesuai dengan prosedur dari masing-masing makanan itu.

- 6) Memasak makanan dengan cepat, dan tepat, dan tidak terlalu lama jaraknya saat diberikan kepada tam
 - 7) Higiene Peralatan
- c. Higiene peralatan ini, yang menjadi sasaran meliputi:
- 1) Penkan masih dalam keadaan yang baik
 - 2) Perawatan peralatan secara berkala
 - 3) Penyimpanan peralatan dalam kondisi yang kering dan di tempat yang baik dalam hal ini higinis.

4. Pengertian Higiene

Menurut Shadily dalam Nyoman Sukana Sabudi (1996) higiene adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kesehatan. Higiene erat hubungannya dengan perorangan, makanan dan minuman karena merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan. Karena merupakan suatu ilmu, maka higiene berdiri sebagai suatu ilmu yang sejajar dengan ilmu-ilmu yang relevan dengan hidup sehat yang lain seperti ilmu gizi dan dengan makanan.

Menurut Dewa Subianta (2000) Dalam hal penyajian dan pengemasan tentunya harus mengedepankan higiene untuk menambah kepercayaan para konsumen karena dengan menjamin mutu dan tingkat ke higienya maka konsumen akan memperyakan sutu produk ataupun jasa kepada sutu tempat tersebut

Faktor faktor yang dapat menunjang higiene dan sanitasi dalam sebuah galabo / warung makan:

- a) Pedagang
- b) Tempat (lokasi penjualan)
- c) Pemerintah
- d) Ketersediaan air bersih

Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum bagi usaha tempat-tempat umum yang paling baik kalau diambil dari penyediaan air minum kota (PDAM). Namun jika syarat ini belum bisa dipenuhi, sejauh sempurna dalam pengolahannya, bisa memanfaatkan air tanah, misalnya dengan membangun sumur. Persyaratan yang harus diperhatikan terkait hal ini meliputi aspek kecukupan dan kualitas air bersih. Kualitas air bersih harus memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/Menkes/Per/IX/1990.

e) Pengelolaan Sampah

Adanya tempat Pengangkutan Sampah Pengumpulan sampah dimulai di tempat sumber di mana sampah tersebut dihasilkan. Dari lokasi sumbernya sampah tersebut diangkut dengan alat angkut sampah. Sebelum sampai ke tempat pembuangan kadang-kadang perlu adanya suatu tempat penampungan sementara. Dari sini sampah dipindahkan dari alat angkut yang lebih besar dan lebih efisien, misalnya dari gerobak ke truk atau dari gerobak ke truk pematik.

Adapun Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum khususnya tempat penjualan makanan, Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, sisa makanan sebagainya. Penyimpanan sampah hendaknya perlu di perhatikan agar konsumen yang berkunjung ketempat tersebut lebih nyaman dan tidak terganggu oleh sampah yang ada, standarisasi untuk pengelolaan sampah hendaknya juga harus di terapkan di setiap tempat penjual makanan, menyediakan tempat sampah antara sampah yang basah kering antara organik dan anorganik.

5. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia berakibat positif dalam mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Semua perkembangan yang terjadi dapat disimpulkan bermuara pada suatu prinsip yang sangat fundamental, yaitu bahwa manusia mungkin diperlakukan sama dengan alat produksi lainnya, melainkan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Timbulnya berbagai motivasi menekankan bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut peningkatan taraf hidup dalam arti kebendaan, akan tetapi ada berbagai kebutuhan lain seperti keamanan sosial, prestis, pengembangan diri, yang harus di penuhi (Siagian, 1992).

Adapun hal-hal yang berkaitan erat dengan kompetensi kinerja manusia atau pun seseorang dalam pekerjaan adalah kinerja, kompensasi, kompetisi.

a. Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam suatu pekerjaan yang dikerjakan. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai. Tiga hal penting dalam kinerja adalah tujuan, ukuran, dan penilaian dari 3 hal tersebut akan mencerminkan seseorang dalam sebuah pekerjaan yang nantinya dapat memberikan penilaian tersendiri atau memberikan hasil report dalam sebuah tugas yang diberikan dari atas.

b. Kompensasi

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. Karena itu semestinya pemberian kompensasi kepada pegawai perlu mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen instansi agar motivasi para pegawai dapat dipertahankan dan kinerja pegawai diharapkan akan terus meningkat. Kompensasi juga akan mempengaruhi sebuah tugas yang dikerjakan dan target yang diberikan sehingga akan terlihat bagaimana kompensasi itu akan diberikan kepada pegawai baik secara rutin ataupun tidak tergantung dari apa yang sudah ditargetkan oleh sebuah pimpinan.

c. Kompetensi

Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*abilities*). Kompetensi karyawan diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya diharapkan dapat menambah optimalisasi dalam sebuah pekerjaan dan menambah prestasi dalam sebuah pekerjaan yang diharapkan.

C. Metode Penelitian

a. **Ruang lingkup** dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta di mana Secara geografis, Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Sala" merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut. Secara administratif, Kota Surakarta berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

- Utara: Kabupaten Boyolali;
- Timur: Kabupaten Karanganyar;
- Selatan: Kabupaten Sukoharjo;
- Barat: Kabupaten Sukoharjo.

Luas wilayah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 adalah 44,04 km².

- b. **Jenis dan sumber data** yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. **Metode analisis** yang digunakan adalah Metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) digunakan untuk merumuskan secara kualitatif baik lingkungan internal maupun eksternal dari obyek yang sedang diamati. Dalam lingkup internal, analisis SWOT akan menjelaskan secara rinci aspek-aspek yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan kekuatan usaha (*strength*). Sementara itu, dalam lingkup eksternal analisis ini akan menjelaskan secara rinci mengenai aspek peluang (*opportunity*) dan kendala/ancaman/tantangan (*threat*) usaha yang akan dihadapi. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) biasa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan (Kuncoro, 2005).

Tabel 13.4 Matriks Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strengths (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	Weaknesses (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki
Opportunities (O) Daftar semua peluang yang diidentifikasi	Strategi SO: Growth	Strategi WO: Stability
Threats (T) Daftar semua peluang yang diidentifikasi	Strategi ST: Diversification	Strategi WT: Defend

Sumber: Kuncoro (2005)

D. Pembahasan

Sasaran Strategis 15 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Untuk mengukur sasaran ini dengan 2 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 98,84% dengan kategori sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian indikator ditunjukkan pada Tabel 13.5 sebagai berikut:

Tabel 13.5
Hasil Pengukuran Capaian Indikator

No	Indikator	Sat	Satuan 2016			Tahun 2021 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Kunjungan wisatawan	orang	4.500.000	4.395.550	97,67	5.750.000	76,6
2	Persentase penerapan inovasi	%	6	6	100	45,71	13,13
Rata-rata capaian					98,83		

Sumber: RPJMD 2016-2021 Surakarta

Tabel 13.6 Matriks Analisis Swot Potensi Wisata Kuliner
Kota Surakarta

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	<ul style="list-style-type: none"> Kota Surakarta sebagai kota yang memiliki potensi lokal dengan produk dan daya tarik wisata yang di miliki Pelayanan-pelayanan yang ramah di Kota Surakarta Lingkungan yang mendukung untuk pengembangan destinasi wisata Produk yang ditawarkan Kota Surakarta lebih beragam 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor higienitas dan sanitasi sentra kuliner masih kurang Infrastruktur akan ketersediaan air bersih di kawasan kuliner masih belum memadai Pengelolaan limbah sampah dari kawasan kuliner belum sepenuhnya teratasi Kualitas sumber daya manusia masih rendah Masih membutuhkan

		<p>keaktivitas mengemas paket wisata kuliner dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya dukungan investasi pada bidang kuliner
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisata kuliner Kota Surakarta memiliki potensi berkontribusi kepada PAD melalui bidang penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman sebesar (25,59%) dari total usaha di Kota Surakarta • Wisata Kuliner dapat Peningkatan perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri 	<p>Strategi SO: <i>Growth</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan PAD • Pengembangan ekonomi kreatif dan menjadikan Kota Surakarta sebagai tujuan wisata seni, budaya, dan kuliner melalui Pemberdayaan masyarakat 	<p>Strategi WO: <i>Stability</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena wisata kuliner menjadi wisata yang berpotensi di Kota Surakarta sehingga perlu adanya sarana dan infrastruktur yang baik, sehingga perlu adanya revitalisasi dan rehabilitasi kawasan-kawasan yang menjadi titik untuk wisata kuliner dikembangkan
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuliner-kuliner yang menjadi potensi lokal Kota Surakarta semakin sedikit peminatnya 	<p>Strategi ST: <i>Diversification</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk tetap melestarikan kuliner-kuliner lokal Kota Surakarta, perlu adanya upaya pemasaran wisata kuliner melalui diselenggarakannya festival-festival kuliner khas Kota Surakarta 	<p>Strategi WT: <i>Defend</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing • Pengembangan Wisata Kuliner Kota Surakarta dengan penguatan pada bidang promosi

E. Penutup

Kota Surakarta adalah salah satu kota di wilayah Jawa Tengah yang memiliki keberagaman budaya dan wisata. Dapat kita lihat dari banyak obyek-obyek wisata yang sangat menarik terdapat di Kota Surakarta dan sangat dikenal oleh para wisatawan. Beberapa contoh obyek wisata di Kota Surakarta yang dapat di kunjungi dan sangat di minati oleh para wisatawan adalah wisata belanja, di Kota Surakarta terdapat pasar Klewer sebagai pusat perdagangan barang industri maupun barang-barang tradisional yang sering dijadikan destinasi para wisatawan karena lokasinya yang berdekatan dengan Alun-alun Kota Surakarta, selain itu terdapat juga wisata sejarah yaitu keraton Surakarta dan museum dan salah satunya adalah wisata kuliner. Menanggapi hal ini wisata kuliner makanan khas sebagai salah satu keunggulan baru dalam bidang pariwisata. Sebagai salah satu keunggulan di bidang pariwisata, wisata kuliner mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan bila dikelola secara profesional dan tertata bahkan mungkin menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah minat para wisatawan untuk datang berkunjung ke Kota Surakarta khususnya dalam menghasilkan devisa di sektor pariwisata.

Di Kota Surakarta sendiri keberadaan wisata kuliner juga berperan dalam perkembangan industri pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Para pelaku wisata kuliner di Kota Surakarta juga dihadapkan dengan berbagai kendala seperti faktor higienitas dan sanitasi sentra kuliner masih kurang, infrastruktur akan ketersediaan air bersih di kawasan kuliner masih belum memadai, pengelolaan limbah sampah dari kawasan kuliner belum sepenuhnya teratasi, kualitas sumber daya manusia masih rendah, masih membutuhkan kreativitas mengemas paket wisata kuliner dan masih perlunya dukungan investasi pada bidang kuliner. Oleh karena itu para pelaku wisata kuliner masih perlu melakukan perbaikan guna untuk lebih meningkatkan mutu dan daya tarik supaya dapat mengikuti perkembangan jaman. Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan perkembangan di dalam industri wisata kuliner sudah cukup baik. Dapat kita lihat dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan wisata kuliner di Kota Surakarta dari diadakannya festival-festival kuliner, diberikannya penyuluhan-penyuluhan dan bantuan alat-alat operasional untuk menunjang keberlangsungan usaha para pelaku wisata kuliner dengan tujuan agar wisata kuliner di Kota Surakarta dapat mengikuti perkembangan jaman akan tetapi tidak meninggalkan ciri khas dari suatu daerah.

REFERENSI

- Besra, Eri. (2012). Potensi Wisata Kuliner dalam Mendukung Pariwisata Di Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol (12) No.1 Maret 2012.
- Buchari, Alma, 2000. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung.
- Ehlers M. and Steel Ernest W.1958. *Municipal and Rural Sanitation*. Newyork: Mc.Graw-Hill **book** company inc.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong, 2008. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Surakarta Tahun 2016.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sabudi, Nyoman Sukana. 1996 *Tata Boga*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sihite, Richard (2000). *Hotel Management*. Surabaya: SIC.
- Sondang P. Siagian, 2001, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 -2026. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah (13/ 2016). Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 60.

LAMPIRAN

#ESPOSPEDIA

MENJUAL POTENSI KULINER SOLO



Solo bersama Bandung menjadi juara kota destinasi wisata kuliner potensial di Indonesia.

Keduanya mengalahkan Jogja, Semarang, dan Bali, sebagai peringkat 3-5.

Catatan Kuliner Solo

- ✓ Faktor higienitas dan sanitasi sentra kuliner, infrastruktur air bersih, dan pengelolaan sampah.
- ✓ Kualitas SDM yang rendah.
- ✓ Butuh kreativitas mengemas paket wisata kuliner dan dukungan investasi sektor kuliner.



POTENSI BESAR KULINER SOLO

- ✓ **21.124** Usaha bidang penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman (25,59% dari total usaha di Solo)
- ✓ **43.787** Tenaga kerja bidang penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman (18,46% dari total tenaga kerja di Solo)

Keunggulan Solo

- ✓ Produk dan daya tarik wisata
- ✓ Pelayanan ramah
- ✓ Lingkungan mendukung untuk pengembangan destinasi wisata
- ✓ Produk lebih beragam. Sentra kuliner Solo kalah dari Jogja, tapi jenis kuliner lebih beragam.

KONTRIBUSI BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKANAN, DAN MINUMAN



Tahun	Persentase
2012	5,36%
2013	5,55%
2014	5,7%
2015	5,76%
2016	5,9% (prediksi)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, data Kementerian Pariwisata (tso)

solopos.com | @soloposdotcom | @solopos_com @koransolopos | www.solopos.com

BAB XIV

PERAN DAN PERILAKU MUSLIMAH PENGUSAHA DALAM DINAMIKA KEWIRAUSAHAAN

**Dwi Prasetyani
Khusnul Ashar
Susilo
Multifiah**

A. Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam wirausaha secara global menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan *Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017: Report on Women's Entrepreneurship*, di antara 63 negara (dari 74) yang ditampilkan dalam laporan tersebut, *Total Entrepreneurial Activity* (TEA) perempuan secara keseluruhan meningkat sebesar 10% dan kesenjangan gender (rasio perempuan terhadap laki-laki yang berpartisipasi dalam kewirausahaan) telah menyempit sebesar 5% dari tahun 2014. Keterlibatan perempuan dalam wirausaha dapat menciptakan sumber pendapatan untuk diri mereka dan keluarga. Tren positif tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang diungkapkan Yu (2011); Langowitz dan Minniti, (2007) dalam penelitian mereka terkait pengusaha perempuan.

Pertumbuhan partisipasi perempuan dalam wirausaha juga diikuti dengan perkembangan kajian tentang wirausaha perempuan yang semakin luas cakupannya. Hal tersebut memberikan dampak positif untuk fondasi riset yang koheren pada wirausaha perempuan. McKay (2001) mengungkapkan bahwa cara berpikir perempuan dan *gender processes* mengindikasikan untuk memisahkan kajian mengenai wirausaha perempuan dan laki-laki. Selain itu, Brush *et al.* (2009) membentuk suatu

kerangka baru yang menciptakan pemahaman holistik terkait wirausaha perempuan. Brush menganggap bahwa kerangka kelembagaan "3M" (*markets, money and management*) untuk menganalisis perkembangan wirausaha harus diperluas. *Motherhood* dan *meso/macro environment* ditambahkan untuk memperluas kajian mengenai wirausaha perempuan. *Motherhood* merepresentasikan peran perempuan dalam konteks rumah tangga dan keluarga yang berdampak lebih besar pada perempuan wirausaha daripada pria wirausaha. *Meso/macro environment* mengungkapkan realitas di luar pasar, seperti ekspektasi masyarakat terhadap perempuan wirausaha dan struktur institusi pendukung.

Salah satu pendekatan dalam penelitian kewirausahaan untuk mengidentifikasi tipologi wirausaha. Carter dan Cannon dalam McKay (2001) mengkategorikan wirausaha perempuan berdasarkan kriteria usia, *employment*, pendidikan, tanggung jawab pada keluarga, dan latar belakang keluarga. Berdasarkan kriteria tersebut, terbentuk lima kategori pengusaha perempuan: pertama, *the drifters*, perempuan muda yang memilih menjadi pengusaha dari pada pengangguran. Kedua, *the young achievers*, perempuan yang bercita-cita tinggi, tidak berpengalaman, tetapi berpendidikan tinggi. Ketiga, *the achievers*, perempuan yang berpendidikan tinggi dengan pengalaman kerja yang cukup relevan. Keempat, *the returners*, menjadi pengusaha ketika setelah pensiun. Kelima, *the traditionalist*, perempuan berusia di atas 45 tahun yang masih bekerja untuk suatu bisnis keluarga. Wirausaha perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun dan menjalankan bisnisnya. Bahkan tantangan yang dihadapi oleh beberapa wirausaha perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tambunan (2009) telah mengidentifikasi beberapa faktor yang membentuk hambatan bagi wirausaha perempuan. *Pertama*, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesempatan pelatihan yang membuat perempuan sangat dirugikan baik dalam bidang ekonomi dan sosial. *Kedua*, banyaknya pekerjaan rumah tangga yang harus ditanggung oleh perempuan. *Ketiga*, hukum, tradisi, adat istiadat dan budaya. *Keempat*, kurangnya akses ke kredit formal dan fasilitas lainnya.

Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi hambatan perempuan wirausaha. Meskipun dalam praktiknya, faktor internal dan eksternal bersifat saling melengkapi satu sama lain, seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akehurst *et al.* (2012). Beberapa studi empiris lainnya juga telah membuktikan hal tersebut, khususnya dalam konteks norma, adat istiadat dan nilai agama, seperti Nilufer (2001) yang menemukan bahwa di negara berkembang, faktor sosial budaya yang meliputi nilai agama, keragaman etnis dan status pernikahan dapat menghambat perempuan untuk menjadi wirausaha. Budaya patriarki juga berperan dalam membatasi kewenangan

perempuan untuk melakukan aktivitas bisnis (Jamali, 2009). Kemudian penelitian Roomi dan Parrot (2008) di negara Pakistan menemukan bahwa perempuan pengusaha tidak menikmati kesempatan yang sama seperti laki-laki karena banyaknya diskriminasi yang dibentuk dari hubungan sosial, budaya dan tradisi.

Namun, penelitian yang lebih luas terkait dengan penerapan nilai agama dalam kegiatan bisnis perempuan menunjukkan adanya kontradiksi, di mana penerapan nilai agama juga dapat mendorong kesuksesan perempuan. Penelitian dari Fatimah *et al.* (2013) menyebutkan bahwa kesuksesan bisnis pengusaha Muslim dipengaruhi oleh sumber modal, lingkungan budaya, nilai agama dan karakteristik pengusaha. Berdasarkan berbagai penelitian, nilai agama telah menunjukkan memiliki potensi untuk secara positif mempengaruhi individu terutama dalam aspek moral (Wimalasari and Abdul, 1996), kejujuran, (Kotey and Meredith, 1997) dan sebagainya. Kotey and Meredith (1997) juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara nilai agama dan kinerja bisnis.

Sejak awal kemunculannya, Islam telah memandang bekerja tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, namun juga mencakup aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber kepuasan sosial dan kesenangan psikologis (Ali and Al-Owaihian, 2008). Hal tersebut menghubungkan kemakmuran dan keberlanjutan sebuah organisasi dengan kesejahteraan sosial. Empat elemennya yaitu usaha, persaingan, transparansi dan perilaku yang bertanggung jawab secara moral, memiliki peran untuk memperkuat perdagangan dan kemajuan ekonomi. Kemudian berdasarkan penelitian Tlais (2014) menunjukkan bahwa Muslimah pengusaha di negara-negara yang tergabung dalam *Arab Middle East* bangga dengan pekerjaan mereka sebagai pengusaha karena Muhammad (p) terlibat dalam perdagangan dan bisnis dan sebagai contoh dan teladan bagi karir mereka dalam berwirausaha.

Pandangan relatif Islam terhadap peran perempuan sebagai wirausaha juga perlu dipahami lebih lanjut. Abou El Fadl melalui karyanya yang berjudul *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* dalam Syed (2009) mencatat bahwa Islam, sebagai agama, tidak membatasi aktivitas perempuan dalam lingkup privat yang tidak memiliki supremasi dalam kehidupan publik. Sebagai contoh adalah Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, yang merupakan salah satu pelaku bisnis terkemuka Arab kuno. Demikian pula, Khalifah Khalil Umar yang mempercayakan pada Shaffa binti Abdullah sebagai inspektur pasar di Madinah. Islam dengan jelas menghargai dan mendefinisikan perempuan dan peran mereka dalam kehidupan dan pekerjaan. Selain itu, Islam tidak menganjurkan kebiasaan sosial *rigid* dan tradisi lama yang telah mengasingkan perempuan dengan status inferior (Ahmad, 2011).

Nilai Islam mengandung perspektif unik tentang pekerjaan yang dirumuskan dalam etika kerja yang spesifik. Sentralitas kerja dan perilaku dalam perspektif Islam berlandaskan pada Al-Quran dan *Hadith*. Dengan demikian, kerja dengan komitmen yang tinggi dapat mewujudkan tujuan seseorang (53:39); “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh, selain apa yang telah diusahakannya”. Kemudian, Quran dengan jelas melarang ketidakjujuran dalam urusan bisnis (2:188); “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Hubungan ajaran Islam terhadap perilaku pengusaha membentuk suatu pandangan bahwa nilai Islam berperan penting dalam kegiatan bisnis. Sobari (2007) menemukan bahwa terdapat pertautan ranah kehidupan ekonomi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari peran penting agama. Agama Islam, dalam penelitian tersebut, memainkan peran untuk membentuk semangat berdagang di kalangan penduduk (Betawi) Suralaya. Kemudian, penelitian Geertz (1983) yang dilakukan di daerah Kota Gede Yogyakarta, menemukan bahwa ajaran Islam yang dilaksanakan secara puritan (*shaleh*) berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan industri. Sementara golongan yang lain yaitu golongan abangan dianggap sebagai golongan yang menerapkan ajaran Islam yang kurang puritan menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang tidak bergairah dan tidak dinamis.

Peran perempuan yang berprofesi sebagai wirausaha, secara alamiah tidak dapat dipisahkan dari konteks keluarga atau rumah tangga, maka kajian terkait wirausaha perempuan memerlukan pandangan yang lebih luas. Penelitian ini menekankan pada wirausaha perempuan Muslim atau muslimah pengusaha dan mendeskripsikan model untuk memahami perilakunya dalam kegiatan bisnis. Hal tersebut juga mengkaitkan dengan perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, peran perempuan tidak dibatasi hanya dalam sektor domestik, dan peran mereka dalam kegiatan ekonomi juga sudah ada sejak awal kemunculan Islam. Perilaku perempuan dilatarbelakangi oleh usia, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya dan agama. Perempuan menginternalisasi berbagai nilai sosial, budaya dan agama yang berlaku secara umum atau khas. Hal tersebut secara kompleks membentuk sikap dan perilakunya sebagai perempuan yang berperan ganda.

Studi ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran perempuan dalam ekonomi dan mengembangkan model penerapan nilai Islam dalam aktivitas bisnis untuk memberikan kerangka analisis perilaku Muslimah pengusaha. Tujuan utama studi ini adalah: a. Mengidentifikasi peran

perempuan dalam kegiatan ekonomi; b. Memberikan gambaran terkait nilai Islam dalam kewirausahaan; c. Mendeskripsikan model penerapan nilai Islam dalam bisnis oleh Muslimah pengusaha.

B. Peran Perempuan

1. Gender

Kajian mengenai wirausaha perempuan termasuk dalam ranah gender. Mosse (1993) mendefinisikan gender sebagai perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Perbedaan tersebut tidak merujuk secara kodrat atau perbedaan secara biologis, melainkan interpretasi biologis melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Sebagai orang dewasa kita cenderung mempercayai bahwa kita hidup dengan kadar kebebasan yang signifikan, yaitu kita bebas memilih cara berperilaku, cara berpikir dan memilih peran. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas.

Suzanne Williams, Janet Seed, dan Adelina Mwaou dalam *The OXFAM Gender Training Manual, Oxford* yang dikutip oleh Nugroho (2008) untuk mendalami strategi pengarus-utamaan gender, mengartikan gender sebagai berikut:

“...manusia dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka dididik tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka dididik bagaimana berelasi di antara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peranan gender mereka dalam masyarakat.”

Diferensiasi gender (*gender difference*) banyak terjadi dalam kegiatan ekonomi. Sejumlah review artikel mengungkapkan hal yang mendasari adanya *gender differences*. Berdasarkan *World Development Report* (2012), terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan adanya segregasi gender dalam akses untuk mendapatkan peluang ekonomi di antara para petani, wirausaha, dan pekerja. *Pertama*, diferensiasi gender dalam pengalokasian waktu (hal utamanya berasal dari perbedaan tanggungjawab dalam merawat anak atau keluarga). *Kedua*, diferensiasi gender dalam akses input produktif (terutama tanah dan akses kredit). *Ketiga*, diferensiasi gender yang berasal dari kegagalan pasar dan institusi. Diferensiasi gender tersebut dapat menjebak perempuan dalam pekerjaan dengan gaji rendah dan bisnis dengan produktivitas rendah.

Selain itu, diferensiasi gender memunculkan stigma negatif (terutama pada perempuan) dan mengasosikan peran perempuan inferior dari pada laki-laki. Croson dan Gneezy (2009) mengidentifikasi tiga tipe preferensi (*types of preferences*) yang menciptakan diferensiasi gender (*gender differences*) dalam ekonomi. *Pertama*, perempuan cenderung menghindari resiko (*risk averse*) dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian yang *kedua*, dalam beberapa eksperimen, perempuan lebih memiliki tingkat kepekaan sosial yang tinggi daripada laki-laki, seperti: perempuan lebih mementingkan orang lain (*more altruistic*), memiliki preferensi pada penciptaan keadilan dan mencegah terjadinya ketidaksetaraan (*inequality averse*), memiliki hubungan yang resiprokal, dan lebih kooperatif. *Ketiga*, preferensi perempuan untuk masuk ke dalam situasi yang kompetitif lebih rendah daripada laki-laki. Hal tersebut mempunyai implikasi pada penentuan kebijakan ekonomi terhadap perempuan dalam pasar tenaga kerja maupun pasar barang dan jasa.

Berdasarkan teori gender yang diungkapkan oleh Edward Wilsondari dalam Sasongko (2009) ada empat teori dasar tentang gender. *Pertama*, teori *nature* yang menyebutkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki secara kodrat sehingga hal tersebut tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan tersebut memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Kedua, teori *nurture* yang mengungkapkan perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan fungsi yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan peran perempuan selalu terabaikan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut memunculkan perjuangan untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki (dipelopori kaum feminis) yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality*.

Ketiga, teori fungsionalis yang mengakibatkan tuntutan kesetaraan gender dalam peran sosial dalam masyarakat sebagai akibat perubahan struktur nilai sosial ekonomi. Era globalisasi yang penuh dengan persaingan, mengakibatkan peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Teori fungsionalis menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga atau masyarakat.

Keempat, teori equilibrium yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan

laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai dengan situasi/keadaan), yang berjalan secara perlahan, berkesinambungan dan terus menerus.

2. Perkembangan Peran Perempuan

Amott dan Matthaei (1991) menganalisis gender, ras dan kelas sosial yang secara intrinsik saling berhubungan dalam sejarah Amerika Serikat, sebagai faktor-faktor utama dalam diferensiasi peran perempuan. Diferensiasi dan ketidaksetaraan rasial berimplikasi pada adanya segregasi yang menempatkan orang-orang kulit berwarna pada posisi yang tidak menguntungkan di bidang sosial, pendidikan, dan politik. Selain itu proses gender juga dapat mendiferensiasi peran perempuan dengan berbagai cara, dari orang-orang dalam suatu kelompok ras maupun kelas tertentu. Disini, kelas sosial berperan penting, misalnya ketika perempuan dari kelas atas (*upper-class*) menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk menggantikan tugasnya dalam hal merawat anak.

Namun, seiring dengan adanya transisi demografi dan arus globalisasi membuat peran perempuan dalam kegiatan ekonomi terus mengalami perubahan dan perkembangan. Perempuan tidak hanya melakukan kegiatan domestik tetapi juga mencakup kegiatan publik. Hal tersebut memberikan peluang bagi perempuan untuk mencapai puncak karir secara profesional dan meningkatkan akses untuk aktualisasi diri di dalam masyarakat (Frederick *et al.*, 1996). Perempuan memutuskan untuk bekerja karena mereka ingin mendapatkan tambahan penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan anak, orang tua dan mereka dapat memiliki rasa aman serta kebebasan dalam menjalankan peran (Marlow, 2002; Frederick, *et al.* 1996). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang perempuan, akan mendorong seorang perempuan untuk berkarir dan memenuhi tanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan lingkungan sosial atau keluarga.

Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung akan terjadi seiring dengan perkembangan zaman, dan menurut Ananta (1990: 160), penyebab terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu *pertama*, adanya perubahan pandangan dan sikap dalam masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum pria dan perempuan serta semakin disadari perlunya kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, *kedua* adanya kemauan perempuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya (dan juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya) dengan penghasilannya sendiri, *ketiga* adanya kebutuhan

untuk menambah penghasilan keluarga, *keempat* semakin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja perempuan, misalnya tumbuhnya industri kerajinan tangan dan industri ringan lainnya.

Menurut Daweti melalui karyanya *Redefining the Meaning of Work* dalam Naidoo dan Patel (2009), anak menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan dalam berkarir atau melanjutkan pendidikan formal. Kemudian, ketika seorang perempuan dengan pendidikan yang tinggi, maka akan dibutuhkan banyak orang, tetapi kehadirannya di tempat kerja dapat terisolasi dari kelompok pekerja yang lain. Oleh karena itu, perempuan harus siap dan dapat mengatasi tantangan tersebut, karena jaringan kerja dan *support system* berperan dalam pengembangan karir perempuan. Hal yang terpenting dalam memaknai kerja adalah tidak adanya keterpaksaan, keputusan, maupun kompetisi tidak sehat, melainkan membuat pekerjaan sebagai penunjang kreativitas dan pengembangan individu.

3. Alokasi Waktu Perempuan

Teori alokasi waktu merepresentasikan peran perempuan yang memasuki dunia kerja yang ditinjau dari perspektif ekonomi. Teori alokasi waktu Becker (1965), menerangkan perilaku individu dalam mengalokasikan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan. Dalam teori ini mengasumsikan bahwa ada tiga jenis kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam hubungannya dengan alokasi waktu. *Pertama*, seorang individu membutuhkan waktu untuk konsumsi (tidak berkaitan dengan kegiatan pasar-*nonmarket consumption activity*), seperti: tidur, makan, minum dan istirahat. *Kedua*, seorang individu membutuhkan waktu untuk keperluan pasar, misalnya waktu untuk bekerja. *Ketiga*, individu membutuhkan waktu untuk investasi modal manusia (*investment in human capital*). Pada alokasi waktu untuk investasi modal manusia tersebut, individu dihadapkan pada pilihan untuk memasuki pasar kerja atau tidak. Bila individu tersebut memasuki pasar kerja, sejumlah waktunya dikorbankan untuk memperoleh sejumlah pendapatan. Dengan demikian, individu tersebut mengorbankan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, apabila individu tersebut tidak memasuki pasar kerja tetapi memilih untuk mengikuti pendidikan, berarti akumulasi modal manusianya menjadi lebih besar. Akumulasi modal manusia ini yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat upah.

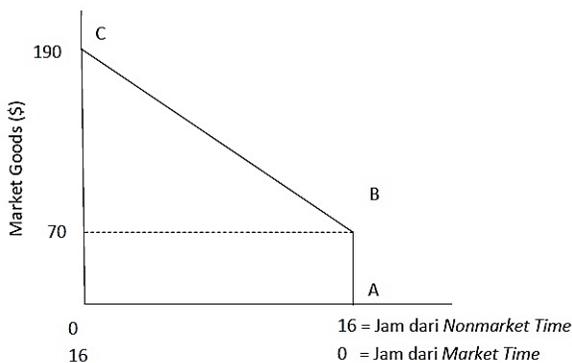
Perempuan yang telah memilih mengalokasikan waktunya untuk bekerja, tentunya memiliki masalah dalam menciptakan keseimbangan hidup (*work-life balance*). Tanggung jawab untuk mengurus keluarga dan adanya kewajiban dalam pekerjaan dapat menimbulkan konflik peran (Shelton, 2006). Pendekatan neoklasik digunakan Blau dan Ferber (1986)

untuk menganalisis keputusan individu dalam mengalokasikan waktu dirumah dan bekerja (*labor market*). Tujuan dari alokasi tersebut untuk memaksimalkan kepuasan (*utility*). Keputusan individu untuk bekerja atau dirumah, mempertimbangkan nilai (*value*) dari waktu yang dialokasikan. Ketika individu melakukan keputusan untuk bekerja, maka nilai (*value*) dari waktu yang dialokasikan untuk bekerja lebih besar dari nilai (*value*) waktu yang dialokasikan untuk dirumah.

Kepuasan (*utility*) yang diperoleh setiap individu berasal dari konsumsi barang dan jasa (*commodities*) yang diproduksi menggunakan input dari *market goods* dan *nonmarket time*. Sebagai contoh, untuk menyajikan sarapan sereal (*commodities*) dibutuhkan input dari *market good* (bahan pembuat makanan, peralatan produksi sereal) dan *nonmarket time* (waktu yang dialokasikan individu untuk menyiapkan makanan sereal). Untuk analisis lebih dalam, Blau dan Ferber (1986) menggunakan model dengan tiga asumsi pokok. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang diterima dari pasar tenaga kerja (*labor market*) dibelanjakan dalam pasar barang (*market goods*). Hal ini menghindari pertimbangan faktor-faktor penentu untuk menabung (*saving*).
2. Semua alokasi *nonmarket time* digunakan untuk produksi suatu komoditas (*commodities*) yang dapat berupa sepotong roti, rumah yang bersih dan anak-anak yang sehat. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan dalam membedakan *nonmarket work* dan waktu luang yang tidak berguna (*leisure unnecessary*).
3. Fokus analisis pada model ini adalah individu bukan keluarga secara keseluruhan.

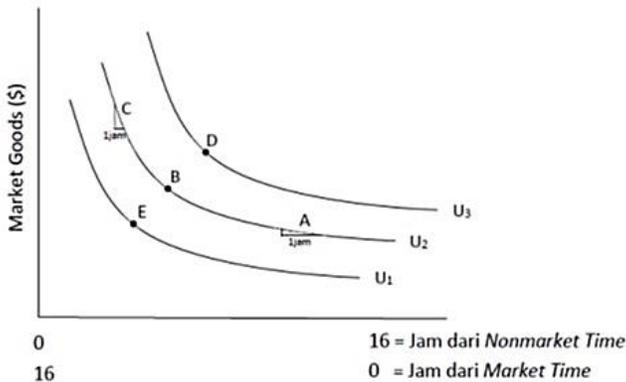
Beberapa opsi yang menjadi pilihan individu terdapat dalam kurva kendala anggaran (*budget constraint*) yang digambarkan pada gambar 14.1 di bawah ini:



Gambar 14.1. Kurva Kendala Anggaran (*Budget Constraint*)

Kurva kendala anggaran menunjukkan beberapa kombinasi alokasi waktu dari setiap individu di *nonmarket time* dan *market goods*. Diasumsikan pendapatan ketika tidak bekerja (*nonlabor income*) sebesar 70 US \$. *Nonlabor income* tersebut dapat berupa pendapatan dari pasangan, deviden, pembayaran transfer dari pemerintah (dana pensiun), dan asuransi. Hal itu tidak berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan dari alokasi waktu untuk bekerja. Jumlah waktu yang dialokasikan pada kegiatan *nonmarket* digambarkan pada garis horizontal dari kiri ke kanan. Diasumsikan setiap individu memiliki 16 jam per hari untuk dialokasikan antara kegiatan *nonmarket* dan *market*. Garis vertikal pada kurva kendala anggaran menunjukkan pendapatan yang dapat diterima oleh individu jika mengalokasikan pada kegiatan *market time*. Kendala anggaran BA menunjukkan *nonlabor income* dari setiap individu. Untuk menambah pendapatan, setiap individu harus menambah alokasi waktu pada kegiatan *market time*. Akan tetapi, individu tersebut harus mengorbankan waktu dari kegiatan *nonmarket*.

Setelah menganalisis dengan kurva kendala anggaran, pilihan individu untuk mengalokasikan waktu pada kegiatan market dan nonmarket dilengkapi dengan kurva *indifference* pada gambar 14.2 di bawah. Kurva tersebut menaksirkan utilitas individu dari setiap pilihan yang telah diambil. Kurva *indifference* U_3 menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi dari U_2 . Begitu juga dengan U_2 menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi dari U_1 . Kemudian, kombinasi alokasi waktu sepanjang garis kurva U_2 menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Misalnya pada titik A alokasi *nonmarket time* lebih banyak dari *market time*, maka pendapatan yang didapatkan juga relatif lebih rendah. Bila dibandingkan dengan titik C maka, dengan alokasi waktu lebih banyak pada *market time*, pendapatan lebih besar. Akan tetapi, hal tersebut juga mengorbankan kegiatan *nonmarket*.



Gambar 14.2. Kurva *Indifference*

Kepuasan setiap individu tidak hanya diturunkan langsung dari *market goods* dan *nonmarket time*. Namun, mereka menilai sejauh mana alokasi waktu tersebut dapat digunakan untuk memproduksi komoditas (*commodities*). Maka, Blau dan Ferber (1986) menambahkan tipe substitusi untuk menganalisis. Substitusi tersebut adalah:

a. Substitusi dalam Konsumsi

Beberapa komoditas (*commodities*) dapat digolongkan menjadi barang produksi intensif (*good intensive*), yang membutuhkan alokasi *market time* lebih banyak daripada *nonmarket time*. Sebagai contoh adalah membeli barang antik dan barang mewah. Sebaliknya, terdapat komoditas (*commodities*) yang relatif lebih banyak membutuhkan waktu atau *time intensive*. Hal ini mencakup merawat anak, melakukan rekreasi hiking, dan olahraga.

b. Substitusi dalam Produksi

Komoditas yang sama dapat diproduksi dengan *time intensive* atau *good intensive*. Sebagai contoh, *pertama* makanan yang enak dapat diproduksi sendiri di rumah dan bisa didapatkan dengan membeli pada restoran yang mewah. *Kedua*, rumah yang bersih dapat diwujudkan oleh individu dengan membersihkan sendiri setiap hari dan dapat diwujudkan dengan membayar *cleaning service*. *Ketiga*, merawat anak dapat dilakukan oleh kedua orang tua, membayar *babysitter*, dan menitipkan pada *child care*.

Seperti yang tergambar pada kurva *indifference* di atas, pilihan individu dari titik A ke B kemudian ke titik C di sepanjang kurva U_2 , dia akan memanfaatkan peluang untuk melakukan substitusi konsumsi maupun substitusi produksi. Dengan kata lain, dia akan mensubstitusi *good-intensive commodities* dengan *time-intensive commodities*. Begitu juga dengan adanya komoditas yang hanya bisa diproduksi di *market good* dan komoditas yang hanya diproduksi di rumah (*nonmarket time*). Ketika komoditas tercipta secara agregat atau bersama-sama seperti yang ditunjukkan kurva *indifference* pada gambar 14.2 maka substitusi pada *market good* dan *nonmarket time* akan tetap terjadi pada setiap individu.

4. Peran Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam

Islam memberikan kebebasan untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Wirausaha perempuan dalam Islam bukanlah hal baru. Jauh sebelum kejayaan Islam, banyak perempuan yang melakukan bisnis. Contohnya adalah RA Khadijah, istri Nabi. Sebelum dikenal sebagai istri Nabi, Khadijah dikenal sebagai pengusaha sukses di era nya. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta pedoman di bidang jual beli. Nabi

(SAW) memberi banyak perhatian dan bimbingan kepada perempuan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana dan mengisinya dengan pekerjaan yang bermanfaat. Selain itu, Islam memberikan perempuan kesetaraan hak dengan laki-laki dalam beragama, pengembangan karir dan spiritual (Hoque *et al.*, 2013). Dalam ayat Al-Qur'an di bawah ini, dapat ditelaah lagi terkait dengan peran perempuan.

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.” [An-Nisa:124]

Berdasarkan prinsip dasar Islam tersebut, semua pria dan perempuan adalah sama dalam hal kemanusiaan, selain itu keduanya juga mempunyai martabat yang sama dihadapan Allah. Hal tersebut merujuk pada penciptaan Allah. Kemudian untuk menegaskan lagi bahwa pria dan perempuan adalah setara di hadapan Allah, merujuk pada ayat Al Qur'an berikut ini:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” [51:49]

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Sheha (2001) menafsirkan secara luas dan mengkaitkan dengan *binary basis* (bagian esensial dari keseluruhan sistem tata kehidupan). Al-Sheha memanifestasikan peran antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi satu sama lain serta memiliki keterikatan. Perbedaan ras, bahasa, mata pencaharian, geografis dan sebagainya, tidak ada hubungannya dengan tinggi rendahnya martabat manusia di hadapan Allah. Faktor-faktor penentu tingkatan martabat manusia adalah ketaqwaan, keimanan, dan tingkat penerapan ajaran-ajaran-Nya pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan nilai-nilai Islam tersebut, keterlibatan perempuan untuk bekerja maupun berwirausaha merupakan hal yang sah-sah saja asalkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggadwita *et al.* (2015), di mana Islam tidak menghambat perempuan untuk bekerja maupun menjadi wirausaha.

Sementara itu, kesetaraan gender yang dilihat dari perspektif nilai Islam, dalam penelitian ini, diturunkan dari ayat Al-Quran berikut ini:

“Dan janganlah kamu iri hati, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian, dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa: 32)

Gender bukan merupakan faktor penghambat khususnya bagi perempuan untuk bekerja maupun menjadi wirausaha. Kesetaraan gender dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban. Perempuan diizinkan untuk bekerja dalam berbagai bidang, selama masih dapat menjaga iman, tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif dari lingkungan pekerjaan dan dapat menjaga kehormatannya sebagai perempuan. Selain itu, perempuan juga dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Suatu pandangan yang menganggap bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan memiliki keterbatasan akses untuk dapat melakukan aktivitas publik (Dechant dan Al-Lamky, 2005; Naser *et al.*, 2009), dan hal tersebut menyebabkan perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin (*leader*). Perempuan dan laki-laki memiliki potensi dan kemampuan untuk dapat memikul tanggung jawab masing-masing. Saat ini, perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat dan memiliki peran penting dalam sektor ekonomi serta pembangunan negara. Ajaran-ajaran Islam memungkinkan perempuan untuk melakukan bisnis dengan persyaratan mendapatkan izin dari suaminya, tidak melanggar aturan agama, menutup aurat, menjaga pandangan, dan bisa membagi waktu antara melayani suami dan mendidik anak (Mat dan Mansor, 2010). Maka, tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan sosial maupun kegiatan ekonomi asalkan tidak melanggar asas-asas Islam.

5. Nilai Islam dalam Kewirausahaan

Agama merupakan sumber nilai. Seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang disebarkan melalui agama, terlepas dari apakah seseorang tersebut beragama atau tidak (Dana, 2009). Sementara itu, faktor-faktor sosiokultural yang terbentuk dari beberapa elemen seperti nilai-nilai agama (*religious value*), keberagaman etnis, dan status pernikahan dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk menjadi wirausaha (Nilufer, 2001; Al Dajani dan Marlow 2010; Roomi, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Dechant dan Al-Lamky (2005), bahwa kebudayaan masyarakat dapat terbentuk dari prinsip agama. Dalam penelitian yang dilakukan di negara Bahrain dan Oman tersebut menemukan adanya pengaruh dari kebudayaan terhadap keputusan perempuan untuk berwirausaha, dan nilai-nilai Islam yang diterapkan berdampak positif terhadap kinerja perempuan wirausaha. Tetapi beberapa budaya masyarakat juga menjadi penghambat dalam menjalankan usaha, contohnya seperti perempuan tidak bisa pergi sendiri ke Arab Saudi untuk berdagang tanpa ditemani oleh suami atau keluarga.

Norma-norma yang diajarkan agama Islam lebih kondusif dalam membentuk *entrepreneurial personalities*, walaupun ideologi, *cultural norms*, dan *entrepreneurship* saling mempengaruhi satu sama lain (Akbar, 1993). Islam mencakup etika perempuan wirausaha, yang dapat mendasari peran dan pengaruh yang baik. Pengaruh tersebut juga dapat menjangkau perubahan sosial, yang berdasarkan deskripsi konseptual, aktivitas perempuan wirausaha dapat menciptakan pekerjaan, mengurangi pengangguran, *female autonomy*, kebebasan sebagai *leader*, *reducing social inequalities and discrimination against women*, and *encourages the entrepreneurial spirit, especially for the youth* (Anggadwita et al., 2015).

Weber (1930) mengungkap bahwa praktik keagamaan atau keimanan seseorang (*religios Practice and beliefs*) memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi (*economics development*). Hasil ini senada dengan tesis Sobari (2007) yang menemukan bahwa terdapat pertautan ranah kehidupan ekonomi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari peran penting agama. Agama Islam, dalam penelitian tersebut, memainkan peran yang menentukan dalam membentuk semangat berdagang di kalangan penduduk (Betawi) Suralaya. Lebih spresifik lagi, Kotey dan Meredith (1997) menunjukkan hubungan yang signifikan antara nilai-nilai agama dan kinerja pengusaha dalam menjalankan bisnis.

Terdapat dua sumber nilai-nilai Islam yaitu *pertama*, Al-Quran di mana umat Muslim meyakini sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, *Sunna* atau Hadith yang berarti kata-kata, perilaku, dan persetujuan (*approval*) Nabi Muhammad SAW. Meskipun Hadith tidak berasal dari firman Allah, umat Muslim meyakini sebagai bentuk wahyu lain kepada Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai Islam tidak diungkapkan secara eksplisit, seperti yang dinyatakan Forster (2014:40), dalam inti ajaran Islam, nilai-nilai dimanifestasikan dalam peraturan dan pedoman daripada diungkapkan secara eksplisit. Nilai-nilai Islam dapat dijadikan tujuan dan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut di mana semua kontennya mencakup moral dan *nature* (kodrat).

Pendalaman riset yang dilakukan oleh Forster (2014) untuk mengidentifikasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajerial menghasilkan kesimpulan bahwa nilai Islam dan etika Islam sama-sama bersumber dari Al-Quran dan Hadith. Maka, penggabungan antara *Islamic Value dan Islamic Work Ethic* dianggap lebih tepat untuk merepresentasikan *The Influence of Islamic Values on Management Practice*. Nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh muslimah pengusaha merupakan suatu turunan dari taqwa (*piety*) dan ‘ibadah (*worship*) kepada Allah. Oleh karena itu, kehidupan tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan fisik saja tetapi juga untuk ibadah dan melayani Allah.

Etika Islam dapat disetarakan dengan *akhlak* dan mendiskripsikan pola perilaku Nabi Muhammad SAW (Beekun and Badawi, 2005). Kemudian, Ali and Al-Owaihian (2008) mendiskripsikan Etika Kerja Islam sebagai orientasi yang dibentuk dan dipengaruhi dari keterlibatan dan partisipasi penganut agama di lingkungan kerja. Etika kerja Islam menekankan pada niat daripada hasil sebagai ukuran moralitas. Hal ini menyiratkan bahwa pekerjaan adalah perbuatan amal berdasarkan kebutuhan seseorang dan merupakan kewajiban untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial.

C. Etika Kerja dalam Perspektif Islam (*Islamic Work Ethic*)

Studi empiris yang dilakukan oleh Tlaiss (2014) menemukan bahwa muslimah pengusaha mempersepsikan nilai-nilai Islam sebagai instrumen dalam mengembangkan bisnis dan meraih kesuksesan seperti: kerja keras dan mengutamakan kualitas (*amal salih*), jujur dan amanah (*sidik and amanah*), fairness and justice (*haqq and adl*), murah hati (*ihsaan*). Kemudian, Beekun dan Badawi (2005) mendiskripsikan sistem etika Islam dari perspektif *Stakeholder*, di mana kriteria *Stakeholder* yang relevan adalah *justice and balance* ('adl dan qist), trust (amanah), benelovence (ihsan). Sedangkan Ali dalam Forster (2014) mendiskripsikan *content* dan *nature* dari nilai Islam secara eksplisit dalam bukunya yang berjudul *Islamic Perspectives on Management and Organization* di mana nilai merupakan "kunci utama" untuk mempelajari kehidupan organisasi. Nilai-nilai Islam dipahami dari Qur-an dan *Prophet's sayings and practices (the Sunna-Hadith)*. Nilai-nilai tersebut seperti: *equality, accountability, hard work, justice, consultation, trust, self-discipline, persistence and co-operation*.

Tujuan Islam didasarkan pada kesejahteraan manusia dan bukan materialisme, sistem etika Islam secara konsep tidak jauh berbeda dengan nilai Islam. Rice bersama Sadeq dan Akhtar dalam Forster (2014) membuat kerangka nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan dan menekankan relevansinya. Hal ini juga memberikan pengertian bahwa nilai-nilai bisa terwujud dalam praktik bisnis, yang dideskripsikan di bawah ini:

1. Unity (tawid): kesatuan dengan Allah, sesama, alam

Dasar filosofi bisnis dalam Islam, berlandaskan pada hubungan manusia dengan Allah. Islam mengajarkan bahwa kehidupan merupakan satu kesatuan, karena dalam ajaran Islam sudah memberikan petunjuk dan cara yang memungkinkan untuk dijalani, serta dapat menuntun dalam segala aspek kehidupan agar sesuai dengan perintah-Nya. Dalam

kesadaran masing-masing individu, harus ada suatu kesatuan (*unity*) dalam berpikir dan berperilaku. Islam merupakan suatu racangan (program) dalam kehidupan yang berdasarkan dengan hukum alam sesuai dengan yang difirmankan-Nya. Semua yang telah dilakukan dalam kehidupan di dunia, menentukan apa yang terjadi di akhirat. Hubungan di antara sesama juga sangat penting, semua dianggap sebagai partner yang sama (sederajat). Semua orang merupakan saudara antara satu sama lain.

2. Justice (Adalah): keadilan, kesetaraan.

Tujuan Islam adalah untuk menghapuskan ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, dan eksploitasi dalam masyarakat. Islam menganjurkan setiap individu untuk memiliki rasa kemanusiaan dalam pencapaian spiritualnya, yang diimbangi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa kekayaan harus didapatkan dengan cara yang produktif. Riba dan perjudian tidak diperbolehkan.

Komitmen terhadap keadilan dan kekeluargaan ditegakkan di dalam umat muslim yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Lembaga zakat (pajak kekayaan) memastikan pemberian amal untuk kelompok masyarakat tertentu dan memfasilitasi redistribusi kekayaan.

3. Trusteeship (khilafah): amanat

Umat muslim di dunia merupakan representasi wali amanat Allah. Sumber daya yang ada di dunia tidak hanya dipergunakan untuk memberi keuntungan bagi kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Jika sumber daya harus dilimpahkan, maka harus dilimpahkan untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua orang.

Diperlukan kemakmuran secara material, tetapi hal tersebut bukanlah tujuan utama. Konsumsi yang berlebihan adalah hal yang tidak tepat. Maka, motivasi merupakan hal yang krusial dalam melakukan aktivitas perekonomian dan harus menjadi kesalehan dalam beribadah serta dapat mewujudkan tindakan yang baik.

4. The Need for Balance

Muhammad SAW mendiskripsikan Islam sebagai jalan tengah, maka umat muslim seharusnya dapat moderat (dapat berpikir terbuka-*open mind*) dalam setiap hal ihwal. Islam mengancam keserakahan dan sikap acuh tak acuh terhadap hak dan kebutuhan sesama. Islam menekankan umat pada kewajiban daripada tuntutan akan hak.

Rice, Sadeq, dan Akhtar dalam Forster (2014) juga menunjukkan gagasan mereka mengenai *ethics, human resource management*, dan

kerangka kerja majikan dan karyawan. Hal tersebut dideskripsikan di bawah ini:

- a. *Unity* (tawid): kesatuan dengan Allah, sesama, alam.

Kerja sama atau gotong royong, mencari ilmu berdasarkan penelitian dan pengembangan.

- b. *Trusteeship* (khilafa): amanat

Kepercayaan (tanggung jawab) diutamakan dalam relasi bisnis dan dalam lingkungan kerja serta peduli terhadap lingkungan.

- c. *Justice* (Adalah/‘Adl): keadilan dan kesetaraan

Ketimpangan pendapatan tidak diizinkan, sehingga mengusahakan adanya pemerataan pendapatan atau tidak adanya eksploitasi. Selain itu, menjaga kejujuran dan itikad baik dalam negosiasi. Dalam seleksi dan perekrutan karyawan, dapat bertindak secara adil dan memenuhi komitmen sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Karyawan juga mendapat perlindungan hak dan diperlakukan secara *fair*, sehingga, dapat memenuhi dan mengenali kebutuhan karyawan maupun majikan.

- d. *Benevolence* (‘Ihsan): kebaikan, kebajikan, amal

Tidak memberikan tekanan pada karyawan secara berlebihan sehingga dapat mencegah terjadinya stress kerja dan selalu berkomitmen dengan perjanjian yang telah dilakukan. Menunjukkan kerja keras dan kualitas sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan yang maksimal.

- e. *Brotherhood* (Ukhuwwah): persaudaraan

Semua hubungan kerja didasarkan pada sikap saling mencintai, menghormati, tolong menolong dan tenggang rasa terhadap sesama manusia. Selain itu, partisipasi aktif juga ditunjukkan dalam pembuatan keputusan (shura).

6. Deskripsi Model Penerapan Nilai Islam dalam Aktivitas Bisnis

Penerapan nilai Islam dalam aktivitas bisnis, memerlukan adanya internalisasi nilai Islam bagi setiap individu yang akan menerapkannya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari seorang individu diselimuti oleh ajaran-ajaran Islam, belum tentu seorang individu dapat melaksanakan ajaran tersebut. Untuk lebih memahami internalisasi nilai Islam dan penerapan nilai Islam dalam kegiatan bisnis, Tlais (2014) menggunakan dua pendekatan yaitu *self determination* dan *feminist*.

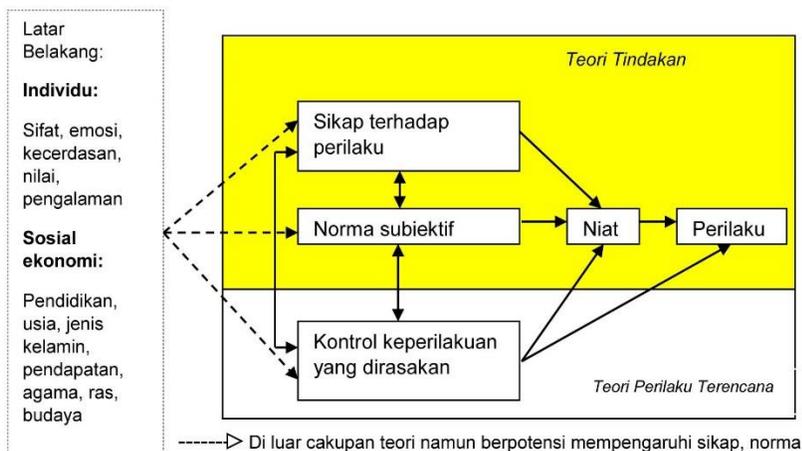
Pertama, pada pendekatan *self determination*, muslimah pengusaha mentransformasi, merasionalisasi dan menginternalisasi ajaran eksternal Islam yaitu mengenai etika bisnis yang mengajarkan kerja keras (*amal salih*) dan menunjukkan kualitas serta pengembangan (*itqan*) untuk diri mereka sendiri. Internalisasi mengarah pada integrasi nilai-nilai Islam dengan praktik kerja perempuan dan mendorong mereka untuk dapat berkontribusi lebih baik dalam hubungan sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Proses integrasi itu sendiri memungkinkan pengusaha perempuan untuk menginternalisasi, mengidentifikasi, kemudian mereka mempraktikkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti yang digambarkan dalam Alquran dan Hadits. Maka, penerapan etika bisnis Islam dapat memberikan tuntunan bagi muslimah pengusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat merealisasikan kesuksesan. Rasionalisasi juga membuka jalan bagi perempuan untuk memahami ajaran-ajaran Islam dan memproyeksikan dalam aktivitas wirausaha, ditengah hambatan budaya masyarakat patriarkal dan intepretasi yang konservatif tentang Islam.

Kedua, dengan pendekatan feminis, muslimah pengusaha berusaha menjauh dari interpretasi patriarki (*patriarchal interpretations*). Muslimah pengusaha menantang penjelasan yang bersifat makro dan konservatif dari teks-teks Islam, tetapi menekankan pada individualitas iman mereka. Dengan mencondongkan diri pada interpretasi feminis dari Alquran dan Hadits, dan dengan adanya pemisahan dari masyarakat yang kontemporer, muslimah pengusaha mendapatkan validasi untuk karir kewirausahaan mereka dan panduan mengenai etika bisnis Islam. Muslimah pengusaha memahami Nabi Muhammad sebagai *role model* serta prototipe untuk pembangunan moralitas yang baik.

Penerapan nilai Islam dalam aktivitas bisnis dalam studi ini merujuk pada teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Teori tersebut dingkapkan oleh Ajzen dan Fishben (2005), di mana teori perilaku yang memandang manusia sebagai pemroses informasi, sehingga perilaku berlandaskan pada kesadaran individu. Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*) dan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour/TPB*) termasuk model *prescriptive*, sementara model pengambilan keputusan individu termasuk model analitik. Model tersebut dapat secara lebih jelas dilihat pada gambar 3 di bawah.

Kedua model ini merupakan model perilaku manusia yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan pantas, yaitu mereka memanfaatkan informasi yang dimilikinya secara eksplisit maupun implisit dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam bertindak. Keduanya menyatakan bahwa: *pertama*, niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (perilaku) adalah penentu perilaku orang

tersebut. Seseorang diperkirakan akan bertindak atau berperilaku sesuai dengan niatnya. *Kedua*, niat dipengaruhi oleh sikap (yang ditentukan oleh keyakinan bersikap), norma subjektif (yang ditentukan oleh keyakinan normatif) dan kontrol berperilaku (yang ditentukan oleh keyakinan kontrol). *Ketiga*, bentuk keyakinan yang menentukan sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku merupakan fungsi dari latar belakang individu, yang meliputi kepribadian, faktor sosial ekonomi dan tingkat informasi yang dimiliki individu.



Sumber: Ajzen dan Fishbein (2005)

Gambar 14.3. Model Penerapan Nilai Islam dalam Aktivitas Bisnis Berdasarkan Teori Tindakan Beralasan dan Teori Perilaku Terencana

Nilai Islam yang dipahami oleh perempuan, akan berdampak pada perilakunya dalam menjalankan bisnis. Pemahaman tersebut juga dapat memberikan landasan bagi perempuan yang memiliki multi peran baik sebagai istri, ibu, pengusaha dan bagian dari masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan berperilaku konvensional dalam konteks menjalankan bisnisnya. Sedangkan nilai Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan, juga menetapkan beberapa pedoman yang harus dipenuhi oleh wirausaha perempuan. Ullah *et al.* (2013) mengungkapkan pedoman yang harus diikuti oleh wirausaha perempuan:

1. Perempuan harus mengambil persetujuan dari wali atau suaminya (jika menikah), yang mungkin menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana aktivitasnya dapat mempengaruhi keluarga dan fungsinya.
2. Seorang perempuan harus memastikan bahwa rumah dan anak-anaknya dirawat dengan baik. Suaminya mungkin membantu di bidang ini, atau bantuan dari luar dapat digunakan.

3. Perhatian harus diberikan untuk memilih bisnis yang sesuai dan sesuai dengan keahliannya. Jelas, setiap pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas terlarang, tidak akan diizinkan.
4. Setiap kegiatan yang mencegahnya memenuhi kewajiban syariahnya, (seperti hijab atau doa) bukanlah hal untuk dipertimbangkan.

D. Penutup

Penelitian terkait dengan wirausaha perempuan merupakan ranah gender, di mana peran perempuan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pada sektor domestik dan sektor publik. Peran nilai-nilai Islam pada muslimah pengusaha khususnya dapat memberikan pandangan dan melandasi perilaku pengusaha yang menekankan taqwa, ibadah, *trusteeship*, dan akhlak. Penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis membutuhkan transformasi, rasionalisasi dan internalisasi dari pengusaha. Selain itu, perilaku muslimah pengusaha berlandaskan pada niat dan kesadaran individu menjadi faktor penentu dalam mengambil tindakan. Pola perilaku pengusaha tersebut akan mempengaruhi individu dalam memaknai keberhasilan usaha. Secara konvensional, memaksimalkan *profit* secara ekonomi adalah tujuan utama dalam aktivitas bisnis. Namun, penerapan nilai-nilai Islam akan menghadirkan keseimbangan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan nilai Islam yang berlandaskan moralitas dan kesejahteraan jangka panjang (dunia dan akherat).

Adanya realitas sosial yang kompleks mengakibatkan muslimah pengusaha belum tentu dapat mengimplementasikan usaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka, penelitian mengenai perilaku perlu untuk dilakukan dan dapat memberikan manfaat, yaitu *pertama*, memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep ekonomi Islam, gender dan konsep entrepreneurship. *Kedua*, hasil dari hasil riset semacam ini memberikan kontribusi bagi muslimah pengusaha, setidaknya informasi yang terdokumentasi secara ilmiah sehingga bisa memberikan inspirasi untuk para pelaku bisnis.

REFERENSI

- Ahmad, Syed. Zamberi. (2011). Evidence of The Characteristics of Women Entrepreneurs in The Kingdom of Saudi Arabia: An Empirical Investigation, *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 3(2), 123-143.
- Ajzen, I dan Fishbein, M. (2005). The Influence of Attitudes on Behaviour. Dolores, A. Blair, T. J., dan Mark, P. Z. (Eds) *The Handbook of Attitude*. Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Akbar, M. (1993). Ideology, environment, and entrepreneurship: Typology from Islamic text and history. *Journal of Entrepreneurship*, 2(2), 135–154.
- Akehurst, Gary., Simarro, Enrique. dan Mas-Tur, Alicia. (2012). Women Entrepreneurship in Small Service Firms: Motivations, Barriers and Performance, *The Service Industries Journal*, 32(15), 2489-2505.
- Al-Dajani, H., dan Marlow, S. (2010). Impact of Women’s Home-Based Enterprise on Family Dynamics: Evidence from Jordan. *International Small Business Journal*, 28(5), 470–486.
- Ali, Abbas. J. dan Al-Owaihian, Abdullah. (2008). Islamic Work Ethic: A Critical Review. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 15(1), 5-19.
- Al-Sheha, Abdul-Rahman. (2001). *Women In Islam & Refutation of some Common Misconceptions*. Riyadh: Islam Land.
- Amott, Teresa L. dan Matthaei, Julie. (1991). Race, Gender, and Work: A *Multicultural Economic History of Women in the United States*. Boston: South End Press.
- Ananta, Aris. (1995). *Trasnisi Demografi, Transisi Penduduk dan Transisi Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan Indonesia BKKBN.
- Anggadwita, G., *et al.* (2015). Women Entrepreneurship in Islamic Perspective: Driver for Social Change. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(3), 389-404
- Becker, Gary. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*, 75(299), 493-517.
- Beekun, R. & Badawi, J. (2005). Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organization Stakeholders: The Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 60, 131–145.
- Blau, Francine. D. dan Ferber, Marianne. A. (1986). *The Economics of Women, Men, and Work*. Prentice-Hall. New Jersey
- Crosan, R. & Gneezy, U. (2009). Gender Differences in Preferences. *Journal of Economic Literature*, 47(2), 1–27

- Dana, L. P. (2009). Religion as An Exploratory Variable for Entrepreneurship. *Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 10(2), 87–99.
- Dechant, K. & Al-Lamky, A. (2005). Towards an Understanding of Arab Women Entrepreneurs in Bahrain and Oman. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 10(2), 123-140.
- Fatimah, H. *et al.* (2013). Rural Women Entrepreneurs in Malaysia: What Drives Their Success? *International Journal of Business and Management*, 9(4), 10–21.
- Forster, Gillian. (2014). *The Influence of Islamic Values on Management Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Geertz, C. (1983). Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Mahasin, A. (Eds). *The Religion of Java*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Global Entrepreneurship Monitor. (2017). *Women's Entrepreneurship 2016/2017 Report*. The Fenway Group: Boston. ISBN: 978-1-939242-09-9.
- Hoque, J., *et al.* (2013). Women Entrepreneurship Development Under Islamic Perspective: A Study on Some Selected Women Entrepreneurs of Bangladesh. *World Review of Business Research*, 4(3), 45-63.
- Jamali, D. (2009). Constraints and Opportunities Facing Women Entrepreneurs in Developing Countries: A Relational Perspective, *Gender in Management: An International Journal*, 24(4), 232-251.
- Kotey, B & Meredith, G.G. (1997). Relationships among Owner or Manager Personal Value, Business Strategies, and Enterprise-performance. *Jurnal of Small Business Management*, 35(2), 37-64.
- Langowitz, N. dan Minniti, M. (2007). The Entrepreneurial Propensity of Women. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 31(3), 341-364.
- Marlow, S. (2002). Women and self-employment: a part of or apart from theoretical construct?, *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 3(2), 83-91.
- Mat, A.B.C & Mansor, N.B. (2010). The Significance of Psychology and Environment Dimensions for Malaysian Muslim Women Entrepreneurships Venturing. *International Journal of Human Sciences*, 7(1), 253-269.
- McKay, Ruth. (2001). Women Entrepreneurs: Moving Beyond Family and Flexibility. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 7(4), 148-165.
- Mosse, J. C. (1993). *Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfam.
- Naidoo, K. & Patel, F. (2009). *Working Woman: Stories of Strife, Struggle, and Survival*. India: Sage Publications, 25-36.

- Naser, K. *et al.* (2009). Factors that Affect Women Entrepreneurs: Evidence from An Emerging Economy. *International Journal of Organizational Analysis*, 17(3), 225- 247.
- Nilufer, A. (2001). *Jobs, Gender and Small Enterprises in Bangladesh: Factors Affecting Women Entrepreneurs in Small and Cottage Industries in Bangladesh*. SEED Working Paper No. 14, International Labor Office: Geneva.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roomi, M. A. (2013). Entrepreneurial capital, social values and Islamic traditions: Exploring the growth of women-owned enterprises in Pakistan. *International Small Business Journal*, 31(2), 175–191.
- Roomi, M. A., & Parrott, G. (2008). Barriers to Development and Progression of Women Entrepreneurs in Pakistan. *Journal Entrepreneurship*, 17(1), 59-72.
- Sasongko, S. S. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKKbN.
- Shelton, Lois M. (2006). Female Entrepreneurs, Work–Family Conflict, and Venture Performance: New Insights into the Work–Family Interface. *Journal of Small Business Management*, 44(2), 285–297
- Sobary, M. (2007). *Kesalehan sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Syed, J. (2009). Reconstruction of Gender in Islamic Thought: Iqbal's Vision of Equal Opportunity. *Women's Studies International Forum*, 32, 435–444.
- Tambunan, T. (2009). Woman entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constrains. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 1(2), 27-40.
- Tlais, H. A. (2014). How Islamic Business Ethics Impact Women Entrepreneurs: Insights from Four Arab Middle Eastern Countries. *Journal of Business Ethics*, 129(4), 859-877.
- Ullah, M., *et al.* (2013). Women Entrepreneurship: Islamic Perspective. *European Journal of Business and Management*. 5(11).
- Weber, Max. (1930). *The Protestant Work Ethic and the Spirit Capitalism*. In P. Baehr and G.C. Wellis (Eds). London: Penguin Books, p.122.
- Wimalasari, P., & Abdul. (1996). An Empirical Study of Moral Reasoning Among Managers in Singapore. *Journal of Business Ethics*. 15, 1331-1341.
- World Development Report. 2012. *Gender Equality and Development*. The World Bank: Washington, DC.
- Yu, E. 2011. Are Women Entrepreneurs More Likely to Share Power Than Men?. *International Journal of Business and Management*, 6(4), 111-119.

BAB XV

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI FASILITAS AKSES KREDIT DAN PENDAMPINGAN USAHA

**Tri Mulyaningsih
Fatimah**

A. Pendahuluan

Usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Pada masa krisis tahun 1997/ 1998, UMK merupakan kelompok usaha yang dapat bertahan dan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia (Hamzani & Achmad, 2016). Salah satu alasan UMK dapat bertahan terhadap krisis karena sebagian besar UMK memproduksi produk yang inelastis seperti bahan pangan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari (Pusat Kebijakan Risiko Fiskal, 2012). Produk-produk tersebut memiliki permintaan yang stabil walaupun tingkat pendapatan masyarakat fluktuatif. Selain dapat bertahan dalam menghadapi krisis, kelompok usaha ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011-2013 kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap PDB Indonesia sekitar 40 persen pertahun. Selain berkontribusi terhadap PDB, usaha ini juga merupakan usaha mayoritas di Indonesia, karena lebih dari 90 persen usaha di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil. UMK juga merupakan salah satu usaha yang menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. UMK di Indonesia menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia.

Walaupun UMK memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kelompok usaha ini dinilai masih memiliki beberapa kekurangan dan hambatan dalam mengembangkan usahanya (Ibrahim & Verliyantina, 2012). UMK menghadapi keterbatasan akses kredit untuk menambah modal dan kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga menghambat proses produksi dan pemasaran produk (Tambunan, 2002). Keterbatasan modal semakin diperburuk dengan keterbatasan akses pengusaha terhadap lembaga keuangan (Shaban et al, 2014). Untuk mengatasi permasalahan modal dan akses lembaga keuangan, UMK memerlukan peran serta lembaga terkait seperti pemerintah maupun lembaga keuangan.

Tabel 15.1
Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2013

Kontribusi	2011		2012		2013	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Jumlah Usaha	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99
	Miliar	%	Miliar	%	Miliar	%
Produk Domestik Bruto	1.022.457,6	43,01	1.085.086,2	42,97	1.150.383,69	43,08
	Pekerja	%	Pekerja	%	Pekerja	%
Penyerapan Tenaga Kerja	98.877.789	94,52	104.395.487	94,21	110.194.697	93,63

Sumber: Kemenkop dan UKM, 2018

Peran pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengambil peran dalam menumbuhkan iklim usaha, mengembangkan usaha, menyediakan akses pembiayaan dan menjalin kemitraan. Dalam meningkatkan kemampuan usaha dan perlindungan terhadap UMK, pemerintah telah memetakan kebijakan terkait pembentukan usaha, pendanaan dan pengembangan usaha.

Artikel ini memfokuskan pada deskripsi fasilitasi akses kredit dan pendampingan baik pendampingan usaha yang diberikan oleh pemerintah

Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Deskripsi akses dan fasilitas adalah penting mengingat pelaku usaha mikro dan kecil maupun menengah membutuhkan sosialisasi informasi tersebut. Beberapa pihak mengeluhkan rendahnya sosialisasi informasi terkait akses dan pendampingan dan hal tersebut berpotensi mengurangi efektivitas implementasi program. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa contoh pendampingan dan fasilitasi di negara-negara lain sebagai inspirasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program.

B. Permasalahan yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil

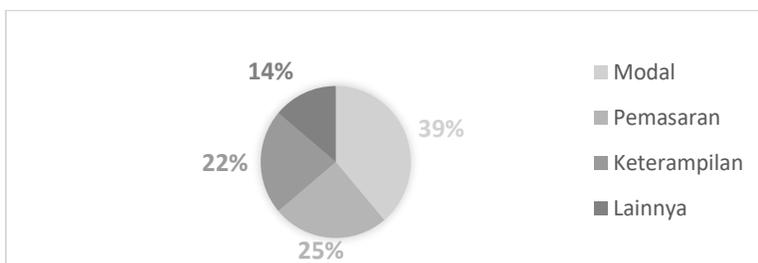
Usaha mikro dan kecil (UMK) pada umumnya berskala kecil baik dalam hal permodalan, jumlah aset maupun nilai omset (penjualan). Menurut definisi usaha mikro dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), skala usaha mikro adalah yang paling kecil dengan nilai aset maksimal 50 Juta Rupiah dan omset mencapai 300 Juta dalam setahun. Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro yaitu nilai aset antara 50 sampai 500 Juta Rupiah dan omset setahun mencapai 2,5 Miliar Rupiah. Skala usaha yang kecil juga ditunjukkan oleh rendahnya jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan pada unit usaha tersebut. Usaha mikro pada umumnya mempekerjakan 1 hingga 5 orang tenaga kerja sedangkan usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja sampai 19 orang (Badan Pusat Statistik).

Skala usaha yang kecil mempersulit usaha kecil dan mikro untuk mencapai skala ekonomi dalam memproduksi barang maupun jasa. Dengan demikian, pada umumnya struktur biaya UMK lebih tinggi dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Struktur biaya yang tinggi artinya biaya untuk menghasilkan per unit barang adalah lebih tinggi dibandingkan unit usaha yang mampu mencapai skala ekonomi. Struktur biaya tersebut mempersulit usaha mikro dan kecil untuk bersaing dengan usaha skala menengah dan besar karena struktur harga cenderung lebih tinggi.

Skala usaha yang kecil juga lekat dengan persepsi tingkat risiko usaha yang tinggi. Hal ini menyulitkan usaha mikro dan kecil untuk memperoleh akses kredit melalui lembaga keuangan perbankan. Pusat Kebijakan Risiko Fiskal pada tahun 2012 melaporkan bahwa UMK harus membayar biaya premi atas penjaminan pinjaman yang persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan usaha berskala besar. *Risk premium* yang dikenakan pada usaha kecil adalah lebih tinggi sebagai biaya penjaminan atas pinjaman yang dinilai berisiko oleh perbankan. *Risk premium* untuk usaha mikro adalah 3,1 persen; untuk usaha kecil adalah 2,6 persen. Unit

usaha dengan skala menengah hanya membayar premi yang lebih rendah atas pinjaman yang dilakukan pada perbankan yaitu 1,8 persen (Pusat Kebijakan Risiko Fiskal, 2012). Tingginya premi risiko yang harus dikeluarkan oleh usaha mikro dan kecil menambah berat beban struktur biaya usaha mikro dan kecil sehingga mengurangi daya saing usaha kecil.

Selain profil premi risiko yang tinggi, usaha mikro dan kecil juga dipandang tidak *bankable* oleh lembaga keuangan karena pengelolaan usaha yang belum profesional. Banyak usaha mikro dan kecil yang belum berbadan hukum, tidak melakukan pencatatan keuangan yang baik dan memenuhi standar akuntansi serta tidak memiliki agunan yang memadai. Hal-hal tersebut semakin mempersulit akses usaha mikro dan kecil pada kredit dari lembaga keuangan. Kesulitan akses usaha kecil pada kredit lembaga keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia. Studi yang dilakukan Harvard Business School pada usaha mikro dan kecil di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa akses kredit dari lembaga keuangan sangat terbatas (Mills, 2014). Di lain pihak, lembaga keuangan merupakan sumber utama dana segar untuk usaha mikro dan kecil karena akses untuk menerbitkan obligasi di pasar keuangan maupun menerbitkan saham di pasar modal lebih terbatas. Studi yang dilakukan oleh Tambunan (2002) dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menemukan adalah permasalahan akses kredit cukup tinggi dan bahwa survei BPS menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kendala yang paling utama. Sekitar 39 persen usaha mikro dan kecil mengemukakan bahwa akses kredit yang sulit telah berdampak pada ketidakmampuan memperoleh sumber permodalan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015

Gambar 15.1
Permasalahan UMK

Selain masalah akses pada kredit, masalah yang sering dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil adalah pemasaran produknya. Survei BPS (2015) menemukan bahwa 25 persen pengusaha usaha mikro dan kecil mengalami kendala memasarkan produk yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh Tambunan (2002) juga menunjukkan bahwa memasarkan

produk adalah masalah pelik yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Usaha berskala kecil pada umumnya tidak memiliki pengetahuan strategi pemasaran yang efektif, bagaimana berinteraksi dengan calon konsumen dan konsumen, maupun upaya promosi yang dapat meningkatkan pemasaran produknya (Seo et al., 2014). Pada umumnya literatur menggunakan istilah gap pengetahuan (*knowledge gap*) untuk menggambarkan kendala kebutaan atau terbatasnya pengetahuan tentang pemasaran produk pada usaha kecil.

Permasalahan internal berikutnya yang dihadapi usaha berskala kecil adalah rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (Tambunan, 2002; BPS, 2015). Survei BPS yang dipublikasikan dalam Analisis Ketenagakerjaan Usaha Mikro Kecil (BPS, 2016) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor tersebut adalah rendah. Pekerja berpendidikan rendah memilih untuk bekerja di UMK karena kebutuhan pada keahlian relatif tidak diperlukan sehingga memudahkan calon pekerja memperoleh pekerjaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditambah dengan penggunaan alat dan teknologi sederhana merupakan sumber inefisiensi usaha mikro kecil. Dengan sistem produksi yang sederhana, UMK mengalami keterbatasan untuk memproduksi dalam jumlah besar dan kualitas yang memenuhi standar yang ditentukan.

Berdasarkan informasi hal-hal yang menjadi permasalahan pada UMK maka pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong kinerja UMK. Terkait dengan akses pada permodalan, pemerintah telah memberikan fasilitas kredit bersubsidi seperti KUR yang memberikan kemudahan pada UMK terutama terkait ketidakmampuan memenuhi persyaratan agunan seperti yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan komersial. Jaminan pada resiko penyaluran KUR juga telah diminimalisir dengan mendirikan lembaga penjamin kredit di tingkat nasional dan daerah. Terkait dengan permasalahan akses pemasaran dan keterampilan, pemerintah di pusat dan daerah mendirikan lembaga pendampingan yaitu Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Berikut akan dijabarkan fasilitas-fasilitas pendampingan yang disediakan oleh pemerintah untuk UMK.

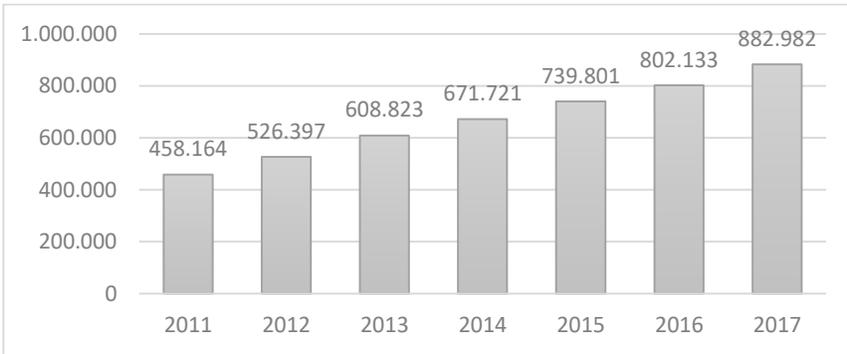
1. Fasilitas Akses Kredit untuk Usaha Mikro Kecil (UMK)

Kebijakan pengembangan usaha kecil mikro di Indonesia memprioritaskan kemudahan akses kredit bagi UMK. Usaha mikro, kecil (menengah) UMK(M) memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah dengan perlakuan khusus. Sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, pemerintah telah menyalurkan beberapa jenis kredit untuk membantu UMKM (Ika et al., 2016). Beberapa jenis kredit tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan

Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

KUT merupakan kredit untuk petani yang diberikan pemerintah melalui bank pelaksana seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada petani melalui kelompok tani atau koperasi dengan segala resiko kegagalan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam perkembangannya, KUT digantikan dengan KKP-E di mana penyaluran dan kepemilikan dana sepenuhnya milik perbankan dan pemerintah hanya memberikan subsidi pada bunga bank. Dengan demikian, resiko kredit dalam format KKP-E diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank.

KUR merupakan kredit atau pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitur yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan kriteria tertentu. KUR dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur dengan status individu, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang dimiliki belum cukup untuk melakukan kredit (kur.ekon.go.id). Melalui KUR diharapkan pelaku usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan untuk mengakses kredit di lembaga keuangan dapat mengakses kredit KUR. Dalam perkembangannya tahun 2018, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 pemerintah menerbitkan dua skema KUR baru. Skema KUR tersebut adalah skema KUR untuk usaha pemula dan skema KUR Multisektor yang ditujukan pada kelompok usaha yang dikelola bersama dalam bentuk klaster. Kredit yang disalurkan kepada UMK(M) dapat diperuntukkan untuk modal kerja dan investasi. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 pemanfaatan kredit bersubsidi KUR digunakan terutama untuk menambah modal kerja sebesar 659 Miliar atau mencapai 75 persen total penyaluran KUR dan investasi sebesar 220 Miliar.

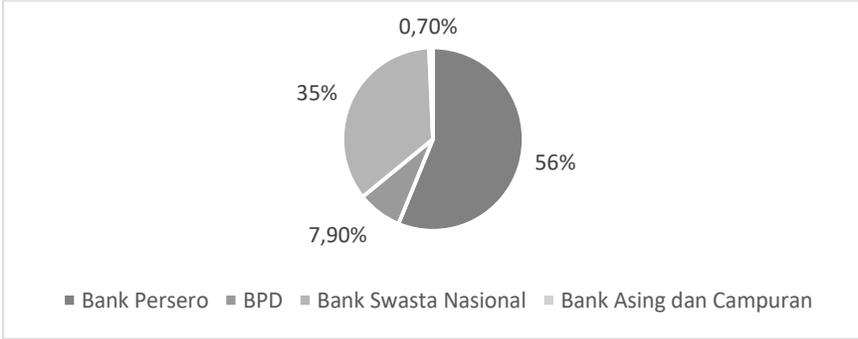


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018

Gambar 15.2
Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaannya (Juta Rupiah)

Nilai kredit yang dapat diakses oleh UMK bervariasi sesuai dengan jenis kredit yang akan diajukan. Jenis yang pertama adalah KUR mikro dengan plafon kredit 20 Juta Rupiah dan suku bunga yang harus dibayarkan adalah 22 persen per tahun. Skema KUR yang kedua adalah KUR Ritel dengan nilai pinjaman antara 20 Juta sampai 500 Juta dan dikenakan suku bunga pinjaman sebesar 13 persen. Jenis ketiga adalah KUR *Linkage* yang memberikan akses kredit dengan nilai yang lebih besar yaitu mencapai 2 Miliar Rupiah. Skema KUR *Linkage* pada umumnya menggunakan lembaga lain seperti koperasi, BPR atau lembaga keuangan non-bank untuk menyalurkan pinjaman KUR dari bank pelaksana (Ika et al., 2016).

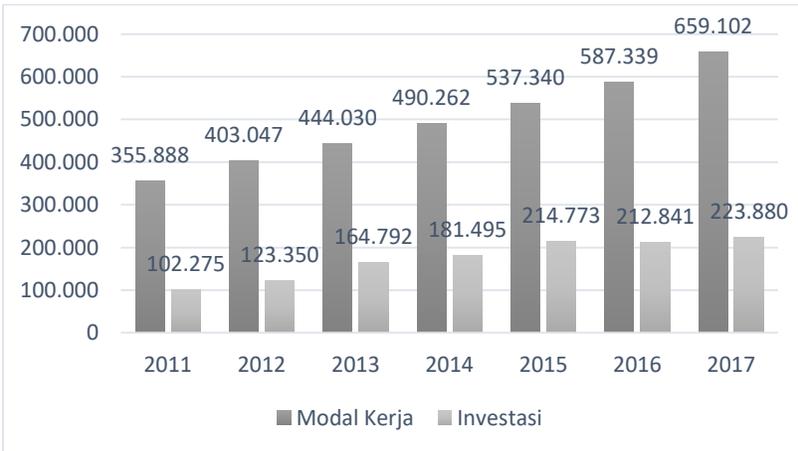
Pada tahun 2011 Baki Debet KUR di Indonesia mencapai lebih dari Rp 400 Miliar Rupiah, di mana penyaluran KUR tertinggi tercatat di provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai 17 persen dari total kredit yang disalurkan. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 penyaluran kredit KUR di Indonesia mencapai Rp 800 Miliar Rupiah. Walaupun program KUR ini sempat dihentikan pada awal tahun 2015 karena sudah hampir melampaui target, program ini kembali efektif pada September 2015 dan terus berjalan hingga sekarang.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018

Gambar 15.3
Perkembangan Kredit UMKM (Juta Rupiah)

Penyaluran kredit bersubsidi seperti KUR sangat bergantung pada dukungan beberapa lembaga di luar pemerintah. Lembaga pertama adalah industri perbankan sebagai penyalur kredit. Kegiatan penyaluran kredit merupakan bidang usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pemerintah dengan usaha mikro kecil. Pemerintah dalam hal ini adalah pemilik dana dan usaha mikro kecil adalah calon debitur. Sejak awal penyaluran kredit bersubsidi, perbankan sudah dilibatkan dalam proses penyaluran kredit. Bank persero (Bank milik pemerintah) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank utama penyalur kredit bersubsidi. Kontribusi bank persero dalam penyaluran kredit bersubsidi mencapai lebih dari separuh (56 persen) dan disusul oleh bank swasta nasional sebesar 35 persen.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018

Gambar 15.4
Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank Tahun 2017

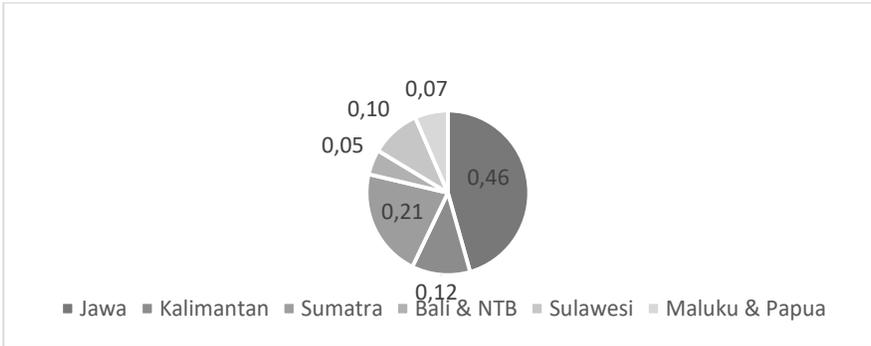
Perbankan memiliki kapasitas dalam *screening* debitur dan menentukan profil risiko debitur. Pada awal penyaluran KUR, bank tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menyalurkan kredit tetapi juga menanggung risiko kegagalan kredit. Kredit bersubsidi memiliki risiko kegagalan pengembalian kredit yang cukup besar karena UMK memiliki profil risiko yang tinggi. Profil risiko kredit semakin tinggi karena UMK tidak memiliki agunan (*collateral*) yang memadai untuk menanggung kerugian apabila kredit menjadi macet. Untuk memberikan akses kredit pada usaha UMK yang tidak memiliki agunan yang memadai dan untuk menekan risiko kegagalan penyaluran kredit bersubsidi, pemerintah melaksanakan program penjamin kredit. Program tersebut memberikan jaminan kepada bank atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi pinjaman non tunai (*non cash loan*) yang diberikan oleh bank dengan sistem *Three-Party* (Ika et al., 2016). Sistem ini melibatkan bank, debitur (UMK) dan lembaga penjamin kredit. Penjaminan dilakukan melalui *Indemnity Agreement* yang merupakan bentuk *Recourse Agreement* kepada debitur bahwa pihak asuransi telah membayar klaim kepada bank, sehingga debitur berkewajiban mengembalikan kepada asuransi senilai klaim yang telah dibayarkan.

Lembaga penjamin simpanan berfungsi untuk memberikan kepastian kepada perbankan sebagai penyalur kredit untuk menanggung kerugian yang muncul apabila pengembalian kredit mengalami masalah. Dengan demikian, risiko kegagalan kredit akan dipindahkan dari pihak bank kepada lembaga penjamin kredit. Lembaga penjamin kredit dibentuk oleh pemerintah dengan skema *unfunded model* di mana biaya penjaminan berasal dari pemerintah. Lembaga penjamin kredit di tingkat nasional adalah JAMKRINDO yang awalnya adalah Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 1970 berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1981. Lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) dan berfungsi untuk memberikan kredit langsung kepada koperasi dengan sistem bagi hasil serta menjamin kredit koperasi (www.jamkrindo.co.id).

Peran PKK diperluas tidak hanya sebatas mengembangkan koperasi di Indonesia tetapi kemudian dilibatkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Lembaga tersebut berganti nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU) melalui PP Nomor 95 Tahun 2000. Pada tahun 2008 pemerintah mengubah fungsi Perum SPU ini dari memberikan kredit langsung dan menjamin kredit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Dengan demikian, melalui PP Nomor 41 Tahun 2008 Perum SPU berganti nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (www.jamkrindo.co.id).

Dalam perkembangannya sampai saat ini terdapat 56 cabang Jamkrindo di seluruh Indonesia. Pentingnya keberadaan lembaga penjamin kredit juga dirasakan di daerah sehingga sudah dibentuk beberapa lembaga penjamin kredit pada tingkat provinsi, yaitu Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Jamkrida merupakan badan usaha perseroan terbatas yang dimiliki pemerintah provinsi yang berperan dalam menjamin kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (www.jamkrida-jakarta.co.id). Sebagai lembaga pemerintah yang menunjang program pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, lembaga ini memberikan penjaminan kredit pada pinjaman usaha tersebut baik pada lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan

Selain Jamkrindo di Indonesia juga terdapat lembaga Askrindo yang berperan dalam menjamin kredit UMKM. Lembaga tersebut didirikan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1971 untuk memberdayakan UMKM di Indonesia dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia (Ika et al., 2016). Askrindo memiliki peran dan fungsi sebagai *Collateral Subtitution Institution*, yaitu lembaga yang menjadi jembatan antara UMKM yang layak dibiayai namun tidak memiliki agunan yang cukup kepada lembaga bank maupun non-bank (askrindo.co.id).



Sumber: askrindo.co.id (2018)

Gambar 15.5
Persebaran Askrindo

Di samping pencapaian penyaluran KUR yang cukup baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan KUR. Data BPS menunjukkan bahwa 80 persen usaha mikro dan kecil di Indonesia masih belum memperoleh akses pinjaman kredit. Menurut data Bank Sentral Republik Indonesia terdapat lima permasalahan penyaluran KUR, yaitu (i) kurangnya sosialisasi kepada pengusaha UMKM terutama yang berada di daerah terpencil, (ii) suku bunga KUR yang dinilai pengusaha masih terlalu tinggi, (iii) keterlambatan pembayaran klaim kredit dari pemerintah,

sehingga menghambat lembaga penyalur kredit dalam menjalankan fungsinya, (iv) kesulitan dalam mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan serta (v) terdapat beberapa dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.

Tingginya tingkat bunga yang dikenakan bagi kredit untuk UMK juga dikemukakan oleh Rosengard (2011). UMK di Indonesia mengalami credit crunch di mana perbankan tidak responsif atas meningkatnya permintaan kredit terutama dari usaha mikro dan kecil. Rosengard (2011) mengemukakan bahwa perilaku perbankan di Indonesia terutama adalah mengejar kepentingan jangka pendek. Selain itu, kebijakan pengawasan perbankan mendorong bank untuk memprioritaskan pencapaian kinerja stabilitas sehingga mengorbankan aspek efisiensi usaha. Studi yang dilakukan Mulyaningsih (2014) juga menunjukkan bahwa persaingan di industri perbankan di Indonesia cenderung tidak kompetitif pada tahun 2000-an dibandingkan periode sebelumnya. Perbankan di Indonesia didominasi oleh beberapa bank besar sehingga struktur pasarnya cenderung oligopoli. Struktur pasar yang tidak kompetitif menyebabkan suku bunga kredit menjadi tinggi.

C. Pendampingan Usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan pemetaan masalah yang dihadapi UMK, permasalahan internal baik yang bersifat primer maupun sekunder merupakan masalah pelik yang dihadapi UMK di Indonesia. Aspek primer dalam pengelolaan bisnis berkaitan dengan bidang utama bisnisnya dalam memproduksi barang dan jasa untuk pasar. Aspek primer di antaranya adalah aspek pengelolaan keuangan, pemasaran, pencatatan keuangan (akuntansi), tata kelola dan rekrutment tenaga kerja hingga aktivitas pemetaan pesaing. Aspek sekunder merupakan aspek pendukung operasional perusahaan seperti pengembangan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun strategi dan usaha untuk menjangkau pasar internasional.

Usaha mikro dan kecil pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan dalam aspek primer maupun sekunder dalam pengelolaan bisnisnya. Pendampingan dari pihak eksternal sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan UMK. Kegiatan pendampingan terutama diberikan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaku UMK terkait aspek pengelolaan bisnis primer dan sekunder. Artikel yang ditulis oleh Seo et al. (2014) menemukan bahwa pendampingan yang tepat memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan usaha UMK. Pendampingan dalam aspek pemasaran misalnya mampu meningkatkan volume penjualan, memperluas jenis produk yang diproduksi, memperluas jangkauan pemasaran secara geografis maupun meningkatkan kinerja

usaha secara umum. UMK juga dibekali pengetahuan untuk melakukan pemasaran yang efektif dalam menjangkau konsumen dengan mengembangkan interaksi langsung dengan konsumen. Selain itu, UMK membutuhkan pendampingan untuk menyusun strategi promosi yang tepat untuk mempromosikan produknya.

Hasil penelitian Seo et al., (2014) juga menemukan bahwa penyusunan desain kegiatan pendampingan harus menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan UMK yang didampingi. Lebih lanjut, Seo et al., (2014) menjelaskan bahwa usaha UMK yang memiliki kinerja keuangan yang rendah misalnya jumlah omset, aset dan keuntungan yang rendah lebih membutuhkan pendampingan pada aspek pengelolaan bisnis primer. Dalam kaitannya dengan UMK yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan di atas rata-rata maka jenis pendampingan yang dibutuhkan adalah pendampingan pada aspek sekunder.

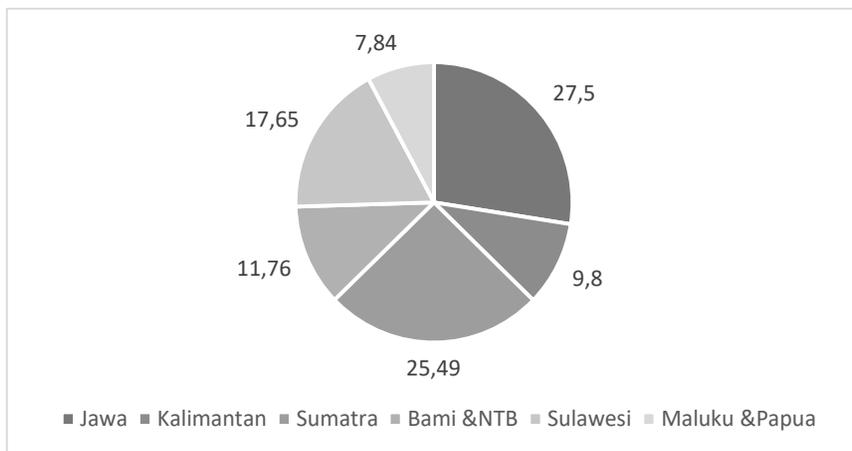
Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha mikro dan kecil, pemerintah membentuk lembaga penyedia layanan usaha pada tingkat provinsi. Lembaga pendamping tersebut adalah Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang beroperasi pada level provinsi serta didukung oleh unit-unit PLUT yang berbasis regional atau merupakan gabungan dari beberapa kabupaten/ kota. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menyediakan jasa layanan pendampingan bagi peningkatan kinerja usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan potensi unggulan daerah (Tamba, 2017).

Jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini berbeda-beda di setiap provinsinya. Secara umum, terdapat tujuh pelayanan pokok yang dilakukan oleh lembaga ini, yaitu (i) bidang kelembagaan; (ii) bidang Sumber Daya Manusia; (iii) bidang pembiayaan; (iv) bidang produksi; (v) bidang pemasaran; (vi) pengembangan teknologi informatika dan (vii) bidang pengembangan jaringan kerjasama (Tamba, 2017). Setiap lembaga baik di provinsi maupun kabupaten/ kota mengembangkan ketujuh layanan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah mereka.

Secara struktur kelembagaan dan fungsinya lembaga ini dapat dikategorikan dalam tiga struktur, yaitu (i) PLUT nasional, (ii) PLUT provinsi dan (iii) PLUT regional. Lembaga pada tingkat nasional dikelola oleh kementerian koperasi dan UMKM. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan koordinasi lembaga secara nasional, pembinaan, pengawasan pelayanan standar minimal (SPM) serta fasilitasi jaringan PLUT.

Lembaga PLUT pada tingkat provinsi dikelola oleh SKPD provinsi yang menaungi KUMKM. Lembaga pada tingkat ini memiliki fungsi di antaranya menyediakan layanan usaha terpadu bagi usaha di daerahnya, mengembangkan jaringan dengan mitra terkait pemberdayaan usaha dan

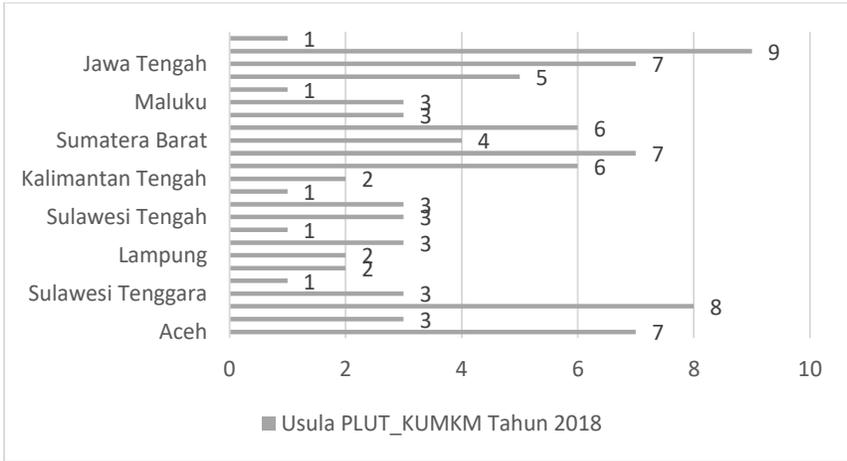
pendampingan dan pengawasan unit lembaga regional. Lembaga pada unit regional juga dikelola oleh SKPD provinsi yang menaungi KUMKM. Lembaga pada unit regional memiliki fungsi yang sama dengan lembaga pada unit provinsi. Dalam perkembangannya pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 51 cabang PLUT baik di tingkata provinsi maupun kabupaten/kota. Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah yang memiliki jumlah PLUT terbanyak di Indonesia. Adapun provinsi yang memiliki jumlah PLUT terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu masing-masing 4 PLUT.



Sumber: Tamba, 2017

Gambar 15.6
Persebaran PLUT di Indonesia (persen)

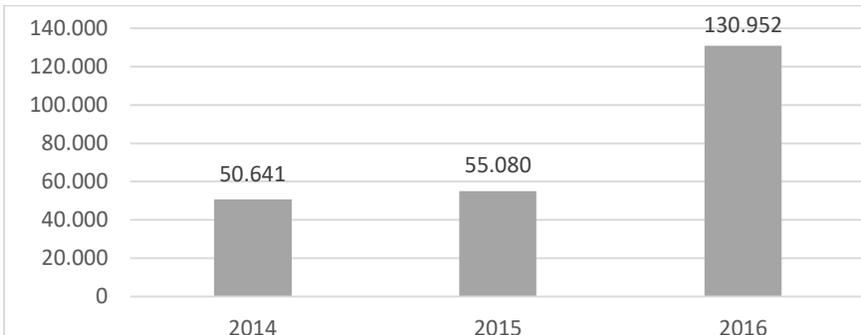
Pada tahun 2018 terdapat 89 pemerintah daerah di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLUT di daerah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap PLUT sebagai salah satu lembaga pemberdayaan UMKMK yang berpengaruh dalam menunjang kinerja UMKM di daerah mereka. Daerah yang paling banyak mengusulkan pembangunan PLUT adalah Sulawesi Selatan yang merupakan penghasil pangan terbesar dan memiliki potensi pertambangan dan pariwisata yang sangat besar terutama di Indonesia timur (www.bi.go.id).



Sumber: Tamba, 2017

Gambar 15.7
 Usulan PLUT_KUMKM Tahun 2018

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kinerja lembaga PLUT dinilai dari jumlah usaha yang dibina. Sejak disahkan pertama kali pada tahun 2013, unit usaha yang didampingi oleh PLUT mengalami peningkatan. Tahun 2014, jumlah unit usaha yang dibina adalah 50.641 unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2015 unit usaha yang didampingi PLUT mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pesat dalam jumlah KMUM yang didampingi oleh PLUT, yaitu naik sebesar 57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa KUMKM di Indoensia memiliki kepercayaan pada lembaga ini, sehingga diharapkan PLUT akan terus memberikan pelayana yang semakin baik. Sehingga jumlah KUMKM yang dibina oleh PLUT akan terus bertambah.



Sumber: Tamba, 2017

Gambar 15.8
 Kinerja PLUT (Jumlah UMKM yang didampingi)

D. Penutup

Data menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dalam menjalankan usahanya UMK memiliki banyak hambatan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi UMK meliputi aspek pengelolaan bisnis primer dan sekunder serta keterbatasan akses kredit. Terbatasnya akses pada kredit disebabkan oleh pengelolaan bisnis yang belum profesional dan memenuhi standar maupun ketidakmampuan menyediakan agunan yang memadai sebagai syarat pengajuan kredit. Selain itu, perbankan menilai kredit pada UMK memiliki risiko macet yang lebih tinggi sehingga UMK harus membayar premi risiko yang lebih tinggi dibandingkan usaha menengah dan besar.

Untuk mendorong perkembangan UMK terutama kaitannya dengan mempermudah akses kredit, pemerintah mengucurkan berbagai fasilitas kredit bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga mendirikan lembaga penjamin kredit untuk memfasilitasi perbankan dalam menyalurkan kredit pada UMK. Lembaga penjamin tersebut berfungsi untuk mengatasi ketiadaan agunan sebagai syarat pengajuan kredit kepada perbankan. Dengan adanya jaminan yang diberikan pemerintah maka risiko kerugian dipindahkan dari pihak bank kepada lembaga penjamin.

Keberadaan kredit bersubsidi maupun lembaga penjamin kredit telah berkontribusi pada peningkatan akses kredit untuk UMK. Akan tetapi, kebutuhan kredit UMK masih jauh lebih besar daripada kredit yang sudah disalurkan. Selain itu, penyaluran kredit juga masih terkendala beberapa hal seperti rendahnya sosialisasi terkait fasilitas kredit dan penjamin kredit, proses yang rumit maupun suku bunga yang tinggi.

Selain kemudahan akses kredit, UMK membutuhkan pendampingan dari pihak eksternal untuk mengurangi *knowledge gap* pengelolaan bisnis yang baik. Keberadaan lembaga pendamping Penyedia Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pada level provinsi maupun kabupaten/ kota diharapkan mampu meningkatkan kapasitas UMK dalam mengelola bisnisnya. Sejauh ini, PLUT berfungsi untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, akses pada pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, mencari akses dan memperluas pemasaran, pemanfaatan teknologi informasi maupun pengembangan jaringan kerjasama (Tamba, 2017). Jumlah PLUT yang terus meningkat di daerah-daerah di Indonesia menunjukkan kebutuhan lembaga pendamping yang sangat besar bagi perkembangan UMK di Indonesia. Akan tetapi, studi lebih lanjut dibutuhkan untuk mengkaji efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kinerja UMK di Indonesia.

REFERENSI

- Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). (2018). Sejarah Askrindo. Retrieved from www.askrindo.co.id
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Profil Industri Kecil Mikro*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Sentral Republik Indonesia. (n.d.). Skim Kredit UMKM. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx>
- Hamzani, U., & Achmad, D. (2016). The Performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): Indigenous Ethnic Versus Non-Indigenous Ethnic. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 265–271. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.015>
- Ibrahim, N., & Verliyantina. (2012). The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based Platform. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 390–397. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00353-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00353-X)
- Ika, S., R.Nurhidayat, & Mutaqin. (2016). *Kredit Usaha Rakyat (Kur): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*.
- Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 3–12. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00315-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00315-2)
- Mulyaningsih, T. (2014). Banking Competition and Its Relationship with Banking Stability: Evidence from Indonesia 1980-2010. Thesis unpublished. University of Canberra
- Pusat Kebijakan Risiko Fiskal. (2012). Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha.
- Shaban, M., Duygun, M., Anwar, M., & Akbar, B. (2014). Diversification and banks’ willingness to lend to small businesses: Evidence from Islamic and conventional banks in Indonesia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, S39–S55. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.021>
- Seo, J.H., Perry, V.G., Tomczyk, D., Solomon, G.T. (2014). Who benefits most? The effects of managerial assistance on high- versus low-performing small businesses. *Journal of Business Research*, 67: 2845-2852.

- Rosengard, J.K. (2011). If the Banks Are Doing So Well, Why Can't I Get A Loan? Regulatory Constraints to Financial Inclusion in Indonesia. *Asian Economic Policy Review*. 6(2): 273-296
- Tamba, H. (2017). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui PLUT_KUMK. Indonesia, kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik.
- Tambunan, T. T. H. (2002). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.

BAB XVI

ANALISIS PENGARUH PDRB DAN UMK TERHADAP PENGANGGURAN PADA 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016

**Wahyu Prasetyo Widodo
Malik Cahyadin**

A. Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu indikator makroekonomi. Beberapa faktor yang menjadi penentu pengangguran telah diteliti oleh Pitartono (2012), Hedayat, Kahn dan Hanafi (2013), Aurangzeb dan Asif (2013), Aruan dan Sriyono (2014), Yanti (2014), Fatimah, Masbar, dan Syahnur (2015), Setyawan (2016), Nugroho (2016), Firdhania dan Muslihatinningsih (2017), Poyoh, Kapantow dan Mandei (2017), Ningtias dan Rahayu (2017), Puspadjuita (2018). Beberapa variabel yang diduga mempengaruhi pengangguran adalah PDB/PDRB/pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, jumlah penduduk, angkatan kerja, nilai tukar, investasi, kemiskinan, IPM, urbanisasi, dan industrialisasi.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun. Kabupaten dengan jumlah pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Cilacap sebesar 89.175 jiwa tahun 2010. Sementara itu, pada tahun 2015 jumlah pengangguran terendah yaitu Kabupaten Temanggung sebesar 6.459 jiwa. Selain itu, pada tahun 2010 Kota Semarang merupakan kota dengan jumlah pengangguran tertinggi sebesar 83.963 jiwa. Pada tahun 2015 Kota Magelang adalah kota dengan jumlah pengangguran terendah sebesar 3.927 jiwa.

BPS Provinsi Jawa Tengah juga mempublikasikan bahwa selama periode 2010-2016 nilai tertinggi PDRB yaitu Kota Semarang sebesar Rp 145.993,68 juta pada tahun 2016. Sementara itu, nilai terendah PDRB adalah Kota Magelang sebesar Rp 4.010,72 juta pada tahun 2010.

Perkembangan UMK (upah minimum kabupaten/kota) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa UMK tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp 1.909.000 per bulan pada tahun 2016. Sementara itu, UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 662.000 per bulan pada tahun 2010.

Studi empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran, perkembangan data pengangguran, data PDRB, dan data UMK menjadi rujukan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh PDRB dan UMK terhadap pengangguran di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh UMK terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016?

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016.
2. Untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016?

C. Kajian Literatur

1. Teori Pengangguran

Teori yang menjelaskan tentang pengangguran dapat merujuk pada Teori Klasik, Keynes, Malthus, dan Sosiologi Ekonomi. Menurut teori Klasik bahwa pengangguran terjadi karena ketidaktepatan/kesalahan penggunaan sumberdaya yang dapat dikurangi melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas (Gilarso, 2004). Sementara itu, Teori Keynes berpendapat bahwa pemerintah perlu terlibat dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk. 2005).

Menurut Teori Kependudukan yang dijelaskan oleh Malthus bahwa penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung”. Kondisi ini dapat berakibat pada adanya persaingan yang berakhir dengan adanya pengangguran. Sementara itu, Teori Sosiologi Ekonomi yang dijelaskan oleh Marx (Marxian) bahwa sistem kapitalis menciptakan kompetisi yang berakibat pada lemahnya kaum buruh karena tidak mempunyai sumberdaya ekonomi (alat produksi). Kelompok kaum buruh tersebut nantinya akan menjadi golongan pengangguran.

Pengangguran dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya kedalam beberapa jenis, yaitu: Pengangguran Normal atau Friksional, Siklikal, Struktural, dan Teknologi (Sukirno, 1994). Penjelasan rincinya dapat dilihat pada Tabel 16.1.

Tabel 16.1
Pengelompokkan Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

No	Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya	Ciri-ciri
1	Pengangguran Normal atau Friksional	<ul style="list-style-type: none">- Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen- Orang yang sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik
2	Pengangguran Siklikal	<ul style="list-style-type: none">- Permintaan agregat lebih tinggi (produksi meningkat)- Lebih banyak pekerja baru- Jika permintaan agregat menurun maka pengangguran akan bertambah
3	Pengangguran Struktural	<ul style="list-style-type: none">- Barang baru yang lebih baik karena ada kemajuan teknologi- Jika ada penurunan produksi maka sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur
4	Pengangguran Teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia

Sumber: (Sukirno, 1994)

Pengangguran juga dapat dikelompokkan berdasarkan cirinya, yaitu: pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan setengah menganggur (Sukirno, 1994). Penjelasan rincinya dapat dilihat pada Tabel 16.2.

Tabel 16.2
Pengelompokkan Pengangguran Berdasarkan Cirinya

No	Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya	Ciri-ciri
1	Pengangguran Terbuka	Jumlah permintaan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan penawarannya Kondisi ekonomi (kegiatan produksi) sedang menurun
2	Pengangguran Tersembunyi	Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada beberapa faktor: besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien
3	Pengangguran Musiman	Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan Contoh, pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur Contoh, pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur

No	Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya	Ciri-ciri
4	Setengah Menganggur	migrasi dari desa ke kota sangat pesat akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari

Sumber: Sukirno, 1994

2. Penelitian Empiris Sebelumnya

Tabel 16.3 menginformasikan penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Penjelasan rincinya adalah sebagai berikut:

Tabel 16.3. Studi Empiris Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
<p>a. Pitartono (2012)</p> <p>b. Wilayah Penelitian: Jawa Tengah</p> <p>c. Periode penelitian: 1997-2010</p>	<p>a. Variabel: jumlah pengangguran (jiwa), jumlah penduduk (jiwa), inflasi (%), rata-rata upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah (rupiah), pertumbuhan PDRB (%)</p> <p>b. Metode: deskriptif statistik dan korelasi Pearson</p>	<p>a. Jumlah penduduk berkorelasi positif terhadap jumlah pengangguran</p> <p>b. inflasi berkorelasi negatif terhadap jumlah pengangguran</p> <p>c. upah minimum kabupaten/kota berkorelasi positif terhadap jumlah pengangguran</p> <p>d. Pertumbuhan PDRB berkorelasi</p>

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
		negatif terhadap jumlah pengangguran
<p>a. Hedayat, Kahn dan Hanafi (2013)</p> <p>b. Wilayah Penelitian: Teheran-Iran</p> <p>c. Sampel penelitian: 240 perempuan</p>	<p>a. Variabel: usia, permintaan dan penawaran tenaga kerja, gender, pendidikan dan ketidaksesuaian ketrampilan, dan bidang studi.</p> <p>b. Metode: deskriptif statistik</p>	<p>a. Responden berusia 21-25 tahun merupakan pengangguran terbesar. Sebesar 64.2% responden menyatakan bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.</p> <p>b. Sebesar 61.3% responden menyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.</p> <p>c. Sebesar 49.2% responden menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.</p> <p>d. Sebesar 37.1% responden menyatakan bahwa pendidikan dan ketidaksesuaian ketrampilan</p>

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
		<p>berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.</p> <p>e. Sebesar 30% responden menyatakan bahwa bidang studi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.</p>
<p>a. Aurangzeb dan Asif (2013)</p> <p>b. Wilayah penelitian: India, Cina dan Pakistan</p> <p>c. Periode penelitian: 1980-2009</p>	<p>a. Dependen: tingkat pengangguran (%)</p> <p>b. Independen: pertumbuhan PDB (%), nilai tukar efektif (nilai tukar domestik terhadap USD, inflasi (%), pertumbuhan penduduk (%))</p> <p>c. Metode: OLS</p>	<p>a. Pertumbuhan PDB berpengaruh positif dan signifikan di ketiga negara</p> <p>b. Nilai tukar efektif berpengaruh positif dan signifikan di ketiga negara</p> <p>c. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan di Pakistan dan India tetapi negatif dan signifikan di Cina</p> <p>d. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan di ketiga negara</p>
<p>a. Aruan dan Sriyono (2014)</p>	<p>a. Dependen: tingkat</p>	<p>a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh</p>

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
b. Wilayah penelitian: Provinsi DIY c. Periode penelitian: 1985-211	pengangguran terbuka (%) b. Independen: pertumbuhan ekonomi (5), upah riil minimum (rupiah), inflasi (%) c. Metode: PAM	positif dan signifikan b. Upah riil minimum tidak berpengaruh c. Tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan
a. Yanti (2014) b. Wilayah penelitian: Jawa Tengah c. Periode penelitian: 1991-211	a. Dependen: tingkat pengangguran (juta jiwa) b. Independen: PDRB (juta rupiah), pertumbuhan penduduk (juta jiwa), Inflasi (%), investasi (ribu USD), upah minimum (rupiah) c. Metode: OLS	a. PDRB, Inflasi, Investasi, dan Upah minimum berpengaruh signifikan b. Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan
a. Fatimah, Masbar, dan Syahnur (2015) b. Wilayah Penelitian: 23 kabupaten/kota di Provinsi NAD c. Periode penelitian: 2009-2013	a. Dependen: tingkat pengangguran b. Independen: pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja, pertumbuhan angkatan kerja, share angkatan kerja usia 15-24 tahun, share angkatan kerja usia 60 tahun	a. Pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
	<p>keatas, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, pertumbuhan ekonomi</p> <p>c. Metode: Panel Data dengan REM</p>	<p>negatif dan signifikan.</p> <p>b. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja, <i>share</i> angkatan kerja usia 15-24 tahun, dan <i>Share</i> angkatan kerja usia 60 tahun keatas berpengaruh positif dan signifikan.</p>
<p>a. Setyawan (2016)</p> <p>b. Wilayah penelitian: Indonesia</p> <p>c. Periode penelitian: 1991-2015</p>	<p>a. Dependen: tingkat pengangguran</p> <p>b. Independen: jumlah penduduk, upah minimum, inflasi</p> <p>c. Metode: OLS</p>	<p>a. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>b. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan</p> <p>c. Inflasi tidak berpengaruh</p>
<p>a. Nugroho (2016)</p> <p>b. Wilayah penelitian: Indonesia</p> <p>c. Periode penelitian: 1998-2014</p>	<p>a. Dependen: tingkat pengangguran</p> <p>b. Independen: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat angkatan kerja, upah minimum, tingkat kemiskinan</p> <p>c. Metode: OLS</p>	<p>a. Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>b. Tingkat Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan.</p>

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
<p>a. Firdhania dan Muslihatinningsih (2017)</p> <p>b. Wilayah penelitian: Kabupaten Jember</p> <p>c. Periode penelitian: 2002-2013</p>	<p>a. Dependen: tingkat pengangguran</p> <p>b. Independen: jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, IPM</p> <p>c. Metode: OLS</p>	<p>a. Jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, dan IPM berpengaruh signifikan</p> <p>b. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh</p>
<p>a. Poyoh, Kapantow dan Mandei (2017)</p> <p>b. Wilayah penelitian: Provinsi Sulawesi</p> <p>c. Periode penelitian: 2001-2014</p>	<p>a. Dependen: tingkat pengangguran</p> <p>b. Independen: upah, inflasi, pertumbuhan PDRB</p> <p>c. Metode: OLS</p>	<p>a. Upah berpengaruh signifikan</p> <p>b. Inflasi dan pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh</p>
<p>a. Ningtias dan Rahayu (2017)</p> <p>b. Wilayah penelitian: 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Periode penelitian: 2011-2015</p>	<p>a. Dependen: tingkat pengangguran terbuka</p> <p>b. Independen: persentase penduduk miskin, Distribusi PDRB ADHB, persentase jumlah angkatan kerja dengan pendidikan diploma/akademi</p> <p>c. Metode: <i>Spatial Autoregressive Model</i> dan <i>Spatial Error Model</i></p>	<p>a. Persentase penduduk miskin dan distribusi PDRB ADHB berpengaruh signifikan</p> <p>b. Persentase jumlah angkatan kerja dengan pendidikan diploma/akademi tidak berpengaruh</p>

Peneliti, Tahun Publikasi, Ruang Lingkup Penelitian	Variabel dan Metode	Temuan
a. Puspajuita (2018) b. Wilayah penelitian: 30 provinsi di Indonesia c. Periode penelitian: 2000	a. Dependen: tingkat pengangguran b. Independen: tingkat urbanisasi, tingkat industrialisasi, tingkat angkatan kerja, elastisitas penyerapan tenaga kerja, upah minimum provinsi c. Metode: OLS	a. Tingkat angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan b. Tingkat urbanisasi, tingkat industrialisasi, elastisitas penyerapan tenaga kerja, dan upah minimum provinsi tidak berpengaruh

D. Metode

1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut meliputi jumlah pengangguran, PDRB, dan UMK. Data jumlah pengangguran merupakan total pengangguran di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016 dalam satuan jiwa. Data PDRB merupakan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016 dalam satuan juta rupiah. Sementara itu, data UMK adalah upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016 dalam satuan rupiah.

Total observasi penelitian ini adalah 245 observasi. Perinciannya adalah data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota dan *time series* sebanyak 7 tahun (2010-2016).

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis panel data. Persamaan dasar panel data dapat mengacu pada Gujarati dan Porter (2009). Selain itu, proses uji *Chow* dan *Hausman* juga mengacu pada Gujarati dan Porter (2009). Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aruan

dan Sriyono (2014), Setyawan (2016), dan Poyoh, Kapantow dan Mandei (2017) dapat diformulasikan model estimasi penelitian ini.

Model estimasi penelitian ini adalah:

$$\text{PENGANGGURAN}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_2 \text{UMK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Pengangguran merupakan jumlah penduduk menganggur dengan satuan jiwa. PDRB adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 dengan satuan juta rupiah. UMK adalah upah minimum kabupaten/kota dengan satuan rupiah. α merupakan konstanta sedangkan $\beta_{1,2}$ adalah koefisien estimasi. ε adalah *error term*. i adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sedangkan t adalah tahun 2010-2016.

E. Hasil dan Pembahasan

Analisis panel data mempunyai tiga model estimasi, yaitu: *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Berdasarkan hasil uji *Chow* dan *Hausman* dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dalam penelitian ini (lihat lampiran).

Hasil estimasi FEM dapat dilihat pada Tabel 16.4. Berdasarkan hasil estimasi tersebut dapat diketahui bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa PDRB sebagai indikator makroekonomi daerah berperan penting dalam pengurangan pengangguran. Selain itu, apabila nilai PDRB meningkat 1 juta rupiah maka jumlah pengangguran akan turun sebesar 0,000415 jiwa.

Hasil estimasi juga menginformasikan bahwa UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Namun demikian, tanda pengaruhnya adalah negatif. Berdasarkan hasil estimasi ini maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengkaji ulang tingkat UMK yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat UMK tersebut dapat diarahkan untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Tabel 16.4. Hasil Estimasi FEM

Dependent Variable: PENGANGGURAN?		
Method: Pooled Least Squares		
Sample: 2010 2016		
Included observations: 7		
Cross-sections included: 35		

Total pool (balanced) observations: 245				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38511.90	2225.912	17.30162	0.0000
PDRB?	-0.000415	0.000111	-3.727748	0.0002
UMK?	-0.001132	0.002891	-0.391578	0.6958
Fixed Effects (Cross)				
CILACAP--C	58556.41			
BANYUMAS--C	20319.75			
PURBALINGGA--C	-8289.721			
BANJARNEGARA--C	-9944.825			
KEBUMEN--C	-2629.589			
PURWOREJO--C	-16501.86			
WONOSOBO--C	-12353.29			
MAGELANG--C	-24629.24			
BOYOLALI--C	-7106.001			
KLATEN—C	24.55635			
SUKOHARJO--C	-3315.906			
WONOGIRI--C	-10878.94			
KARANGANYAR--C	-6153.858			
SRAGEN--C	-1904.840			
GROBOGAN--C	7230.860			
BLORA—C	-6339.120			
REMBANG--C	-15454.22			
PATI—C	18896.35			
KUDUS—C	18636.30			
JEPARA—C	-3033.364			
DEMAK—C	3826.172			
SEMARANG--C	66741.15			
TEMANGGUNG--C	-17920.43			
KENDAL--C	4177.335			
BATANG--C	-9365.729			
PEKALONGAN--C	-25919.46			
PEMALANG--C	4845.169			
TEGAL—C	-22278.41			
BREBES—C	42385.68			
MAGELANG--C	-24629.24			

SURAKARTA--C	-7628.266		
SALATIGA--C	-27906.71		
SEMARANG--C	66741.15		
PEKALONGAN--C	-25919.46		
TEGAL—C	-22278.41		
	Effects Specification		
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.839503	Mean dependent var	26973.55
Adjusted R-squared	0.811725	S.D. dependent var	17290.49
S.E. of regression	7502.461	Akaike info criterion	20.82217
Sum squared resid	1.17E+10	Schwarz criterion	21.35093
Log likelihood	-2513.716	Hannan-Quinn criter.	21.03510
F-statistic	30.22155	Durbin-Watson stat	1.645271
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data sekunder (diolah)

Nilai *adjusted R*² estimasi FEM adalah 0,811725 atau 81,1725%. Hal ini berarti bahwa variasi variabel pengangguran dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDRB dan UMK sebesar 81,1725%. Sementara itu, nilai sebesar 18,8275% merupakan variasi variabel lain yang tidak ditentukan di dalam model estimasi FEM.

Nilai uji F estimasi FEM adalah 30,22155 dengan probabilitas sebesar 0,000000. Apabila kesimpulan yang digunakan mengacu pada nilai probabilitas maka secara bersama-sama variabel PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016.

F. Penutup

Berdasarkan hasil estimasi FEM dapat disimpulkan bahwa:

1. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016.
2. UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016.

Rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong peningkatan nilai PDRB untuk pengurangan pengangguran. Upaya peningkatan nilai PDRB dapat dilakukan melalui peraturan daerah untuk meningkatkan nilai dan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang berdampak besar terhadap pengurangan pengangguran atau penyerapan tenaga kerja.
2. Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat mengkaji ulang keputusan/penetapan UMK. Kaji ulang ini difokuskan pada upaya penetapan tingkat UMK yang dapat mendorong pengurangan pengangguran/penyerapan tenaga kerja.

REFERENSI

- Aruan, Norman Luther dan D. Sriyono. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011. *MODUS* Vol. 26 (2) hal. 173-187.
- Aurangzeb and Khola Asif. 2013. Factors Effecting Unemployment: A Cross Country Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* Vol. 3, No. 1 pp 219-230.
- Fatimah, Raja Masbar, dan Sofyan Syahnur. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 3 No. 1 hal. pp. 37- 46.
- Firdhania, Riza dan Fivien Muslihatinningsih. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Volume IV (1) hal. 117-121.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gujarati, D.N. and Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics, Fifth Edition*. USA: McGraw-Hill Companies.
- Hedayat, Mina, Sabzali Musa Kahn and Jaffri Hanafi. 2013. Factors affecting the unemployment (rate) of female art graduates in Iran. *Educational Research and Reviews* Vol. 8 (9) pp. 546-552.
- Ningtias, Ida Puspita dan Santi Puteri Rahayu. 2017. Pemodelan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Menggunakan Regresi Spasial. *Jurnal Sains dan Seni ITS* Vol. 6 No. 2 hal. D212-D218.
- Nugroho, Rosalendro Eddy. 2016. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014. *Jurnal PASTI* Volume X No. 2 hal. 177 – 191.
- Pitartono, Ronny. 2012. Analisis Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1997-2010. *Skripsi*. Semarang: FEB UNDIP.
- Poyoh, Arfan, Gene H. M. Kapantow dan Juliana R. Mandei. 2017. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat* Volume 13 Nomor 1A hal. 55 – 66.

- Puspajuita, Erna A.R. 2018. Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance* Vol. 10 No. 1 pp. 140-147.
- Setyawan, Ma'arif Ridho. 2016. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Indonesia Tahun 1991-2015. *Skripsi*. Surakarta: FEB UNS.
- Sisnita, Aisyah. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soesastro, Hadi, dkk. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam SetengahAbad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yanti, Vika Novi. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1991 Sampai 2011. *Skripsi*. Surakarta: FEB UMS.

LAMPIRAN

1. *Chow Test*

Chow test digunakan untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat dalam estimasi data panel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka model yang lebih baik adalah Fixed effect
- Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka model yang lebih baik adalah Common effect

Rumus F-hitung:

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n - 1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Keterangan:

SSE_1 (*Sum Squared Resid* dari *Common effect model*) = 42891321385,14604

SSE_2 (*Sum Squared Resid* dari *Fix effect model*) = 11707680550,04405

n (jumlah *cross section*) = 35

t (jumlah *time series*) = 7

nt (jumlah *cross section* x jumlah *time series*) = 245

F-hitung = $\frac{42891321385,14604 - 11707680550,04405}{35 - 1} \div \frac{11707680550,04405}{(245 - 35 - 7)}$

F-hitung = $\frac{917165906,915}{57673303,2022}$

F-hitung = 15,9028

Hasil perhitungan F di atas mengindikasikan bahwa *Fixed effect model* lebih tepat dibandingkan *Common effect model*.

2. Hausman Test

Hausman test digunakan untuk memilih apakah *Fixed effect model* atau *Random effect model* yang paling tepat digunakan. Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika *Chi square* hitung > *Chi square* tabel maka model yang lebih baik adalah *Fixed effect model*;
- Jika *Chi square* hitung < *Chi square* tabel maka model yang lebih baik adalah *Random effect model*.

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	43.310305	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB?	-0.000415	0.000192	0.000000	0.0000
UMK?	-0.001132	-0.012147	0.000003	0.0000

Berdasarkan hasil uji Hausman dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *random effect model* (REM).

BAB XVII

PEMETAAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Hasil Sebuah Tinjauan Ulang dari Berbagai Sumber

**Tulus Tambunan
Ida Busnety**

A. Pendahuluan

Dari banyak sumber informasi yang tersedia, didapat sejumlah kriteria untuk menentukan apakah sebuah produk di suatu daerah/wilayah adalah produk unggulan dari daerah tersebut. Misalnya menurut Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (<http://eprints.unlam.ac.id/50/2/BAB%204.pdf>), kriteria produk unggul dari suatu daerah/wilayah adalah produk (bisa jasa, bisa barang) yang memenuhi persyaratan kecukupan sejumlah input di daerah tersebut, yakni sumberdaya, keterkaitan produk bersangkutan, posisi bersaing, dan potensi bersaing. Dari kriteria ini didapat pengelompokkan produk berikut: (a) produk potensial adalah produk daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan (atas daerah-daerah lain) dalam memproduksi produk tersebut. Sebuah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam membuat suatu produk karena kecukupan ketersediaan sumberdaya lokal, seperti bahan baku (tidak harus impor), keterampilan sumberdaya manusia, memiliki teknologi produksi serta tersedianya sarana dan prasarana di daerah tersebut.

Laporan ini adalah hasil sementara dari tinjauan terhadap semua sumber-sumber resmi mengenai produk-produk unggulan dari provinsi

Sumatera Barat. Tinjauan ini merupakan tahap awal dari sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Usaha, Universitas Trisakti, dengan tujuan untuk menetapkan produk-produk (bisa berupa jasa maupun komoditas) unggulan utama yang secara riil atau potensial dimiliki oleh provinsi Sumatera Barat.

B. Cara Menentukan Produk Unggulan

Hingga saat ini sudah sangat banyak penelitian atau/dan publikasi di dalam negeri mengenai produk-produk unggulan daerah. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat ada berbagai macam metode penentuan suatu produk unggulan daerah, di antaranya metode *Location Quotient* (LQ), Rasio Pertumbuhan MRP, *Shift Share* (SS), Metode SIG, Penggandaan Pendapatan; Tipologi Klassen; Klasifikasi Jenis Obyek (KJO); analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT); atau metode yang sangat sederhana misalnya, melihat pada nilai output atau produksi tertinggi di antara produk-produk yang ada di suatu wilayah, atau pangsa output dari suatu produk atau sektor di dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), atau bahkan bisa digunakan nilai investasi relatif dari suatu industri.

Pemilihan metode yang digunakan sangat tergantung pada jenis produk yang diteliti, dan tujuan penelitian. Pada umumnya untuk menilai tingkat keunggulan (secara statis) sebuah komoditas digunakan metode LQ. Jika ingin melihat perubahan keunggulan suatu produk dari satu period ke periode berikutnya, dipakai metode SS. Jika ingin melihat keunggulan suatu produk lewat dampaknya terhadap ekonomi wilayah di mana produk tersebut berada, digunakan Penggandaan Pendapatan. Untuk produk yang bukan komoditas digunakan misalnya KJO.

Selain metode-metode tersebut, cara lainnya seperti perkembangan rasio ekspor-impor dari suatu daerah untuk suatu produk, atau ketergantungan daerah itu terhadap sebuah produk yang dihasilkan oleh daerah lain dapat juga digunakan, dengan dasar pemikirannya bahwa apabila suatu daerah untuk sebuah produk (terutama yang permintaan lokalnya sangat besar seperti misalnya komoditas-komoditas kebutuhan pokok) sangat tergantung pada impor, berarti daerah tersebut tidak mampu membuatnya secara teknis atau secara teknis sanggup namun tidak memiliki keunggulan komparatif atau tidak daya saing dibandingkan produk yang sama buatan luar (dalam perkataan lain, daerah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atas daerah-daerah lain yang juga membuat produk yang sama.

Namun di antara metode-metode tersebut, metode LQ adalah yang paling banyak digunakan di dalam banyak penelitian mengenai produk unggulan suatu daerah di Indonesia. Pada dasarnya, metode LQ ini membandingkan porsi dari sejumlah variabel kunci yakni jumlah pekerja atau jumlah produksi atau jumlah nilai tambah untuk sebuah produk atau sektor tertentu di suatu daerah/wilayah dibandingkan dengan porsi dari masing-masing variabel tersebut untuk produk atau sektor yang sama pada tingkat nasional. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi produk atau sektor unggulan di dalam suatu daerah (lihat misalnya, <http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/06/alat-analisis-yang-digunakan-untuk.html>).

Teknik analisis dalam metode LQ ini merupakan cara pada tahap awal dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam produk atau sektor tertentu, misalnya, dalam produksi alat-alat pertanian atau dalam mengembangkan sektor pariwisata. Karena merupakan tahap awal, maka metode LQ sebenarnya tidak atau belum dapat memberi sebuah kesimpulan akhir, melainkan baru merupakan suatu kesimpulan sementara yang masih harus dikaji dan ditilik kembali melalui teknik analisis lain yang dapat menjawab apakah kesimpulan sementara tersebut terbukti kebenarannya. Misalnya, bisa saja terjadi bahwa hasil analisa LQ menunjukkan suatu daerah memiliki keunggulan dalam produksi minyak goreng berbahan baku erkebunan kelapa sawit, namun fakta selama ini menunjukkan bahwa daerah itu banyak mengimpor minyak goreng yang sama dari luar daerah. Dengan asumsi bahwa daerah tersebut memang berkeinginan dan sudah mencoba membuat minyak goreng sendiri, namun karena luas lahan perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut tidak mencapai titik ekonomis dengan teknologi yang ada, maka harga jual minyak goreng yang dihasilkannya lebih mahal daripada harga minyak goreng impor.

Nilai LQ antara lebih kecil hingga lebih besar dari satu (1). Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor atau produk yang bersangkutan kurang terspesialisasi dibanding sektor/produk yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan. Jika nilai $LQ = 1$, sektor/produk yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor/produk sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri. Jika nilai $LQ > 1$, sektor/produk yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan.

C. Hasil Penelitian dari Berbagai Sumber

Berikut ini dijabarkan informasi mengenai produk-produk unggulan menurut sektor di provinsi Sumatera Barat yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 17.1, banyak sektor unggulan di provinsi tersebut berdasarkan hasil hitungan LQ dengan koefisien yang bervariasi, dengan nilai tertinggi hampir 35,7 untuk komoditas pertanian markisa yang terdapat di sejumlah wilayah yakni Kabupaten Solok, Kota Payakumbu, dan Kabupaten Agam. Selain menggunakan metode LQ, digunakan juga metode KJO untuk sektor pariwisata, dan melihat nilai produksi tertinggi, yakni untuk sektor perikanan.

Tabel 17.1: Potensi Komoditas Unggulan dan Lokasi Pengembangannya di Provinsi Sumatera Barat

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
1	Pertanian Tanaman Pangan	Ubi Jalar	1,63	Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota	Hasil LQ
		Padi Sawah dan Ladang	1,26	Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar	Hasil LQ
2	Pertanian Tanaman Buah-Buahan	Markisa	35,66	Kabupaten Solok, Kota Payakumbu, Kabupaten Agam	Hasil LQ
		Alpukat	5,69	Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar	Hasil LQ
		Manggis	3,67	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota	Hasil LQ

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
				Padang Panjang, Kabupaten Dharmasraya	
		Sawo	3,66	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya	Hasil LQ
		Melon	2,66	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil LQ
		Melindo	1,83	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok	Hasil LQ
		Durian	1.71	Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang	Hasil LQ
		Semangka	1,25	Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman	Hasil LQ
		Petai	1.04	Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten	Hasil LQ

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
				Pesisir Selatan	
3	Pertanian Tanaman Sayuran	Bawang Putih	5,33	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok	Hasil LQ
		Jamur	2,41	Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota	Hasil LQ
		Kembang Kol	1,90	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar	Hasil LQ
		Tomat	1,56	Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam	Hasil LQ
		Buncis	1,45	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Payakumbu, Kabupaten Agam	Hasil LQ
		Cabe Besar	1,41	Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil LQ
		Terung	1,40	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Payakumbu	Hasil LQ

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
		Kol/Kubis	1,31	Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam	Hasil LQ
		Bawang Daun	1,05	Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam	Hasil LQ
		Ketimun	1,01	Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Dharmasraya	Hasil LQ
4	Perkebunan	Kakao	3,83	Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar	Hasil LQ
		Karet	2,12	Kota Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok	Hasil LQ
		Kelapa	1,65	Kota Pariaman, Kota Payakumbu, Kota Padang	Hasil LQ
5	Perikanan dan Kelautan	Budidaya Kolam	-	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman	Produksi Tertinggi

Menumbuhkan Ekonomi Lokal
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
6	Pernakan	Kerbau	4,16	Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman	Hasil LQ
		Ayam Petelur	3,63	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbu	Hasil LQ
		Itik	1,17	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil LQ
		Sapi Potong	1,16	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok	Hasil LQ
7	Kehutanan	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	1,56	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok	Hasil LQ
		Hutan Lindung	1,34	Kabupaten Pasaman, Kabupaten	Hasil LQ

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
				Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok	
8	Industri dan Perdagangan	Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Nuklir	2,01	-	Hasil LQ
		Makanan dan Minuman	1,94	-	Hasil LQ
		Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	1,68	-	Hasil LQ
		Tekstil	1,09	-	Hasil LQ
9	Pariwisata	Wisata Bahari	-	Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota dan Kabupaten Padang Pariaman	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Sejarah	-	Kota Bukittinggi	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Budaya	-	Kota Padang Panjang	Klasifikasi Jenis Obyek

No	Sektor	Komoditas Unggulan	Nilai LQ	Sebaran Lokasi	Keterangan Penentuan Komoditas Unggulan
		Wisata Alam	-	Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Heritage	-	Kota Sawahlunto	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Kerajinan	-	Kota dan Kabupaten Padang Pariaman	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Ziarah	-	Kota Padang, Kabupaten Agam	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Olahraga	-	Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Olahraga Minat Khusus	-	Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai	Klasifikasi Jenis Obyek
		Wisata Minat Khusus	-	Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto	Klasifikasi Jenis Obyek
10	Pertambangan	Batubara	1,00	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung	Hasil LQ

Sumber: Hasil Analisis, 2013

(<http://appe.navperencanaan.com/pejuanginvestasi/viewdescriptionbyprovinsi/9>)

Berikut, dari sejumlah sumber yang menggunakan nilai produksi atau investasi relatif (sebagai persentase dari nilai total produksi atau investasi di daerah terkait) sebagai alat ukur, Tabel 17.2 menunjukkan wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki keunggulan produk-produk/sektor-sektor tertentu. Beberapa sektor dapat dijelaskan secara garis besar disini. Misalnya, untuk sektor pariwisata, wilayah-wilayah penting adalah Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kota, dan banyak lagi unggul dalam sektor tersebut. Namun, masing-masing wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk komponen-komponen tertentu dari sektor pariwisata. Misalnya, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar memiliki keunggulan komparatif pada sub sektor restoran. Kabupaten Solok memiliki keunggulan komparatif pada sub sektor restoran dan angkutan jalan raya.

Adapun daerah tujuan wisata lain lebih dominan dikunjungi dengan menggunakan jasa angkutan jalan raya. Menurut sumber yang digunakan, nilai ekonomi pariwisata yang dihasilkan baru dari aktifitas restoran saja, sebagaimana terjadi pada wilayah Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hanya destinasi Kota Bukittinggi yang memiliki keunggulan kompetitif untuk semua sub sektor dengan memberikan sumbangan terhadap nilai ekonomi pariwisata Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang sub sektor restorannya belum kompetitif terhadap yang lainnya. Dalam pengembangan pariwisata di Kota Padang wisata kuliner harus lebih mendapat perhatian tinggi, agar turis yang datang dapat menjadikan Kota Padang sebagai tujuan wisata kulinernya.

Tabel 17.2: Nama-nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat menurut Produk/Sektor Unggulan

Sektor	Wilayah
Pariwisata	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Agam. Kabupaten 50 Kota Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Solok Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Perkebunan -Gambir	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten 50 Kota

-Karet	Kota Solok Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Solok
- Perkebunan Kakao	Kabupaten Pasaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang
-Kopi Kawa	Kabupaten Tanah Datar
-Sawit	Kabupaten Solok
Industri -Kimia dan Bahan Bangunan	Kabupaten 50 Kota Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman, Kota Padang Kota Bukittinggi.
Industri Kerajinan Tangan -Sulaman	Kabupaten Pasaman Kabupaten Agam Kota Padang Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Sijunjung Kota Solok Kota Bukit Tinggi Kota Pariaman Kota Sawahlunto
-Barang-barang berbasis Kerang	Pulau Mentawai Kota Padang Panjang
-Barang-barang berbasis kulit	Kota Bukit Tinggi
-Sepatu dan Sandal	Kabupaten Solok
-Gula Aren, Gula Saka dan Gula Tebu	Kota Padang
-Tampurung Barendo, Batik Tanah Liek, Sandal & Boneka Flanel	Kabupaten Dharmasraya

-Batu Lumut Sei Dareh -Minyak atsiri	Kota Solok
Peternakan -Ayam Ras Pedaging -Ayam Ras Petelur -Sapi potong	Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman Kota Padang Kota Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kota Padang Kota Payakumbuh
Pertambangan dan Energi -Batu Bara -Bijih Besi -Emas -Panas Bumi	Kota Sawahlunto Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten 50 Kota Kabupaten Solok Koto Singkarak Kabupaten Solok Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Pasaman Kabupaten 50 Kota Kota Padang Kabupaten Solok Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Pasaman Kabupaten Agam Kabupaten 50 Kota Kabupaten Tanah Datar

Pertanian -Tanaman Pangan	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Kabupaten Pasaman
Perikanan -Perikanan Tangkap -Perikanan Budidaya	Kota Padang Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Agam Kabupaten 50 Kota Kabupaten Pasaman, Kota Padang Kabupaten Padang Pariaman
Kuliner -Rendang	Kota Padang Kota Payakumbuh

Sumber:

- 1) <http://ditjenbun.deptan.go.id/budtanreayar/images/morfeoshow/gambir-6636/big/Gambir-Var.udang-sedang-ber.jpg>,
- 2) www.allaboutminangkabau.com,
- 3) <http://disnak.sumbarprov.go.id/foto/info/1/dsc01098.jpg>,
- 4) <http://energitoday.com/>,
- 5) http://ptpn6.com/wp-content/uploads/2012/08/karet_merdeka.jpg,
- 6) http://www.antarasumbar.com/id/foto/fotoutama/300511130640_ikan1.jpg,
- 7) http://www.antarasumbar.com/id/foto/berita/040812023243_kebun-kakao-coklat.jpg,
- 8) http://www.antarasumbar.com/id/foto/berita/261012213704_tambang_emas_di_aliran_sungai_batang_hari_solok_selatan.jpg,
- 9) <http://disnak.sumbarprov.go.id/foto/info/1/dsc03049.jpg>,
- 10) <http://www.seputarukm.com/kerajinan-tangan-sumatera-barat-miliki-banyak-keunggulan>,
- 11) <http://hariansinggalang.co.id/siang-ini-diskop-umkm-sumbar-pamerkan-40-produk-unggulan>,
- 12) <http://www.m.padek.co/detail.php?news=28801>,
- 13) <http://sumbar.antarane.ws.com/berita/119187/kopi-kawa-produk-unggulan-sumbar-expo-2014.html>,
- 14) <http://rocana.kemenerperin.go.id/index.php/unggul-prov/sumbar>,
- 15) <http://bengkuluexpress.com/pameran-produk-unggulan-ke-sumbar/>,
- 16) <http://www.sumbarprov.go.id/detailsnews6055>,
- 17) <http://bisnisukm.com/tanaman-gambir-mutiara-baru-dari-sumatera-barat.html>.

Untuk sektor perkebunan, adalah terutama gambir, yang memang selama ini merupakan salah satu produk perkebunan yang diunggulkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Menurut informasi dari Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian, selama ini Provinsi Sumatera Barat merupakan pemasok lebih kurang 80 persen dari total ekspor Indonesia untuk komoditas gambir. Hingga saat ini ada paling kurang 20 kelompok dan koperasi petani gambir yang ada di dua daerah sentra gambir di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten 50 Kota

yang terletak di bagian timur wilayah Provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi. Berdasarkan informasi yang ada per 2009, di Kabupaten 50 Kota luas perkebunan gambir tercatat sebanyak 11.937 ha dengan volume produksi mencapai 7.379 ton rata-rata per tahun. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan luas lahan mencapai 24.69 ha dengan volume produksi rata-rata 688 ton per tahun. Selain dua kabupaten tersebut, ada beberapa kabupaten lainnya yang juga punya lahan untuk perkebunan gambir namun relatif kecil, yang secara keseluruhan luasnya mencapai 175 ha yang sebahagian besar belum berproduksi. Luas wilayahnya 3.354,30 km persegi, terbagi dalam delapan kecamatan dengan 180 desa dan 505 dusun. Salah satu koperasi petani gambir yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu adalah Koperasi Kopsin di Siguntur Kabupaten Pesisir Selatan yang melatarbelakangi lahirnya PT. Cathecin Siguntur yang memiliki alat moderen pengolahan gambir.

Komoditas perkebunan yang juga dapat diunggulkan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah karet. Menurut catatan, ada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki perkebunan karet, yang terdiri atas perkebunan rakyat dengan luas (per 2013) hampir mencapai 148.000 ha, dan perkebunan swasta nasional seluas 3.114 ha., atau hanya sebesar 2 % dari luas produksi karet perkebunan rakyat di provinsi tersebut. Namun berdasarkan hasil perhitungan LQ hanya Kota Solok, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok yang memiliki potensi tersebsar.

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk membuat tanaman kakao sebagai salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunannya, karena tanaman ini terdapat hampir di semua kabupaten dan kota. Sebanyak 17 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat punya sentra produksi kakao. Namun yang utama di antara sentra-sentra tersebut terdapat di Kabupaten Pasaman diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan kota-kota yang juga memiliki perkebunan kakao rakyat adalah Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang. Dalam konteks pembangunan wilayah, tanaman kakao menjadi prioritas pemerintah melalui perencanaan pembangunan pertanian. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Sumatera Barat tahun 2011-2015, tanaman kakao merupakan tanaman perkebunan yang dikembangkan dalam program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Kopi kawa (minuman tradisional Minangkabau yang bermukim di daerah pegunungan, yang terbuat dari daun kopi) dari Kabupaten Tanah Datar sebagai produk unggulan terbaru. Kopi tersebut memiliki kekhasan dalam cara penyajiannya, yakni disajikan dengan gelas dari tempurung. Tidak hanya itu, asal tempat dari kopi kawa sendiri merupakan potensi wisata alam yang bagus.

Untuk sektor industri pengolahan adalah terutama kimia dan bahan bangunan. Wilayah-wilayahnya adalah terutama Kabupaten 50 Kota yang nilai investasi dari industri tersebut per 2013 tercatat mencapai sekitar Rp 59 Miliar (atau sebesar 9,18 persen dari total investasi di industri kimia dan bangunan pada tingkat nasional, dan 80,82 persen dari total investasi sektor industri di wilayah tersebut), Kabupaten Agam dengan nilai investasi Rp 23 Miliar (3,58 persen dari total investasi di jenis industri ini di tingkat nasional, dan 35,96 persen dari total investasi sektor industri di kabupaten ini). Wilayah-wilayah lainnya yang juga industri tersebut dapat diunggulkan adalah Kabupaten Pasaman, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi.

Untuk industri kerajinan tangan, berdasarkan nilai investasi, ada tiga wilayah utama yaitu Kabupaten Pasaman dengan nilai investasi per 2013 mencapai Rp 35,4 Miliar atau 32,48 % dari investasi industri utama di wilayah tersebut, Kabupaten Agam dengan nilai investasi Rp 26 Miliar (atau 23,85 % dari investasi industri utama di wilayah tersebut), dan Kota Padang dengan nilai investasi Rp 22 Miliar (atau sebesar 21,01 % investasi industri utama di wilayah tersebut). Industri kerajinan tangan di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh sulam. Hampir 70 jenis sulam yang dikenal di Indonesia ada di provinsi ini yang salah satu jenis sulam tersebut bahkan memiliki 20 tipe sulaman, yaitu sulam terawang, mulai dari songket, sulam, dan kerancang. Di pesisir Selatan ada sulaman bayang, yang bahkan mendapat penghargaan dari UNESCO. Songket pandai sikek terdapat di Kabupaten Tanah Datar, songket unggan di Sijunjung, sulaman dan bordir di Kabupaten Agam, sulaman dan bordir Mungka di Kota 50 Kota, bordir dan sulaman di Kabupaten Pariaman, bordir dan kuliner bunda di Kota Solok, songket dan sarung silungkang di Kabupaten Sawahlunto, tenun unggan di Kabupaten Sijunjung, dan sulaman dan kerancang terdapat di Kota Bukittinggi. Menurut informasi dari Seputarukm.com, ada hampir 5000 industri kerajinan sulam di Provinsi Sumatera Barat. Terutama untuk songket tenun, banyak wilayah di provinsi ini yang memproduksinya. Selain tenun, kerajinan tangan lainnya adalah misalnya barang-barang berbasis kerang di pulau Mentawai, produk-produk berbahan baku kulit di misalnya Kota Padang Panjang.

Untuk sektor peternakan, komoditas yang dapat diunggulkan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah antara lain ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Ayam ras petelur terdapat hampir di semua kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah paling banyak ada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan jumlah ayam ras pedaging lebih dominan di wilayah kabupaten di bandingkan dengan wilayah perkotaan. Produksi ayam ras pedaging sangat dominan pada beberapa Kabupaten

antara lain pada Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman dan Wilayah Kota di antaranya Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil produksi ayam pedaging tertinggi di Sumatera Barat dari total produksi ayam pedaging Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman menduduki urutan kedua, disusul oleh Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Kabupaten dan Kota lain meskipun sebagai penghasil ayam ras pedaging tetapi tidak dengan produksi yang dominan.

Komoditas peternakan lainnya yang juga dapat diunggulkan adalah sapi potong. Provinsi Sumatera Barat dipercaya menjadi satu dari 10 provinsi di Indonesia untuk mencapai target swasembada daging di tanah air melalui antara lain peningkatan reproduksi ternak sapi. Populasi sapi terdapat pada wilayah sejumlah kabupaten dan kota, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pada wilayah Kota dominan terdapat di Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

Untuk sektor pertambangan termasuk energi, Provinsi Sumatera Barat punya dua produk unggulan, yakni batubara, bijih besi, emas dan panas bumi, Batubara sampai saat ini merupakan satu-satunya bahan galian golongan strategis yang potensi dan cadangannya telah diketahui cukup besar di provinsi ini. Selain volume cadangannya besar, kualitasnya yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat juga cukup baik. Saat ini dalam kegiatan pertambangan batubara, di Provinsi Sumatera Barat ada tiga perusahaan skala menengah, yakni PT Tambang Batubara Bukit Asam (Unit Pertambangan Ombilin), PT Allied Indo Coal dan PT Karbindo Abesyapradhi. Selain itu, di provinsi ini ada sejumlah perusahaan batubara skala kecil adalah dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD), di antaranya paling terkenal adalah KUD Sisawah, KUD Muaro dan KUD Kunangan.

Untuk bijih besi, terdapat di Koto Singkarak yakni tepatnya di daerah Paninggahan X; sejumlah wilayah di Kabupaten Solok seperti Lubuk Selasih, Air Dingin dan dan Surian, Batu Manjular di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Gunung Besi di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Untuk emas terdapat di wilayah Kabupaten Pasaman termasuk di Silaping, dan Sigalabor; Mangani di Kabupaten 50 Kota; Bukit Bulek dan Batu Busuk di wilayah Kota Padang; di Lubuk Selasih, Sungai Abu, dan Sungai Sapek di Kabupaten Solok); di Gunung Arum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan; dan sejumlah daerah di dalam wilayah Kab. Sawahlunto/Sijunjung seperti Bukit Kabun, Batu Manjular, Silokek, dan Palangki. Proses penambangan emas (dan perak) di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat

setempat, baik terhadap endapan emas alluvial (sekunder) di sungai-sungai maupun endapan emas primer di daerah perbukitan.

Untuk energi, adalah terutama panas bumi. Letak Provinsi Sumatera Barat di atas jalur vulkanik membuat provinsi tersebut memiliki potensi energi panas bumi cukup besar, yang tersebar di banyak wilayah, termasuk di Kabupaten Solok yang porsinya adalah yang terbesar yang per 2013 mencapai sekitar 55 persen, disusul kemudian oleh Kabupaten Pasaman dengan 36 persen. Sedangkan kabupaten-kabupaten yang sahamnya relatif kecil adalah seperti Kabupaten Agam yang hanya memiliki 5 persen, Kabupaten 50 Kota 2 persen dan Kabupaten Tanah Datar yang juga hanya 2 persen.

Untuk sektor pertanian, terutama adalah tanaman pangan dengan produksi utama padi dan palawija. Wilayahnya meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman. Daerah-daerah ini memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangannya karena sudah sejak lama daerah-daerah sentra tanaman pangan tersebut dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Selain padi dan palawija, juga lainnya seperti jagung terdapat di wilayah barat Kabupaten Pesaman.

Untuk sektor perikanan, yang dapat diunggulkan Provinsi Sumatera Barat adalah perikanan tangkap dan ikan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap, Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai sentral utama produksi ikan tongkol dan tuna kawasan barat Indonesia bagian barat oleh Presiden RI pada tahun 2006 dan hasil kesepakatan IMTGT pada tahun 2007 di Phuket Thailand untuk membuka peluang Provinsi Sumatera Barat untuk memodernisasi potensi sumberdaya perikanannya, khususnya ikan tuna. Terutama Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat berpotensi dalam ikan tangkap. Pengembangan terhadap industri pengolahan ikan tuna dan sejenisnya terdapat di Kota Padang yang mempunyai potensi dan peluang besar untuk di kembangkan, karena kota ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sarana prasarana seperti pelabuhan perikanan samudera Bungus. Sedangkan untuk perikanan budidaya adalah terutama ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Ikan nila dan ikan mas paling besar terdapat di Kabupaten Agam dan disusul kemudian oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman, sedangkan ikan lele terdapat paling banyak di Kabupaten Pasaman diikuti oleh Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Produk Unggulan: dari Potensi hingga Realisasi

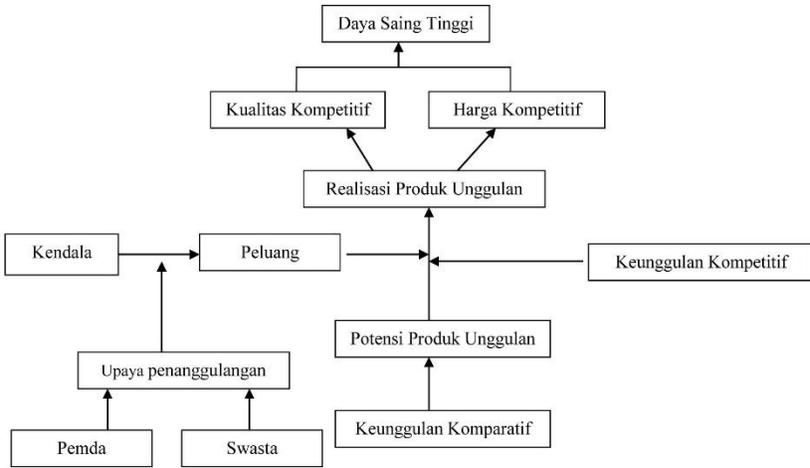
Pada lingkup nasional, misalnya Indonesia, produk atau komoditas atau sektor di sebuah provinsi dikatakan unggul atau merupakan sektor unggulan dari provinsi tersebut apabila sektor tersebut mampu bersaing atau unggul dalam persaingan dengan sektor yang sama dari provinsi-provinsi lainnya (a.l. Suyatno, 2000; Tambunan, 2001a). Namun sektor unggulan di suatu wilayah dapat juga diartikan sebagai sektor sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB dan dengan tingkat daya saing tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut. Menurut Soemarno (2011) dalam bahan kajian strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis, yang dikutip oleh Yufrizal (2014), memaparkan Produk Unggulan atau Komoditi unggulan itu merupakan hasil usaha masyarakat pedesaan dengan kriteria:

1. mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan /ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah);
2. memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dapat dikembangkan;
3. mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat pedesaan;
4. secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia; dan
5. layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Pertanyaan sekarang adalah: bagaimana sebuah produk atau sektor ekonomi bisa menjadi sebuah produk/sektor unggulan atau berdaya saing tinggi? Teori klasik mengenai perdagangan internasional menyatakan bahwa tingkat daya saing suatu produk di sebuah negara ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif yang dimiliki negara tersebut (seperti jumlah tenaga kerja, luas dan kualitas lahan, iklim, letak geografi, dan ketersediaan sumber daya alam). Sedangkan dalam teori modern mengenai perdagangan internasional menambahkan bahwa selain faktor-faktor keunggulan komparatif, negara tersebut juga harus memiliki faktor-faktor keunggulan kompetitif yakni kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan teknologi, infrastruktur (seperti jalan raya, jalan kereta api, jembatan, penerangan, dan telekomunikasi), logistik (seperti pelabuhan laut dan/atau udara, pergudangan), kebijakan-kebijakan pemerintah yang kondusif, dan banyak lainnya lagi yang bersifat bukan alami tetapi yang harus diciptakan oleh manusia (a.l. Tambunan, 2001b, 2004).

Pertanyaan kedua, bagaimana sebuah produk yang secara potensial dapat diunggulkan bisa terrealisasi menjadi sebuah produk unggulan? Jawabannya dijelaskan dengan skema (diagram) di bawah ini. Intinya

adalah bahwa sebuah produk berpotensi menjadi sebuah produk unggulan sangat ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif. Adapun realisasinya sangat ditentukan oleh tiga hal, yakni faktor-faktor keunggulan kompetitif yang bisa diciptakan oleh daerah bersangkutan, kendala-kendala yang dihadapi oleh proses realisasinya, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh misalnya Pemda untuk menghilangkan kendala-kendala tersebut. Jika kendala-kendala tersebut berhasil dihilangkan, maka upaya-upaya Pemda telah menciptakan sebuah peluang untuk merealisasikan potensi produk bersangkutan menjadi produk unggulan.



Gambar 17.1
Produk Unggulan: Proses dari Potensi hingga Realisasi,
dan Faktor-faktor Penentu

E. Penelitian Lanjutan yang Diperlukan

Di bab 3 telah diperlihatkan produk-produk unggulan per kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan berbagai metode dengan menggunakan data atau informasi dari beberapa tahun sebelumnya, yang mungkin sekali dalam realisasinya saat ini (tahun 2017) kinerjanya sudah berbeda. Bisa saja, hingga awal tahun 1990-an sebuah produk merupakan produk yang paling diunggulkan oleh sebuah wilayah berdasarkan metode penghitungan seperti di atas. Namun, akibat menipisnya SDA terkait atau sudah semakin tidak ekonomis dalam proses eksplorasi atau pengadaan SDA yang selama itu sebagai pendukung utama, produk tersebut sudah tidak lagi merupakan produk unggulan.

Oleh karena itu, penelitian ke depan yang diperlukan adalah paling tidak dalam tiga tahap utama berikut ini:

1. menghitung kembali tingkat keunggulan dari masing-masing produk atau sektor di bab 3 tersebut dengan menggunakan data terakhir yang tersedia, misalnya tahun 2016 atau paling lama tahun 2015. Dengan cara ini akan diketahui apakah kinerja dari produk terkait sudah berbeda dengan kinerja sebelumnya (misalnya apakah nilai koefisien LQ-nya dengan data 2016 berbeda dengan yang diperlihatkan di Tabel 1);
2. jika hasil dari tahap pertama di atas menunjukkan tingkat keunggulan sebuah produk ternyata menurun atau bahkan hilang, maka tahap kedua ini adalah mengidentifikasi kendala atau faktor-faktor penyebab penurunan tersebut. Jadi, apabila hasil dari tahap pertama tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien LG dari produk "A" di Kabupaten "B" dengan data 2016 lebih rendah dibandingkan nilainya di Tabel 2, maka pertanyaan adalah: apakah yang menyebabkan menurunnya tingkat keunggulan tersebut adalah akibat tingkat produktivitas dari pabrik-pabrik yang membuat produk "A" merosot selama beberapa tahun belakangan ini, dan apa yang menyebabkannya, dan seterusnya; dan,
3. melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Sumatera Barat, yang mempengaruhi, baik secara langsung (misalnya kebijakan-kebijakan Pemda yang khusus dibuat untuk mendukung industri "A") maupun secara tidak langsung (misalnya kebijakan energi nasional, kebijakan ekspor atau impor, dan lainnya). Tahap ini diawali dengan mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 93/M-IND/PER/8/2010 mengenai "Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014". Pertanyaan di sini adalah apa yang telah dilakukan dan telah dicapai dari pelaksanaan peraturan Menteri tersebut hingga saat ini?

Dengan sumber daya terbatas (dana, SDM, waktu), tidak semua produk yang secara potensial dapat diunggulkan oleh Provinsi Sumatera Barat dapat direalisasikan dalam periode yang sama. Oleh karena itu, perlu penentuan prioritas, yakni memilih di antara produk-produk tersebut, produk mana yang akan akan dijadikan sebagai produk terunggul, dan pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan memilih "terbaik dari yang baik": produk yang untuk segala aspek memiliki nilai tertinggi (khususnya nilai output/sumbangan terhadap pembentukan PDRB, dan nilai ekspor) dengan biaya terendah (khususnya pemakaian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD). Pemilihan ini menjadi visi pembangunan ke depan dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi pertanyaannya mengenai visi adalah: "ke depan (misalnya pada 2025) Provinsi Sumatera Barat akan menjadi pusat pariwisata nasional, atau menjadi pusat industri pengolahan berbahan baku kakao, atau lainnya".

REFERENSI

Suyatno (2000), "Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 144-159. Surakarta: UMS.

Tambunan, Tulus (2001a), *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Tambunan, Tulus (2001b), *Perdagangan Internasional dan Necara Pembayaran. Teori dan Penemuan Empiris*, Jakarta: LP3ES.

Tambunan, Tulus (2004), *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yufrizal (2014), "Pengembangan Produk Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah", 30 Maret, Solok Selatan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (<http://www.solselkab.go.id/post/read/690/httpyufrizal-67.blogspot.com.html>) Bappeda Solok Selatan.

Blue Economy IRSA

by Nurul Istiqomah

Submission date: 20-Mar-2020 04:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1278676454

File name: Blue_Economy_IRSA.pdf (596.11K)

Word count: 3895

Character count: 25002

KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI ENERGI MELALUI PEMANFAATAN BIOGAS

Izza Mafruhah¹, Nurul Istiqomah²

^{1,2} Faculty of Economics and Bussiness Sebelas Maret University, Jl Ir Sutami no 36 Ketingan Surakarta, Central Java

A. PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu input dalam kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga. Energi bisa berasal dari yang tidak terbarukan dan terbarukan. Indonesia dulu terkenal sebagai penghasil energi yang tidak terbarukan, yaitu minyak bumi dan gas alam sehingga menjadi salah satu negara eksportir minyak dunia dan masuk menjadi bagian negara-negara OPEC. Seiring berjalannya waktu, dalam dua dasawarsa terakhir, konsumsi energi masyarakat Indonesia sangat tinggi, melebihi produksi yang dilakukan. Terdapat tiga dampak utama konsumsi BBM yang berlebihan yaitu : (1) biaya energi yang tinggi; (2) polusi lingkungan khususnya udara yang tinggi; dan (3) cadangan minyak yang semakin berkurang. Data produksi dan impor BBM Indonesia selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Produksi dan Impor BBM Indonesia 2010 – 2015

Tahun	Produksi (juta barel)		Impor BBM (juta barel)
	BBM	NON BBM	
2010	235,7	85,8	163,6
2011	237,1	104,2	195,0
2012	240,3	111,9	201,1
2013	237,5	85,2	205,6
2014	245,5	97,1	209,0
2015	248,8	80,7	175,4

Sumber : Energi outlook 2016

Menipisnya cadangan minyak bumi di dalam negeri dan meningkatnya konsumsi BBM di dalam negeri telah menyebabkan Indonesia menjadi negara *net oil importer* semenjak tahun 2004. Gap produksi konsumsi semakin melebar, dimana pada tahun 1975-1995, produksi minyak Indonesia masih di atas 1 juta barel, bahkan pada 1980-an dan 1991-an produksi minyak Indonesia hampir mendekati 2 juta barel. Sementara konsumsi BBM dalam negeri pada 1975-1985 di bawah 500.000 barel per hari. Namun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat hingga pada 2004 produksi minyak tidak mencukupi untuk menutupi konsumsi dalam negeri. Mulai periode 2004 konsumsi BBM dalam negeri sudah berada di level 1 juta barel per hari, sementara produksinya terus turun.

Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia tidak dapat lagi menggantungkan penyediaan energi bersumber dari minyak bumi karena harga minyak mentah dunia sangat fluktuatif sehingga dapat menguras devisa negara dan mengancam ketahanan energi nasional. Upaya penghematan energi dilakukan karena pasokan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas maupun batu bara semakin berkurang sementara permintaan terus mengalami kenaikan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan adanya Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa penyusunan KEN tersebut harus memperhatikan prinsip keadilan, keberkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional yang sesuai dengan arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemahaman baru tersebut menuntut adanya pengembangan energi alternatif terbarukan dan bersifat ramah lingkungan. Pemahaman masyarakat sangat diperlukan dalam kondisi pemanasan global yang terjadi sekarang ini dan adanya penurunan kualitas lingkungan. Pengembangan energi alternatif terbarukan yang bersifat ramah lingkungan dan tersedia di tingkat lokal dapat menjadi instrumen yang bermanfaat ganda, yaitu mampu mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, mewujudkan keberlanjutan lingkungan, dan menyediakan energi yang mudah diakses oleh masyarakat lokal baik secara kuantitas, kualitas, maupun daya beli (Setyawan, 2010).

Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu perwujudan dari *green economy*, yaitu pemanfaatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Energi alternatif masih mendapatkan porsi yang relatif kecil, tetapi nilainya memang semakin naik dari tahun ke tahun. Gambar 1 mengenai *Blue Print* Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2006 sumber energi masih didominasi oleh minyak bumi sebesar 53 %, kemudian diikuti oleh batu bara sebesar 22% dan gas bumi sebesar 21 %, sedangkan energi lain penggunaannya baru sekitar 4 %.

Blue print tersebut mempunyai tujuan pada tahun 2025, penggunaan energi minyak bumi sudah berkurang hanya menjadi sebesar 20 % saja dan energi lain yang berasal dari panas bumi, pencairan batu bara, biofuel, nukir, CBM, biomass dan hydrogen akan mengalami peningkatan menjadi 17 %, sebagaimana pada gambar 1.

Gambar 1. Blue Print Kebijakan Energi Nasional



B. Elastisitas Energi

Elastisitas energi adalah perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi terhadap pertumbuhan produk atau pertumbuhan agregat dengan kata lain pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengukur kebutuhan energi terhadap perkembangan ekonomi di sebuah negara. Angka elastisitas energi apabila nilainya dibawah 1 ma apemanfaatan energi tersebut sudah produktif, sedangkan jika hasil perhitungan elastisitas energi lebih dari 1 berarti dibutuhkan banyak konsumsi energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Menurut Yusgiantoro (2000), salah satu komponen yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah jumlah pemakaian energi secara nasional. Meningkatnya pemakaian energi mendorong proses industrialisasi. Permintaan energi pada industri manufaktur untuk menjalankan mesin-mesin memang sangat tinggi. Di sisi lain, dukungan kontribusi energi,

terutama dalam penerimaan ekspor dan penerimaan pemerintah, menjadi sarana akumulasi modal pembangunan. Dengan menyadari bahwa pemakaian energi sangat erat berhubungan dengan PDB, maka dapat diperkirakan berapa kenaikan yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat output tertentu. Besarnya kenaikan pemakaian energi yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dapat diketahui dengan menghitung elastisitas energi terhadap output nasional. Elastisitas tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$EE = (DEC/EC)/(DPDB/PDB)$$

EE = Elastisitas energi

EC = Pemakaian energi nasional pada waktu tertentu

PDB = Produk domestik bruto waktu tertentu

DEC = *Incremental* pemakaian energi selang waktu tertentu ($EC_2 - EC_1$)

$DPDB$ = *Incremental* PDB selang waktu tertentu ($PDB_2 - PDB_1$)

Rata-rata pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia berkisar 7% sampai dengan 8% per tahun, sedangkan pertumbuhan ekonominya berkisar 5% sampai 6 % pertahun. Angka tersebut digunakan untuk menghitung elastisitas energi, maka elastisitas energi di Indonesia berkisar 1,6 yang mencerminkan penggunaan energi di Indonesia belum efisien. Negara maju biasanya lebih efisien dalam penggunaan energy sehingga elastisitasnya rendah, antara lain elastisitas energi Jepang hanya sebesar 0,1 dan 0,2 untuk Amerika Serikat. Sedangkan elastisitas energi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura yang sebesar 1,1 dan Thailand sebesar 1,4. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perlu adanya pembenahan dalam pemanfaatan energi di Indonesia.

C. Konsep *Blue Economy*

Elastisitas energi yang masih besar tidak didukung oleh cadangan energi yang dipunyai oleh Indonesia. Cadangan minyak di Indonesia tinggal 3,7 milyar barrel dari semula 27 milyar barrel. Cadangan tersebut akan bertahan untuk 10 tahun lagi. Sedangkan potensi gas bumi pada tahun 2008 mencapai 170 TSCF dan produksi per tahunnya adalah sebesar 2,87 TSCF, berdasarkan perbandingan data tersebut maka bisa diperkirakan cadangan gas di Indonesia bisa bertahan selama 59 tahun. Kesadaran masyarakat bahwa cadangan energi yang ada di Indonesia tidak lagi melimpah perlu dilakukan sehingga akan memanfaatkannya secara efisien.

Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar adalah dengan mengurangi penggunaan *unrenewable energy* dan mencari sumber energi baru yang *renewable*. Terdapat beberapa sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tersedia di tingkat lokal. Salah satu sumber energi terbarukan dan bisa dimanfaatkan secara optimal di Indonesia adalah energi yang berasal dari biogas. Biogas adalah energi yang berasal dari suatu gas yang dihasilkan oleh proses anaerobik/ fermentasi bahan organik yang berasal dari bahan organik seperti kotoran manusia, limbah rumah tangga dan juga kotoran hewan.

Konsep *green economy* sudah mulai bergeser ke *blue economy*, yaitu suatu konsep yang menerapkan kepedulian social (*social inclusiveness*), efisiensi sumber daya alam, dan sistem produksi tanpa menyisakan limbah (*zero waste*). *Blue economy* atau ekonomi biru merupakan sebuah konsep ekonomi yang tengah dikembangkan untuk menjawab tantangan atas sistem ekonomi dunia yang cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Kerusakan utama disebabkan oleh adanya limbah, eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Moto utama *Blue Economy* adalah tidak ada sampah/limbah yang terbuang.

Terminologi "*blue economy*" merupakan dinamika pemikiran konsep pembangunan terbaru yang kini sedang berkembang dengan mengandalkan sumber daya laut atau perairan yang berlandaskan pada tiga pilar terintegrasi yaitu ekosistem, ekonomi dan sosial. Istilah *blue economy* tersebut telah diangkat dalam berbagai kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat *Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Konsep tersebut adalah konsep pengembangan yang membidik tiga kepentingan, yakni Pertumbuhan, Kesejahteraan masyarakat dan Penyehatan lingkungan.

Blue Economy dirancang untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengefisienkan sumber daya alam sehingga tidak merusak sistem alam. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi dijadikan bahan baku untuk produk lain sehingga limbah tersebut dapat menghasilkan banyak produk lain serta pendapatan. Arah kebijakan pembangunan *blue economy* adalah *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*. Secara rinci konsep *Blue Economy* mengandung pengertian :

- a. Suatu kegiatan masyarakat khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi dimana semua bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja.
- b. Model Ekonomi masa depan yang akan memperhitungkan keuntungan dan strategi inovasi dengan upaya meminimalkan kerusakan alam. Semua kembali ke alam dengan nilai lebih dalam peningkatan ekonomi.

- c. Ekonomi Biru diharapkan akan menjadi pemikiran yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang telah kurang baik.
- d. Penciptaan lebih banyak kegiatan dalam bentuk model yang berkesinambungan di mana komunitas terkecil dalam masyarakat digunakan sebagai ujung tombak kegiatan.
- e. Memberikan solusi terbaik dengan cara mentransfer ekonomi dan menghasilkan komunitas untuk masa yang akan datang sehingga akan lebih baik.

Ekonomi biru sebenarnya merupakan suatu keniscayaan dilakukan oleh masyarakat mulai dari tataran yang paling kecil yaitu keluarga. Ekonomi Biru akan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi apabila dikembangkan dalam suatu komunitas. Tingkat keberhasilan Ekonomi Biru ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dan didukung kebijakan pemerintah, dunia pendidikan serta dunia usaha. Keempat pelaku tersebut sering disebut dengan konsep ABCG yaitu *Academic, Business, Community* dan *Government*.

Pengembangan konsep *blue economy* di Indonesia didukung dengan adanya konggres *Blue Economy* ke-9 yang diselenggarakan di Surabaya sebagai kelanjutan konggres yang dilakukan di Madrid Spanyol. Konggres tersebut bertujuan untuk mempercepat realisasi keterlibatan masyarakat dengan memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pihak industri yang mengelola sumber daya alam, seperti ditetapkan oleh Undang-undang No. 47 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012.

D. Implementasi *Blue Economy*

Blue economy mengarah pada pengembangan energi terbarukan. Konsep energi terbarukan selalu mengarah konsep energi alternatif yang terdiri dua jenis yaitu :

1. Energi alternatif terbarukan dengan skala besar yang dibangun oleh pemerintah, Ciri energi alternatif ini adalah *high investment, high product scale, dan high technology* sehingga menjadi mega proyek. Salah satu contoh energi alternatif yang dikembangkan antara lain pemanfaatan sampah skala besar. Saat ini sedang dilakukan proses kelayakan proyek per sampahan pada beberapa kota besar di Indonesia. Untuk mendukung proses pembangkit listrik tenaga sampah ini pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Energi alternatif

berbahan dasar sampah ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat bagus, karena menyelesaikan dua permasalahan sekaligus, yaitu masalah sampah sebagai masalah lingkungan dan masalah ketersediaan energi. Namun dalam kenyataannya, energi berbahan dasar sampah ini ternyata masih menyisakan permasalahan karena terkait dengan tingginya dana investasi dan peraturan pembebasan lahan yang belum menemukan titik temu. Meski sudah terdapat Perpres yang mengatur masalah ini, namun belum bisa menyentuh permasalahan yang sifatnya teknis.

Investor yang akan masuk dalam proyek tersebut masih tarik ulur kaitannya dengan dana pendamping yang harus disediakan oleh pemerintah untuk pengelolaan dan model pengelolaan setelah menjadi energi terbarukan khususnya listrik. Tarik ulur kepentingan masyarakat, pemerintah dan swasta ini perlu untuk diselesaikan dengan solusi terbaik agar segera bisa dilaksanakan.

2. Energi alternatif berbasis kearifan lokal, model energi alternatif ini sudah mulai dilakukan dengan pendekatan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di daerah. Model ini memberikan nilai positif khususnya dalam kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lingkungan di sekitarnya.

E. Energi Terbarukan Berbasis Kearifan Lokal

Menipisnya sumber daya minyak yang menyebabkan kelangkaan energi berimbas pada semakin mahalnya harga energi, kondisi ini mendorong pemikiran masyarakat untuk mulai memanfaatkan potensi lokal sebagai bahan baku pengganti BBM, namun tanpa melakukan perusakan terhadap lingkungan. Ciri-ciri energi terbarukan berbasis kearifan lokal ini adalah :

1. Berbasis teknologi tepat guna yang berbiaya rendah
2. Bahan baku berasal dari lingkungan sekitar
3. Biaya operasional rendah
4. Mudah dilakukan dan direplikasikan

Salah satu energi terbarukan yang mulai mendapatkan perhatian adalah biogas. Beberapa tahun terakhir ini pemanfaatan biogas melalui kotoran ternak menjadi alternatif yang dianggap menguntungkan dan berdampak positif bagi masyarakat. Sistem ternak tani terpadu dan ternak industri terpadu yang sudah digalakkan oleh masyarakat saat dikembangkan bukan hanya untuk dipanen hasilnya saja, namun residu atau kotoran yang dihasilkan oleh ternak bisa digunakan menjadi berbagai alternatif yang bukan hanya memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga

mengatasi masalah kelangkaan energi. Prinsip pembuatan biogas sangat sederhana sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa membutuhkan teknologi yang tinggi.

Secara umum Biogas diartikan sebagai gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi feces (kotoran) ternak, misalnya, sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain dalam suatu ruangan yang disebut “digester”. Komponen-komponen biogas adalah gas metan, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, karbon monoksida, oksigen, dan hidrogen. Prinsip kerja pembentukan biogas adalah pengumpulan feces ternak ke dalam suatu tangki kedap udara yang disebut “digester” (pencerna). Di dalam digester tersebut, kotoran dicerna dan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan komponen-komponen biogas. Gas yang timbul dari proses ini ditampung di dalam digester. Penumpukan produksi gas akan menimbulkan tekanan sehingga dapat disalurkan ke rumah dengan pipa. Gas yang dihasilkan dapat dipakai untuk masak dengan menggunakan kompor gas atau untuk penerangan dengan mengubah lampu petromaks sesuai dengan bahan bakar gas tadi. Gas yang dihasilkan ini sangat baik untuk pembakaran karena mampu menghasilkan panas yang cukup tinggi, apinya berwarna biru, tidak berbau, dan tidak berasap.

Prinsip kerja yang sangat sederhana dan *low investasion* tersebut menyebabkan biogas menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk dimasukkan dalam sistem ternak tani terpadu. Pola pengembangan yang dilakukan pada model energi alternatif terbarukan berbasis kearifan lokal adalah dengan Desa Mandiri Energi.

Potensi biogas ini menjadi sangat penting karena sektor peternakan menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Data dari Direktorat Jenderal Peternakan, angka populasi sapi pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan populasinya pada tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut : sapi potong sebanyak 14,73 juta ekor yang mengalami peningkatan sebesar 16,09 persen sedangkan sapi perah mengalami peningkatan sebesar 0,5 juta ekor yang mengalami peningkatan sebesar 13,11 persen jika dibandingkan pada tahun 2013. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah populasi ternak besar di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Populasi Ternak Besar di Indonesia (000 ekor)

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015
Sapi potong	14,824	15,981	12,686	14,272	15,494
Sapi perah	597	612	444	503	525
Kerbau	1,305	1,438	1,110	1,335	1,381
Kuda	409	437	434	428	436

Sumber : Badan Pusat statistik berbagai tahun

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa potensi sapi yang begitu banyak menyumbangkan emisi gas metana yang besar pula, dimana sumbangan emisi gas metana merupakan emisi terbesar kedua setelah karbon dioksida yaitu sebesar 13 % dari total emisi. Pemanfaatan limbah peternakan khususnya kotoran ternak sapi mendukung program *blue energy* atau konsep *zero waste* sehingga terwujud sistem pertanian berkelanjutan dan ekonomi ramah lingkungan. Beberapa keuntungan menggunakan kotoran ternak sebagai penghasil biogas adalah (Santi dalam Waskito, 2011) :

1. Mengurangi pencemaran lingkungan terhadap air dan tanah, serta pencemaran udara.
2. Terciptanya energi alternative untuk rumah tangga dari pemanfaatan limbah kotoran sebagai bahan bakar biogas.
3. Meningkatkan kesejahteraan peternak karena bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk energi bagi kegiatan rumah tangga.
4. Terciptanya Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*) terhadap pemanfaatan biogas.

Berdasarkan sejarah, pengolahan limbah sapi menjadi biogas (Waskito, 2011) pertama kali dibangun pada tahun 1900 yang dilakukan di Negara Jerman dan Perancis pada masa antara dua perang dunia. Pada saat Perang Dunia II, banyak petani menggunakan dan memanfaatkan biogas untuk menjalankan traktor, terutama di Negara Inggris dan Benua Eropa. Tetapi pada tahun 1950, akses untuk memperoleh BBM semakin mudah dan murah harga maka membuat pemakaian biogas mengalami penurunan. Kebutuhan akan energi dengan harga yang murah dan harus selalu tersedia sangat diperlukan oleh Negara-negara sedang berkembang, oleh karena itu pemanfaatan biogas seperti di Negara India masih terus dilakukan semenjak

abad ke-19 dan riset pengembangannya terus dilakukan oleh Negara China, Filipina, Korea, Taiwan dan Papua Nugini.

F. Penelitian Tentang Energi Biogas

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2010) menghasilkan bahwa pengembangan biogas merupakan salah satu bentuk solusi alternatif terhadap terjadinya krisis energi fosil di tingkat daerah maupun nasional. Potensi pengembangan biogas di Indonesia masih bisa terus dikembangkan karena adanya program swasembada daging yang akan segera diwujudkan sehingga menyebabkan jumlah persediaan daging dan produk sampingan yaitu limbah kotoran sapi juga akan mengalami peningkatan.

Gebreegziabher et al (2014) menyatakan sampah bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan nilai tambah, atau hanya menjadi sampah saja yang tidak mempunyai nilai ekonomi. diperlukan manajemen pengolahan sampah yang bagus untuk peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan di negara sedang berkembang. Pemanfaatan biogas mempunyai karakter yang berbeda antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pemanfaatan biogas biasanya dilakukan di pedesaan, sedangkan apabila di perkotaan kesinambungan antara kelayakan secara teknis, berjalannya proses ekonomi, penerimaan social dan lingkungan yang berkelanjutan. biasanya kota-kota besar menghadapi masalah yang serius mengenai tekanan populasi yang besar dan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai juga. untuk menentukan biaya yang efektif dan penggunaan energi terbarukan yang berkelanjutan maka pemanfaatan biogas sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah social ekonomi.

Galvez, et al (2015), biogas merupakan sumber energi potensial yang bisa digunakan untuk kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Tahap pertama dalam suatu proses pemanfaatan biogas adalah keputusan untuk membangun jaringan/ saluran yang digunakan untuk menyalurkan energi biogas tersebut. Keputusan ini menggunakan AHP karena adanya pengambilan keputusan yang kompleks yang meliputi factor ekonomi, social dan lingkungan. hasil yang diperoleh agar pihak penghasil sampah menyadari mengenai pentingnya penyortiran sampah dan pengelompokkan sampah kembali sehingga pemanfaatan sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif bisa dilakukan secara efektif.

Mwirigi et al (2014) menyatakan bahwa kesadaran untuk menggunakan energi fosil untuk kehidupan yang berkelanjutan semakin menurun. Di Afrika, hampir 70% rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak. Afrika ingin supaya pada tahun 2030 akses terhadap energi yang lebih modern dapat dilakukan secara menyeluruh. Penggunaan energi modern salah satunya adalah dengan pemanfaatan biogas yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk di desa dan pencapaian *Millenium Development Goals*. Penggunaan biogas sebagai salah satu sumber energi terbarukan merupakan usaha yang menarik pemerintah untuk mendorong produksi energi terbarukan. Energi biogas yang berasal dari kotoran hewan penggunaannya lebih banyak digunakan sebagai energi untuk memasak atau penerangan. di Afrika, pengenalan program biogas dilakukan dengan proyek percontohan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ternyata, belum membawa hasil seperti yang diinginkan. demonstrasi atau proyek percontohan yang dilakukan oleh pemerintah belum memberikan motivasi kepada masyarakat. Permasalahan lain yang timbul adalah penggunaan digester kadang mengalami kegagalan karena ukurannya yang tidak sesuai dengan limbah kotoran hewan yang ada. Semangat Negara-negara Afrika dalam menggunakan biogas sebagai sumber energi alternative sangat luar biasa, pada tahun 2010 telah 2.000 biogas unit. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Winrock International memberikan kesimpulan bahwa masih memungkinkan untuk membuat 100.000 instalansi biogas selama tahun 2009 sampai 2010. Pertumbuhan instalansi biogas yang paling tinggi adalah di China dengan membangun instalansi biogas sebanyak 5 juta unit pada tahun 2010. Yang membedakan antara Negara Asia dan Sub Sahara Afrika (SSA) dalam perkembangan pemakaian biogas adalah jumlah hewan ternak yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biogas, biaya pembuatan digester lebih mahal di Afrika dibandingkan dengan Asia. Yang membuat biaya pembuatan biogas mahal adalah bahan baku semen, dan dikombinasikan dengan pendapatan disposibel yang rendah. Hampir 86 % instalansi biogas yang ada di Bangladesh dibiayai dengan kredit. Di China, petani menerima 69 % subsidi untuk biaya pembuatan digester. Secara umum, Negara-negara di SSA masih tertinggal dibandingkan dengan Negara Asia.

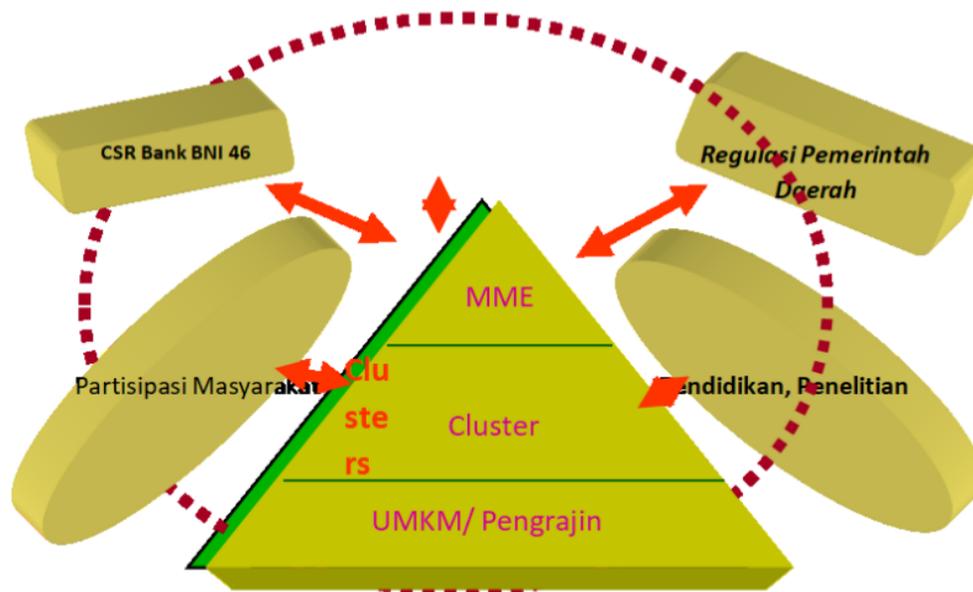
Demarest et al (1993) mendeskripsikan pengaruh karakteristik sosial ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan dari kepala rumah tangga terhadap adopsi teknologi penggunaan biogas. Factor lain yang mempengaruhinya adalah jumlah limbah/kotoran sapi serta akses terhadap air. Di Uganda, factor yang mempengaruhi terhadap adopsi biogas adalah umur dari kepala rumah tangga, ukuran rumah, bahan bakar tradisional yang digunakan serta tingkat pendidikan. Peningkatan usia dan tingkat pendidikan berbanding

terbalik dengan kesediaan untuk mengadopsi biogas, sedangkan ketersediaan bahan bakar tradisional dan ukuran rumah tangga berpengaruh positif terhadap kesediaan mengadopsi teknologi pemanfaatan biogas. Survey social ekonomi di Uganda dan Kenya memberikan hasil bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah sebagai penyebab utama terbatasnya akses perempuan untuk mengambil keputusan dalam pengistalanan biogas sebagai bahan bakar alternatif. Di Kenya, luasnya lahan peternakan, adanya keamanan kepemilikan lahan, jumlah susu yang dihasilkan, serta sistem pertanian dan biaya pemeliharaan sapi mempunyai korelasi positif terhadap adopsi teknologi untuk menggunakan biogas.

G. Desa Mandiri Energi

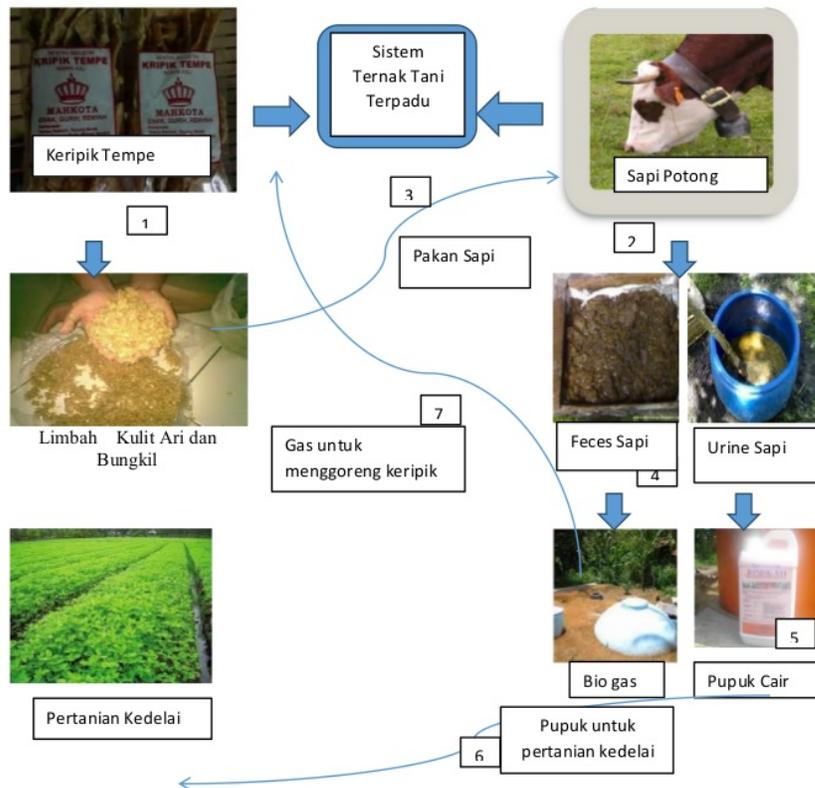
Desa Mandiri energi merupakan konsep yang melibatkan keikutsertaan seluruh *stakeholder* meliputi pemerintah daerah, swasta dan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran penting sesuai dengan porsinya. Model kerjasama ini merupakan pengembangan dari model yang disusun dalam Program Dasar Pembangunan Partisipatif. Model tersebut tepat digunakan dalam kegiatan Implementasi Blue Economy.

Gambar. 2. Kemitraan Swasta, Masyarakat, Pemda dan Akademisi



Program *Blue Economy* menggunakan sistem ternak industri terpadu, yaitu menyatukan unsur-unsur dalam industri dengan peternakan sehingga bisa saling mendukung dan memanfaatkan sisa produksi masing – masing menjadi input yang bermanfaat. Secara detail proses *blue economy* bisa digambarkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3
Program Blue Economy Ternak Industri Terpadu



Gambar di atas menunjukkan dengan jelas contoh hubungan yang dapat dibangun antara ternak dan industri untuk saling memanfaatkan dan menjadi ekonomi tanpa sisa. Ekonomi tanpa sampah ini yang akan mendorong lingkungan tetap bersih.

Hasil data empirik menunjukkan bahwa dengan menggunakan 2 ekor sapi dan digester biogas sebesar 9 kubik, ternyata mampu menghasilkan kompor yang bisa digunakan untuk memasak selama 6 jam per hari sehingga apabila dihitung bisa memberikan penghematan biaya rumah tangga antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 250.000. Di sisi lain pemanfaatan bio gas ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kayu bakar berkurang sehingga aspek kelestarian hutan bisa terjaga.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan energi terbarukan berbasis kearifan lokal dengan pemanfaatan biogas merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar non renewable.
2. Kerjasama ABCG (*Academic, Bussines, Community, Government*) merupakan hal yang mutlak dalam kegiatan pembangunan di daerah.
3. Sistem ternak Industri terpadu merupakan salah satu implementasi dalam pengembangan *Blue Economy* yang mampu mengembangkan kegiatan tanpa sisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Gaya Gava Media. Yogyakarta.
- Arsyad. Lincoln.1999. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Demarest EJ, Reisner ER, Anderson LM, Humprey DC, Farquhar E, Stein SE. Review of Research on Achieving the Nation’s Readiness Goal. Washington D.C: U.S.Department of Education; 1993. p. 82.
- Direktori Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, 2012, *Policy Paper Keselarasan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Galvez,et all, 2015, Reverse Logistics Network Design For a Biogas Plant : An Approach Based on MILP Optimization and Analytical Hierarchical Process (AHP), *Journal of Manufacturing Systems* 37, Page 616-623, Elsevier.
- Gebreegziabher et all, 2014, Prospect and Challenges for Urban Application of Biogas Installations in Sub-Saharan Africa, *Biomass and Bioenergy* 70, Page 130-140. Elsevier.
- Lipton & ravalion, 1995, *Poverty and Policy*. Dalam Chenery and Srinivasan, Handbook of Development Economics, Volume IIIB, Amsterdam Netherland; Elsevier Science B.V.
- Mudrajat, 2000, “Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan,” Airlangga, Surabaya.
- Mwirigi et all, 2014, Socio-Economic Hurdles to Widespread Adaption of Small–Scale Biogas Digesters in Sub-Saharan-African : A Review, *Biomass and Bioenergy* 70, Page 17-25, Elsevier.
- Setyawan, Albertus Hendri, 2010, Pengembangan Biogas Berbahan Baku Kotoran Ternak Upaya Mewujudkan Ketahanan Energi di Tingkat Rumah Tangga. *Tugas Akhir*. Tidak untuk dipublikasikan. Institut Teknologi Bandung.
- Todaro Michael, 2000, “Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yusgiantoro, Purnomo.2000. *Ekonomi Energi : Teori dan Praktik*. LP3ES. Jakarta.

Waskito, Didit. 2011. Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dengan Pemanfaatan Kotoran Sapi di Kawasan Usaha Peternakan Sapi. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

www. Wikipedia.org

[*www.bps.go.id*](http://www.bps.go.id)

[*www.kompas.com*](http://www.kompas.com)

Blue Economy IRSA

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ ep.fe.uns.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : **BUKU** *

Judul Buku : Konsep Blue Economy dalam Mewujudkan Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Biogas
 Jumlah Penulis : 2 Orang (Izza Mafruhah, **Nurul Istiqomah**)
 Status Pengusul : ~~Penulis pertama~~ / penulis ke 2 **
 Identitas Buku : a. Nomor ISBN : 978-602-397-178-7
 b. Edisi : Cetakan Pertama, Edisi I, Juni 2018
 c. Tahun terbit : 2018
 d. Penerbit : UNS Press
 e. Jumlah Halaman : 310

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku Referensi (Book Chapter).....
 Buku (beri ~ pada kategori yang Buku Monograf
 Tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku 10		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsure isi buku (20%)	8		1,6
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	8		2,4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7		2,1
d. Keengkapan unsure dan kualitas terbitan/buku (20%)	9		1,8
Total = (100%)			7,9
Nilai Pengusul =			

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :

Pembahasan mengenai konsep Blue Economy bisa dibuat buku tersendiri supaya lebih detail.

Surakarta, 20 FEB 2019

Reviewer**

Prof. Dr. Yungaswati Purwaningsih, M.P
 NIP. 195906131984032001.....

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : **BUKU** *

Judul Buku : Konsep Blue Economy dalam Mewujudkan Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Biogas
 Jumlah Penulis : 2 Orang (Izza Mafruhah, Nurul Istiqomah)
 Status Pengusul : ~~Penulis pertama~~ / penulis ke 2 **
 Identitas Buku : a. Nomor ISBN : 978-602-397-178-7
 b. Edisi : Cetakan Pertama, Edisi I, Juni 2018
 c. Tahun terbit : 2018
 d. Penerbit : UNS Press
 e. Jumlah Halaman : 310

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku Referensi (Book Chapter).....
 Buku (beri ~ pada kategori yang Buku Monograf
 Tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku 10		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsure isi buku (20%)	10		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	8		2,4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	8		2,4
d. Keengkapan unsure dan kualitas terbitan/buku (20%)	10		2,0
Total = (100%)			8,8
Nilai Pengusul =			

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :

- Format penulisan perlu ada perbaikane
- Perlu ada perbaikane beberapa topik pembaharuan.

Surakarta, 15 Februari 2019

Reviewer 1/2

(Signature)
 NIP. 196202211986011001
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret